



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah.
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan.
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan kasnya.
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai.

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*)
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen (*Management*)
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.



c. *Transparansi (Transparancy)*

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. *Keseimbangan Antar Generasi*

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. *Evaluasi Kinerja*

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas suatu Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran pemerintah daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan (PSAP Nomor 03).



Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan Laporan Arus Kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
- e. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- cc. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- dd. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- ee. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- ff. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung;
- gg. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung;

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

7.1 PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Indikator Pencapaian Target APBD
- 7.2.4 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3 Basis Pengakuan dan Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standard Akuntansi Pemerintahan
- 7.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
 - 7.5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.2 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.3 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca
 - 7.5.3.1 Posisi Keuangan Secara Umum
 - 7.5.3.2 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 7.5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 7.5.5 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Ikhtisar Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.2 Penjelasan Per Pos laporan Arus Kas
 - 7.5.6 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 7.6 INFORMASI KEUANGAN LAINNYA
- 7.7 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN
- 7.8 PENUTUP



7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

a. Produk Domestic Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah PDRB. PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tulungagung tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1 PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB (Rp.Miliar)	31.126,13	33.640,18	36.496,03	39.215,49	38.225,9
PDRB ADHK(Rp.Miliar)	23.446,43	24.637,36	25.920,20	27.299,80	26.455,76

Sumber : Badan Pusat Statistik KabupatenTulungagung

PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga berlaku tahun 2020 menunjukkan penurunan sekitar 989 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula dengan kondisi PDRB Kabupaten Tulungagung atas dasar harga konstan yang juga mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 844 miliar dibanding tahun sebelumnya. Perekonomian pada tahun 2020 terganggu secara global akibat pandemi Covid19 yang juga menyebabkan perekonomian Kabupaten Tulungagung berkontraksi.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar harga konstan tahun 2021 sebesar Rp27.390.420.000,00. Gambar berikut menyajikan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021.



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 – 2021



Sumber: Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Gambar di atas memberikan informasi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan dan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,73 dan pertumbuhan ekonomi paling rendah yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar -3,30

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung menurut sektor selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Tahun 2017-2021 (dalam %)

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,07	-0,63	1,79	-0,82	1,51
2 Pertambangan dan Penggalian	4,73	2,73	1,03	-6,42	0,89
3 Industri Pengolahan	6,15	7,59	6,81	-2,00	3,94
4 Pengadaan Listrik dan Gas	3,71	4,48	5,12	0,20	1,90
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,32	4,78	4,93	4,87	7,66
6 Konstruksi	7,53	7,25	6,23	-6,05	1,06
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,44	6,12	5,80	-8,50	6,87
8 Transportasi dan Pergudangan	8,34	7,89	8,07	-4,89	8,73
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,99	7,51	7,17	-9,31	2,23
10 Informasi dan Komunikasi	7,31	6,83	6,93	6,71	5,84
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	4,49	3,89	-0,03	0,56
12 Real Estate	5,87	6,73	6,24	2,95	2,16
13 Jasa Perusahaan	5,26	6,27	6,34	-6,33	1,57
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,12	3,52	3,42	-2,88	-0,77
15 Jasa Pendidikan	5,82	6,82	7,02	2,63	1,73
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	7,54	7,83	8,14	-3,30
17 Jasa Lainnya	5,05	5,13	5,96	-13,83	4,05
Kabupaten Tulungagung	5,08	5,21	5,32	-3,09	3,53

Sumber: Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

c. Struktur Ekonomi dan Pergeserannya

Struktur ekonomi suatu daerah tercermin melalui seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap jumlah total nilai tambah dari seluruh sektor/lapangan usaha. Struktur ekonomi suatu wilayah biasa disajikan dari PDRB atas dasar harga berlaku. Dari persentase sumbangan masing-masing sektor/lapangan usaha akan terlihat struktur ekonomi suatu daerah sehingga bisa diketahui ciri khas ekonomi, andalan, potensi, hasil pembangunan ataupun perubahan akibat kebijakan publik dari pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi suatu



sektor/lapangan usaha terhadap PDRB, semakin besar pula dominasi sektor/lapangan usaha tersebut dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Apabila suatu sektor/lapangan usaha yang paling dominan mengalami penurunan nilai tambah, maka struktur ekonomi juga akan mengalami perubahan karena kontribusinya yang cukup besar. Pertumbuhan suatu sektor/lapangan usaha yang lebih lambat jika dibanding sektor/lapangan usaha lain juga dapat menyebabkan pergeseran struktur ekonomi.

Struktur ekonomi kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3 Struktur Ekonomi Menurut Sektor
Tahun 2017-2021 (dalam %)**

Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1 Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	20,74	19,64	19,04	19,51	19,26
2 Pertambangan dan Penggalian	3,73	3,76	3,62	3,50	3,42
3 Industri Pengolahan	21,12	21,64	22,10	22,33	22,81
4 Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
6 Konstruksi	9,61	9,72	9,67	9,32	9,07
7 Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,51	20,82	20,82	19,74	20,26
8 Transportasi dan Pergudangan	2,21	2,24	2,30	2,24	2,32
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,02	2,04	2,09	1,96	1,99
10 Informasi dan Komunikasi	5,44	5,41	5,43	5,96	6,04
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,30	2,25	2,31	2,25
12 <i>Real Estate</i>	1,98	2,04	2,09	2,21	2,16
13 Jasa Perusahaan	0,37	0,38	0,38	0,37	0,36
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,27	3,31	3,41	3,50	3,29
15 Jasa Pendidikan	4,26	4,30	4,36	4,60	4,39
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,03	1,07	1,19	1,11
17 Jasa Lainnya	1,26	1,26	1,26	1,12	1,14
Kabupaten Tulungagung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasanya struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah di lapangan usaha industri pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Prosentase terbesar pada tahun 2021 terdapat pada lapangan usaha kategori industri pengolahan sebesar 22,81%; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,26%; lapangan usaha kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 19,26%; lapangan usaha kategori konstruksi sebesar 9,07%; lapangan usaha kategori informasi dan komunikasi sebesar 6,04%. Sementara peranan yang lain persentasenya dibawah 10%.

7.2.1.1 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 atau pada pertengahan periode RPJMD ini adalah sebesar 3,53%, diharapkan dengan berbagai instrumen kebijakan daerah yang dilaksanakan selama periode RPJMD dapat tercapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,35% pada tahun 2023 atau akhir periode RPJMD. Secara garis besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung didorong oleh pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Tingginya pertumbuhan ekonomi sektor sekunder dan tersier mengindikasikan bahwa Kabupaten Tulungagung telah bergerak menuju suatu daerah yang berkembang kearah modernisasi. Dinamika budaya dan pola hidup masyarakat yang menempatkan barang dan jasa pada kelompok kebutuhan sekunder dan tersier sebagai kebutuhan yang vital, menunjukkan bahwa penempatan standar



kebutuhan hidup minimal semakin naik. Kondisi ini tentu tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di segala sektor.

PDRB Kabupaten Tulungagung Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp41.166,67 milyar, dari sebelumnya sebesar Rp38.225,99 Miliar pada tahun 2020. Sumbangan terbesar terletak pada sektor Industri Pengolahan, selanjutnya diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan yang ketiga adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Sementara untuk angka PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan dari yang sebelumnya tahun 2020 sebesar Rp26.455,76 Miliar menjadi Rp27.390,42 Miliar pada tahun 2021.

Secara ringkas, proyeksi makro ekonomi pada tahun 2021 untuk kondisi makro ekonomi tahun 2022, adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

	ASPEK	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,53%
2	PDRB per Kapita (ADHK)	27.390,42 Miliar
3	Tingkat Kemiskinan	7,51%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,91%

Sumber: Data dan Statistik Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022

Pencapaian atas target proyeksi makro ekonomi tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*), serta lingkungan eksternal yang terdiri dari dua faktor strategis, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Pelaksanaan otonomi daerah telah membuka peluang untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dilaksanakannya reformasi administrasi publik memungkinkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik.
- 3) Potensi sumberdaya alam, khususnya berbagai sumberdaya mineral dan sumberdaya alam yang prospektif untuk dikembangkan dan dimanfaatkan guna menunjang percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung, baik aset pemerintah daerah maupun dukungan masyarakat dan dunia usaha, yang dapat didayagunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya potensi daerah.
- 5) Terjalannya hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memungkinkan harmonisasi perumusan kebijakan pembangunan daerah, yang ditunjang oleh tumbuh dan berkembangnya jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas kerja pemerintahan daerah, sehingga memperlemah daya saing pemerintah daerah dalam meraih keuntungan kompetitif yang sangat diperlukan bagi akselerasi pembangunan daerah.
- 2) Masih belum mantapnya penerapan *new public management* dan penerapan prinsip-prinsip



tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memperlemah dukungan sektor swasta sebagai pelaku pembangunan daerah.

- 3) Masih belum optimalnya tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas produk penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 4) Masih belum optimalnya usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga menjadikan daya dukung dalam penyediaan dana penerimaan daerah terbatas dan kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan investasi pemerintah daerah.

Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban wilayah dan daerah yang cukup kondusif memberi jaminan kepercayaan pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasi yang berguna bagi akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2) Berkembangnya iklim demokratisasi yang memungkinkan segenap unsur dan komponen masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan daerah.
- 3) Terbukanya jaringan kerja, baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan unsur swasta nasional dan daerah, yang dapat didayagunakan untuk mengembangkan perekonomian daerah, utamanya masuknya Kabupaten Tulungagung dalam kebijakan pengembangan dan pembangunan Wilayah Selatan Jawa Timur (Jalur Lintas Selatan).
- 4) Semakin kuat dan berperannya organisasi sosial, politik dan kemasyarakatan serta lembaga non pemerintah yang dapat dijadikan *partnership* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- 5) Adanya potensi budaya dan kearifan lokal yang agamis, yang merupakan peluang untuk dapat didayagunakan dalam rangka mengatasi berbagai problema pembangunan daerah.
- 6) Perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang sebagai salah satu upaya pengenalan potensi daerah.

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sebagai dampak dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.
- 2) Masih terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada kondisi masih cukup tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
- 3) Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak adanya ancaman meningkatnya penyakit sosial dan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Masih belum dapat diwujudkan secara optimal pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berdampak masih terjadinya tindakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sehingga memicu pemanasan global (*global warming*).
- 5) Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan IPTEK berpotensi mempengaruhi karakter dan kearifan budaya lokal.



Rencana Target Pendapatan Tahun 2022

Berdasarkan analisis di atas, rencana target pendapatan pada tahun 2022 sebagaimana di RPJMD tahun 2018 hingga 2023 adalah sebesar Rp3.436.769.657.255,33 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung

(dalam Rupiah)

Uraian	Proyeksi Pendapatan			
	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	3.112.370.212.588,64	3.265.803.694.587,34	3.436.769.657.255,33	3.513.050.032.310,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	559.801.850.938,63	615.185.694.797,21	673.719.293.331,63	735.413.044.718,26
Pendapatan Pajak Daerah	121.477.087.807,51	139.698.650.978,64	160.653.448.625,43	184.751.465.919,25
Pendapatan Retribusi Daerah	26.832.320.283,63	27.093.128.290,72	27.770.456.497,98	28.464.717.910,43
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.277.554.059,62	6.723.716.795,53	7.169.879.531,44	7.616.042.267,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	405.214.888.787,87	441.670.198.732,32	478.125.508.676,77	514.580.818.621,23
DANA PERIMBANGAN	1.859.421.375.110,95	1.905.349.977.275,28	1.968.817.021.876,68	1.939.593.769.799,56
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	100.137.922.862,21	104.952.552.356,91	109.767.181.851,60	114.581.811.346,30
Dana Alokasi Umum	1.255.049.814.525,56	1.279.018.904.573,52	1.314.000.704.452,75	1.314.916.368.610,37
Dana Alokasi Khusus	504.233.637.723,19	521.378.520.344,86	545.049.135.572,32	510.095.589.842,89
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	693.146.986.539,07	745.268.022.514,85	794.233.342.047,03	838.043.217.792,82
Hibah	84.945.833.280,00	82.422.942.031,58	80.799.210.073,56	80.015.457.735,85
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	196.733.279.859,07	211.211.985.223,27	225.690.690.587,47	240.169.395.951,67
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	295.614.281.000,00	318.401.464.000,00	341.188.647.000,00	363.975.830.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	115.853.592.400,00	133.231.631.260,00	146.554.794.386,00	153.882.534.105,30
Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: RPJMD Kab Tulungagung 2018-2023

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Sebagaimana diterangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. Oleh karena itu pelaksanaan keuangan daerah senantiasa diarahkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menopang kegiatan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sebagaimana arah tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung.

Dalam penyusunan anggaran, daerah harus mampu menyusun anggaran dengan prinsip-prinsip anggaran kinerja (*budget performance*), yaitu alokasi anggaran yang dikaitkan dengan hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu dalam proses penganggaran, Pemerintah Daerah dituntut untuk menyertakan informasi tentang sasaran, tujuan, prioritas pada tahun fiskal tertentu. Anggaran kinerja diarahkan pada pemilihan program atau kegiatan yang terukur dan menyertakan kegiatan yang menjadi skala prioritas, kebutuhan atau tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja.



Pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam bentuk kerangka APBD. Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Perencanaan pembangunan jangka pendek yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan jangka panjang, yang terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi anggaran berkaitan dengan analisa fiskal, sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumberdaya.

Dalam penyusunan KUA Tahun 2022, terdapat beberapa kesesuaian dengan berbagai hal, sebagai berikut yaitu.

- a. Sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 hingga 2023.
- b. Memuat komponen-komponen pelayanan yang dalam kaitan ini lebih didekatkan pada program-program daerah yang telah dimuat dalam dokumen RPJMD, dan tingkat pencapaian yang diharapkan. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun anggaran sebelumnya.
- c. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk mengembangkan kreativitas dalam pelaksanaannya.
- d. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Dalam kaitan yang lebih luas lagi, perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Tulungagung nampaknya tetap menjadi perhatian dalam penyiapan Kebijakan Umum Anggaran ini, karena ketersediaan dana untuk belanja diperoleh dari pendapatan daerah yang salah satu indikator utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah prospek perekonomian Kabupaten Tulungagung ke depan.

Ketersediaan dana dalam APBD, kedepannya direncanakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini telah terlaksana. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut diharapkan benar-benar dapat diwujudkan sehingga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan warga masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkesinambungan, Kebijakan Umum APBD mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berbagai kebijakan pembangunan yang ditetapkan baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah.

Untuk mensinergikan dan menyelaraskan program-program pemerintah, Kabupaten Tulungagung menetapkan Visi dan Misi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia".

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing.
2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah.



3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat.
4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Guna mencapai arah pembangunan yang optimal dan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas dan sejalan dengan agenda Pemerintah, maka program-program pembangunan Tahun 2018 hingga 2023 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan :
 - Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan.
 - Meningkatkan kualitas dan akses kesehatan.
 - Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan.
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan :
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
 - Meningkatkan kemandirian pendapatan daerah.
 - Menurunnya kesenjangan ekonomi masyarakat.
- c. Mempercepat penurunan kemiskinan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib, dengan sasaran pembangunan :
 - Terjaminnya perlindungan sosial masyarakat.
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan.
 - Terwujudnya penguatan usaha mikro.
- d. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata, berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan :
 - Meningkatkan infrastruktur dasar yang merata.
 - Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan.
- e. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan :
 - Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 hingga 2023 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung periode berikutnya.

Melalui kebijakan pembangunan tersebut, diharapkan performa pembangunan Kabupaten Tulungagung benar-benar akan merupakan representasi dari fungsi berbagai variabel komponen masyarakat. Sehingga kedepan implementasi pembangunan sebagai tindak lanjut dari manajemen perencanaan akan mampu memenuhi hak-hak dasar rakyat (*right based approach*) dan meningkatkan rasa tanggung jawab (*responsibilities*) masyarakat terhadap semua sumber daya pembangunan, termasuk hasil-hasilnya.

Untuk mewujudkan agenda tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dijabarkan dalam landasan operasional dalam kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

7.2.3 Indikator Pencapaian Target APBD

Sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya dan permasalahan/isu strategis serta tantangan yang akan dihadapi, maka tema pembangunan Tahun 2022 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Sosial dengan Fokus Pemulihan Akses, Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar, Pariwisata, Investasi dan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan” dengan prioritas pembangunan Tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dan pariwisata.
2. Peningkatan infrastruktur dasar wilayah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, daya saing ketenagakerjaan, penguatan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan.
4. Peningkatan perlindungan sosial masyarakat dan pelestarian nilai budaya lokal.
5. Peningkatan ketahanan pangan
6. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan.\
7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Tulungagung tersebut merupakan upaya untuk mengarahkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, yang selanjutnya diformulasikan ke dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, kebijakan nasional dan regional, serta penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilakukan eksekutif.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto.

Kebijakan Pendapatan Daerah merupakan kewenangan untuk meningkatkan Penerimaan Daerah, sebagai upaya untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Arah kebijakan yang ditempuh meliputi:

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan



tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komposisi Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulungagung diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah), Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah) serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan).

Dari semua jenis pendapatan daerah tersebut, pendapatan transfer dari pemerintah pusat memiliki kontribusi paling besar. Sedangkan kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah cukup kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Daerah diberikan kewenangan perluasan basis pajak dan penetapan tarif sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Pajak dan Retribusi Daerah tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering. Ada 4 (empat) jenis Pajak baru bagi Daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang- Undang. Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dengan peraturan pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping pajak daerah, kabupaten/kota juga menerima bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas (a) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen), (b) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen), (c) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan (d) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Di samping itu, pemerintah kabupaten/ kota dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis-jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/ atau kualitas layanan yang lebih baik.
2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
3. Retribusi Perijinan Tertentu ; (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :
 - a. Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
 - b. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
 - c. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung meliputi :

1. Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengatur 11 Jenis pajak yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Retribusi Jasa Umum dengan Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; Perda Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan; Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan.
3. Retribusi Jasa Usaha dengan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung; Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang; Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Hasil Usaha Daerah.
4. Retribusi Perijinan Tertentu dengan Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan IMB; Perda Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ijin Gangguan; Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ijin Trayek; dan Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Berakohol.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Selanjutnya pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dengan cara:

1. Penetapan Wajib Pajak Daerah sebagai upaya memperluas basis penerimaan, dengan upaya mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak. Secara internal melalui perbaikan basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan upaya mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan



peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.

3. Meningkatkan pengawasan, melalui pemeriksaan secara insidental/tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, dengan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kabupaten Tulungagung.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah/BUMD; dan Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik swasta.

Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; Penerimaan jasa giro; Pendapatan denda pajak; Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah; Kontribusi pengelolaan aset daerah; dan Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

2. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pos Pendapatan Transfer dalam APBD Kabupaten Tulungagung bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari dana perimbangan (dana transfer umum dan dana transfer khusus), dan dana insentif daerah. Sedangkan komponen dari Transfer Antar- Daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana bagi hasil pajak bersumber dari provinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3-AP) dan pajak rokok.

Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyesuaian program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja daerah seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain- lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Tulungagung bersumber dari hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima Pemerintah Kabupaten Tulungagung masih relatif



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

kecil, akan tetapi keberadaannya sangat menunjang/mendukung kemampuan pendanaan bagi Kabupaten Tulungagung.

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung, maka kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Tulungagung antara lain dengan :
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung dengan target kenaikan rata-rata 8,5% dan 5% untuk pendapatan transfer setiap tahunnya. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proposional akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara :
 - a. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan-peraturan daerah pendukungnya.
 - b. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak
 - d. Meningkatkan peran aktif Perangkat Daerah yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
 - e. Mendukung implementasi teknologi informasi secara terpadu/terintegrasi guna mengintensifkan pajak dan retribusi untuk meningkatkan sistem pemungutan pajak agar lebih optimal.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kabupaten Tulungagung.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta
6. manajemen pengelolaan guna memberikan kemudahan akses Wajib pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

7. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD).
8. Melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau.
9. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pemanfaatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu sumber potensial PAD yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
10. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Tulungagung, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.
11. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih efektif dan efisien pemanfaatannya bagi pembangunan di Kabupaten Tulungagung.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat given (pengeluaran/kegiatannya sudah ditentukan). Demikian juga dengan Dana bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur yang diasumsikan tetap karena juga bersifat given.
13. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana bagi hasil dari provinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan reward secara proposional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.

b. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Tahun 2022 Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Target Pendapatan Tahun 2022 Kabupaten Tulungagung

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	539.727.793.348,00
4.1.01	Pajak Daerah	120.397.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.695.504.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.460.163.497,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	396.175.125.351,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.043.167.822.985,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.625.864.282.461,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	417.303.540.524,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00
4.3.01	Hibah	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.582.895.616.333,00

Sumber : BPKAD dan Bapenda Kabupaten Tulungagung



B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

1) Kebijakan terkait dengan perencanaan Belanja Daerah

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pasal 55 bahwa klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah Kabupaten Tulungagung diarahkan pada prioritas-prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

2) Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga serta belanja subsidi yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

APBD yang disusun oleh pemerintah daerah wajib dialokasikan untuk belanja yang sudah diatur oleh undang-undang dengan besaran persentase tertentu sesuai dengan undang-undang (*mandatory spending*) sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Alokasi transfer ke desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota (Pasal 97 PP No. 43 Tahun 2014)

Untuk tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengalokasikan *mandatory spending* sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp986.422.691.093,00 atau 29,71% dari APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Besar anggaran kesehatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp981.295.917.755,00 atau 39,19% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji..
3. Alokasi anggaran bidang infrastruktur Rp285.073.844.096,00 atau 27,88% dari Dana Transfer Umum (DTU).
4. Alokasi dana Desa (ADD) sebesar Rp119.930.120.000 atau 10,24% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Alokasi transfer desa sebesar Rp14.191.289.430,00 atau 10,35% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.

Berdasarkan alokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah memenuhi *mandatory spending* sesuai perundang-undangan.

Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap perangkat daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan / atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Tulungagung diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas.
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan program Kepala Daerah terpilih.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) PD.
4. Optimalisasi Belanja Langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta
5. Transparan dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya

Tabel 7 Rencana Belanja Tahun 2022 Kabupaten Tulungagung

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
5S	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Operasi	2.324.020.350.645,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.312.893.382.514,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	870.206.720.131,00
5.1.05	Belanja Hibah	105.779.747.500,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	35.140.500.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	URAIAN	JUMLAH
5.2	Belanja Modal	571.090.317.912,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	44.704.777.307,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.960.211.610,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.491.678.573,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.912.147.222,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.021.503.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	14.775.223.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.775.223.000,00
5.4	Belanja Transfer	421.817.606.430,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	14.191.289.430,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	407.626.317.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.331.703.497.987,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

2) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- SiLPA diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD) dan penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kabupaten Tulungagung tahun 2022 diarahkan untuk:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah.
- Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- Memfasilitasi dan mendorong peningkatan kerjasama dengan pihak swasta/masyarakat antara lain melalui kerangka regulasi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (public private partnership).

**Tabel 8 Rencana Pembiayaan Daerah Tahun
2022 Kabupaten Tulungagung**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	782.262.732.342,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	782.262.732.342,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	13.454.850.688,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	33.454.850.688,00
	Pembiayaan Netto	748.807.881.654,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulungagung

7.2.4 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kebijakan Fiskal dan Kondisi Ekonomi Makro

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO dan Kejadian Luar Biasa oleh Pemerintah Indonesia. Pandemi ini banyak menimbulkan korban jiwa dan telah menghantam sendi-sendi perekonomian di Indonesia. Hampir seluruh asumsi dasar ekonomi makro menyebutkan bahwa APBN 2021 berpotensi untuk tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga berdampak pada postur APBN secara keseluruhan (pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan), melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan memburuknya sistem keuangan nasional.

Diperlukan kebijakan dan langkah-langkah cepat serta luar biasa yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud. Untuk mengatasi kegentingan yang memaksa tersebut, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara yang termasuk di dalamnya termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hal tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang juga berimbas pada perekonomian daerah. Mengerucut pada kabupaten Tulungagung, pandemi Covid-19 juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh data BPS yang mencatat tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tulungagung pada bulan Agustus tahun 2020 mencapai 4,61%, ini merupakan angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Selain tingkat pengangguran terbuka akibat terperosoknya sektor usaha, Pemerintah juga mendapati melonjaknya jumlah pasien Covid-19 yang tidak disertai peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Untuk mengatasi beberapa dampak tersebut, berdasar pada UU No. 2 Tahun 2020 pada Bagian Kedua Perpu tentang Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan pencapaian keuangan pada akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada lambatnya pencapaian pendapatan Kabupaten Tulungagung. Selain pencapaian pendapatan, realisasi belanja juga terdampak ditandai dengan lemahnya penyerapan anggaran belanja. Berikut adalah ikhtisar pencapaian target keuangan Kabupaten Tulungagung pada Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 9 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten Tulungagung TA 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
I. Pendapatan	2.582.895.616.333,00	2.642.478.582.447,22	102,31
I.1. Pendapatan Asli Daerah	539.727.793.348,00	577.544.166.624,22	107,01
I.2. Pendapatan Transfer	2.043.167.822.985,00	2.064.526.415.823,00	101,05
I.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	408.000.000,00	100,00
II. Belanja	3.331.703.497.987,00	2.913.688.510.341,23	87,45
II.1. Belanja Operasi	2.324.020.350.645,00	2.141.914.216.517,25	92,16
II.2. Belanja Modal	571.090.317.912,00	352.048.362.950,98	61,64
II.3. Belanja Tidak Terduga	14.775.223.000,00	1.228.684.101,00	8,32
II.4. Transfer	421.817.606.430,00	418.497.246.772,00	99,21
Surplus/(Defisit)	(748.807.881.654,00)	(271.209.927.894,01)	
III. Pembiayaan	748.807.881.654,00	748.807.881.654,38	100,00
III.1. Penerimaan Pembiayaan	782.262.732.342,00	782.262.732.342,38	100,00
III.2. Pengeluaran Pembiayaan	33.454.850.688,00	33.454.850.688,00	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	477.597.953.760,37	

Lambatnya pencapaian keuangan ini tidak terlepas dari penurunan aktivitas ekonomi yang mempengaruhi realisasi beberapa unsur pendapatan asli daerah, diantaranya realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2022 mengalami penurunan daripada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena pembatasan kegiatan oleh masyarakat seperti berkurangnya kegiatan jual beli, penutupan tempat hiburan, penutupan tempat olahraga serta rekreasi, dan berkurangnya pengunjung hotel serta restoran, hal tersebut menyebabkan rendahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan pada



penyerapan belanja, kegiatan belanja operasi dan modal adalah yang paling terdampak. Penyerapan pada tahun anggaran 2022 ini kurang dari pagu anggaran yang ditetapkan, hal ini disebabkan salah satunya karena ditundanya proyek pemerintah akibat refocussing untuk dana penanganan Covid-19. Dampak Pandemi Covid-19 ini hampir menyebar pada seluruh pos-pos dalam laporan keuangan, sehingga kegiatan penanganannya tidak disajikan pada pos luar biasa, akan tetapi disajikan pada pos laporan keuangan yang terdampak signifikan.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp2.582.895.616.333,00 dan pencapaian realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.642.478.582.447,22. Jadi pencapaian target kinerja keuangan mencapai 102,31%.

Pada Tahun Anggaran 2022, alokasi Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.331.703.497.987,00 sementara realisasi Belanja Daerah mencapai sebesar Rp2.913.688.510.341,23 yang berarti tingkat penyerapan Belanja Daerah masih mencapai 87,45%.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Tulungagung selama Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat secara ringkas pada berikut ini:

Tabel 10 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
IV. Pendapatan	2.582.895.616.333,00	2.642.478.582.447,22	102,31
I.1. Pendapatan Asli Daerah	539.727.793.348,00	577.544.166.624,22	107,01
I.2. Pendapatan Transfer	2.043.167.822.985,00	2.064.526.415.823,00	101,05
I.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	408.000.000,00	100,00
V. Belanja	3.331.703.497.987,00	2.913.688.510.341,23	87,45
II.1. Belanja Operasi	2.324.020.350.645,00	2.141.914.216.517,25	92,16
II.2. Belanja Modal	571.090.317.912,00	352.048.362.950,98	61,64
II.3. Belanja Tidak Terduga	14.775.223.000,00	1.228.684.101,00	8,32
II.4. Transfer	421.817.606.430,00	418.497.246.772,00	99,21
Surplus/(Defisit)	(748.807.881.654,00)	(271.209.927.894,01)	
VI. Pembiayaan	748.807.881.654,00	748.807.881.654,38	100,00
III.1. Penerimaan Pembiayaan	782.262.732.342,00	782.262.732.342,38	100,00
III.2. Pengeluaran Pembiayaan	33.454.850.688,00	33.454.850.688,00	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	(0,00)	477.597.953.760,37	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar Rp2.582.895.616.333,00 dan realisasi sebesar Rp2.642.478.582.447,22 atau 102,31% telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi PAD sebesar Rp133.576.824.382,00 dari target anggaran sebesar Rp539.727.793.348,00. Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan pada TA 2022 adalah sebesar Rp2.064.526.415.823,00 dari target anggaran sebesar Rp2.043.167.822.985,00. Sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp408.000.000,00 dari target anggaran sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2022, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp3.331.703.497.987,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.913.688.510.341,23 atau 87,45%. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.324.020.350.645,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.141.914.216.517,25 atau sebesar 92,16%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.312.893.382.514,00	1.105.948.316.423,44	84,24
2	Belanja Barang	870.206.720.131,00	899.004.702.666,36	103,31
3	Belanja Hibah	105.779.747.500,00	102.827.446.326,46	97,21
4	Belanja Bantuan Sosial	35.140.500.500,00	34.133.751.100,99	97,14
	Jumlah	2.324.020.350.645,00	2.141.914.216.517,25	

Pada TA 2022, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp571.090.317.912,00 dan terealisasi sebesar Rp352.048.362.950,98 atau 61,64%. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tanah	44.704.777.307,00	13.388.794.832,00	29,95
2	Belanja Peralatan Mesin	180.960.211.610,00	132.382.446.981,63	73,16
3	Belanja Gedung dan Bangunan	171.491.678.573,00	94.083.313.985,28	54,86
4	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	160.912.147.222,00	104.920.363.082,07	65,20
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.021.503.200,00	7.273.444.070,00	55,86
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	
	Jumlah	571.090.317.912,00	352.048.362.950,98	61,64

Belanja Tidak terduga pada TA 2022 dari anggaran sebesar Rp14.775.223.000,00 terealisasi sebesar Rp1.228.684.101,00 atau 8,32% sedangkan Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp418.497.246.772,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp421.817.606.430,00.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp782.262.732.342,00 dapat direalisasikan sebesar Rp782.262.732.342,38 atau 100% dari anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan ini berasal dari SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan target Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp33.454.850.688,00 dapat terealisasi sebesar Rp33.454.850.688,00 atau sebesar 100,00%.

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala umum yang sedang dihadapi dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan adalah.

a. Bidang Pendapatan.

- 1) Realisasi kondisi lapangan yang kurang sesuai dengan potensi PAD.
- 2) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Belum dapat diterapkannya sanksi hukum bagi wajib pajak dan/atau wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 4) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.



- b. Berkaitan dengan belum diimplementasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 secara utuh dan menyeluruh mengingat keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, kepemilikan sumber daya yang ada dan struktur kelembagaan yang masih belum memadai.

Guna mengatasi hambatan dan kendala yang sedang dihadapi tersebut, telah dilakukan berbagai daya upaya dan strategi antara lain.

- a. Dalam rangka peningkatan pendapatan, kebijakan yang ditempuh adalah.
- 1) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
 - 2) Penyederhanaan pungutan.
 - 3) Efisiensi biaya administrasi pemungutan.
 - 4) Memperkecil jumlah tunggakan.
 - 5) Menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.
 - 6) Sosialisasi ketentuan hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Dengan mengikuti berbagai bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah, dan sosialisasi yang kontinu serta senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat berkenaan dengan ketentuan-ketentuan terbaru dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

7.4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam Laporan Keuangan satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi jika di Pemerintah Daerah disebut juga SKPD/SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari dua jenis yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari LRA, neraca, LO, LPE dan CaLK, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;



- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Entitas akuntansi adalah satuan kerja di dalam struktur Pemerintah Daerah yang berkewajiban melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkup satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu:

- a. SKPD;
- b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut.

- a) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri atas delapan bagian, yaitu: (1) Bagian Administrasi Pemerintahan; (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan; (3) Bagian Hukum; (4) Bagian Administrasi Perekonomian; (5) Bagian Administrasi Pembangunan; (6) Bagian Humas dan Protokol; (7) Bagian Umum dan (8) Bagian Organisasi.

- b) Sekretariat DPRD

- c) Inspektorat Daerah

- d) Dinas Daerah

Jumlah dinas daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah 22 (dua puluh dua) dinas daerah, yaitu: (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (2) Dinas Kesehatan; (3) Dinas Sosial; (4) Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (5) Dinas Perhubungan; (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; (8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (9) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air; (10) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; (11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (12) Dinas Pertanian; (13) Dinas Komunikasi dan Informatika; (14) Dinas Perikanan; (15) Dinas Ketahanan Pangan, (16) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; (17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (18) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; (19) Dinas Lingkungan Hidup; (20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; (21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (22) Satuan Polisi Pamong Praja.

- e) Badan Daerah

Jumlah badan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung terdiri dari 6 (enam) badan daerah, yaitu: (1) Badan Pendapatan Daerah; (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Badan Kepegawaian dan SDM; (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (5) Badan Penanggulangan Bencana daerah; (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- f) Kecamatan

Jumlah kecamatan lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung ada 19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu: (1) Tulungagung; (2) Kedungwaru; (3) Ngantru; (4) Boyolangu; (5)



Sumbergempol; (6) Ngunut; (7) Rejotangan; (8) Pucanglaban; (9) Tanggunggunung; (10) Kalidawir; (11) Campurdarat; (12) Besuk i; (13) Bandung; (14) Pakel; (15) Gondang; (16) Kauman; (17) Pagerwojo; (18) Karangrejo; dan (19) Sendang.

Selanjutnya dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

7.4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas, serta basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.3. Basis Pengakuan dan Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

7.4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan; dan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi (*realized*).



Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

7.4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. terjadinya pengeluaran dari RKUD; dan
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b. terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, belanja dan beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

7.4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.



Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD kecuali untuk SILPA, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

7.4.3.4. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Aset Lancar; dan
- b. Aset Non Lancar.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Pos-pos Investasi Jangka Pendek antara lain deposito berjangka tiga sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar diklasifikasikan menjadi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Kerja Sama (Kemitraan).

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.



Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

7.4.3.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Utang PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka dan Kewajiban Lancar Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d. kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*). Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Tulungagung pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Tulungagung yang substansinya sama dengan Surat Utang Negara (SUN). Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.



7.4.3.6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum, Laporan Keuangan Tahun 2022 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Tahun 2022 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas, serta basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung antara lain sebagai berikut:

1. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Piutang Pendapatan; dan
- b. Piutang Lainnya.

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah Piutang yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV/net realizable value*). Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*NRV*). Namun Piutang merupakan Aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai Piutang atau dengan melakukan estimasi nilai Piutang yang tidak tertagih agar nilai Aset yang disajikan secara wajar dalam Laporan Keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna Laporan Keuangan.

Untuk mengestimasi nilai Piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis Piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Pelaksanaan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih wajib dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- a. penilaian kualitas Piutang; dan
- b. pertimbangan pemantauan dan pengambilan langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

- a. kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan; dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% dari Piutang dengan kualitas macet.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk jenis Piutang berikut ini diperlakukan dengan kebijakan persentase penyisihan Piutang berdasarkan jenis dan umur Piutang yaitu.



a. Persentase Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 13 Persentase Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Kualitas Lancar (< 1 tahun)	Kualitas Kurang Lancar (1-2 tahun)	Kualitas Diragukan (>2-5 tahun)	Kualitas Macet (> 5 tahun)
0,5%	10%	50%*	100%*

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

b. Persentase Penyisihan Piutang Retribusi

Tabel 14 Persentase Penyisihan Piutang Retribusi

Kualitas Lancar (0-1 bulan)	Kualitas Kurang Lancar (>1-3 bulan)	Kualitas Diragukan (>3-12 bulan)	Kualitas Macet (>12 bulan)
0,5%	10%	50%*	100%*

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)

c. Persentase Penyisihan Piutang selain pajak dan retribusi

Tabel 15 Persentase Penyisihan Piutang Selain Pajak dan Retribusi

Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet
0,5%	10%	50%*	100%*

* setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah. Belanja Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran Belanja Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

3. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Konsumsi atas Persediaan ini harus diakui sebagai Beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai Persediaan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggunakan pendekatan Aset sehingga setiap pembelian Persediaan akan langsung dicatat sebagai Persediaan.

Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas Persediaan, maka pencatatan Persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan Persediaan dilakukan dengan metode perpetual. Pengukuran nilai Persediaan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).



4. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi permanen berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- b. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi Non Permanen Lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. metode biaya untuk kepemilikan kurang dari 20%;
- b. metode ekuitas untuk kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%; dan
- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk kepemilikan bersifat non permanen.

5. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP 07 Paragraf 7) yang terbagi dalam klasifikasi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan Aktiva Tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak Aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan Aktiva Tetap merupakan akun kontra Aktiva Tetap yang berhubungan.

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam LO.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Masa manfaat adalah:

- periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16 Masa Manfaat Aset Tetap

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT	
						TAHUN	SEMESTER
1	2	3	4	5	7	8	9
1	3				ASET TETAP		
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN		
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10 tahun	20 semester
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8 tahun	16 semester
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7 tahun	14 semester
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7 tahun	14 semester
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2 tahun	4 semester
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10 tahun	20 semester
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3 tahun	6 semester
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20 tahun	40 semester
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10 tahun	20 semester
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	3 tahun	6 semester
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5 tahun	10 semester
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4 tahun	8 semester
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5 tahun	10 semester
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5 tahun	10 semester
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5 tahun	10 semester
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5 tahun	10 semester
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5 tahun	10 semester
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10 tahun	20 semester
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5 tahun	10 semester



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT	
						TAHUN	SEMESTER
1	2	3	4	5	7	8	9
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5 tahun	10 semester
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5 tahun	10 semester
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8 tahun	16 semester
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8 tahun	16 semester
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	5 tahun	10 semester
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15 tahun	30 semester
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10 tahun	20 semester
1	3	2	08	06	DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10 tahun	20 semester
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7 tahun	14 semester
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15 tahun	30 semester
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	10 tahun	20 semester
1	3	2	09	01	SENJATA API	10 tahun	20 semester
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3 tahun	6 semester
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	10 tahun	20 semester
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	3 tahun	6 semester
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4 tahun	8 semester
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4 tahun	8 semester
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5 tahun	10 semester
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10 tahun	20 semester
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	10 tahun	20 semester
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10 tahun	20 semester
1	3	2	13	01	SUMUR	10 tahun	20 semester
1	3	2	13	02	PRODUKSI	10 tahun	20 semester
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15 tahun	30 semester
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	10 tahun	20 semester
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	10 tahun	20 semester
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5 tahun	10 semester
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5 tahun	10 semester
1	3	2	15	03	ALAT SAR	2 tahun	4 semester
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	10 tahun	20 semester
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10 tahun	20 semester
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8 tahun	16 semester
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	10 tahun	20 semester
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	10 tahun	20 semester
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	10 tahun	20 semester
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	3 tahun	6 semester



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT	
						TAHUN	SEMESTER
1	2	3	4	5	7	8	9
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN		
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50 tahun	100 semester
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50 tahun	100 semester
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50 tahun	100 semester
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40 tahun	80 semester
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	10 tahun	20 semester
1	3	4			JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
1	3	4	01	01	JALAN	10 tahun	20 semester
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50 tahun	100 semester
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50 tahun	100 semester
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50 tahun	100 semester
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25 tahun	50 semester
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10 tahun	20 semester
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30 tahun	60 semester
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40 tahun	80 semester
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40 tahun	80 semester
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30 tahun	60 semester
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30 tahun	60 semester
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10 tahun	20 semester
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10 tahun	20 semester
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40 tahun	80 semester
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40 tahun	80 semester
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30 tahun	60 semester
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30 tahun	60 semester
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20 tahun	40 semester
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	30 tahun	60 semester
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30 tahun	60 semester
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40 tahun	80 semester
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20 tahun	40 semester
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30 tahun	60 semester
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA		
1	3	5	02		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN		
1	3	5	02	01	BARANG BERCORAK KESENIAN	4 tahun	8 semester
1	3	5	02	02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	4 tahun	8 semester



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	URAIAN	MASA MANFAAT	
						TAHUN	SEMESTER
1	2	3	4	5	7	8	9
1	3	4	02	03	TANDA PENGHARGAAN	4 tahun	8 semester
1	3	5	06		BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
1	3	5	06	01	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	4 tahun	8 semester
1	3	5	07		ASET TETAP DALAM RENOVASI		
1	3	5	07	01	ASET TETAP DALAM RENOVASI	4 tahun	8 semester
1	5	3			ASET TIDAK BERWUJUD		
1	5	3	01		ASET TIDAK BERWUJUD	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	01	GOODWILL		
1	5	3	01	02	LISENSI DAN FRENCHISE	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	03	HAK CIPTA	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	04	HAK PATEN	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	05	SOFTWARE	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	06	KAJIAN	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	4 tahun	8 semester
1	5	3	01	09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	4 tahun	8 semester

Untuk perhitungan penyusutan, Aset Tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing periode dengan jumlah yang sama. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana. Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 17 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

Uraian	Jumlah minimal (Rp)
Peralatan dan Mesin	1.000.000
Bangunan Gedung	20.000.000
Aset Tak Berwujud	25.000.000

Nilai satuan Minimum Kapitalisasi dikecualikan terhadap belanja untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Belanja peralatan dan mesin yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan dengan nilai satuan barang di bawah nilai kapitalisasi tetap dicatat sebagai aset dan termasuk dalam barang *extra comptable*, sehingga tidak dicatat di dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi



perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar. Artinya adalah semua pengeluaran yang berkaitan dengan Aset tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar harus dikapitalisasi.

Pemeliharaan jalan/irigasi/jaringan yang belum/tidak direncanakan sebelumnya/tidak terukur volumenya tetapi secara teknis segera memerlukan perbaikan dianggarkan di belanja barang dan jasa serta tidak dikapitalisasi.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- c. Aset Tidak Berwujud; dan
- d. Aset Lain-lain.

Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

7. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
- b. Kewajiban Jangka Panjang

8. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun perolehan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan pos-pos luar biasa. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban adalah kewajiban pemerintah yang



diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

7.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan Keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. LRA;
- b. LPSAL;
- c. Neraca;
- d. LO;
- e. LAK;
- f. LPE; dan
- g. CaLK.

LRA adalah laporan yang menggambarkan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan selama suatu periode. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatannya terhadap APBD. Laporan realisasi anggaran di sini pada hakikatnya menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pendapatan (basis kas) adalah semua penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun perolehan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan pos-pos luar biasa. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar.



7.5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.5.1.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan Daerah TA 2022 menunjukkan adanya tren yang positif. Realisasi Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp2.642.478.582.447,22 dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp2.582.895.616.333,00. Dengan rincian Pendapatan sebagai berikut:

- PAD sebesar Rp 577.544.166.624,22 (tercapai 107,01% dari besarnya target yang telah ditetapkan);
- Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.064.526.415.823,00 (tercapai 101,05% dari besarnya target yang telah ditetapkan); dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 408.000.000,00 (tercapai 100,00% dari besarnya target yang telah ditetapkan).

Sedangkan realisasi Belanja Daerah dan Belanja Transfer tahun 2022 adalah sebesar Rp2.913.688.510.341,23 dari anggaran sebesar Rp 3.331.703.497.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar Rp2.141.914.216.517,25 (terserap 92,16% dari besarnya pagu yang telah ditetapkan);
- Belanja Modal sebesar Rp352.048.362.950,98 (terserap sebesar 61,64% dari besarnya pagu yang telah ditetapkan);
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1.228.684.101,00 (terserap sebesar 8,32% dari besarnya pagu yang telah ditetapkan); dan
- Belanja Transfer sebesar Rp 418.497.246.772,00 (terserap sebesar 99,21% dari besarnya pagu yang telah ditetapkan).

Dalam aspek pelaksanaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengimplementasikan strategi dan pelaksanaan kebijakan belanja yang dilakukan dan bertumpu pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan publik, serta terselenggaranya agenda-agenda penting pemerintahan daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2022 tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp271.209.927.894,01 dan berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan didapatkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp748.807.881.654,38 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp477.597.953.760,37.

Komparasi realisasi penerimaan daerah, belanja daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Penerimaan Daerah, Belanja Dan Surplus/(Defisit) dan SILPA Tahun Anggaran 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Pendapatan Daerah	2.642.478.582.447,22	3.095.975.320.366,44
2	Belanja Daerah	2.913.688.510.341,23	2.753.992.368.427,47
3	Surplus/(Defisit)	(271.209.927.894,01)	341.982.951.938,97
4	Pembiayaan Netto	748.807.881.654,38	440.279.780.403,41
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	477.597.953.760,37	782.262.732.342,38



7.5.1.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

7.5.1.2.1. Pendapatan

	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	2.582.895.616.333,00	2.642.478.582.447,22	3.095.975.320.366,44

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2022 sebesar Rp2.642.478.582.447,22 mengalami penurunan sebesar Rp453.496.737.919,22 atau 14,65% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.095.975.320.366,44. Realisasi Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Pendapatan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	539.727.793.348,00	577.544.166.624,22	953.892.026.423,44
2	Pendapatan Transfer	2.043.167.822.985,00	2.064.526.415.823,00	2.051.224.047.043,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	408.000.000,00	90.859.246.900,00
	Jumlah	2.582.895.616.333,00	2.642.478.582.447,22	3.095.975.320.366,44

7.5.1.2.2 Belanja dan Transfer

	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja dan Transfer	3.331.703.497.987,00	2.913.688.510.341,23	2.753.992.368.427,47

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp2.913.688.510.341,23 mengalami kenaikan sebesar Rp159.696.141.913,76 atau 5,80% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp2.753.992.368.427,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1)	Belanja Operasi	2.324.020.350.645,00	2.141.914.216.517,25	2.064.101.812.477,69
2)	Belanja Modal	571.090.317.912,00	352.048.362.950,98	288.291.855.548,78
3)	Belanja Tidak Terduga	14.775.223.000,00	1.228.684.101,00	17.151.113.610,00
4)	Transfer	421.817.606.430,00	418.497.246.772,00	384.447.586.791,00
	Jumlah	3.331.703.497.987,00	2.913.688.510.341,23	2.753.992.368.427,47

	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Belanja Operasi	2.324.020.350.645,00	2.141.914.216.517,25	2.064.101.812.477,69



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Belanja Operasi adalah pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, yang digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 mencapai 92,16% dari anggaran atau tidak terealisasi sebesar Rp182.106.134.127,75. Dibandingkan dengan Tahun 2021 realisasi Belanja Operasi naik sebesar Rp77.812.404.039,56 (3,77%). Rincian objek Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1)	Belanja Pegawai	1.312.893.382.514,00	1.105.948.316.423,44	1.177.487.042.959,42
2)	Belanja Barang dan Jasa	870.206.720.131,00	899.004.702.666,36	773.538.004.507,16
3)	Belanja Hibah	105.779.747.500,00	102.827.446.326,46	91.303.782.511,11
4)	Belanja Bantuan Sosial	35.140.500.500,00	34.133.751.100,99	21.772.982.500,00
	Jumlah	2.324.020.350.645,00	2.141.914.216.517,25	2.064.101.812.477,69

TA 2022

TA 2021

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Realisasi (Rp)

b) Belanja Modal 571.090.317.912,00 352.048.362.950,98 288.291.855.548,78

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk memperoleh Aset Tetap atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp352.048.362.950,98 mencapai 61,64% dari anggaran, atau tidak terealisasi sebesar Rp219.041.954.961,02. Dibandingkan tahun 2021, realisasi Belanja modal pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp63.756.507.402,20 atau 22,12%.

Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal perSKPD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	58.040.061.000,00	41.577.954.752,16	52.684.532.150,93
2	DINAS KESEHATAN	290.143.178.165,00	170.642.371.676,32	152.932.877.970,88
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	171.475.269.547,00	96.819.704.073,18	43.041.559.783,31
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	2.479.208.100,00	2.250.018.799,99	10.492.208.226,53
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.128.029.000,00	3.622.573.144,90	6.350.628.652,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	105.170.000,00	88.400.000,00	249.260.000,00
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50.700.000,00	50.400.000,00	29.950.000,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	954.304.000,00	910.710.353,00	645.684.400,00
9	DINAS SOSIAL	32.720.000,00	30.520.000,00	341.174.300,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	298.357.100,00	296.655.000,00	257.994.759,46



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
11	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	173.150.000,00	161.650.000,00	817.112.700,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	245.150.000,00	240.100.000,00	8.000.000,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	480.326.000,00	442.383.290,00	1.381.768.455,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	102.100.000,00	100.000.000,00	179.400.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1.634.722.200,00	1.621.284.154,43	3.962.730.450,67
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	880.129.500,00	872.204.700,00	235.955.870,00
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	10.000.000,00	9.800.000,00	134.820.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.468.688.500,00	1.436.490.800,00	169.072.000,00
19	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12.392.545.000,00	11.502.994.200,00	1.111.299.000,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	257.957.200,00	247.267.000,00	143.420.000,00
21	DINAS PERIKANAN	220.660.000,00	212.093.950,00	372.388.280,00
22	DINAS PERTANIAN	913.528.200,00	783.609.994,00	370.007.400,00
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.109.275.000,00	2.791.918.716,00	360.993.000,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.532.092.500,00	4.410.577.136,00	2.460.518.900,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	1.690.332.500,00	1.636.937.500,00	3.201.613.100,00
26	SEKRETARIAT DPRD	2.180.210.000,00	2.031.105.706,00	657.394.100,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	664.257.000,00	560.326.515,00	650.679.050,00
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.521.389.600,00	3.124.656.550,00	1.286.574.000,00
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	242.770.000,00	240.420.000,00	585.060.200,00
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	266.780.000,00	263.362.000,00	457.069.500,00
31	INSPEKTORAT DAERAH	123.991.000,00	55.703.900,00	247.982.500,00
32	KECAMATAN BANDUNG	177.433.900,00	173.905.000,00	83.950.000,00
33	KECAMATAN BESUKI	182.756.400,00	181.148.000,00	50.320.000,00
34	KECAMATAN BOYOLANGU	70.100.000,00	69.850.000,00	235.150.000,00
35	KECAMATAN CAMPURDARAT	49.300.000,00	48.500.000,00	101.875.000,00
36	KECAMATAN GONDANG	208.925.000,00	206.390.000,00	59.060.000,00
37	KECAMATAN KALIDAWIR	49.702.000,00	47.656.000,00	157.199.500,00
38	KECAMATAN KARANGREJO	67.900.000,00	67.250.000,00	22.400.000,00
39	KECAMATAN KAUMAN	112.600.000,00	110.130.000,00	120.666.000,00
40	KECAMATAN KEDUNGGWARU	296.040.000,00	98.545.900,00	100.900.000,00
41	KECAMATAN NGANTRU	26.275.000,00	25.700.000,00	18.500.000,00
42	KECAMATAN NGUNUT	25.250.000,00	25.200.000,00	60.778.300,00
43	KECAMATAN PAGERWOJO	230.902.000,00	227.005.000,00	78.500.000,00
44	KECAMATAN PAKEL	68.500.000,00	67.400.000,00	45.900.000,00
45	KECAMATAN PUCANGLABAN	203.072.000,00	193.990.000,00	112.354.000,00
46	KECAMATAN REJOTANGAN	600.000,00	600.000,00	189.510.000,00
47	KECAMATAN SENDANG	203.741.000,00	199.300.000,00	157.040.000,00
48	KECAMATAN SUMBERGEMPOL	147.740.000,00	144.790.000,00	275.207.000,00
49	KECAMATAN TANGGUNGUNUNG	222.132.000,00	219.095.000,00	23.900.000,00
50	KECAMATAN TULUNGAGUNG	930.297.500,00	907.714.140,00	578.917.000,00
	Jumlah	571.090.317.912,00	352.048.362.950,98	288.291.855.548,78

Tabel 23 Rincian Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1.	Belanja Modal Tanah	44.704.777.307,00	13.388.794.832,00	5.430.000.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.960.211.610,00	132.382.446.981,63	148.480.353.467,60
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	171.491.678.573,00	94.083.313.985,28	69.246.688.066,80
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	160.912.147.222,00	104.920.363.082,07	59.715.735.094,38
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.021.503.200,00	7.273.444.070,00	5.419.078.920,00
	Jumlah	571.090.317.912,00	352.048.362.950,98	288.291.855.548,78

		TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
c)	Belanja Tidak Terduga	14.775.223.000,00	1.228.684.101,00	17.151.113.610,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk keperluan kegiatan yang bersifat tidak biasa atau diharapkan tidak berulang bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mencapai 8,32% dari anggaran atau tidak terealisasi sebesar Rp13.546.538.899,00. Dibandingkan tahun 2021, realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp15.922.429.509,00 atau 92,84%. Rincian realisasi Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh *Leading Sector* (SKPD) berikut:

Tabel 24 Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga

(dalam Rupiah)

No	SKPD <i>Leading Sector</i>	TA 2022	TA 2021
		Realisasi	Realisasi
1	BPKAD	248.851.826,00	0,00
2	RSUD dr. Iskak	0,00	5.920.558.125,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	480.090.000,00
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	208.500.000,00
5	BPBD	35.000.000,00	532.639.000,00
6	Dinas Kesehatan	0,00	8.419.790.485,00
7	Bagian Kesra Setda	772.650.000,00	545.100.000,00
8	Dinas Sosial	42.218.000,00	1.011.394.500,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	33.041.500,00
10	Dinas PU PR	129.964.275	0,00
	Jumlah	1.228.684.101,00	17.151.113.610,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

7.5.1.2.3. Transfer

	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Transfer	421.817.606.430,00	418.497.246.772,00	384.447.586.791,00

Realisasi transfer Tahun 2022 sebesar Rp418.497.246.772,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.049.659.981,00 atau 8,86% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp384.447.586.791,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Transfer Bagi Hasil	14.191.289.430,00	10.870.929.772,00	9.786.824.291,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	407.626.317.000,00	407.626.317.000,00	374.660.762.500,00
	Jumlah	421.817.606.430,00	418.497.246.772,00	384.447.586.791,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

a.	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		14.191.289.430,00	10.870.929.772,00	9.786.824.291,00

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun 2022 sebesar Rp10.870.929.772,00 atau terealisasi sebesar 76,60% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.084.105.481,00 atau 11,08% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp9.786.824.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil			
	▪ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	13.635.844.333,00	10.492.257.465,00	9.417.175.795,00
	▪ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	555.445.097,00	378.672.307,00	369.648.496,00
	JUMLAH	14.191.289.430,00	10.870.929.772,00	9.786.824.291,00

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

b.	Transfer Bantuan Keuangan	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		407.626.317.000,00	407.626.317.000,00	374.660.762.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Realisasi belanja bantuan keuangan Tahun 2022 sebesar Rp407.626.317.000,00 atau terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp32.965.554.500,00 atau 8,80% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp374.660.762.500,00.

7.5.1.2.4 Pembiayaan

	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pembiayaan Daerah	748.807.881.654,00	748.807.881.654,38	440.279.780.403,41

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 sebesar Rp748.807.881.654,38 mengalami kenaikan sebesar Rp308.528.101.250,97 atau 70,08% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp440.279.780.403,41 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penerimaan Pembiayaan	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		782.262.732.342,00	782.262.732.342,38	447.279.780.403,41

Penerimaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp782.262.732.342,38 mencapai 100,00% dari anggaran. Dibandingkan tahun 2021, realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp334.982.951.938,97 atau 74,89%.

Anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2022 dan 2021, terdiri dari:

Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022		TA 2021
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	782.262.732.342,00	782.262.732.342,38	447.279.780.403,41
	Jumlah	782.262.732.342,00	782.262.732.342,38	447.279.780.403,41

b.	Pengeluaran Pembiayaan	TA 2022		TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
		33.454.850.688,00	33.454.850.688,00	7.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp33.454.850.688,00 mencapai 100,00% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp26.454.850.688,00,00 atau 377,93% dibandingkan Tahun 2021.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2022 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp13.454.850.688,00 dan penempatan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan.



7.5.1.2.5. SILPA

	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
SILPA	0,00	477.597.953.760,37	782.262.732.342,38

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran atau yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum diselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

7.5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan SAL tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Laporan Perubahan SAL Tahun 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021
Saldo Anggaran Lebih Awal	782.262.732.342,38	447.279.780.403,41
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(782.262.732.342,38)	(447.279.780.403,41)
Sub total a	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	477.597.953.760,37	782.262.732.342,38
Sub total b	477.597.953.760,37	782.262.732.342,38
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Sub total c	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	477.597.953.760,37	782.262.732.342,38

7.5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

7.5.3.1. Posisi Keuangan Secara Umum

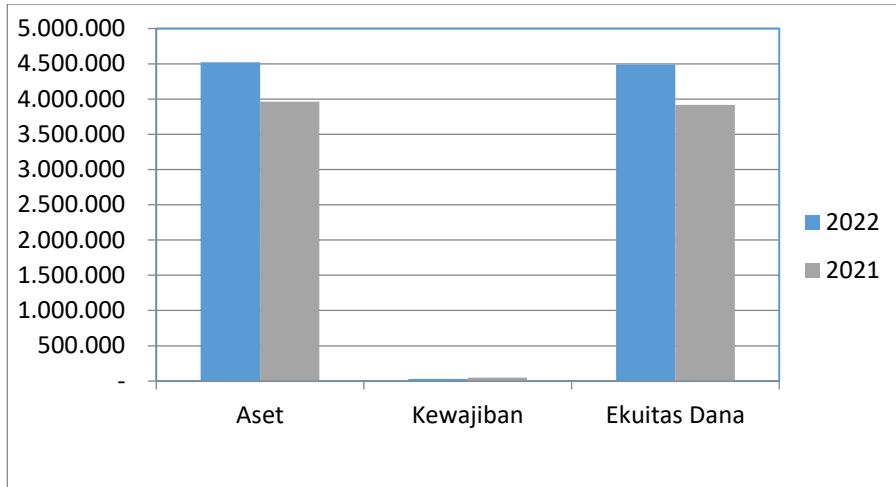
Komposisi dan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 adalah meliputi Aset sebesar Rp4.393.120.892.237,25 Kewajiban sebesar Rp45.623.419.836,61 dan Ekuitas sebesar Rp4.347.497.472.400,64.

Jumlah Aset sebesar Rp4.393.120.892.237,25 tersebut secara rinci terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp570.828.404.435,78 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp162.872.877.310,11 Aset Tetap sebesar Rp3.528.328.458.392,57 Dana Cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp111.091.152.098,79.

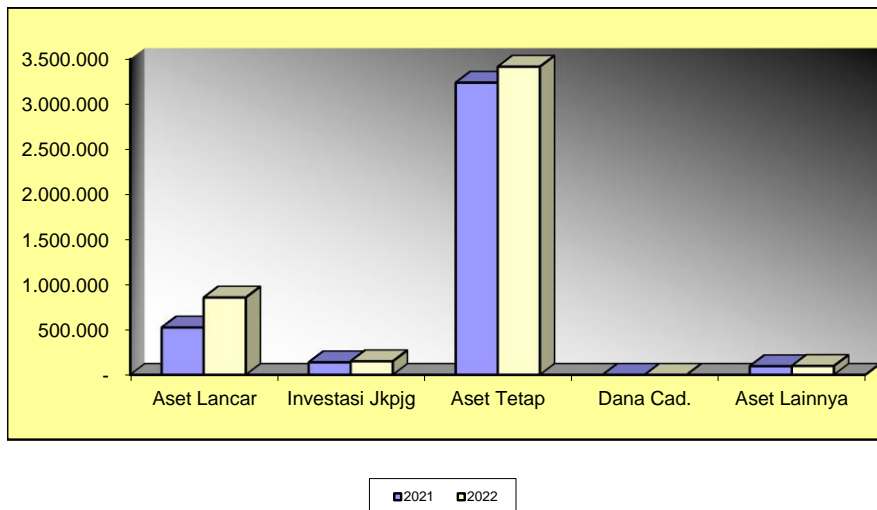


PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Gambar 2 Posisi Keuangan Per 31 Desember 2022 (dalam jutaan Rupiah)



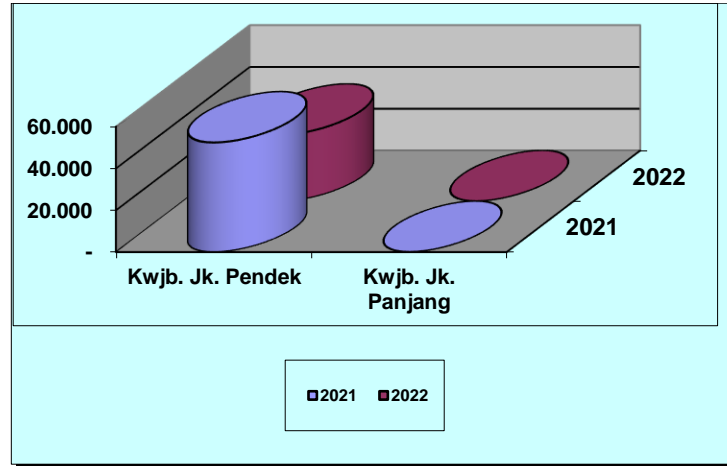
Gambar 3 Rincian Aset per 31 Desember 2022 (dalam jutaan Rupiah)



Jumlah kewajiban sebesar Rp45.623.419.836,61 tersebut hanya merupakan Kewajiban Jangka Pendek saja sebesar Rp45.623.419.836,61 dan sedangkan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00. Dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp34.754.159.603,59 maka Posisi 31 Desember 2022 jumlah Kewajiban terjadi peningkatan sebesar Rp10.869.260.232,92 atau 31,27%.

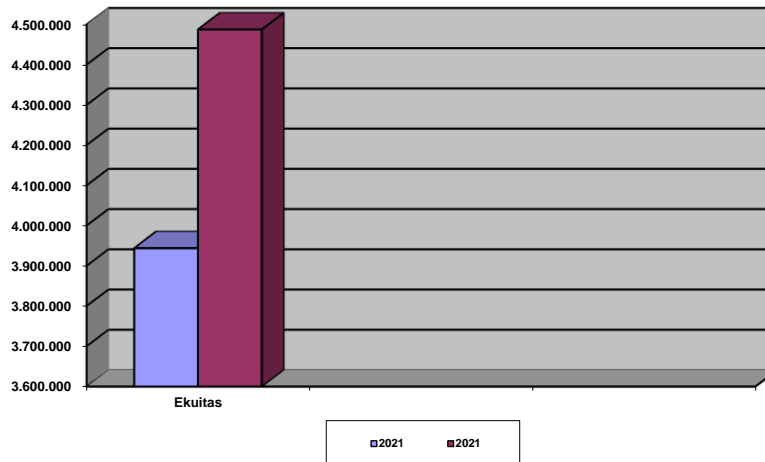


Gambar 4 Rincian Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2022 (dalam jutaan rupiah)



Total ekuitas per 31 Desember 2022 dengan nilai sebesar Rp4.347.497.472.400,64 dibandingkan dengan Posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp4.484.561.139.194,25 maka terjadi penurunan sebesar Rp137.063.666.793,61 atau 3,06%.

Gambar 5 Rincian Jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2022 (dalam jutaan Rupiah)



7.5.3.2 Penjelasan Per Pos Neraca

7.5.3.2.1. Aset Lancar

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar	570.828.404.435,78	856.565.542.989,26

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp570.828.404.435,78 terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka dan Persediaan, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 29 Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

Aset Lancar	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Kas dan Setara Kas	477.624.194.616,80	782.288.867.149,38
Piutang Pendapatan	46.683.444.718,68	26.789.590.794,00
Piutang Lainnya	1.311.083.756,71	1.834.269.853,00
Penyisihan Piutang	(10.293.949.276,47)	(10.859.024.122,54)
Beban Dibayar Dimuka	108.221.800,00	99.106.695,94
Persediaan	55.395.408.820,06	56.412.732.619,48
Jumlah	570.828.404.435,78	856.565.542.989,26

a) Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Kas dan Setara Kas	477.624.194.616,80	782.288.867.149,38

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, Bendahara BOS, serta Bendahara pada SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank.

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp477.624.194.616,80 atau mengalami penurunan sebesar Rp304.664.672.532,58 (38,95%) dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp782.288.867.149,38. dengan rincian:

Tabel 30 Rincian Kas dan Setara Kas

(dalam Rupiah)

Kas dan Setara Kas	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
Kas di Kas Daerah	415.077.681.447,07	428.452.190.106,34
Kas di Bendahara Penerimaan	153.230.363,06	11.500.125,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.325.000,00	1.767.160,00
Kas di BLUD RSUD Dr.Iskak	41.018.116.725,84	279.207.392.152,38
Kas di BLUD Puskesmas	21.271.176.860,34	74.446.316.775,24
Kas di Bendahara Dana BOS	77.748.364,06	145.196.463,42
Kas Lainnya	22.915.856,43	24.504.367,00
Jumlah	477.624.194.616,80	782.288.867.149,38

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
b. Piutang Pendapatan	46.683.444.718,68	26.789.590.794,00

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain, saldo piutang per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Piutang Pendapatan

(dalam Rupiah)

Piutang Pendapatan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Pajak	14.751.316.844,00	13.999.025.065,00
Piutang Retribusi	252.390.065,00	958.040.820,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	20.622.427.309,68	461.881.380,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	1.843.197.581,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Piutang Pendapatan	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.057.310.500,00	9.527.445.948,00
Jumlah	46.683.444.718,68	26.789.590.794,00

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
4) Penyisihan Piutang Lainnya	(655.541.878,36)	(917.134.926,50)

Penyisihan piutang lainnya Tahun 2022 sebesar Rp655.541.878,36 mengalami kenaikan mencapai Rp261.593.048,14 atau 28,52% dari Tahun 2021 sebesar Rp917.134.926,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32 Aging Schedule Piutang Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Piutang	JUMLAH PIUTANG BERDASARKAN UMUR Per 31 Desember 2022				Jumlah	Per 31 Desember 2021
		< 1 Thn	>1- 2 Thn	>2-5 Thn	>5 Thn		
1	PT. KARYA YOGA PRATAMA	0,00		0,00	0,00	0,00	118.222.452,79
2	PT. KYA GRAHA	0,00		44.732.780,92	0,00	44.732.780,92	44.732.780,92
3	PT. KYA GRAHA	0,00		555.036.321,83	0,00	555.036.321,83	555.036.321,83
4	PT. KYA GRAHA	0,00		711.314.653,96	0,00	711.314.653,96	711.314.653,96
5	PT. WIDI INDO TAMA	0,00		0,00	0,00	0,00	54.067.125,95
6	PT. WIDI INDO TAMA	0,00		0,00	0,00	0,00	168.570.098,03
7	PT. WIDI INDO TAMA	0,00		0,00	0,00	0,00	182.326.419,52
	Jumlah	0,00	0,00	1.311.083.756,71	0,00	1.311.083.756,71	1.834.269.853,00
	Presentase penyisihan	0,5%	10%	50%	100%		
	Jumlah Penyisihan	0,00	0,00	655.541.878,36	0,00	655.541.878,36	917.134.926,50

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
e. Beban Dibayar Dimuka	108.221.800,00	99.106.695,94

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2022 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Beban dibayar dimuka tahun 2022 sebesar Rp108.221.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.115.104,06 atau 9,19% dari Tahun 2021 sebesar Rp99.106.695,94.

	<u>31 Desember 2022 (Rp)</u>	<u>31 Desember 2021 (Rp)</u>
f. Persediaan	55.395.408.820,06	56.412.732.619,48

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat/publik. Dalam pelaporannya, persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Jumlah persediaan Tahun 2022 sebesar Rp. 55.395.408.820,06 mengalami penurunan mencapai Rp. 1.017.323.799,42 atau 1,80% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp. 56.412.732.619,48. Rincian persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 untuk masing- masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Saldo Persediaan Per SKPD

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	171.631.140,00	344.411.520,00
2	Sekretariat DPRD	22.632.000,00	22.199.500,00
3	Inspektorat	1.567.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	14.167.000,00	11.642.000,00
5	Dinas Kesehatan	47.866.970.268,70	46.155.706.109,84
6	Dinas KB, PP & PA	251.221.992,00	249.093.063,00
7	Dinas Perhubungan	319.083.600,00	475.593.906,00
8	Dinas Kependudukan & Capil	1.810.679.025,00	1.721.745.515,00
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	264.050.800,00	171.058.303,00
10	Dinas PU & Penataan Ruang	3.339.779.000,96	6.166.846.713,31
11	Dinas Perumahan dan KP	17.462.500,00	133.468.784,33
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	12.886.500,00	2.943.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	530.000,00	490.000,00
14	Dinas Pertanian	1.842.000,00	2.323.000,00
15	Dinas Komunikasi & Informatika	300.000,00	500.000,00
16	Dinas Perikanan	26.138.450,00	27.111.450,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	348.510.500,00	163.370.750,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	29.386.628,40	18.406.500,00
19	Dinas Pemberdayaan Masy & Desa	835.000,00	6.015.000,00
20	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	171.161.000,00	110.871.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup	5.568.105,00	30.709.455,00
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	13.525.500,00	8.919.500,00
23	Dinas Penanaman Modal & PTSP	5.587.850,00	2.582.250,00
24	Dinas Sosial	472.000,00	1.871.000,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja	1.548.000,00	583.000,00
26	Badan Pendapatan Daerah	621.757.400,00	494.000.000,00
27	BAPPEDA	26.300.560,00	22.874.800,00
28	BKPSDM	1.671.000,00	790.000,00
29	BPKAD	30.831.000,00	58.109.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	707.000,00	681.000,00
31	BPBD	9.273.500,00	500.000,00
32	Kecamatan Kedungwaru	0,00	293.000,00
33	Kecamatan Boyolangu	165.000,00	0,00
34	Kecamatan Ngantru	1.815.000,00	0,00
35	Kecamatan Ngunut	88.000,00	278.000,00
36	Kecamatan Rejotangan	2.239.000,00	2.852.000,00
37	Kecamatan Sumbergempol	100.000,00	240.000,00
38	Kecamatan Kalidawir	462.000,00	412.000,00
39	Kecamatan Pucanglaban	132.000,00	409.500,00
40	Kecamatan Campurdarat	50.000,00	0,00
41	Kecamatan Pakel	559.000,00	1.449.000,00
42	Kecamatan Bandung	100.000,00	200.000,00
43	Kecamatan Besuki	196.000,00	214.000,00
44	Kecamatan Tanggunggunung	0,00	37.500,00
45	Kecamatan Kauman	396.000,00	140.000,00
46	Kecamatan Gondang	0,00	0,00
47	Kecamatan Pagerwojo	450.000,00	263.000,00
48	Kecamatan Karangrejo	230.000,00	137.500,00
49	Kecamatan Sendang	350.500,00	391.000,00
50	Kecamatan Tulungagung	0,00	0,00
	JUMLAH	55.395.408.820,06	56.412.732.619,48



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 34 Rincian Saldo Persediaan per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1	Sekretariat Daerah		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Suku Cadang		
	- Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.960.000,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	105.970.200,00	169.594.000,00
	-Kertas dan Cover	44.098.650,00	18.246.500,00
	-Bahan Komputer	922.500,00	0,00
	-Perabot Kantor	7.344.125,00	65.791.360,00
	-Alat Listrik	13.295.665,00	87.719.660,00
	-Perlengkapan Dinas	0,00	200.000,00
	Obat-obatan		
	- Obat-obatan Lainnya	0,00	900.000,00
2	Sekretariat DPRD		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	10.718.000,00	8.930.000,00
	-Kertas dan Cover	3.656.000,00	7.582.000,00
	-Benda Pos	40.000,00	825.000,00
	-Bahan Komputer	350.000,00	4.740.000,00
	-Perabot Kantor	500.000,00	122.500,00
	-Alat Listrik	1.368.000,00	0,00
	-Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	0,00
3	Inspektorat		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.077.000,00	0,00
	-Kertas dan Cover	490.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda & OR		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	6.917.000,00	4.365.600,00
	-Kertas dan Cover	7.250.000,00	5.976.000,00
	- Bahan Komputer	0,00	0,00
	- Perabot Kantor	0,00	660.000,00
	- Alat Listrik	0,00	475.400,00
	- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	130.000,00
	Obat-obatan		
	- Obat	0,00	35.000,00
5	Dinas Kesehatan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Bahan		
	Bahan Kimia	749.998,14	6.354.975.360,00
	Isi Tabung Gas	2.197.000,00	0,00
	Bahan Lainnya	33.537.900,00	46.971.478,66
	Suku Cadang		
	-Suku Cadang Alat Angkutan	2.400.000,00	761.000,00
	-Suku Cadang Alat Besar	672.000,00	0,00
	-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.066.287.317,63	5.211.332.915,39
	-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.632.215.073,84	6.758.531.398,74
	- Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	4.266.900,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.078.862.108,00	958.812.426,10
	-Kertas dan Cover	292.630.802,00	149.731.698,98
	-Bahan Cetak	4.260.000,00	0,00
	-Benda Pos	0,00	300.000,00
	-Bahan Komputer	54.855.000,00	29.021.012,00
	-Perabot Kantor	514.642.434,54	489.740.435,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	-Alat Listrik	54.347.536,20	25.722.450,00
	- Perlengkapan Dinas	1.080.000,00	0,00
	-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.000,00	0,00
	Obat-obatan		
	-Obat-obatan	36.396.106.539,11	25.254.662.339,87
	-Obat-obatan lainnya	570.857.224,00	452.401.394,10
	Natura dan Pakan		
	Natura	1.161.179.335,24	418.475.301,00
6	Dinas KB, PP & PA		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Suku Cadang		
	Suku Cadang Alat Kedokteran	28.665.585,00	18.205.785,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	2.877.000,00	5.634.500,00
	-Kertas dan Cover	1.754.000,00	1.929.000,00
	-Perabot Kantor	622.000,00	1.851.000,00
	-Alat Listrik	0,00	1.254.000,00
	Obat-obatan		
	-Obat-obatan	217.303.407,00	220.218.778,00
7	Dinas Perhubungan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	- Alat Tulis Kantor	308.349.600,00	318.612.546,00
	- Kertas dan Cover	10.734.000,00	21.345.000,00
	- Bahan Komputer	0,00	11.000.000,00
	- Perabot Kantor	0,00	5.665.000,00
	- Alat Listrik	0,00	118.971.360,00
8	Dinas Kependudukan & Capil		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Bahan		
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.721.800,00	5.250.000,00
	Suku Cadang		
	Suku Cadang Alat Kedokteran	3.937.000,00	14.767.500,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.724.297.225,00	1.622.843.115,00
	-Kertas dan Cover	41.791.000,00	53.593.000,00
	-Benda Pos	5.440.000,00	0,00
	-Bahan Komputer	9.630.000,00	21.195.000,00
	-Perabot Kantor	15.026.000,00	2.880.000,00
	Alat Listrik	3.941.000,00	196.900,00
	Natura dan Pakan		
	-Natura	2.895.000,00	1.020.000,00
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	262.914.400,00	165.603.933,00
	-Kertas dan Cover	410.000,00	1.722.000,00
	-Bahan Komputer	622.400,00	1.879.600,00
	-Perabot Kantor	104.000,00	1.637.000,00
	-Alat Listrik	0,00	215.770,00
10	Dinas PU & Penataan Ruang		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Bahan		
	-Bahan Bangunan dan Konstruksi	790.726.600,00	569.303.750,00
	-Bahan Bakar dan Pelumas	36.367.500,00	0,00
	Suku Cadang		
	-Suku Cadang Alat Kedokteran	4.218.000,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	16.171.642,50	8.101.700,00
	-Kertas dan Cover	4.730.645,50	4.403.300,00
	-Benda Pos	0,00	360.000,00
	-Bahan Komputer	0,00	1.520.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	-Perabot Kantor	5.178.000,00	2.508.000,00
	-Alat Listrik	4.503.800,00	0,00
	-Perlengkapan Dinas	799.200,00	0,00
	-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.121.100,00	0,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan		
	- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	2.220.000,00
	- Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	5.578.429.963,31
	Hibah		
	Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.442.218.512,96	0,00
	Persediaan Barang Tak Pakai Habis		
	Pipa		
	Pipa Plastik PVC (UPVC)	33.744.000,00	0,00
11	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Bahan		
	- Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	5.817.020,00
	- Bahan Baku	0,00	30.707.392,91
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	4.318.500,00	8.555.500,00
	-Kertas dan Cover	4.625.000,00	4.649.000,00
	-Bahan Komputer	0,00	770.000,00
	-Perabot Kantor	1.653.000,00	3.410.371,42
	-Alat Listrik	6.866.000,00	7.307.000,00
	-Perlengkapan Dinas	0,00	2.720.000,00
	-Persediaan Barang Tak Habis Pakai		
	Pipa		
	- Pipa Plastik PVC(UPVC)	0,00	67.532.500,00
	- Pipa Lainnya	0,00	2.000.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	11.589.500,00	2.693.000,00
	-Kertas dan Cover	701.000,00	250.000,00
	-Benda Pos	150.000,00	0,00
	-Perabot Kantor	446.000,00	0,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Kertas dan Cover	530.000,00	490.000,00
14	Dinas Pertanian		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	162.000,00	120.000,00
	-Kertas dan Cover	998.000,00	628.000,00
	-Perabot Kantor	682.000,00	1.575.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Kertas dan Cover	300.000,00	500.000,00
16	Dinas Perikanan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Suku Cadang		
	-Suku Cadang Alat Kedokteran	542.850,00	542.850,00
	-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	0,00	1.650.000,00
	-Kertas dan Cover	839.000,00	0,00
	-Perabot Kantor	19.796.700,00	19.796.700,00
	-Alat Listrik	0,00	162.000,00
	-Perlengkapan Dinas	4.959.900,00	4.959.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
17	Dinas Ketahanan Pangan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	23.349.000,00	23.180.000,00
	-Kertas dan Cover	334.000,00	150.000,00
	-Perabot Kantor	77.000,00	98.000,00
	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan		
	-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	139.942.750,00
	-Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	324.750.500,00	0,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	18.104.865,90	13.562.500,00
	-Kertas dan Cover	11.281.762,50	2.688.000,00
	-Perabot Kantor	0,00	2.156.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masy & Desa		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	835.000,00	1.310.000,00
	-Perabot Kantor	0,00	4.705.000,00
20	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Bahan		
	-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	163.000.000,00	97.000.000,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	5.675.000,00	7.056.000,00
	-Kertas dan Cover	165.000,00	4.282.000,00
	-Perabot Kantor	589.000,00	601.000,00
	-Alat Listrik	1.732.000,00	1.932.000,00
21	Dinas Lingkungan Hidup		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	2.856.605,00	13.313.455,00
	-Kertas dan Cover	1.971.500,00	10.258.000,00
	-Perabot Kantor	740.000,00	2.155.000,00
	- Alat Listrik	0,00	4.983.000,00
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Suku Cadang		
	-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.680.000,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	2.053.000,00	4.823.500,00
	-Kertas dan Cover	9.792.500,00	4.096.000,00
23	Dinas Penanaman Modal & PTSP		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.372.000,00	282.000,00
	-Kertas dan Cover	3.071.000,00	1.000.000,00
	-Benda Pos	50.000,00	200.000,00
	-Perabot Kantor	816.000,00	663.000,00
	-Alat Listrik	278.850,00	437.250,00
24	Dinas Sosial		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	182.000,00	1.871.000,00
	-Kertas dan Cover	290.000,00	0,00
25	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.548.000,00	583.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
26	Badan Pendapatan Daerah		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Suku Cadang		
	- Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	165.000,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	575.855.000,00	434.319.500,00
	-Kertas dan Cover	44.036.000,00	43.763.000,00
	-Bahan Komputer	1.220.000,00	12.385.000,00
	-Perabot Kantor	129.000,00	2.179.000,00
	-Alat Listrik	517.400,00	1.188.500,00
27	BAPPEDA		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	20.181.780,00	16.710.800,00
	-Kertas dan Cover	1.616.600,00	1.656.000,00
	-Benda Pos	500.000,00	0,00
	-Bahan Komputer	1.000.000,00	2.600.000,00
	-Perabot Kantor	2.022.900,00	1.908.000,00
	-Alat Listrik	979.280,00	0,00
28	BKPSDM		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	295.000,00	0,00
	-Kertas dan Cover	1.156.000,00	790.000,00
	-Perabot Kantor	220.000,00	0,00
29	BPKAD		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	17.374.000,00	14.854.000,00
	-Kertas dan Cover	1.622.000,00	1.880.000,00
	-Benda Pos	90.000,00	250.000,00
	-Bahan Komputer	11.745.000,00	41.125.000,00
30	Badan Kesatuan Bangsa & Politik		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	367.000,00	321.000,00
	-Kertas dan Cover	340.000,00	360.000,00
31	BPBD		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	6.063.500,00	0,00
	-Kertas dan Cover	3.210.000,00	500.000,00
32	Kecamatan Kedungwaru		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	- Alat Tulis Kantor	0	43.000,00
	- Kertas dan Cover	0	250.000,00
33	Kecamatan Boyolangu		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	Kertas dan Cover	165.000,00	0,00
34	Kecamatan Ngantru		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	0,00
	-Kertas dan Cover	165.000,00	0,00
35	Kecamatan Ngunut		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	88.000,00	120.000,00
	-Kertas dan Cover	0,00	158.000,00
36	Kecamatan Rejotangan		
	Persediaan Barang Pakai Habis		



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Suku Cadang		
	-Suku Cadang Alat Kedokteran	45.000,00	0,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	1.208.000,00	1.033.000,00
	-Kertas dan Cover	538.000,00	548.000,00
	-Perabot Kantor	448.000,00	1.271.000,00
37	Kecamatan Sumbergempol		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	100.000,00	40.000,00
	- Kertas dan Cover	0,00	200.000,00
38	Kecamatan Kalidawir		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	64.000,00	64.000,00
	-Kertas dan Cover	398.000,00	348.000,00
39	Kecamatan Pucanglaban		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	32.000,00	259.500,00
	-Kertas dan Cover	100.000,00	150.000,00
40	Kecamatan Campurdarat		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Kertas dan Cover	50.000,00	0,00
41	Kecamatan Pakel		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	210.000,00	0,00
	-Kertas dan Cover	0,00	100.000,00
	-Bahan Komputer	0,00	200.000,00
	-Perabot Kantor	299.000,00	474.000,00
	Obat-obatan		
	-Obat-obatan lainnya	50.000,00	675.000,00
42	Kecamatan Bandung		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Benda Pos	100.000,00	200.000,00
43	Kecamatan Besuki		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	Alat Tulis Kantor	36.000,00	0,00
	- Kertas dan Cover	160.000,00	214.000,00
44	Kecamatan Tanggunggunung		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	- Alat Tulis Kantor	0,00	37.500,00
45	Kecamatan Kauman		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	96.000,00	140.000,00
	-Kertas dan Cover	300.000,00	0,00
46	Kecamatan Gondang	0,00	0,00
47	Kecamatan Pagerwojo		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	200.000,00	0,00
	-Kertas dan Cover	250.000,00	263.000,00
48	Kecamatan Karangrejo		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	180.000,00	0,00
	-Kertas dan Cover	50.000,00	137.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
49	Kecamatan Sendang		
	Persediaan Barang Pakai Habis		
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
	-Alat Tulis Kantor	98.500,00	0,00
	-Kertas dan Cover	252.000,00	391.000,00
50	Kecamatan Tulungagung	0,00	0,00
	Jumlah	55.395.408.820,06	56.412.732.619,48

Jumlah persediaan keseluruhan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 55.395.408.820,06 terdiri dari Persediaan Barang Pakai Habis sebesar Rp. 55.361.664.820,06, Persediaan Barang Tak Habis Pakai Rp. 33.744.000,00 dan Persediaan Barang Bekas Dipakai sebesar Rp.0,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

31 Desember 2022 (Rp) 31 Desember 2021 (Rp)

a. Persediaan Barang

Pakai Habis 55.361.664.820,06 56.343.200.119,48

Barang pakai habis adalah barang/benda kantor yang penggunaannya hanya satu/beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Termasuk dalam persediaan barang pakai habis adalah terbagi dalam beberapa kelompok yaitu *bahan* (bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan baku dan lain-lain), *suku cadang* (suku cadang alat angkutan, suku cadang alat besar, suku cadang alat kedokteran, suku cadang alat laboratorium, suku cadang alat pemancar, suku cadang alat studio dan komunikasi, suku cadang alat pertanian, suku cadang alat bengkel, persediaan dari belanja bantuan sosial dan suku cadang lainnya), *alat/bahan untuk kegiatan kantor* (alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, benda pos, persediaan dokumen/administrasi tender, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik, kaporlap dan perlengkapan satwa, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir/cendera mata, dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya), *Obat-Obatan* (Obat, Obat-Obatan Lainnya), *persediaan untuk dijual/diserahkan* (persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya), *Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, Persediaan Penelitian* (persediaan biologi,teknologi dan lain-lain), dan *Persediaan dalam Proses*.

Persediaan Barang Pakai Habis pada Tahun 2022 sebesar Rp. 55.361.664.820,06 mengalami penurunan sebesar Rp. 981.535.299,42 atau 1,74% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp. 56.343.200.119,48. Adapun rincian dari Persediaan Barang Pakai Habis adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Persediaan Barang Pakai habis

(Dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi	790.726.600,00	575.120.770,00
2	Persediaan Bahan Kimia	749.998,14	6.354.975.360,00
3	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	36.367.500,00	0,00
4	Persediaan Bahan Baku	0,00	30.707.392,91
5	Persediaan Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00
6	Persediaan Barang dalam Proses	0,00	0,00
7	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
8	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.721.800,00	5.250.000,00
9	Persediaan Isi Tabung Gas	2.197.000,00	0,00
10	Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	163.000.000,00	97.000.000,00
11	Persediaan Bahan Lainnya	33.537.900,00	46.971.478,66
12	Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan	2.400.000,00	761.000,00
13	Persediaan Suku Cadang Alat Besar	672.000,00	0,00
14	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	5.105.375.752,63	5.246.974.050,39
15	Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium	2.632.215.073,84	6.758.531.398,74
16	Persediaan Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00
17	Persediaan Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
18	Persediaan Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00
19	Persediaan Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	4.266.900,00
20	Persediaan Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
21	Persediaan Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00
22	Persediaan Alat Tulis Kantor	4.214.198.426,40	3.809.440.075,10
23	Persediaan Kertas dan Cover	496.952.460,00	345.227.998,98
24	Persediaan Bahan Cetak	4.260.000,00	
25	Persediaan Benda Pos	6.370.000,00	2.135.000,00
26	Persediaan Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
27	Persediaan Bahan Komputer	80.344.900,00	126.435.612,00
28	Persediaan Perabot Kantor	571.335.159,54	611.847.366,42
29	Persediaan Alat Listrik	87.829.531,20	250.565.290,00
30	Persediaan Perlengkapan Dinas	6.839.100,00	7.879.900,00
31	Persediaan Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00
32	Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00
33	Persediaan Suvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	0,00
34	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.211.100,00	130.000,00
35	Persediaan Obat-obatan	36.613.409.946,11	25.474.916.117,87
36	Persediaan Obat-obatan lainnya	570.907.224,00	453.976.394,10
37	Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	142.162.750,00
38	Persediaan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	5.578.429.963,31
39	Persediaan Persediaan jaga	0,00	0,00
40	Persediaan Persediaan Jaga Lainnya	0,00	0,00
41	Persediaan Natura	1.164.074.335,24	419.495.301,00
42	Persediaan Pakan	0,00	0,00
43	Persediaan Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
44	Persediaan Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00
45	Persediaan Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	0,00
46	Persediaan Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00
47	Persediaan Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	0,00
48	Persediaan Persediaan Dalam Proses	0,00	0,00
49	Persediaan Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	0,00
50	Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
51	Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
52	Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00
53	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00
54	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00
55	Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00
56	Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
57	Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00
58	Persediaan Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00
59	Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	0,00
60	Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00
61	Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00
62	Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00
63	Persediaan Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00
64	Persediaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00
65	Persediaan Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00
66	Persediaan Pakaian Siaga	0,00	0,00
67	Persediaan Pakaian Teknik	0,00	0,00
68	Persediaan Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00
69	Persediaan Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00
70	Persediaan Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00
71	Persediaan Pakaian KORPRI	0,00	0,00
72	Persediaan Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00
73	Persediaan Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00
74	Persediaan Pakaian Olahraga	0,00	0,00
75	Persediaan Pakaian Paskibraka	0,00	0,00
76	Persediaan Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00
77	Persediaan Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00
78	Persediaan Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00
79	Persediaan Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	324.750.500,00	0,00
80	Persediaan Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
81	Persediaan Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.442.218.512,96	0,00
82	Persediaan Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
83	Persediaan Hibah Barang kepada BUMN	0,00	0,00
84	Persediaan Hibah Barang kepada BUMD	0,00	0,00
85	Persediaan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
86	Persediaan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
87	Persediaan Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
88	Persediaan Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00
	Total	55.361.664.820,06	56.343.200.119,48

1. Persediaan Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi per SKPD

Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi antara lain berupa persediaan Aspal Emulsi, Aspal Cold Mix, Kawat Bronjong dan lain-lain. Rincian persediaan bahan bangunan dan konstruksi per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Persediaan Barang Pakai habis

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas PU & Penataan Ruang	790.726.600,00	569.303.750,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	5.817.020,00
	Jumlah	790.726.600,00	575.120.770,00

2. Persediaan Bahan - Bahan Kimia per SKPD

Persediaan Bahan Kimia antara lain berupa persediaan BHP Kit RT PCR (BHP KitRT PCR), dan Reagen Kit RT PCR (Reagen Kit RT PCR). Rincian persediaan bahan Bahan Kimia per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Persediaan Barang Pakai habis

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	749.998,14	6.354.975.360,00
	Jumlah	749.998,14	6.354.975.360,00

3. Persediaan Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas per SKPD

Persediaan Bahan Baku antara lain berupa persediaan Bahan Bakar Minyak, Minyak Pelumas, dan lain-lain. Rincian persediaan bahan baku per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Saldo Persediaan Bahan -
Bahan Bakar dan Pelumas per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas PU & Penataan Ruang	36.367.500,00	0,00
	Jumlah	36.367.500,00	0,00

4. Persediaan Persediaan Bahan - Bahan Baku per SKPD

Persediaan Bahan Baku antara lain berupa persediaan kawat segel biasa, bethek/sesek, dolken bambu dan lain-lain. Rincian persediaan bahan baku per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



**Tabel 39 Rincian Saldo Persediaan
Bahan - Bahan Baku per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	30.707.392,91
	Jumlah	0,00	30.707.392,91

5. Persediaan Bahan - Isi Tabung Pemadam Kebakaran per SKPD

Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran antara lain berupa persediaan APAR Powder 3,5 Kg (Peralatan Pemadam Kebakaran) dan APAR Powder 6 Kg (Peralatan Pemadam Kebakaran). Rincian persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Saldo Persediaan Bahan - Isi
Tabung Pemadam Kebakaran per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kependudukan & Capil	3.721.800,00	5.250.000,00
	Jumlah	3.721.800,00	5.250.000,00

6. Persediaan Bahan - Isi Tabung Gas per SKPD

Persediaan Isi Tabung Gas antara lain berupa persediaan isi tabung gas oksigen kecil (Gas Oksigen). Rincian persediaan Isi Tabung Gas per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Saldo Persediaan Bahan - Isi Tabung Gas per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	2.197.000,00	0,00
	Jumlah	2.197.000,00	0,00

7. Persediaan Bahan - Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per SKPD

Persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan antara lain berupa persediaan Sapi hasil IB Betina (Tinggi 115 cm, Panjang 140 cm, Umur 6 s/d 12 bulan), Sapi jenis PO Betina (Tinggi 120-130 cm, Panjang 120-130 cm, Umur 8 s/d 10 bulan), Sapi jenis PO Jantan (Tinggi 125-135 cm, Panjang 140-160 cm, Umur 10 s/d 12 bulan) dan lain-lain. Rincian persediaan bahan/bibit ternak/bibit Ikan per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Saldo Persediaan Bahan -
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	163.000.000,00	97.000.000,00
	Jumlah	163.000.000,00	97.000.000,00

8. Persediaan Bahan - Bahan Lainnya per SKPD

Persediaan Bahan Lainnya (bahan lainnya, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman jamuan tamu, penambah daya tahan tubuh, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan, makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial, makanan dan minuman aktivitas lapangan) antara lain berupa persediaan Entramix Vanilla 185 g (bubuk), Nephrisol Vanilla 201 g (bubuk), plastik



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

klip 12x8 (Bahan Plastik), kasa non steril, under pad, matras, kasa steril dan lain-lain. Rincian persediaan bahan lainnya per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Saldo Persediaan
Bahan - Bahan Lainnya per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	33.537.900,00	46.971.478,66
	Jumlah	33.537.900,00	46.971.478,66

9. Persediaan Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan per SKPD

Persediaan Suku Cadang Alat Angkutan antara lain berupa persediaan Air cleaner, Back mirror, Bolt stud roda depan, Cross joint, Fuel filter primer / sekunder dan lain-lain. Rincian persediaan suku cadang alat kedokteran per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Saldo Persediaan Suku Cadang- Suku
Cadang Alat Angkutan per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	2.400.000,00	761.000,00
	Jumlah	2.400.000,00	761.000,00

10. Persediaan Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar per SKPD

Persediaan Suku Cadang Alat Besar antara lain berupa persediaan Air cleaner inner, Air cleaner outer, Crank shaft, Fuel filter primary dan lain-lain. Rincian persediaan suku cadang alat kedokteran per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Saldo Persediaan Suku Cadang- Suku
Cadang Alat Besar per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	672.000,00	0,00
	Jumlah	672.000,00	0,00

11. Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran per SKPD

Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran antara lain berupa persediaan Safety Box 5 LT OM (Onemed), Povidone iodine 30 cc OM (Bahan Medis Habis Pakai), Handscoon (Alat Perbekalan Kesehatan) /50 Pasang, Masker Surgical Onemed ear loop isi 50 (hijau) (Bahan Medis Habis Pakai) dan lain-lain. Rincian persediaan suku cadang alat kedokteran per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Saldo Persediaan Suku Cadang-Suku
Cadang Alat Kedokteran per SKPD**

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	0,00	1.960.000,00
2	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	5.066.287.317,63	5.211.332.915,39
4	Dinas KB, PP & PA	28.665.585,00	18.205.785,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
6	Dinas Kependudukan & Capil	3.937.000,00	14.767.500,00
7	Dinas Perikanan	542.850,00	542.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
8	Badan Pendapatan Daerah	0,00	165.000,00
9	Dinas PU & Penataan Ruang	4.218.000,00	0,00
10	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	1.680.000,00	0,00
11	Kecamatan Rejotangan	45.000,00	0,00
	Jumlah	5.105.375.752,63	5.246.974.050,39

12. Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium per SKPD

Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium antara lain berupa persediaan probe Cleanser (Alat Laboratorium), reagen golongan darah (peralatan/bahan laboratorium), Rapid Diagnostic Test (RDT) Hepatitis B, Cell Pack 20 Lt Sysmax, Vacum tube K3 EDTA 3 MI Endo, Combiscreen 11 Sys Plus 100 Test, Stick Cholesterol Easy Tought, Stromatolyzer WH, HCG strip Easy Touch, dan lain-lain. Rincian persediaan suku cadang alat laboratorium per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Saldo Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	2.632.215.073,84	6.758.531.398,74
	Jumlah	2.632.215.073,84	6.758.531.398,74

13. Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel per SKPD

Persediaan Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel antara lain berupa persediaan obeng 2 way. Rincian persediaan Suku Cadang Suku Cadang Alat Bengkel per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Saldo Persediaan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	0,00	4.266.900,00
2	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	4.266.900,00

14. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per SKPD

Persediaan alat tulis kantor antara lain berupa persediaan sidol papan, tip ex, binder clip, tinta ribbon fargo, film datacard sr200, buku ekspedisi (isi/100 lembar), cetak amplop dinas bahan casing b (ukuran 12x28 cm), blangko sppd depan, buku kwitansi, staples (HD-30), Blangko Rincian Pemeriksaan Penunjang (Cetak Khusus Medis Pelayanan Kesehatan), Buku Pengiriman Kembali/Rujukan (Cetak Khusus Medis Pelayanan Kesehatan), Buku Register Rawat Jalan, Etiket Obat (Cetak Khusus Medis Pelayanan Kesehatan), Cetak Kohort Ibu, Cetak Kohort Apras dan lain-lain. Rincian persediaan Alat Tulis Kantor per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Setda	105.970.200,00	169.594.000,00
2	Sekretariat DPRD	10.718.000,00	8.930.000,00
3	Inspektorat	1.077.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	6.917.000,00	4.365.600,00
5	Dinas Kesehatan	1.078.862.108,00	958.812.426,10
6	Dinas KB, PP & PA	2.877.000,00	5.634.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
7	Dinas Perhubungan	308.349.600,00	318.612.546,00
8	Dinas Kependudukan & Capil	1.724.297.225,00	1.622.843.115,00
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	262.914.400,00	165.603.933,00
10	Dinas PU & Penataan Ruang	16.171.642,50	8.101.700,00
11	Dinas Perumahan dan KP	4.318.500,00	8.555.500,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	11.589.500,00	2.693.000,00
13	Dinas Pertanian	162.000,00	120.000,00
14	Dinas Perikanan	0,00	1.650.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	23.349.000,00	23.180.000,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.104.865,90	13.562.500,00
17	Dinas Pemberdayaan Masy&Desa	835.000,00	1.310.000,00
18	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	5.675.000,00	7.056.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	2.856.605,00	13.313.455,00
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	2.053.000,00	4.823.500,00
21	Dinas Penanaman Modal &PTSP	1.372.000,00	282.000,00
22	Dinas Sosial	182.000,00	1.871.000,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja	1.548.000,00	583.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	575.855.000,00	434.319.500,00
25	BAPPEDA	20.181.780,00	16.710.800,00
26	BKPSDM	295.000,00	0,00
27	BPKAD	17.374.000,00	14.854.000,00
28	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	367.000,00	321.000,00
29	BPBD	6.063.500,00	0,00
30	Kecamatan Ngantru	1.650.000,00	0,00
31	Kecamatan Kedungwaru	0,00	43.000,00
32	Kecamatan Ngunut	88.000,00	120.000,00
33	Kecamatan Rejotangan	1.208.000,00	1.033.000,00
34	Kecamatan Sumbergempol	0,00	40.000,00
35	Kecamatan Kalidawir	64.000,00	64.000,00
36	Kecamatan Pucanglaban	32.000,00	259.500,00
37	Kecamatan Pakel	210.000,00	0,00
38	Kecamatan Besuki	36.000,00	0,00
39	Kecamatan Tanggunggunung	0,00	37.500,00
40	Kecamatan Kauman	96.000,00	140.000,00
41	Kecamatan Pagerwojo	200.000,00	0,00
42	Kecamatan Karangrejo	180.000,00	0,00
43	Kecamatan Sendang	98.500,00	0,00
	Jumlah	4.214.198.426,40	3.809.440.075,10

15. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover per SKPD

Persediaan Kertas dan Cover antara lain berupa persediaan kertas hvs 70 gr warna, kertas tik dorslag (berwarna 500 lembar), kertas buffalow lorel (75 x 109 cm 90 x 120 cm), amplop putih (ukuran 95 x 152 mm (1 dos isi 100 lembar), kertas tik (folio /500 lbr), kertas manila putih, kertas faximile (210 x 30 cm), amplop dinas (casing 25 x 35 d) amplop (paperline 110) dan lain-lain. Rincian persediaan ATK per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 50 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Setda	44.098.650,00	18.246.500,00
2	Sekretariat DPRD	3.656.000,00	7.582.000,00
3	Inspektorat	490.000,00	0,00
4	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	7.250.000,00	5.976.000,00
5	Dinas Kesehatan	292.630.802,00	149.731.698,98
6	Dinas KB, PP & PA	1.754.000,00	1.929.000,00
7	Dinas Perhubungan	10.734.000,00	21.345.000,00
8	Dinas Kependudukan & Capil	41.791.000,00	53.593.000,00
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	410.000,00	1.722.000,00
10	Dinas PU & Penataan Ruang	4.730.645,50	4.403.300,00
11	Dinas Perumahan dan KP	4.625.000,00	4.649.000,00
12	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	701.000,00	250.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	530.000,00	490.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
14	Dinas Pertanian	998.000,00	628.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000,00	500.000,00
16	Dinas Perikanan	839.000,00	0,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	334.000,00	150.000,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	11.281.762,50	2.688.000,00
19	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	165.000,00	4.282.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	1.971.500,00	10.258.000,00
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	9.792.500,00	4.096.000,00
22	Dinas Penanaman Modal & PTSP	3.071.000,00	1.000.000,00
23	Dinas Sosial	290.000,00	0,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	44.036.000,00	43.763.000,00
26	BAPPEDA	1.616.600,00	1.656.000,00
27	BKPSDM	1.156.000,00	790.000,00
28	BPKAD	1.622.000,00	1.880.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa & Politik	340.000,00	360.000,00
30	BPBD	3.210.000,00	500.000,00
31	Kecamatan Kedungwaru	0,00	250.000,00
32	Kecamatan Boyolangu	165.000,00	0,00
33	Kecamatan Ngantru	165.000,00	0,00
34	Kecamatan Ngunut	0,00	158.000,00
35	Kecamatan Rejotangan	538.000,00	548.000,00
36	Kecamatan Sumbergempol	100.000,00	200.000,00
37	Kecamatan Kalidawir	398.000,00	348.000,00
38	Kecamatan Pucanglaban	100.000,00	150.000,00
39	Kecamatan Campurdarat	50.000,00	0,00
40	Kecamatan Pakel	0,00	100.000,00
41	Kecamatan Bandung	160.000,00	0,00
42	Kecamatan Besuki	0,00	214.000,00
43	Kecamatan Tanggunggunung	0,00	0,00
44	Kecamatan Kauman	300.000,00	0,00
45	Kecamatan Pagerwojo	250.000,00	263.000,00
46	Kecamatan Karangrejo	50.000,00	137.500,00
47	Kecamatan Sendang	252.000,00	391.000,00
	Jumlah	496.952.460,00	345.227.998,98

16. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per SKPD

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak antara lain Baliho, Kartu golongan darah, Cetak kartu nama, Kartu ID Card dan lain - lain . Rincian persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Saldo Persediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	4.260.000,00	0,00
	Jumlah	4.260.000,00	0,00

17. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per SKPD

Persediaan Benda Pos antara lain berupa persediaan materai. Rincian persediaan Benda Pos per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 52 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat DPRD	40.000,00	825.000,00
	Dinas Kependudukan & Capil	5.440.000,00	0,00
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	150.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
3	Dinas PU & Penataan Ruang	0,00	360.000,00
4	Dinas Penanaman Modal & PTSP	50.000,00	200.000,00
5	BAPPEDA	500.000,00	0,00
6	BPKAD	90.000,00	250.000,00
7	Kecamatan Bandung	90.000,00	200.000,00
	Jumlah	6.370.000,00	2.135.000,00

18. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer per SKPD

Persediaan Bahan Komputer antara lain berupa persediaan usb hub, mouse kabel, cd-rw (gt pro isi 50 pcs), cartridge laserjet 12a, cartridge laserjet compatibel 80a, keyboard dan lain-lain. Rincian persediaan bahan komputer per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	922.500,00	0,00
2	Sekretariat DPRD	350.000,00	4.740.000,00
3	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	0,00
4	Dinas Kesehatan	54.855.000,00	29.021.012,00
5	Dinas Perhubungan	0,00	11.000.000,00
6	Dinas Kependudukan & Capil	9.630.000,00	21.195.000,00
7	Dinas Perindustrian & Perdagangan	622.400,00	1.879.600,00
8	Dinas PU & Penataan Ruang	0,00	1.520.000,00
9	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	0,00	770.000,00
10	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	0,00	0,00
11	Badan Pendapatan Daerah	1.220.000,00	12.385.000,00
12	BAPPEDA	1.000.000,00	2.600.000,00
13	BPKAD	11.745.000,00	41.125.000,00
14	Kecamatan Pakel	0,00	200.000,00
	Jumlah	80.344.900,00	126.435.612,00

19. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per SKPD

Persediaan Perabot Kantor antara lain berupa persediaan sapu ijuk lantai (2 macan, kipas kecil), sikat wc (ichiyama), kemucing (polos tanggung), alat pel, sabun cuci piring (mama lime 400 ml reffil), sabun colek (wing biru 900gr), pengharum ruangan (glade one for all lemon, 70 ml), plastik warp (bening), kamper (bagus, ball 200 gr), tissue basah (non emboss), tempat sampah injak (alat kebersihan), tempat sampah tutup besar (alat kebersihan), dan lain-lain. Rincian persediaan Perabot Kantor per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	7.344.125,00	65.791.360,00
2	Sekretariat DPRD	500.000,00	122.500,00
3	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	660.000,00
4	Dinas Kesehatan	514.642.434,54	489.740.435,00
5	Dinas KB, PP & PA	622.000,00	1.851.000,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	5.665.000,00
7	Dinas Kependudukan & Capil	15.026.000,00	2.880.000,00
8	Dinas Perindustrian & Perdagangan	104.000,00	1.637.000,00
9	Dinas PU & Penataan Ruang	5.178.000,00	2.508.000,00
10	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	1.653.000,00	3.410.371,42
11	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	446.000,00	0,00
12	Dinas Pertanian	682.000,00	1.575.000,00
13	Dinas Perikanan	19.796.700,00	19.796.700,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	77.000,00	98.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	2.156.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masy & Desa	0,00	4.705.000,00
17	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	589.000,00	601.000,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	740.000,00	2.155.000,00
19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	816.000,00	663.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	129.000,00	2.179.000,00
21	BAPPEDA	2.022.900,00	1.908.000,00
22	BKPSDM	220.000,00	0,00
23	Kecamatan Ngunut	0,00	0,00
24	Kecamatan Rejotangan	448.000,00	1.271.000,00
25	Kecamatan Pucanglaban	0,00	0,00
26	Kecamatan Pakel	299.000,00	474.000,00
27	Kecamatan Karangrejo	0,00	0,00
	Jumlah	571.335.159,54	611.847.366,42

20. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik per SKPD

Persediaan Alat Listrik antara lain berupa persediaan lampu led 14 watt (lampu listrik), lampu mc 250 watt, stop kontak, saklar lampu, mcb 20 a / 1 phase (mcb), senter, kabel nyy 2 x 1,5 mm per 100m, kabel twistied 2 x 10 pulong, son-t 150 watt, vitting besi kje – 40, kap totok mc, kapasitor 25 farad, selcon photosel 06a, timer theben dan lain-lain. Rincian persediaan Alat Listrik per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	13.295.665,00	87.719.660,00
2	Sekretariat DPRD	1.368.000,00	0,00
3	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	475.400,00
4	Dinas Kesehatan	54.347.536,20	25.722.450,00
5	Dinas KB, PP & PA	0,00	1.254.000,00
6	Dinas Perhubungan	0,00	118.971.360,00
7	Dinas Kependudukan & Capil	3.941.000,00	196.900,00
8	Dinas PU & Penataan Ruang	4.503.800,00	0,00
9	Dinas Perindustrian & Perdagangan	0,00	215.770,00
10	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	6.866.000,00	7.307.000,00
11	Dinas Perikanan	0,00	162.000,00
12	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	1.732.000,00	1.932.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	4.983.000,00
14	Dinas Penanaman Modal & PTSP	278.850,00	437.250,00
15	Badan Pendapatan Daerah	517.400,00	1.188.500,00
16	BPBD	0,00	0,00
17	BAPPEDA	979.280,00	0,00
	Jumlah	87.829.531,20	250.565.290,00

21. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas per SKPD

Persediaan Perlengkapan Dinas (perlengkapan dinas, pakaian dinas KDH dan wkdh, pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian dinas harian (PDH), pakaian dinas lapangan (PDL), pakaian adat daerah, pakaian batik tradisional, pakaian olahraga, pakaian jas/safari dan lain-lain) antara lain berupa persediaan pakaian kerja lapangan, penutup kepala (hairnet kain), sarung tangan tebal, sepatu boot karet, masker, peilskala (alat ukur pegairan) dan lain-lain. Rincian persediaan Perlengkapan Dinas per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 56 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	0,00	200.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.080.000,00	0,00
3	Dinas PU & Penataan Ruang	799.200,00	0,00
4	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	0,00	2.720.000,00
5	Dinas Perikanan	4.959.900,00	4.959.900,00
6	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
7	BPBD	0,00	0,00
	Jumlah	6.839.100,00	7.879.900,00

22. Persediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata per SKPD
Persediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata antara lain berupa Vandel, Medali, Tropy, Batik Katun Tulis dan lain-lain. Rincian persediaan Suvenir/Cendera Mata per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 57 Rincian Saldo Persediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat DPRD	6.000.000,00	0,00
	Jumlah	6.000.000,00	0,00

23. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya antara lain berupa persediaan larissst tissue handuk dan gunting kecil. Rincian persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 58 Rincian Saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	130.000,00
2	Dinas Kesehatan	90.000,00	0,00
3	Dinas PU & Penataan Ruang	1.121.100,00	0,00
4	Dinas Kependudukan & Capil	0,00	0,00
	Jumlah	1.211.100,00	130.000,00

24. Persediaan Obat-Obatan-Obat per SKPD
Persediaan Obat antara lain berupa persediaan Blossave 5 ml, Antihemorold supp / ssuperhold, Vitamin C 50 mg, Acyclovir 400 mg tab box 100 tab, Atropine inj 0,25 mg/ml - Box 100's, Eritomisin 500 mg / Eyra F box 100 tab, Serum anti tetanus inj 1500 IU/blosat, Dermafix (Bahan Medis Habis Pakai), IUD Coper, Anastesi-KIT, Kasa Steril 5x5cm, Lidocaine, PLKB /PKB-KIT, RR-KIT, Asam Mefenamat kaplet 500mg (Obat yang diluar ekatalog) dan lain-lain. Rincian persediaan Obat per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 59 Rincian Saldo Persediaan Obat-Obatan-Obat per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	35.000,00
2	Dinas Kesehatan	36.396.106.539,11	25.254.662.339,87
3	Dinas KB, PP & PA	217.303.407,00	220.218.778,00
4	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	36.613.409.946,11	25.474.916.117,87

25. Persediaan Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya per SKPD

Persediaan Obat-Obatan Lainnya antara lain berupa persediaan Aseptanios Hp 50, Fumicid (Disinfektan), Avigan 200mg, Desinfektan(Hidrogen Peroksida5%, Phospor 0,005%, Silver 0,05%), Icon 25 EC, Abate dan lain-lain. Rincian persediaan Obat Lainnnya per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Saldo Persediaan Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Sekretariat Daerah	0,00	900.000,00
2	Dinas Pendidikan Pemuda & OR	0,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	570.857.224,00	452.401.394,10
4	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
5	Kecamatan Ngunut	0,00	0,00
6	Kecamatan Pakel	50.000,00	675.000,00
	Jumlah	570.907.224,00	453.976.394,10

26. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per SKPD

Yang termasuk dalam kelompok Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yaitu Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu, Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga, Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat, dan Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat antara lain berupa persediaan cikrak seret (alat pertamanan), linggis (alat pertamanan), mata pisau potong rumput gendong (alat pertamanan), beras dan karung / sak kemasan 10kg. Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 61 Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas PU & Penataan Ruang	0,00	2.220.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	324.750.500,00	139.942.750,00
	Jumlah	324.750.500,00	142.162.750,00

27. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per SKPD

Yang termasuk dalam kelompok Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya yaitu Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya, Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat, Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Hibah Barang kepada BUMN, Hibah Barang kepada BUMD, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dan Hibah Barang kepada Koperasi. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya antara lain berupa persediaan Pemeliharaan Berkala Halaman Makodim dan Rumah Dinas Dandin 0807 Tulungagung (Pemeliharaan Berkala Halaman Makodim dan Rumah Dinas Dandin 0807 Tulungagung), Hibah Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Polres Tulungagung (Hibah Barang Rehabilitasi Kantor Polres Tulungagung), Hibah Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor KODIM Tulungagung, dan lain-lain. Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Rincian Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas PU & Penataan Ruang	2.442.218.512,96	5.578.429.963,31
	Jumlah	2.442.218.512,96	5.578.429.963,31

28. Persediaan Natura dan Pakan-Natura per SKPD

Persediaan Natura antara lain berupa persediaan air mineral gelas, air mineral botol 600 ml air mineral galon dan susu kotak. Rincian persediaan Natura per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 63 Rincian Saldo Persediaan Natura dan Pakan-Persediaan Natura per SKPD

(Dalam Rupiah)

NO.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	1.161.179.335,24	418.475.301,00
2	Dinas Kependudukan & Capil	2.895.000,00	1.020.000,00
	Jumlah	1.164.074.335,24	419.495.301,00

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

b. Persediaan Bahan

Tak Habis Pakai	33.744.000,00	69.532.500,00
------------------------	----------------------	----------------------

Persediaan bahan tak habis pakai terdiri dari Persediaan Komponen Jembatan Baja, Persediaan Komponen Jembatan Pratekan, Persediaan Komponen Peralatan, Persediaan Komponen Rambu-Rambu, Persediaan Attachment, Persediaan Komponen Lainnya, Persediaan Pipa Air Besi Tuang (DCI), Persediaan Pipa Asbes Semen (ACP), Persediaan Pipa Baja, Persediaan Pipa Beton Pratekan, Persediaan Pipa Fiber Glass, Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC) dan Persediaan Pipa Lainnya.

Persediaan bahan tak habis pakai Tahun 2022 sebesar Rp. 33.744.000,00 mengalami penurunan mencapai Rp. 35.788.500,00 atau 51,47% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp. 69.532.500,00. Adapun rincian dari Persediaan bahan tak habis pakai adalah sebagai berikut:

Tabel 64 Rincian Persediaan Bahan Tak Habis Pakai

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Persediaan Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00
2	Persediaan Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00
3	Persediaan Komponen Peralatan	0,00	0,00
4	Persediaan Komponen Rambu	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
5	Persediaan Attachment	0,00	0,00
6	Persediaan Komponen Lainnya	0,00	0,00
7	Persediaan Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	0,00
8	Persediaan Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00
9	Persediaan Pipa Baja	0,00	0,00
10	Persediaan Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00
11	Persediaan Pipa Fiber Glass	0,00	0,00
12	Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC)	33.744.000,00	67.532.500,00
13	Persediaan Pipa Lainnya	0,00	2.000.000,00
	JUMLAH	33.744.000,00	69.532.500,00

1. Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC) per SKPD

Persediaan pipa plastik PVC (UPVC) berupa pipa pvc ø 12 " 4 meteran (pipa pvc), pipa pvc ø 6 " 4 meteran (pipa pvc), pipa pvc ø 8 " 4 meteran (pipa pvc), dan pipa pvc (berbagai pipa pvc). Rincian persediaan pipa plastik PVC (UPVC) per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 65 Rincian saldo Persediaan Pipa Plastik PVC (UPVC) per SKPD

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas PU & Penataan Ruang	33.744.000,00	0,00
2	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	0,00	67.532.500,00
	Total	33.744.000,00	67.532.500,00

2. Persediaan Pipa Lainnya per SKPD

Persediaan pipa lainnya berupa pleindes (knie pvc). Rincian persediaan pipa lainnya per SKPD per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 66 Rincian saldo Persediaan Pipa Lainnya per SKPD

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Dinas Perindustrian & Perdagangan	0,00	0,00
2	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	0,00	2.000.000,00
	Total	0,00	2.000.000,00

7.5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	162.872.877.310,11	149.732.595.636,91

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp162.872.877.310,11 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.140.281.673,20 atau 8,78% dibandingkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp149.732.595.636,91. Investasi Jangka Panjang tahun 2021 tersebut di atas. dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	162.872.877.310,11	149.732.595.636,91

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal (investasi) di suatu entitas bisnis pada lembaga/instansi lain. Investasi tersebut akan dipertahankan dalam jangka panjang dengan maksud mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah telah melakukan tambahan nilai penyertaan modal sebesar Rp19.254.012.810,09 dan pengurangan nilai penyertaan modal sebesar Rp6.113.731.136,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Mutasi Penambahan dan Pengurangan Penyertaan Modal Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2021	Mutasi		Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	PT Bank Jatim	17.674.493.750,00	0,00	0,00	17.674.493.750,00
2	PT BPR Jatim	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
3	PD Aneka Usaha	21.385.094.803,00	0,00	(422.752.782,00)	20.962.342.021,00
4	PDAM	53.252.305.220,91	6.891.670.734,09	(1.732.123.713,89)	58.411.852.241,11
5	PT BPR Bank Tulungagung	56.820.701.863,00	12.362.342.076,00	(3.958.854.641,00)	65.224.189.298,00
Jumlah		149.732.595.636,91	19.254.012.810,09	(6.113.731.136,89)	162.872.877.310,11

Rincian penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing dengan nilai sebesar Rp162.872.877.310,11 dan Rp149.732.595.636,91 adalah sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemda

(dalam Rupiah)

No	Penempatan	% Kepemilikan	Metode	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Bank Jatim	0,59	Cost	17.674.493.750,00	17.674.493.750,00
2	PT BPR Jatim	0,47	Cost	600.000.000,00	600.000.000,00
3	PD Aneka Usaha (PDAU)	100,00	Equity	20.962.342.021,00	21.385.094.803,00
4	PD Air Minum (PDAM)	100,00	Equity	58.411.852.241,11	53.252.305.220,91
5	PT BPR Bank Tulungagung	100,00	Equity	65.224.189.298,00	56.820.701.863,00
Jumlah				162.872.877.310,11	149.732.595.636,91

Atas mutasi penyertaan modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal kepada Bank Jatim tidak terdapat perubahan sehingga nilainya tetap dari Tahun 2021 yaitu sebesar Rp17.674.493.750,00. Nilai tersebut terdiri dari 70.697.975 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp250,00. Penyertaan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

modal terhadap Bank Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT Bank Jatim. Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal adalah metode *cost* karena persentase kepemilikan Pemerintah Daerah hanya sebesar 0,59%. Berikut ini mutasi nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap PT Bank Jatim.

Tabel 69 Rincian Saldo Penyertaan Modal pada Bank Jatim

(dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022
	Tunai	Non Tunai	
17.674.493.750,00	0.00	0.00	17.674.493.750,00

- 2) Penyertaan modal kepada BPR Jatim tidak terdapat perubahan sehingga nilainya tetap dari posisi per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp600.000.000,00. Nilai tersebut terdiri dari 6.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000,00.

Penyertaan modal terhadap BPR Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal adalah metode *cost* karena persentase kepemilikan Pemerintah Daerah hanya sebesar 0,22%. Berikut ini mutasi nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap PT BPR Jatim.

Tabel 70 Rincian Saldo Penyertaan Modal pada BPR Jatim

(dalam Rupiah)

Saldo Per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022
	Tunai	Non Tunai	
600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00

- 3) Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) terjadi penurunan sebesar Rp422.752.782,00 atau 1,98% dari Rp21.385.094.803,00 per 31 Desember 2021 menjadi Rp20.962.342.021,00 per 31 Desember 2022.

Mutasi nilai penyertaan modal pada PD Aneka Usaha terdiri dari:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	21.385.094.803,00
Rugi Tahun 2022 (Laporan Laba Rugi <i>audited</i> PDAU)	Rp	(422.752.782,00)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	<u>20.962.342.021,00</u>

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PDAU Kabupaten Tulungagung, nilai investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000.000,00 dan selain uang sebesar Rp166.026.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| (a) Percetakan sebesar | Rp | 160.026.000,00 |
| (b) Kendaraan sebesar | Rp | <u>6.600.000,00</u> |
| | Rp | 166.626.000,00 |

Disamping itu pemerintah daerah akan menambah penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk uang dan/atau selain uang sebesar Rp20.000.000.000,00 yang akan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dilaksanakan dalam empat tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tulungagung menambah nilai penyertaan modal berupa tanah dan bangunan ke PDAU sebesar Rp7.063.160.000,00 sehingga penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada PDAU per 31 Desember 2022 (*at cost*) adalah sebesar Rp22.166.626.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uang Tunai	: Rp 2.000.000.000,00
Uang Tunai 2017	: Rp 3.000.000.000,00
Percetakan	: Rp 160.026.000,00
Kendaraan	: <u>Rp 6.600.000,00</u>
Jumlah s/d tahun 2017	: Rp 5.166.626.000,00
Penyertaan Tahun 2018	: Rp 5.000.000.000,00
Penyertaan Tahun 2019	: Rp 2.000.000.000,00
Penyertaan Tahun 2020	: <u>Rp 2.936.840.000,00</u>
Jumlah s/d Tahun 2020	: Rp 15.103.466.000,00
Tanah dan Bangunan Tahun 2021	: <u>Rp 7.063.160.000,00</u>
Jumlah s/d Tahun 2022	:Rp 22.166.626.000,00

Dikarenakan kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung atas Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah 100% maka metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.962.342.021,00. Nilai tersebut lebih rendah daripada perhitungan dengan metode cost karena selama 3 (dua) tahun terakhir yaitu 2020, 2021 dan 2022 PDAU mengalami kerugian. Kerugian yang dialami disebabkan karena PDAU melakukan investasi jangka panjang yaitu “Bungur Pertanian Terpadu” yang mana bidang usahanya meliputi perkebunan buah klengkeng, alpukat, nangka dan durian dan juga peternakan domba yang belum menghasilkan keuntungan. Dan juga kafe “ Ingandaya “ yang masih merupakan bisnis start up yang masih mulai beroperasi selama 2 (dua) bulan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya biaya pemeliharaan dan beban penyusutan.

- 4) Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terdapat peningkatan sebesar Rp5.159.547.020,20 atau 9,69% dari Rp53.252.305.220,91 per 31 Desember 2021 menjadi Rp58.411.852.241,11 per 31 Desember 2022.

Tabel 71 Perhitungan Nilai Penyertaan Modal kepada PDAM

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Investasi
1	Nilai penyertaan modal per 31 Des 2021	53.252.305.220,91
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022	6.580.281.000,00
3	Pembagian Laba Tahun 2021 yang disetor Tahun 2022	(45.885.394,31)
5	Koreksi Saldo Laba	(1.537.879.180,03)
6	Laba bersih PDAM Tahun 2022 (Laporan Laba/Rugi PDAM <i>Audited</i> Tahun 2022)	311.389.734,09
7	Penggunaan Cadangan	12.514.198,45
8	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(160.873.338,00)
9	Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2022	58.411.852.241,11



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.144.964.014,85 dengan rincian sebagai berikut:

a) Aset (Perda Nomor 3 Tahun 2008)	Rp	6.132.273.147,11
b) Uang Tunai (Perda Nomor Tahun 2011)	Rp	2.000.000.000,00
c) Uang Tunai (Perda Nomor 9 tahun 2012)	Rp	5.900.000.000,00
d) Aset (Perda Nomor 9 Tahun 2012)	Rp	1.850.980.000,00
e) Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2014)	Rp	2.000.000.000,00
f) Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2014)	Rp	1.998.000.000,00
g) Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2014)	Rp	1.998.000.000,00
h) Non Kas (Perda Nomor 21 Tahun 2016)	Rp	14.685.429.867,74
i) Uang Tunai (Perda Nomor 14 Tahun 2017)	Rp	3.000.000.000,00
j) Uang Tunai (Perda Nomor 14 Tahun 2017)	Rp	3.000.000.000,00
k) Uang Tunai (Perda Nomor 14 Tahun 2017)	Rp	3.000.000.000,00
l) Uang Tunai (Perda Nomor 4 Tahun 2022)	Rp	6.580.281.000,00
Jumlah	Rp	52.144.964.014,85

Metode pencatatan investasi yang digunakan adalah metode ekuitas karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tulungagung atas PDAM adalah 100%. Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai penyertaan modal kepada PDAM per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp58.411.852.241,11.

Pembagian Laba Tahun 2021 yang dibagikan Tahun 2022 sebesar Rp83.427.989,65 adalah 55% dari Laba bersih Tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dengan rincian:

- 55% dari Rp83.427.989,65 Rp45.885.394,31

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM (*Audited*), nilai Ekuitas PDAM per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.411.852.241,11 dengan rincian berikut:

Modal Dasar	Rp	65.000.000,00
Penyertaan Pemerintah Pusat ybd Statusnya	Rp	40.289.036.721,88
Penyertaan Pemerintah Daerah	Rp	52.144.964.014,85
Modal dan Cadangan	Rp	546.467.814,52
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	Rp	(1.940.376.277,11)
Laba(Rugi) Tahun lalu	Rp	(33.004.629.767,12)
Laba (Rugi) Tahun berjalan	Rp	311.389.734,09
Ekuitas	Rp	58.411.852.241,11

- 5) Penyertaan modal kepada PT BPR Bank Tulungagung terdapat kenaikan sebesar Rp8.403.487.435,00 atau 14,79% dari Rp56.820.701.863,00 per 31 Desember 2021 menjadi Rp65.224.189.298,00 per 31 Desember 2022. Mutasi penambahan penyertaan modal pada PD BPR Daerah terdiri dari:

**Tabel 72 Perhitungan Nilai Penyertaan Modal kepada
PT BPR Bank Tulungagung**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Investasi
1	Nilai penyertaan modal per 31 Des 2021	56.820.701.863,00
2	Pembagian Laba Tahun 2021 yang disetorkan ke Pemda di 2022	(2.715.452.626,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Uraian	Nilai Investasi
3	Penambahan Penyertaan modal	6.874.569.688,00
4	Lain-lain pembagian laba	(1.243.402.014,00)
9	Koreksi pencatatan	(1,00)
10	Laba Tahun 2022 (Laporan Laba Rugi PD BPR Bank Daerah Tulungagung <i>audited</i>)	5.487.772.388,00
11	Nilai penyertaan modal per 31 Desember 2022	65.224.189.298,00

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PT BPR Bank Tulungagung per 31 Desember 2022 dihitung secara *at cost* adalah sebesar Rp49.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a)	Uang Tunai (Perda Nomor 10 Tahun 2007)	Rp	1.000.000.000,00
b)	Uang Tunai (Perda Nomor 10 Tahun 2007)	Rp	2.245.255.312,00
c)	Uang Tunai (Perda Nomor 32 Tahun 2012)	Rp	1.000.000.000,00
d)	Tanah dan Bangunan (Perda Nomor 31 Th 2012)	Rp	1.025.430.000,00
e)	Uang Tunai (Perda Nomor 32 Tahun 2014)	Rp	2.500.000.000,00
f)	Uang Tunai (Perda Nomor 32 Tahun 2014)	Rp	3.254.745.000,00
g)	Konversi Dana Bergulir (Perda Nomor 6 Th 2015)	Rp	4.950.000.000,00
h)	Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2015)	Rp	2.000.000.000,00
i)	Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2015)	Rp	2.000.000.000,00
j)	Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2015)	Rp	2.000.000.000,00
k)	Uang Tunai (Perda Nomor 6 Tahun 2015)	Rp	4.050.000.000,00
l)	Uang Tunai (Perda Nomor 8 Tahun 2020)	Rp	10.000.000.000,00
m)	Uang Tunai (Perda Nomor 8 Tahun 2020)	Rp	7.000.000.000,00
m)	Uang Tunai (Perda Nomor 8 Tahun 2020)	Rp	6.874.569.688,00
	Jumlah	Rp	49.900.000.000,00

Dikarenakan kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten atas PT BPR Bank Tulungagung adalah 99,99% maka metode penilaian investasi menggunakan metode ekuitas sehingga saldo penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.224.189.298,00.

Bagian Laba Tahun 2021 yang dibagikan Tahun 2022 sebesar Rp2.715.452.626,00 sesuai dengan hasil RUPS PT BPR Bank Tulungagung Tahun 2022. Bagian laba tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp164.114.763,00 atau 6,43% jika dibandingkan dengan bagian laba tahun 2020 yang dibayarkan tahun 2021 sebesar Rp2.551.337.863,00. Hal ini disebabkan karena kondisi pengusaha mikro sudah mulai membaik sehingga penyaluran kredit mikro yang merupakan bidang usaha utama dari PT BPR Bank Tulungagung juga mulai mengalami peningkatan.

Jumlah Ekuitas PT BPR Bank Tulungagung berdasarkan laporan Keuangan PT.BPR Bank Daerah Tulungagung (Audited) dengan rincian berikut:

Modal Dasar	Rp	50.000.000.000,00
Modal yang belum disetor	Rp	0,00
Modal sumbangan	Rp	2.961.000,00
Cadangan Umum	Rp	4.898.839.378,00
Cadangan Tujuan	Rp	4.934.616.532,00
Saldo laba	Rp	5.487.772.388,00
Ekuitas	Rp	65.324.189.298,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Terdapat perbedaan jumlah Penyertaan Modal yang tercatat pada Neraca Pemerintah Daerah dengan jumlah Ekuitas PD BPR Daerah Tulungagung berdasarkan laporan Keuangan PT.BPR Bank Daerah Tulungagung (Audited) sebesar Rp100.000.000,00. Perbedaan jumlah tersebut merupakan modal karyawan yang tidak bisa diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai penambahan investasi.

7.5.3.2.3 Aset Tetap

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap	3.528.328.458.392,57	3.415.133.696.678,31

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Mutasi aset tetap pada Tahun 2022 tidak sama dengan realisasi belanja modal. Hal ini disebabkan adanya koreksi tambah dan kurang atas nilai aset pada SKPD serta penghapusan aset sesuai SK Penghapusan dari Bupati. Mutasi tambah dan kurang aset tetap selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Mutasi Saldo Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2022
1	Tanah	1.111.938.931.410,50	32.864.633.477,24	6.533.501.376,24	1.138.270.063.511,50
2	Peralatan dan Mesin	934.025.533.074,68	146.035.802.765,24	47.858.566.941,45	1.032.202.768.898,47
3	Gedung dan Bangunan	995.632.300.854,91	114.712.317.172,99	49.930.471.056,49	1.060.414.146.971,41
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.365.612.150.503,26	562.101.611.685,75	499.437.988.474,55	2.428.275.773.714,46
5	Aset Tetap Lainnya	117.249.497.003,81	10.541.916.908,53	394.975.200,00	127.396.438.712,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.445.729.040,00	48.639.552.210,00	7.315.219.040,00	48.770.062.210,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.116.770.445.208,85)	(346.883.592.779,99)	(156.653.242.363,23)	(2.307.000.795.625,61)
Jumlah		3.415.133.696.678,31			3.528.328.458.392,57

Secara umum dibandingkan dengan periode Tahun 2021, maka sampai dengan 31 Desember 2022 ini terdapat peningkatan nilai aset tetap yakni sebesar Rp113.194.761.714,26 atau 3,31%. Saldo aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
a. Tanah	1.138.270.063.511,50	1.111.938.931.410,50

Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak. Biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 jumlah keseluruhan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 26.331.132.101,00 atau sebesar 2,37%.

Rincian mutasi aset tanah Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	1.111.938.931.410,50
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp		13.333.612.000,00
Belanja Modal BLUD	Rp		55.182.832,00
Koreksi Pencatatan	Rp		-
Mutasi dari SKPD lain	Rp		4.826.441.351,12
Reklasifikasi Masuk	Rp		47.619.351,12
Hibah Masuk	Rp		14.601.777.943,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	32.864.633.477,24
Mutasi Kurang			
Koreksi Pencatatan	Rp		(1,72)
Mutasi ke SKPD lain	Rp		(4.826.441.351,12)
Reklasifikasi Keluar	Rp		(1.707.060.023,40)
Hibah	Rp		-
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(6.533.501.376,24)
Saldo Akhir 2022		Rp	1.138.270.063.511,50

Belanja modal senilai Rp. 13.333.612.000,00 terdiri dari belanja modal tanah untuk Puskesmas Tulungagung senilai Rp.2.529.600.000,00; tanah untuk SDN 3 Bendosari senilai Rp.425.880.000,00; tanah SDN 2 Sidem senilai Rp.253.132.000,00 dan tanah Kanjengan senilai Rp. 10.125.000.000,00.

Tabel 74 Rincian Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			13.333.612.000,00
2	Belanja Modal BLUD			
a	Dinas Kesehatan	Pelepasan Hak Tanah, Pajak, Ukur dan Patok PKM Kedungwaru	55.182.832,00	
	Sub Total 2			55.182.832,00
3	Mutasi dari SKPD Lain			
a	DPMPSTSP	Mutasi dari Sekretariat Daerah-Tanah Untuk Bangunan MPP	2.849.780.000,00	
b	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan dan KP-Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.526.232.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan dan KP-Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	2.810.000,00	
c	Dinas Perumahan dan KP	Mutasi dari Dinas PUPR-Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah	400.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
d	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mutasi dari BPKAD - Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	47.619.351,12	
	Sub Total 3			4.826.441.351,12
4	Hibah Masuk			
a	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hibah Fasum Fasos Pengembang Perumahan-Rekreasi dan Olahraga	345.000.000,00	
		Hibah Fasum Fasos Pengembang Perumahan-Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	12.093.285.943,00	
		Hibah Fasum Fasos Pengembang Perumahan-Tanah Untuk Bangunan Air Kotor/Jaringan Saluran pembuangan air hujan Drainase Hujan	847.737.000,00	
		Hibah Fasum Fasos Pengembang Perumahan-Tanah Untuk Taman Lainnya	297.030.000,00	
		Hibah Fasum Fasos Pengembang Perumahan-Tanah Untuk PAUD dan Pos Satpam	512.050.000,00	
		Hibah Fasum Fasos Pengembang Perumahan-Tanah untuk Musholla	506.675.000,00	
	Sub Total 4			14.601.777.943,00
5	Reklasifikasi			
a	BPKAD	Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultasi Penilaian Tanah dan Bangunan	47.619.351,12	
	Sub Total 5			47.619.351,12
	Total Mutasi Tambah			32.864.633.477,24
6	Mutasi Keluar			
a	Sekretariat Daerah	Mutasi ke DPMPSTP - Tanah Untuk Bangunan MPP	(2.849.780.000,00)	
b	Dinas Perumahan dan KP	Mutasi ke Dinas PUPR-Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	(1.526.232.000,00)	
		Mutasi ke Dinas PUPR-Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	(2.810.000,00)	
c	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan KP-Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limbah	(400.000.000,00)	
d	BPKAD	Mutasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	(47.619.351,12)	
	Sub Total 6			(4.826.441.351,12)
7	Koreksi Pencatatan Keluar			
a	Dinas PUPR	Koreksi Kurang Nilai Perolehan Tanah Untuk Jalan (Sebab Pembulatan)	(1,72)	
8	Reklasifikasi Keluar			



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
a	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi sebab salah catat	(1.707.060.023,40)	
	Sub Total 8			(1.707.060.023,40)
	Total Mutasi Kurang			(6.533.501.376,24)

Adapun rincian tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Rincian Aset Tetap – Tanah

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	5	27.187.646.000,00	6	30.037.426.000,00
2	DINAS KESEHATAN	50	25.436.985.672,00	49	22.852.202.840,00
3	DINAS PETERNAKAN	11	2.620.047.008,00	11	2.620.047.008,00
4	BPKAD	241	42.882.106.430,00	241	42.882.106.430,00
5	INSPEKTORAT	2	233.000.000,00	2	233.000.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	1	1.436.000.000,00	1	1.436.000.000,00
7	DBMPTSP	2	3.599.780.000,00	1	750.000.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	40	1.342.293.000,00	40	1.342.293.000,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	3.616.050.000,00	2	3.616.050.000,00
10	SATUAN POLISI PP	2	220.501.000,00	2	220.501.000,00
11	KEC. KEDUNGWARU	1	11.024.000,00	1	11.024.000,00
12	KEC. NGUNUT	2	2.814.180.000,00	2	2.814.180.000,00
13	KEC.REJOTANGAN	1	470.000.000,00	1	470.000.000,00
14	KEC. SUMBERGEMPOL	1	1.526.000.000,00	1	1.526.000.000,00
15	KEC. KALIDAWIR	3	171.334.000,00	3	171.334.000,00
16	KEC. PUCANGLABAN	3	144.700.000,00	3	144.700.000,00
17	SEKRETARIAT DPRD	2	2.413.000.000,00	2	2.413.000.000,00
18	DINAS PENDIDIKAN	425	69.278.544.978,00	429	68.599.532.978,00
19	DISPENDUKCAPIL	1	5.225.000.000,00	1	5.225.000.000,00
20	DINAS PUPR	1282	668.405.804.092,78	1.164	667.276.762.094,50
21	DINAS KOPERASI	2	1.918.000.000,00	2	1.918.000.000,00
22	DINAS PERTANIAN	19	5.886.146.327,00	19	5.886.146.327,00
23	DINAS KB, PP & PA	1	270.000.000,00	1	270.000.000,00
24	DISKOMINFO	4	346.936.000,00	4	346.936.000,00
25	KEC. BOYOLANGU	2	743.570.000,00	2	743.570.000,00
26	KEC. KAUMAN	3	2.477.920.000,00	3	2.477.920.000,00
27	KEC. GONDANG	2	154.880.000,00	2	154.880.000,00
28	KEC. PAGERWOJO	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00
29	KEC. KARANGREJO	1	2.053.000,00	1	2.053.000,00
30	KEC. SENDANG	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
31	DINAS NAKERTRANS	2	1.987.000.000,00	2	1.987.000.000,00
32	DINAS PERHUBUNGAN	3	28.586.788.201,00	3	28.586.788.201,00
33	DISPERINDAG	43	11.853.030.000,00	43	11.853.030.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
34	DINAS PERUMAHAN & KP	383	169.989.362.270,00	447	156.516.626.327,00
35	DINAS PERIKANAN	5	2.338.750.000,00	5	2.338.750.000,00
36	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6	34.081.794.311,72	5	25.616.234.984,00
37	BKPSDM	1	2.395.714.000,00	1	2.395.714.000,00
38	BPBD	1	291.000.000,00	1	291.000.000,00
39	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	39	11.204.449.221,00	39	11.204.449.221,00
40	KEC. NGANTRU	3	192.495.000,00	3	192.495.000,00
41	KEC. CAMPURDARAT	1	2.743.139.000,00	1	2.743.139.000,00
42	KEC. PAKEL	1	7.530.000,00	1	7.530.000,00
43	KEC. BANDUNG	1	655.000.000,00	1	655.000.000,00
44	KEC. BESUKI	1	530.130.000,00	1	530.130.000,00
45	KEC. TANGGUNGUNUNG	4	182.880.000,00	4	182.880.000,00
46	DINAS SOSIAL	3	381.500.000,00	3	381.500.000,00
	TOTAL	2.610	1.138.270.063.511,50	2.558	1.111.938.931.410,50

Aset tetap tanah sebesar 1.138.270.063.511,50 termasuk di dalamnya aset tetap tanah sebagai berikut.

- Aset tetap tanah yang masih dalam proses penelusuran atas status kepemilikannya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebanyak 5 bidang senilai Rp. 158.330.000,00
- Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan sebanyak 1299 bidang dan sebanyak 280 bidang tanah dalam proses sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Aset tetap tanah yang sebelumnya berdiri bangunan Kantor Koramil 0807/01 seluas 413 m² dan berlokasi di kelurahan Karangwaru. Aset tetap tanah tersebut merupakan bagian dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 5 tanggal 24 Mei 1983 dengan luas keseluruhan 40.280 m². Aset tetap tanah tersebut telah diakui dan dicatat sebagai aset tetap tanah milik Koramil 0807/01 berdasarkan hak okupasi. Atas kondisi tersebut telah dilakukan koordinasi dengan Kepala Staf Satuan Angkatan Darat sebagaimana surat terakhir nomor: 030/798/407.209/2022 pada tanggal 28 Juli 2022 namun sampai dengan saat ini belum diperoleh kepastian terkait status aset tetap tanah tersebut.

Selain itu pada aset tanah terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Tanah yang digunakan oleh Yayasan Universitas Tulungagung (Unita) belum tercatat pada daftar barang milik daerah karena ada beberapa permasalahan kepemilikan yaitu bahwa di atas tanah yang saat ini digunakan Yayasan Unita terdapat sertipikat hak milik atas nama RM. Sasongko. dkk (empat orang). Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah beberapa kali mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan ahli waris. tetapi sampai dengan saat ini ada beberapa ahli waris yang tidak mengakui adanya proses tukar menukar pada Tahun 1985 antara Pemkab Tulungagung dengan keluarga pada saat itu. Sebagai langkah pengamanan aset milik daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mengajukan Surat Pinjam Pakai kepada Yayasan Unita. tetapi tidak ada tindak lanjut dari pihak Yayasan Unita. Pihak Yayasan Unita mengajukan Permohonan Surat Keterangan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tanah yang ditempati Universitas Tulungagung tidak termasuk aset Pemerintah Kabupaten Tulungagung sebagaimana surat tanggal 23 Maret 2011 Nomor 004/YYS/III/2011, dengan mendasarkan pada Surat Bupati Tulungagung Nomor 1123/445.16/85 tanggal 9 September 1985 bahwa tanah seluas 31.000 m² diserahkan dengan hak pakai kepada Yayasan Unita. Pada tanggal 2 Desember 2013 Yayasan Unita mengirimkan surat kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung Nomor A/008/YYS/XII/2013 perihal permohonan hibah untuk Kampus Unita. Pemerintah Kabupaten Tulungagung menindaklanjuti surat tersebut dengan surat jawaban Nomor 900/782/209/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang intinya terhadap permintaan Yayasan Unita untuk menghibahkan tanah belum dapat dipenuhi.

- b) Tanah yang tercatat sebagai barang milik daerah pada BPKAD senilai Rp5.776.400.000.00 sesuai dengan hasil penilaian oleh kantor jasa penilai publik Immanuel Johnny & rekan Nomor 053/JR-JML/PA-V/2014 yang di atasnya berdiri Kompleks Pertokoan Belga yang sebelumnya merupakan aset kemitraan dengan PT PNA yang telah berakhir pada tanggal 24 September 2014. Sejak berakhirnya perjanjian dengan PT PNA, Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum mendapat kontribusi apapun.

Pembebanan kontribusi kepada pihak ketiga sebagai penghuni Kompleks Pertokoan Belga tersebut tidak dapat terlaksana karena belum adanya Berita Acara Penyerahan aset secara resmi dari PT PNA kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan belum adanya kesepakatan atau perjanjian baru antara penghuni Kompleks Pertokoan Belga dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk saat ini terkait aset tersebut masih dalam proses Kasasi dari Mahkamah Agung.

- c) Tanah yang tercatat sebagai barang milik daerah pada Dinas Perhubungan seluas 272.25 m² yang digunakan untuk pembangunan kios pengganti sesuai perjanjian kerjasama dengan PT TS Nomor 181/131A/013/2013 dan Nomor 63/PT.TS/II/2013 dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan tahun 2033. Perjanjian tersebut merupakan addendum dari Surat Perjanjian Nomor 644/356.a/424.22/1994 tanggal 4 Mei 1994.
- d) Nilai Aset Tanah sebesar Rp 1.139.929.504.183,78 sudah termasuk nilai tanah yang di atasnya dibangun jalan sebagaimana telah ditetapkan ruasnya dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/139/SK/014/1998 tanggal 4 Mei 1998 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan SK Bupati Tulungagung Nomor 188.45/130/013/2018 tanggal 20 Februari 2018.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
b. Peralatan dan Mesin	1.032.202.768.898,47	934.025.533.074,68

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah, dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 jumlah keseluruhan nilai peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan nilai sebesar Rp 98.177.235.823,79 atau sebesar 10,51%.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adapun mutasi aset peralatan dan mesin Tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	934.025.533.074,68
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	47.183.367.245,97	
Belanja Modal BOS	Rp	5.464.054.766,72	
Belanja Modal BLUD	Rp	79.741.680.683,50	
Belanja BTT	Rp	26.663.000,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	8.493.000,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	8.658.848.125,05	
Reklasifikasi Masuk	Rp	4.871.050.544,00	
Hibah Masuk	Rp	81.645.400,00	
		Rp	146.035.802.765,24
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(60.000.000,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	(8.658.848.125,05)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(12.375.000,03)	
Hibah Keluar	Rp	(576.390.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(38.550.953.816,37)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(47.858.566.941,45)
Saldo Akhir 2022		Rp	1.032.202.768.898,47

Adapun rincian nilai dan jenis aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 76 Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Alat Besar Darat	183	18.517.713.347,52	191	18.718.182.097,52
2	Alat Besar Apung	1	188.500.000,00	1	188.500.000,00
3	Alat Bantu	273	18.408.179.153,69	265	17.309.339.183,69
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.509	133.059.286.877,13	2.729	127.118.727.256,13
5	Alat Angkutan Tak Darat Bermotor	371	1.282.631.100,00	413	1.620.611.200,00
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	9	408.021.000,00	9	408.021.000,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	5	486.514.000,00	5	486.514.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	280	2.903.520.541,00	276	2.865.872.541,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	174	1.115.443.142,00	176	1.139.779.500,00
10	Alat Ukur	499	4.565.881.570,80	488	4.512.645.294,80
11	Alat Pengolah	420	3.502.109.721,60	435	3.399.612.266,60
12	Alat Kantor	5.336	39.795.626.216,94	5.393	38.289.276.961,94
13	Alat Rumah Tangga	22.498	113.696.249.469,19	22.372	105.115.164.367,97
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.975	9.934.386.756,14	1.877	9.649.990.351,00
15	Alat Studio	1.615	14.320.691.702,00	1.796	13.955.117.727,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Uraian	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
16	Alat Komunikasi	954	8.147.480.887,00	914	6.209.611.981,00
17	Peralatan pemancar	90	1.008.577.620,00	95	1.060.502.620,00
18	Alat Kedokteran	11.082	435.359.708.381,27	9.802	376.438.191.784,69
19	Alat Kesehatan Umum	50	513.362.374,00	30	155.201.999,00
20	Unit Alat Laboratorium	890	27.981.380.017,99	919	27.508.662.903,99
21	Alat Peraga Praktik Sekolah	1.216	25.190.995.945,67	1.191	25.137.053.945,67
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1	54.450.000,00	2	69.450.000,00
23	Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	5	133.681.300,00	5	133.681.300,00
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	6	28.450.000,00	6	28.450.000,00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	47	2.610.115.300,00	44	2.452.667.300,00
26	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	30	471.571.700,00	10	351.913.700,00
27	Persenjataan Non Senjata Api	37	185.526.850,00	39	207.526.850,00
28	Komputer Unit	15.581	119.915.440.073,65	14.862	110.001.906.762,72
29	Peralatan Komputer	6.985	43.030.754.523,22	6.952	34.762.902.810,83
30	Alat Pelindung	21	73.342.500,00	21	73.342.500,00
31	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	135	4.745.182.424,66	65	4.099.184.466,13
32	Peralatan OlahRaga	430	567.994.403,00	423	557.928.403,00
	TOTAL	73.708	1.032.202.768.898,47	71.806	934.025.533.074,68

Sedangkan uraian mutasi masing-masing jenis peralatan dan mesin sebagai berikut :

1) Alat Besar Darat

Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Besar Darat Pemerintah Kabupaten Tulungagung posisi per 31 Desember Tahun 2022 menurun sebesar Rp200.468.750,00 atau turun sebesar 1,07% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	18.718.182.097,52
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	22.644.000,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	4.745.250,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	19.000.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	46.389.250,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(19.000.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(227.858.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(246.858.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	18.517.713.347,52



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Alat-Alat Besar Darat terdiri dari:

Tabel 77 Rincian Mutasi Alat Besar Darat

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			22.644.000,00
2	Belanja Modal BLUD			
a	Dinas Kesehatan	Mesin Proses	4.745.250,00	
	Sub Total 2			4.745.250,00
3	Mutasi Masuk			
a	Dinas Perumahan dan KP	Mutasi dari Dinas PUPR-Hauler	4.000.000,00	
		Mutasi dari Dinas PUPR-Rock Drill	15.000.000,00	
	Sub Total 3			19.000.000,00
	Total Mutasi Tambah			46.389.250,00
4	Mutasi Keluar			
a	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan KP - Hauler	(4.000.000,00)	
		Mutasi dari Dinas Perumahan dan KP - Rock Drill	(15.000.000,00)	
	Sub Total 4			(19.000.000,00)
5	Reklasifikasi Keluar			
a	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(32.840.000,00)	
b	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(17.200.000,00)	
c	Dinas Lingkungan Hidup	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(100.000.000,00)	
d	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(77.818.000,00)	
	Sub Total 5			(227.858.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(246.858.000,00)

Adapun rincian alat besar darat per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Alat-Alat Besar Darat

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	2	11.845.250,00	1	7.100.000,00
2	DINAS PETERNAKAN	-	-	2	17.200.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	87	14.469.093.674,00	89	14.569.093.674,00
4	SATUAN POLISI PP	5	111.400.000,00	5	111.400.000,00
5	KEC.REJOTANGAN	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
6	DINAS PU PR	62	2.937.437.768,00	64	3.011.611.768,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	2	6.250.000,00	2	6.250.000,00
8	DISPERINDAG	1	279.840.000,00	1	279.840.000,00
9	DINAS PERIKANAN	19	614.353.624,52	24	647.193.624,52
10	DINAS PERUMAHAN DAN KP	2	19.000.000,00	-	-
11	BPBD	2	66.993.031,00	2	66.993.031,00
	TOTAL	183	18.517.713.347,52	191	18.718.182.097,52



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

2) Alat-Besar Apung

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat-alat Bantu Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 tidak mengalami meningkat ataupun penurunan atau sebesar Rp 188.500.000,00 yang dicatatkan pada Dinas Perikanan berupa 1 (satu) unit kapal pengawas.

3) Alat Bantu

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Bantu Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.098.839.970,00 atau naik sebesar 6,35% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	17.309.339.183,69
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	359.466.500,00	
Belanja BLUD	Rp	1.209.996.470,00	
Belanja BTT	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	2.151.536.975,05	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	320.000.000,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	4.040.999.945,05
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(2.151.536.975,05)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(790.623.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(2.942.159.975,05)
Saldo Akhir 2022		Rp	18.408.179.153,69

Mutasi Alat-Alat Bantu terdiri dari:

Tabel 79 Rincian Mutasi Alat-Alat Bantu

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			359.466.500,00
2	Belanja BLUD			
a	Dinas Kesehatan		1.209.996.470,00	
	Sub Total 2			1.209.996.470,00
3	Reklasifikasi Masuk			
a	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi dari Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya ke Electric Generating Set	320.000.000,00	
	Sub Total 3			320.000.000,00
4	Mutasi Masuk			
a	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan & KP-Transportable Water Pump	129.100.000,00	
b	DPMPSTP	Mutasi dari Sekretariat Daerah-Dynamo Electric	120.000.000,00	
c	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari Dinas PUPR-Transportable Water Pump	1.667.436.975,05	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Mutasi bertambah dari Dinas PUPR-Unit Alat Pengolahan Air Kotor	235.000.000,00	
	Sub Total 4			2.151.536.975,05
	Total Mutasi Tambah			4.040.999.945,05
5	Mutasi Keluar			
a	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi Ke Dinas PUPR-Transportable Water Pump	(129.100.000,00)	
b	Sekretariat Daerah	Mutasi ke DPMPSTP-Dynamo Electric	(120.000.000,00)	
c	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(1.667.436.975,05)	
		Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(235.000.000,00)	
	Sub Total 5			(2.151.536.975,05)
6	Reklas Keluar			
a	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain- Pompa	(1.000.000,00)	
b	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.750.000,00)	
c	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain- Portable Compressor	(2.995.000,00)	
d	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD-Toilet (Jasa Perencanaan Pembangunan Toilet)	(2.082.500,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Gudang (Jasa Perencanaan Gudang)	(3.357.500,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-IPAL(Belanja IPAL dan Perencanaan)	(106.875.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-IPAL(belanja ipal dan pelunasan)	(210.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-IPAL(Belanja IPAL dan Pengawasan)	(182.477.500,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-TOILET (Pembangunan Toilet dan Jasa Pengawas Toilet)	(59.942.500,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Gudang (Jasa Pengawas Gudang dan Pembangunan Gudang)	(95.942.500,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Pengadaan Air Bersih,Tandon Air,Pompa Air dan Instalasi Pustu	(54.700.000,00)	
e	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(56.500.000,00)	
	Sub Total 6			(790.623.000,00)
	Total Koreksi Kurang			(2.942.159.975,05)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adapun rincian alat-alat bantu per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 80 Rincian Alat-Alat Bantu

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	41	189.890.000,00	57	366.390.000,00
2	DINAS KESEHATAN	74	11.415.926.813,64	76	10.734.308.343,64
3	DINAS PETERNAKAN	8	154.778.900,00	11	161.528.900,00
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00
5	DPMPSTP	2	244.486.500,00	-	-
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46	337.360.500,00	46	337.360.500,00
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
8	BAPENDA	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
9	SATUAN POLISI PP	5	24.500.000,00	4	15.500.000,00
10	KEC. KEDUNGGARU	1	51.845.000,00	1	51.845.000,00
11	KEC. NGUNUT	1	1.290.000,00	1	1.290.000,00
12	SEKRETARIAT DPRD	1	320.000.000,00	-	-
13	DISPENDUKCAPIL	2	2.500.000,00	-	-
14	DINAS PU PR	6	175.916.700,00	23	1.949.253.675,05
15	DINAS KOPERASI	1	2.160.000,00	1	2.160.000,00
16	DINAS PERTANIAN	12	555.876.640,00	12	555.876.640,00
17	BAPPEDA	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
18	DISKOMINFO	2	967.162.000,00	2	967.162.000,00
19	DINAS NAKERTRANS	2	12.000.000,00	1	3.500.000,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	6	1.837.108.925,00	5	1.829.848.925,00
21	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	20	1.937.472.675,05	4	167.130.700,00
22	DINAS PERIKANAN	8	64.819.500,00	7	55.849.500,00
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	1	1.000.000,00
24	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	1.250.000,00	-	-
25	BPBD	21	65.935.000,00	2	65.935.000,00
26	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00
27	KEC. PAKEL	3	12.400.000,00	1	9.900.000,00
28	KEC. BANDUNG	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
29	KEC. BESUKI	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
	TOTAL	273	18.408.179.153,69	265	17.309.339.183,69

4) Alat Angkutan Darat Bermotor

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.940.559.621,00 atau naik sebesar 4,67%. dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	127.118.727.256,13
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	7.214.920.400	
Belanja Modal BLUD	Rp	1.120.024.000	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	5.642.987.000,00	
Hibah Masuk	Rp	67.000.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	14.044.931.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang

Penghapusan	Rp	(0,00)
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(5.642.987.000,00)
Reklas Keluar	Rp	(2.461.384.779,00)
Hibah Keluar	Rp	(0,00)

Jumlah Mutasi Kurang

Rp (8.104.371.779,00)

Saldo Akhir 2022

Rp 133.059.286.877,13

Mutasi Alat Angkutan Darat Bermotor terdiri dari:

Tabel 81 Rincian Mutasi Alat Angkutan Darat Bermotor

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			7.214.920.400
2	Belanja BLUD			1.120.024.000
3	Mutasi dari SKPD lain			
a	SATPOL PP	Mutasi dari BPKAD-Mobil-Kijang Innova AG 1329 Rp	314.500.000,00	
		Mutasi dari Sekretariat Daerah-TOYOTA RUSH	259.600.000,00	
		Mutasi dari Sekretariat Daerah-Yamaha ALL NEW AEROX 155 VVA CONNECTED	54.600.000,00	
b	BPKAD	Mutasi dari Dinkes - Mobil-Kijang Innova AG 1329 Rp	314.500.000,00	
		Mutasi dari Dinkes - Mobil-Kijang Innova AG 1327 Rp	338.200.000,00	
		Mutasi dari Dinkes - Mobil-Kijang Innova AG 1321 Rp	338.200.000,00	
		Mutasi dari Dinkes - Mobil-Kijang Innova AG 1308 Rp	406.400.000,00	
		Mutasi dari Dinkes - Mobil-Kijang Innova AG 1330 Rp	338.200.000,00	
c	Kecamatan Kalidawir	Mutasi dari BPKAD-Sepeda Motor	11.497.000,00	
d	Kecamatan Rejotangan	Mutasi dari Sekretariat Daerah-Honda NF 100TD	9.400.000,00	
		Mutasi dari Sekretariat Daerah-Honda MCB 97 Win	10.500.000,00	
e	Kecamatan Pucanglaban	Mutasi dari BPKAD-Sepeda Motor	12.000.000,00	
f	Kecamatan Pagerwojo	Mutasi dari Dinas KB-Sepeda Motor	13.100.000,00	
		Mutasi dari Dinas KB-Sepeda Motor	13.750.000,00	
g	DLH	Mutasi dari BPKAD-Mobil-Kijang Innova AG 1327 Rp	338.200.000,00	
h	Inspektorat	Mutasi dari BPKAD-Mobil-Toyota Avansa AG 1184 Rp	152.600.000,00	
i	Sekretariat Daerah	Mutasi dari KB-Honda / NF 125TD	13.100.000,00	
		Mutasi dari KB-Honda / NF 125TD	13.100.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Mutasi dari BPKAD-Suzuki RC 100	5.500.000,00	
		Mutasi dari BPKAD-Toyota Kijang Innova	338.200.000,00	
		Mutasi dari BPKAD-Toyota Kijang Innova	406.400.000,00	
		Mutasi dari BPKAD-Kawasaki KLX	28.520.000,00	
		Mutasi dari Kecamatan Ngantru-Honda Revo	11.497.000,00	
		Mutasi dari Dinas Koperasi-Chevrolet Captiva	310.474.500,00	
		Mutasi dari KB-Honda / NF 125TD	13.100.000,00	
j	Dinas PUPR	Mutasi dari BPKAD-Mobil-Daihatsu L8014	40.000.000,00	
		Mutasi dari Kec.Ngantru-Sepeda Motor Suzuki TRS	2.000.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan-Sepeda Motor	410.867.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan-Bemo	111.160.000,00	
k	DPMPSTP	Mutasi dari Dinas Perhubungan-TOYOTA KJG INNOVA G XW42	255.420.000,00	
l	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mutasi dari KB-Sepeda Motor	13.100.000,00	
		Mutasi dari KB-Sepeda Motor	13.100.000,00	
m	Kecamatan Ngantru	Mutasi dari BPKAD-Sepeda Motor	11.000.000,00	
		Mutasi dari BPKAD-Sepeda Motor	11.500.000,00	
n	Dinas Koperasi dan UM	Mutasi bertambah dari DLH-Chaevrolet Cartiva	310.474.500,00	
o	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari PUPR-Mobil Pick Up	7.327.000,00	
		Mutasi bertambah dari PUPR-Sepeda Motor	27.500.000,00	
p	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mutasi bertambah dari Dinas KBPPPA-Sepeda Motor	13.100.000,00	
		Mutasi bertambah dari Dinas KBPPPA-Sepeda Motor	13.100.000,00	
q	Dinas Perhubungan	Mutasi dari BPKAD-Mobil-Kijang Innova AG 1330 Rp	338.200.000,00	
	Sub Total 3			5.642.987.000,00
4	Hibah Masuk			
a	Dinas Perikanan	Hibah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim-Pick Up	67.000.000,00	
	Sub Total 4			67.000.000,00
	Total mutasi tambah			14.044.931.400,00
5	Mutasi ke SKPD lain			
a	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-Colt Pick Up	(7.327.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-	(27.500.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
b	BPKAD	Mutasi ke Kecamatan Kalidawir-Sepeda Motor	(11.497.000,00)	
		Mutasi ke Sekretariat Daerah -Sepeda Motor	(28.520.000,00)	
		Mutasi ke Sekretariat Daerah-Sepeda Motor	(5.500.000,00)	
		Mutasi ke Kecamatan Pucanglaban-Sepeda Motor	(12.000.000,00)	
		Mutasi ke Kecamatan Ngantru-Sepeda Motor	(11.500.000,00)	
		Mutasi ke Kecamatan Ngantru-Sepeda Motor	(11.000.000,00)	
		Mutasi ke Inspektur-Mobil-Toyota Avansa AG 1184 Rp	(152.600.000,00)	
		Mutasi ke Dinas PUPR-Mobil-Daihatsu L8014	(40.000.000,00)	
		Mutasi ke Satpol PP-Mobil-Kijang Innova AG 1329 Rp	(314.500.000,00)	
		Mutasi ke DLH-Mobil-Kijang Innova AG 1327 Rp	(338.200.000,00)	
		Mutasi ke Sekretariat Daerah-Mobil-Kijang Innova AG 1321 Rp	(338.200.000,00)	
		Mutasi ke Sekretariat Daerah-Mobil-Kijang Innova AG 1308 Rp	(406.400.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perhubungan-Mobil-Kijang Innova AG 1330 Rp	(338.200.000,00)	
c	DLH	Mutasi ke Dinkop-Mobil-Captiva AG	(310.474.500,00)	
d	Sekretariat Daerah	Mutasi ke Kecamatan Rejotangan-Honda NF 100TD	(9.400.000,00)	
		Mutasi ke Kecamatan Rejotangan-Honda MCB 97 Win	(10.500.000,00)	
		Mutasi Ke Satpol PP-Yamaha AEROX	(27.300.000,00)	
		Mutasi Ke Satpol PP-Yamaha AEROX	(27.300.000,00)	
		Mutasi Ke Satpol PP-Toyota Rush	(259.600.000,00)	
e	Kecamatan Ngantru	Mutasi ke Sekretariat Daerah-Sepeda Motor	(11.497.000,00)	
		Mutasi ke Dinas PUPR-Sepeda motor	(2.000.000,00)	
f	Dinas KB, PP & PA	Mutasi ke Kecamatan Pagerwojo-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	
		Mutasi ke Kecamatan Pagerwojo-Sepeda Motor	(13.750.000,00)	
		Mutasi ke Sekretariat Daerah-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	
		Mutasi ke Sekretariat Daerah-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Mutasi ke Dinas Perpustakaan-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perpustakaan-Sepeda Motor	(13.100.000,00)	
		Mutasi Berkurang ke Sekretariat Daerah-Sepeda motor	(13.100.000,00)	
g	Dinas Koperasi dan UM	Mutasi berkurang ke Sekretariat Daerah-Chaevrolet Cartiva	(310.474.500,00)	
h	Dinas Perhubungan	Mutasi Ke DPMTSP-TOYOTA KJG INNOVA G XW42	(255.420.000,00)	
i	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi Ke PUPR-Sepeda Motor	(410.867.000,00)	
		Mutasi Ke PUPR-Bemo	(111.160.000,00)	
j	Dinas Kesehatan	Mutasi ke BPKAD-Mobil Inova AG 1327 RP	(338.200.000,00)	
		Mutasi ke BPKAD-Mobil Inova AG 1321 RP	(338.200.000,00)	
		Mutasi ke BPKAD-Mobil Inova AG 1329 RP	(314.500.000,00)	
		Mutasi ke BPKAD-Mobil Inova AG 1330 RP	(338.200.000,00)	
		Mutasi ke BPKAD-Mobil Inova AG 1308 RP	(406.400.000,00)	
	Sub Total 5			(5.642.987.000,00)
6	Reklas Keluar			
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.000.000,00)	
b	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(21.250.000,00)	
c	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(43.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(98.422.000,00)	
d	Kecamatan Bandung	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.900.000,00)	
e	DPMD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.200.000,00)	
f	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(46.570.000,00)	
g	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(44.750.000,00)	
h	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(20.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(17.000.000,00)	
i	KECAMATAN BESUKI	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	
j	BKPSDM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(31.850.000,00)	
k	KECAMATAN KALIDAWIR	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.500.000,00)	
l	BAPENDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.000.000,00)	
m	Kecamatan Ngantru	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.400.000,00)	
n	Dinas KB	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.750.000,00)	
o	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
p	Kecamatan Rejotangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.000.000,00)	
q	Dinas Komunikasi dan Informatika	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.500.000,00)	
r	Kecamatan Pucanglaban	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.200.000,00)	
s	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(103.000.000,00)	
t	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(235.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(87.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(159.606.779,00)	
u	Inspektorat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(60.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	
v	Kecamatan Campurdarat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.044.000,00)	
w	Kecamatan Ngunut	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(12.000.000,00)	
x	Kecamatan Pakel	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(14.800.000,00)	
y	Kecamatan Sumbergempol	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.000.000,00)	
z	Kecamatan Kauman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.000.000,00)	
aa	Kecamatan Boyolangu	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.000.000,00)	
ab	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(117.980.000,00)	
ac	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(5.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(208.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(115.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(15.750.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(97.310.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(31.000.000,00)	
ad	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(527.370.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(71.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(87.340.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.062.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(34.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
ae	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.330.000,00)	
	Sub Total 6			(2.461.384.779,00)
	Total Mutasi Kurang			(8.104.371.779,00)

Saldo angkutan darat bermotor sebesar Rp 133.059.286.877,13 termasuk didalamnya kendaraan bermotor yang belum diproses TPTGR sejumlah 23 kendaraan dengan rincian Kecamatan Karangrejo 1 unit, Bagian Umum 2 unit, BKPSDM 1 unit, Dinas Sosial 1 unit dan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga 18 unit.

Adapun rincian alat angkutan darat bermotor per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 82 Rincian Alat Angkutan Darat Bermotor

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	146	16.582.790.593,00	193	16.506.771.093,00
2	DINAS KESEHATAN	465	31.802.129.688,70	499	31.162.265.688,70
3	DINAS PETERNAKAN	45	1.390.656.820,00	35	1.108.383.020,00
4	BPKAD	47	5.345.521.500,00	47	2.776.738.500,00
5	INSPEKTORAT	15	801.840.000,00	16	713.240.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	23	909.111.000,00	25	917.311.000,00
7	DBMPTSP	26	1.136.587.000,00	25	881.167.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81	11.428.041.381,00	100	10.419.595.060,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	21	1.364.073.200,00	19	1.337.873.200,00
10	BAPENDA	53	1.351.552.000,00	54	1.358.552.000,00
11	SATUAN POLISI PP	35	6.048.698.596,00	27	5.275.998.596,00
12	KEC. KEDUNGWARU	47	780.835.500,00	47	780.835.500,00
13	KEC. NGUNUT	43	736.343.000,00	44	748.343.000,00
14	KEC. REJOTANGAN	40	677.330.500,00	39	667.430.500,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	40	693.734.500,00	41	702.734.500,00
16	KEC. KALIDAWIR	40	735.264.500,00	40	691.267.500,00
17	KEC. PUCANGLABAN	27	536.977.000,00	26	489.177.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	41	3.909.002.500,00	41	3.909.002.500,00
19	DINAS PENDIDIKAN	42	1.076.390.000,00	117	1.194.370.000,00
20	DISPENDUKCAPIL	15	1.872.111.500,00	15	1.872.111.500,00
21	DINAS PU PR	88	3.566.798.071,43	53	2.980.309.071,43
22	DINAS KOPERASI	26	993.189.500,00	28	1.001.189.500,00
23	DINAS PERTANIAN	101	2.874.760.600,00	104	2.919.510.600,00
24	BAPPEDA	56	2.880.720.700,00	62	2.927.290.700,00
25	DINAS KB, PPPA	125	4.526.130.000,00	137	4.648.430.000,00
26	BADAN KESBANGPOL	23	758.113.200,00	27	795.113.200,00
27	DISKOMINFO	36	1.006.479.000,00	36	1.016.979.000,00
28	KEC. BOYOLANGU	42	695.489.000,00	43	698.489.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA PEROLEHAN
29	KEC. KAUMAN	32	582.101.500,00	33	589.101.500,00
30	KEC. GONDANG	49	816.288.000,00	49	816.288.000,00
31	KEC. PAGERWOJO	33	598.835.000,00	30	534.985.000,00
32	KEC. KARANGREJO	33	587.143.000,00	33	587.143.000,00
33	KEC. SENDANG	30	574.935.000,00	29	537.935.000,00
34	DINAS NAKERTRANS	10	1.044.957.000,00	31	1.186.379.000,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	35	6.513.154.060,00	44	6.533.374.060,00
36	DISPERINDAG	59	1.545.558.500,00	58	1.130.758.500,00
37	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	39	1.608.543.200,00	73	2.095.743.200,00
38	DINAS PERIKANAN	49	2.109.542.000,00	48	2.042.542.000,00
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	26	1.044.001.000,00	23	953.001.000,00
40	BKD	14	572.770.000,00	18	604.620.000,00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	35	1.346.313.000,00	37	1.367.563.000,00
42	BPBD	25	2.746.505.567,00	25	2.746.505.567,00
43	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	40	697.253.000,00	40	697.253.000,00
44	KEC. NGANTRU	33	600.670.000,00	34	599.067.000,00
45	KEC. CAMPURDARAT	25	488.568.500,00	27	501.812.500,00
46	KEC. PAKEL	44	749.235.500,00	46	764.035.500,00
47	KEC. BANDUNG	42	717.992.200,00	44	728.892.200,00
48	KEC. BESUKI	28	542.116.500,00	29	546.116.500,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	21	465.710.500,00	20	428.710.500,00
50	DINAS SOSIAL	18	626.423.000,00	18	626.423.000,00
	TOTAL	2.509,00	133.059.286.877,13	2.729	127.118.727.256,13

5) **Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 turun sebesar Rp.337.980.100,00 atau turun sebesar (20,86%). dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	1.620.611.200,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	164.310.000,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	29.589.500,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	39.738.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	17.760.000,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	251.397.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang

Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(39.738.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(549.639.600,00)	
Koreksi keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(589.377.600,00)	
Saldo Akhir 2022	Rp	1.282.631.100,00	

Tabel 83 Rincian Mutasi Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			164.310.000,00
2	Belanja BLUD			29.589.500,00
3	Mutasi dari SKPD Lain			
a	Dinas Lingkungan Hidup	Mutasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan-Container Dolly	39.738.000,00	
	Sub Total 3			39.738.000,00
4	Reklas Masuk			
a	Dinas PUPR	Reklasifikasi dari Persediaan-Gerobak Dorong	17.760.000,00	
	Sub Total 4			17.760.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah			251.397.500,00
5	Mutasi ke SKPD Lain			
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mutasi Keluar ke DLH-Container	(39.738.000,00)	
	Sub Total 5			(39.738.000,00)
6	Reklas Keluar			
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke Extracomp-Kereta Sorong (Artco)	(12.432.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomp-Kereta Sorong (Artco)	(15.540.000,00)	
b	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Extracomp-Gerobak Barang PKM Kedungwaru	(800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomp-Gerobak Barang PKM Kedungwaru	(850.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomp-Arko PKM Kedungwaru	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain (RSUD Iskak)	(5.775.000,00)	
c	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi ke Extracomp-Gerobak Sampah	(400.000,00)	
d	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(358.765.000,00)	
e	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(153.577.600,00)	
	Sub Total 6			(549.639.600,00)
	Total Mutasi Keluar			(589.377.600,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adapun rincian Alat Angkutan Darat Tak Bermotor per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 84 Rincian Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	53	127.836.600,00	78	107.172.100,00
2	DINAS PETERNAKAN	2	5.250.000,00	2	5.250.000,00
3	BPKAD	1	3.360.000,00	1	3.360.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	134	488.265.200,00	164	602.104.800,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00
6	KEC. KEDUNGWARU	1	3.150.000,00	1	3.150.000,00
7	KEC. KALIDAWIR	1	3.883.000,00	1	3.883.000,00
8	DINAS PENDIDIKAN	12	35.915.300,00	12	35.915.300,00
9	DINAS PUPR	16	17.760.000,00	-	-
10	DISPERINDAG	98	406.045.000,00	106	718.190.000,00
11	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	7	24.840.000,00	6	20.840.000,00
12	DINAS PERIKANAN	27	72.151.000,00	27	72.151.000,00
13	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3,00	7.830.000,00	-	-
14	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	13	78.345.000,00	12	40.595.000,00
	TOTAL	371	1.282.631.100,00	413	1.620.611.200,00

6) Alat Angkutan Apung Bermotor

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai alat angkut apung bermotor per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Nilai alat angkut apung bermotor adalah sebesar Rp408.021.000,00 yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 152.150.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 255.871.000,00.

7) Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

Dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021, nilainya Alat Angkut Apung Tak Bermotor per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan, dengan nilai Rp486.514.000,00. Seluruh aset alat angkut tersebut tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

8) Alat Bengkel Bermesin

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, Alat Bengkel Bermesin Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.37.648.000,00 atau sebesar 1,31% dengan rincian mutasi Alat Bengkel Bermesin terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	2.865.872.541,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	47.223.000,00	
Mutasi Masuk	Rp	25.000.000,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	72.223.000,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi Keluar	Rp	(25.000.000,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(9.575.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang			(34.575.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	2.903.520.541,00

Tabel 85 Rincian Mutasi Alat Bengkel Bermesin

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			47.223.000,00
2	Mutasi Masuk			
	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman-Mesin Gergaji	25.000.000,00	
	Sub Total 2			25.000.000,00
	Total Mutasi Masuk			72.223.000,00
3	Mutasi Keluar			
a	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi ke Dinas PUPR - Mesin Gergaji	(25.000.000,00)	
	Sub Total 3			(25.000.000,00)
4	Reklas Keluar			
a	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.750.000,00)	
b	Dinas Komunikasi dan Informatika	Reklasifikasi ke Extracomptable	(825.000,00)	
c	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(5.000.000,00)	
	Sub Total 4			(9.575.000,00)
	Total Mutasi Keluar			(34.575.000,00)

Adapun rincian alat bengkel bermesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 86 Rincian Alat Bengkel Bermesin

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	11	166.672.591,00	12	171.672.591,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29	134.079.550,00	29	134.079.550,00
3	SATUAN POLISI PP	6	13.570.000,00	6	13.570.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN	2	1.321.675.000,00	2	1.321.675.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
5	DINAS PU PR	21	115.850.000,00	10	44.452.000,00
6	KEC. SENDANG	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00
7	DINAS NAKERTRANS	181	1.033.558.400,00	181	1.033.558.400,00
8	DINAS PERHUBUNGAN	1	8.750.000,00	1	8.750.000,00
9	DISPERINDAG	21	81.140.000,00	21	81.140.000,00
10	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	1	5.000.000,00	6	30.000.000,00
11	DINAS PERIKANAN	3	7.500.000,00	4	11.250.000,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	1.475.000,00	1	1.475.000,00
13	BPBD	2	6.250.000,00	2	6.250.000,00
	TOTAL	280	2.903.520.541,00	276	2.865.872.541,00

9) **Alat Bengkel Tak Bermesin**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Bengkel Tak Bermesin Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp24.336.358,00 atau (2,14%) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022 **Rp 1.139.779.500,00**

Mutasi Tambah

Belanja Modal	Rp	35.604.000,00
Belanja Modal BLUD	Rp	19.097.395,00
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00
Hibah Masuk	Rp	0,00

Jumlah Mutasi Tambah **Rp 54.701.395,00**

Mutasi Kurang

Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(79.037.753,00)
Hibah Keluar	Rp	(0,00)

Jumlah Mutasi Kurang **Rp (79.037.753,00)**

Saldo Akhir 2022 **Rp 1.115.443.142,00**

Tabel 87 Rincian Mutasi Alat Bengkel Tak Bermesin

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			35.604.000,00
2	Belanja Modal BLUD			19.097.395,00
	Total Mutasi Masuk			54.701.395,00
3	Reklas Keluar			
a	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain-Perkakas Bangku Kerja	(10.000.000,00)	
b	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(2.000.000,00)	
c	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklas ke Persediaan Bansos yang	(35.604.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Direncanakan Kepada Masyarakat-Mesin Penggiling Tanah		
d	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain-Alat Pencetak Marka	(18.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain-Tool Kit Set	(5.000.000,00)	
e	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset lain-lain-Tripod	(4.400.000,00)	
f	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Extracomptable	(3.333.753,00)	
	Sub Total 4			(79.037.753,00)
	Total Mutasi Keluar			(79.037.753,00)

Adapun rincian alat bengkel tak bermesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 88 Rincian Alat Bengkel Tak Bermesin

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	8.300.000,00	1	8.300.000,00
2	DINAS KESEHATAN	24	120.350.392,00	24	104.586.750,00
3	DPMPSTP	2	3.556.000,00	2	3.556.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19	67.485.750,00	19	67.485.750,00
5	SATUAN POLISI PP	4	4.800.000,00	4	4.800.000,00
6	DINAS PENDIDIKAN	3	8.230.000,00	3	8.230.000,00
7	DINAS PU PR	28	127.975.000,00	28	127.975.000,00
8	DINAS PERTANIAN	2	8.250.000,00	2	8.250.000,00
9	DINAS NAKERTRANS	75	642.201.000,00	75	642.201.000,00
10	DINAS PERHUBUNGAN	6	62.050.000,00	9	85.750.000,00
11	DISPERINDAG	7	34.845.000,00	7	34.845.000,00
12	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	-	-	1	4.400.000,00
13	DINAS PERIKANAN	3	27.400.000,00	4	29.400.000,00
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	1	10.000.000,00
	TOTAL	174	1.115.443.142,00	180	1.139.779.500,00

10) Alat Ukur

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Ukur Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp53.236.276,00 atau naik sebesar 1,18% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	4.512.645.294,80
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	94.242.330,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	36.545.313,50	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	100.298.250,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	231.085.893,50
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(100.298.250,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Reklas keluar	Rp	(77.551.367,50)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(177.849.617,50)
Saldo Akhir 2022		Rp	4.565.881.570,80

Tabel 89 Rincian Mutasi Alat Ukur

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			94.242.330,00
2	Belanja BLUD			36.545.313,50
3	Mutasi dari SKPD Lain			
a	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan-THEODOLIT	49.775.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan-Top con (THEODOLIT)	22.773.250,00	
b	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR-Survey Meter (Alat Ukur Universal) dan Temperatur Digital	27.750.000,00	
	Sub Total 3			100.298.250,00
	Total Mutasi Masuk			231.085.893,50
4	Mutasi Keluar			
a	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi Ke PUPR-THEODOLIT	(49.775.000,00)	
		Mutasi Ke PUPR-Top con (THEODOLIT)	(22.773.250,00)	
b	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-GPS (alat ukur koordinat)	(7.750.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(20.000.000,00)	
	Sub Total 4			(100.298.250,00)
5	Reklas Keluar			
a	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Timbangan	(4.500.000,00)	
b	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.500.000,00)	
c	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.000.000,00)	
d	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Global Positioning System	(18.440.000,00)	
e	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Extracomptable-	(900.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Thermohygrometer HTC2 PKM Ngunut		
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(11.575.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Thermometer Gun PKM Ngunut	(17.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Thermogun PKM Campurdarat	(4.329.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Termometer Infrared Telinga, dahi @Ki8176	(2.099.287,50)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Infrared Thermometer RS Campurdarat	(808.080,00)	
	Sub Total 5			(77.551.367,50)
	Total Mutasi Keluar			(177.849.617,50)

Adapun rincian alat ukur per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Alat Ukur per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	8	27.536.000,00	8	27.536.000,00
2	DINAS KESEHATAN	212	441.672.780,00	212	441.430.754,00
3	DINAS PETERNAKAN	9	62.160.000,00	10	66.660.000,00
4	BPKAD	3	27.950.000,00	3	27.950.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	227.480.000,00	10	227.480.000,00
6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00
7	BAPENDA	7	26.394.000,00	7	26.394.000,00
8	KEC. SUMBERGEMPOL	2	2.700.000,00	2	2.700.000,00
9	DINAS PENDIDIKAN	5	8.867.500,00	3	8.867.500,00
10	DISPENDUKCAPIL	3	5.700.000,00	3	5.700.000,00
11	DINAS PU PR	32	487.205.250,00	31	423.648.000,00
12	DINAS KOPERASI	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00
13	DINAS PERTANIAN	37	143.625.250,00	22	68.950.000,00
14	BAPPEDA	5	26.500.000,00	6	34.500.000,00
10	DISKOMINFO	5	33.600.000,00	5	33.600.000,00
11	DINAS NAKERTRANS	1	6.950.000,00	1	6.950.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	18	2.204.222.840,80	18	2.204.222.840,80
13	DISPERINDAG	35	487.212.500,00	35	487.212.500,00
14	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	66	218.767.850,00	69	282.006.100,00
15	DINAS PERIKANAN	20	87.972.600,00	22	97.472.600,00
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00
17	BKPSDM	1	2.260.000,00	1	2.260.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
18	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	15.075.000,00	6	15.075.000,00
19	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	1	1.680.000,00	1	1.680.000,00
20	KEC. CAMPURDARAT	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00
	TOTAL	499	4.565.881.570,80	488	4.512.645.294,80

11) Alat Pengolahan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Pengolahan Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 meningkat sebesar Rp 102.497.455,00 atau naik sebesar 3,01%. dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	3.399.612.266,60
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	212.527.305,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	46.955.000,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	49.100.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah			308.582.305,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(49.100.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(156.984.850,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang			(206.084.850,00)
Saldo Akhir 2022			3.502.109.721,60

Tabel 91 Rincian Mutasi Alat Pengolah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			212.527.305,00
2	Belanja BLUD			46.955.000,00
3	Mutasi Masuk			
a	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.100.000,00	
	Sub Total 3			49.100.000,00
	Total Mutasi Tambah			308.582.305,00
4	Mutasi Keluar			
a	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi ke Dinas PUPR	(49.100.000,00)	
	Sub Total 4			(49.100.000,00)
	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.000.000,00)	
	DPMD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(5.000.000,00)	
	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(12.000.000,00)	
	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(20.000.000,00)	
	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.700.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(42.835.000,00)	
	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(19.107.000,00)	
	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(53.342.850,00)	
	Sub Total 4			(156.984.850,00)
	Total Mutasi Keluar			(206.084.850,00)

Adapun rincian alat pengolah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Alat Pengolah per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	23	99.991.256,00	20	53.036.256,00
2	DINAS PETERNAKAN	54	446.420.305,00	43	322.198.000,00
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	3	17.250.000,00	5	22.250.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79	764.453.150,00	109	863.738.000,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	2.500.000,00	2	2.500.000,00
6	SEKRETARIAT DPRD	1	3.095.000,00	-	-
7	DINAS PENDIDIKAN	90	317.150.400,00	90	317.150.400,00
8	DINAS PU PR	10	102.460.000,00	5	13.400.000,00
9	DINAS PERTANIAN	19	504.496.199,60	23	524.496.199,60
10	DISKOMINFO	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
11	DINAS NAKERTRANS	5	11.750.000,00	5	11.750.000,00
12	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	1	2.700.000,00
13	DISPERINDAG	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00
14	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	4	19.998.000,00	5	69.098.000,00
15	DINAS PERIKANAN	119	1.127.185.411,00	116	1.109.935.411,00
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	2.000.000,00	2	4.000.000,00
17	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	5	69.260.000,00	4	69.260.000,00
18	KEC. NGANTRU	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
19	DINAS SOSIAL	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00
	TOTAL	420	3.502.109.721,60	435	3.399.612.266,60

12) Alat Kantor

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Kantor Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.506.349.255,00 atau naik sebesar 3,93% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022	Rp	38.289.276.961,94
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp	1.261.593.910,60
Belanja BLUD	Rp	1.308.260.870,00
Belanja BOS	Rp	605.606.542,00
Koreksi Pencatatan	Rp	1.100.000,00
Mutasi dari SKPD lain	Rp	128.629.400,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	203.561.457,00
Hibah Masuk	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah		3.508.752.179,60
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp	(0,00)
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(128.629.400,00)
Hibah Keluar	Rp	(6.900.000,00)
Reklas Keluar	Rp.	(1.866.873.524,60)
Jumlah Mutasi Kurang		(2.002.402.924,60)
Saldo Akhir 2022		39.795.626.216,94

Mutasi Alat Kantor terdiri dari:

Tabel 93 Rincian Mutasi Alat Kantor

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			1.261.593.910,60
2	Belanja BLUD			1.308.260.870,00
3	Belanja BOS			605.606.542,00
4	Koreksi Pencatatan			
a	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koreksi Nilai Bertambah sebab Reklas dari Aset Lain-Lain ke Alat Kantor- Almari Perpustakaan	1.100.000,00	
	Sub Total 4			1.100.000,00
5	Mutasi Masuk			
a	DPMPSTP	Mutasi dari BKPSDM-Mesin Absensi	5.960.000,00	
b	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR-Papan Pengumuman (White Board)	3.270.000,00	
c	Sekretariat Daerah	Mutasi dari BKPSDM-Mesin Absensi	5.960.000,00	
d	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	50.605.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman-Mesin Absensi & Alat Penghancur Kertas	62.834.400,00	
	Sub Total 5			128.629.400,00
6	Reklas Masuk			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD-Almari Sandwich Panel	102.440.457,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Rak besar	26.085.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi Aset BLUD-Rak kecil	8.547.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Lemari loker	9.102.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Loker	52.170.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Rak custom	5.217.000,00	
	Sub Total 6			203.561.457,00
	Total Mutasi Tambah			3.508.752.179,60
7	Mutasi Keluar			
a	BKPSDM	Mutasi ke Sekretariat Daerah-Mesin Absensi	(5.960.000,00)	
		Mutasi ke DPMPSTSP-Finger Print	(5.960.000,00)	
b	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi ke Dinas PUPR	(50.605.000,00)	
		Mutasi ke Dinas PUPR-Mesin Absensi & Alat Penghancur Kertas	(62.834.400,00)	
c	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-White Board Standart	(3.270.000,00)	
	Sub Total 7			(128.629.400,00)
8	Hibah Keluar			
a	Dinas KB, PP & PA	Hibah ke Desa-Rak Kayu	(4.500.000,00)	
		Hibah ke Desa-Papan Struktur	(2.400.000,00)	
	Sub Total 8			(6.900.000,00)
9	Reklas Keluar			
a	DPMPSTSP	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	(2.210.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Hitung Manual	(7.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(31.947.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(48.680.000,00)	
b	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Filling Cabinet	(4.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Triport	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Filling Cabinet	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Roll Opek	(8.475.000,00)	
c	DPMD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Etalase	(5.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Papan Data	(2.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.750.000,00)	
d	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(54.510.000,00)	
e	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Almari Perpustakaan	(1.100.000,00)	
f	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.500.000,00)	
g	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Komputer Notebook	(9.955.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Komputer Notebook	(4.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Pengadaan Meja rapat	(4.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Sofa / Kursi Tamu	(3.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Rapat	(7.250.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Kerja	(5.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Almari	(4.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Kerja	(4.840.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kulkas display	(2.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kulkas	(4.990.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Pendingin (AC)	(6.100.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Pendingin AC	(6.100.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Brankas	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Brankas	(3.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(210.083.000,00)	
h	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.687.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(26.900.000,00)	
i	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(11.480.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(21.118.200,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(24.643.500,00)	
j	BKPSDM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(13.400.000,00)	
k	BPKAD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.100.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.025.000,00)	
l	BAPENDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.125.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(29.010.500,00)	
m	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Hitung	(37.620.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Papan Nama	(11.660.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Penghancur Kertas	(3.025.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Papan Pengumuman	(17.600.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Papan Pengumuman	(3.400.000,00)	
n	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Lemari Besi/Metal & Peti Uang	(7.064.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
o	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Conservation Tools	(32.480.000,00)	
p	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Ketik	(2.500.000,00)	
q	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(24.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(103.775.000,00)	
r	Kecamatan Gondang	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Ketik	(3.000.000,00)	
s	Kecamatan Ngunut	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.400.000,00)	
t	Kecamatan Pakel	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(11.250.000,00)	
u	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Filing Cabinet Besi	(13.528.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Penghancur Kertas	(7.100.000,00)	
v	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR	Reklasifikasi ke Extracomptable	(1.994.670,00)	
		Reklasifikasi Modal BOS SD ke Extracomptable	(203.847.080,00)	
		Reklasifikasi Modal BOS SMP ke Extracomptable	(72.369.750,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(35.816.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(54.810.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.520.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(79.755.320,00)	
		Reklasifikasi Modal BOP PAUD ke Extracomptable	(550.000,00)	
w	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Extracomptable-Detector Uang RS Campurdarat	(3.725.004,60)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(29.525.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(19.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable	(4.720.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(28.380.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.845.000,00)	
x	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Filling Besi/Metal	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(235.350.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(76.950.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.895.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.800.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.650.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(5.600.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(13.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(44.434.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.455.000,00)	
	Sub Total 9			(1.866.873.524,60)
	Total Mutasi Kurang			(2.002.402.924,60)

Adapun rincian alat kantor per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Alat kantor per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	143	751.490.900,00	228	1.049.164.900,00
2	DINAS KESEHATAN	1.001	10.415.530.508,00	1.001	8.796.227.181,00
3	DINAS PETERNAKAN	82	339.193.800,00	132	576.951.800,00
4	BPKAD	152	552.771.250,00	152	536.796.250,00
5	INSPEKTORAT	9	42.804.300,00	9	42.804.300,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	32	222.069.300,00	37	232.819.300,00
7	DBMPTSP	48	348.692.800,00	56	269.441.300,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	178	680.283.400,00	196	808.958.400,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	306	1.125.638.800,00	310	1.075.546.300,00
10	BAPENDA	93	822.830.800,00	99	846.621.300,00
11	SATUAN POLISI PP	46	243.025.328,00	46	243.025.328,00
12	KEC. KEDUNGWARU	10	93.001.500,00	9	89.094.300,00
13	KEC. NGUNUT	7	16.272.300,00	10	27.172.300,00
14	KEC. REJOTANGAN	10	78.404.300,00	10	78.404.300,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	6	62.659.300,00	6	62.659.300,00
16	KEC. KALIDAWIR	8	83.066.800,00	7	72.410.800,00
17	KEC. PUCANGLABAN	7	76.004.300,00	5	36.204.300,00
18	SEKRETARIAT DPRD	52	397.785.450,00	48	393.607.450,00
19	DINAS PENDIDIKAN	1.467	14.872.016.373,74	1.406	14.711.110.395,74
20	DISPENDUKCAPIL	107	881.540.300,00	110	930.045.300,00
21	DINAS PU PR	135	568.692.700,00	75	390.588.300,00
22	DINAS KOPERASI	43	318.028.300,00	45	325.092.300,00
23	DINAS PERTANIAN	97	356.407.840,00	118	411.971.540,00
24	BAPPEDA	49	312.452.300,00	53	339.841.800,00
25	DINAS KB, PPPA	62	260.020.800,00	62	260.020.800,00
26	BADAN KESBANGPOL	89	598.076.800,00	89	598.076.800,00
27	DISKOMINFO	57	215.176.300,00	55	208.676.300,00
28	KEC. BOYOLANGU	4	49.954.300,00	4	49.954.300,00
29	KEC. KAUMAN	9	105.540.087,40	9	105.540.087,40
30	KEC. GONDANG	17	95.354.300,00	15	64.304.300,00
31	KEC. PAGERWOJO	15	227.072.662,40	12	183.022.662,40
32	KEC. KARANGREJO	4	22.304.300,00	4	22.304.300,00
33	KEC. SENDANG	9	70.979.300,00	8	40.879.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
34	DINAS NAKERTRANS	145	458.849.300,00	143	453.299.300,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	80	600.364.000,00	78	586.014.000,00
36	DISPERINDAG	59	359.941.200,00	59	379.871.200,00
37	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	338	1.147.226.280,00	344	1.229.018.680,00
38	DINAS PERIKANAN	69	336.288.250,00	59	286.508.300,00
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	100	414.554.300,00	95	399.054.300,00
40	BKD	42	185.860.900,00	48	211.180.900,00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	14	77.228.300,00	14	77.228.300,00
42	BPBD	19	103.279.300,00	17	95.479.300,00
43	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	52	259.347.000,00	49	235.639.500,00
44	KEC. NGANTRU	6	61.268.300,00	6	61.268.300,00
45	KEC. CAMPURDARAT	16	138.645.087,40	16	138.645.087,40
46	KEC. PAKEL	5	21.054.300,00	7	32.304.300,00
47	KEC. BANDUNG	10	89.604.300,00	7	47.554.300,00
48	KEC. BESUKI	12	96.854.300,00	11	66.804.300,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	7	83.759.300,00	6	53.709.300,00
50	DINAS SOSIAL	8	56.360.000,00	8	56.360.000,00
	TOTAL	5.336	39.795.626.216,94	5.393	38.289.276.961,94

13) Alat Rumah Tangga

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp8.581.085.101,22 atau naik sebesar 8,16% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	105.115.164.367,97
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	7.235.108.602,70	
Belanja BLUD	Rp	6.421.312.476,00	
Belanja BOS	Rp	2.414.772.209,17	
Belanja BTT	Rp	26.663.000,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	7.393.000,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	387.942.500,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	997.082.500,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	17.490.274.287,87
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(44.290.000,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(387.942.500,00)	
Reklas Keluar	Rp	(8.476.956.686,65)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(8.909.189.186,65)
Saldo Akhir 2022		Rp	113.696.249.469,19



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Alat Rumah Tangga terdiri dari:

Tabel 95 Rincian Mutasi Alat Rumah Tangga

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1		Belanja Modal		7.235.108.602,70
2		Belanja Modal BLUD		6.421.312.476,00
3		Belanja Modal BOS		2.414.772.209,17
4		Belanja BTT		
a	Dinas Sosial	Belanja BTT-Tenda	25.000.000,00	
		Belanja BTT-Blender	325.000,00	
		Belanja BTT-Tungku Kompor	1.338.000,00	
		Sub Total 4		26.663.000,00
5		Koreksi Pencatatan		
a	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Koreksi Nilai Bertambah sebab Reklas dari Aset Lain-Lain ke Rumah Tangga-Vacum Cleaner	900.000,00	
		Koreksi Nilai Bertambah sebab Reklas dari Aset Lain-Lain ke Rumah Tangga-Meja Eselon IV	3.540.000,00	
		Koreksi Nilai Bertambah sebab Reklas dari Aset Lain-Lain ke Rumah Tangga-Meja Staf	2.953.000,00	
		Sub Total 5		7.393.000,00
6		Mutasi Masuk		
	DPMPTSP	Mutasi dari Sekretariat Daerah-AC	102.300.000,00	
		Mutasi dari Sekretariat Daerah -Terpal Kanopi Cendana	1.850.000,00	
b	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR-Tustel dan Tangga Aluminium	13.450.000,00	
c	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman-	162.460.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman-	9.900.000,00	
d	Sekretariat Daerah	Mutasi dari BPKAD-Videotron	97.982.500,00	
		Sub Total 6		387.942.500,00
7		Reklas Masuk		
a	DPMPTSP	Reklasifikasi dari Persediaan-APAR	9.490.500,00	
b	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD-Meja 2 laci	6.327.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Pony Finishing presses laundry (Seterika)	295.000.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Automatic Scrub Station (tempat cuci tangan higienis)	226.665.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Hospital Refrigerator (friser makanan)	190.500.000,00	
		Reklasifikasi Aset BLUD-Ultra Low Temperature Freezer	238.100.000,00	
c	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Alat Rumah Tangga-Vacum Cleaner	600.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	d	Dinas PUPR	Reklasifikasi dari Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Putar	30.400.000,00
		Sub Total 7		997.082.500,00
		Total Mutasi Bertambah		17.490.274.287,87
8		Hibah Keluar		
	a	Dinas KB, PP & PA	Hibah ke Desa-Kursi Lipat dan Meja	(6.000.000,00)
	b	BPBD	Hibah ke UIN SATU Tulungagung-TV	(11.040.000,00)
	c	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR	Hibah ke Lembaga Swasta	(27.250.000,00)
		Sub Total 8		(44.290.000,00)
9		Mutasi Keluar		
	a	Sekretariat Daerah	Mutasi ke DPMPSTSP-Panasonic	(7.580.000,00)
			Mutasi ke DPMPSTSP-Panasonic	(31.600.000,00)
			Mutasi ke DPMPSTSP-Panasonic	(9.400.000,00)
			Mutasi ke DPMPSTSP-Panasonic	(53.720.000,00)
			Mutasi ke DPMPSTSP-Terpil Kanopi Cendana	(1.850.000,00)
	b	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi ke Dinas PUPR	(162.460.000,00)
			Mutasi ke Dinas PUPR	(9.900.000,00)
	c	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-Tangga Aluminium 4 m	(2.600.000,00)
			Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-Camera Mirrorless Sony Alpha 6000	(10.850.000,00)
	d	BPKAD	Mutasi ke Sekretariat Daerah-Videotron	(97.982.500,00)
		Sub Total 9		(387.942.500,00)
10		Reklas Keluar		
	a	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi Rapat	(11.175.000,00)
	b	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-A.C. Window	(4.050.000,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.400.000,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Pemadam/Portable	(3.500.000,00)
	c	DPMPSTSP	Reklasifikasi ke Extracomptable-kursi rapat	(22.311.000,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(19.080.750,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	(4.030.000,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC SPLIT	(20.400.000,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(84.112.000,00)
			Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Generator Busa	(8.000.000,00)
	d	Dinas Sosial	Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera	(220.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi BTT ke Extracomptable-Blender	(325.000,00)	
		Reklasifikasi BTT ke Extracomptable-Tungku Kompor	(1.338.000,00)	
e	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Reklasifikasi ke Extracomptable-Rice Cooker	(825.000,00)	
f	Kecamatan Kedungwaru	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Besi/Metal	(3.450.000,00)	
g	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Ac Split	(11.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Tangga Aluminium	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Ac Spilt	(6.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Tv dan Vcd	(2.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Ac Split	(15.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi	(1.033.333,33)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Pot Bunga	(58.832.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Ac Split	(17.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.150.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Pemadam/Portable	(2.000.000,00)	
h	Kecamatan Bandung	Reklasifikasi ke Extracomptable-Adaptor Camera	(890.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Tripod kamera	(800.000,00)	
i	DPMD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	(1.450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC Split	(16.950.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Stabilisator	(4.000.000,00)	
j	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi ke Extracomptable-Pot	(2.550.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Pot	(1.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(157.790.000,00)	
k	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera Merah Putih	(450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Tali Tiang Bendera	(400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Vacum Cleaner	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Eselon IV	(3.540.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Staf	(2.953.000,00)	
l	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.175.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
m	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi Rapat	(134.765.100,00)	
n	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(20.650.000,00)	
o	BPBD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(23.672.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.700.000,00)	
p	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(26.937.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(14.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(52.100.000,00)	
q	Kecamatan Besuki	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Televisi	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Layar Proyektor	(533.000,00)	
r	BKPSDM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Komputer	(1.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC	(11.640.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.000.000,00)	
s	SATPOL PP	Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi	(13.320.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Tabung Apar 3kg	(22.735.020,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Tabung Apar 6kg	(24.635.340,00)	
t	BPKAD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(103.950.000,00)	
u	Kecamatan Kalidawir	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(12.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.500.000,00)	
v	BAPENDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.617.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(18.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(13.500.000,00)	
w	Kecamatan Ngantru	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-kursi putar	(2.000.000,00)	
x	Kecamatan Pagerwojo	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Televisi	(1.500.000,00)	
y	Dinas KB, PP & PA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-UPS, Kamera, Gordin	(55.440.000,00)	
z	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi Lipat	(4.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi rapat	(9.340.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Bangku Tunggu	(3.050.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi lipat	(23.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Komputer	(9.435.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Jam Mekanis	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC Sentral	(15.510.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC Windows	(4.275.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC Windows	(9.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-AC Windows	(13.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Exhaust Fan	(2.340.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Unit Power Supply	(4.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Unit Power Supply	(23.225.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Gordyn	(5.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Gordyn	(1.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Pemadam	(3.260.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Pemadam	(3.600.000,00)	
aa	Kecamatan Karangrejo	Reklasifikasi ke Extracomptable-Tripod Kamera	(728.255,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Adaptor	(742.482,40)	
ab	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Besi/Metal &Partisi	(10.309.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-A.C. Window	(52.250.000,00)	
ac	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke Extracomptable-Apar	(8.452.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-	(223.450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-	(151.725.000,00)	
ad	Kecamatan Rejotangan	Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera Merah Putih	(220.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Tali Bendera	(180.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Tamu	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera Merah Putih	(110.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Tali Bendera	(90.000,00)	
ae	Kecamatan Tulungagung	Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera Merah Putih	(110.000,00)	
af	Kecamatan Pucanglaban	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Besi/Metal	(1.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Adaptor Kamera	(900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Tripod Kamera	(800.000,00)	
ag	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Ruang Tunggu	(9.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Kerja	(6.250.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Traffic Light	(10.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Traffict Light	(37.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Smoke Tester	(157.104.950,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Gerobak dorong Pegecatan	(74.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Alat Penabur Glasbit	(10.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Dongkrak Bajul	(12.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Rik / Radio Komunikasi	(6.490.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Flash Light	(5.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Tabung Gas	(2.300.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kipas Angin	(3.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-kursi rapat	(37.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.318.000,00)	
ah	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(62.230.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(39.450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(63.509.600,00)	
ai	Kecamatan Tanggunggunung	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kasur/Spring Bed, kursi tamu, partisi	(7.700.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Gordyin/Kray	(7.000.000,00)	
aj	Inspektorat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(33.900.000,00)	
ak	Kecamatan Sendang	Reklasifikasi ke Extracomptable-Adaptor	(900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Tripod	(800.000,00)	
al	Kecamatan Gondang	Reklasifikasi ke Extracomptable-Adaptor Kamera	(890.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Tripod	(800.000,00)	
am	Kecamatan Campurdarat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Lipat	(2.000.000,00)	
an	Kecamatan Ngunut	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	
ao	Kecamatan Pakel	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	
ap	Kecamatan Sumbergempol	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Televisi	(1.200.000,00)	
aq	Kecamatan Kauman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kasur/Spring Bed	(4.000.000,00)	
ar	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-A.C. Window	(37.055.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Televisi	(5.000.000,00)	
as	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR	Reklasifikasi ke Extracomptable	(1.072.516.244,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi Modal BOS SD ke Extracomptable-	(275.960.950,00)	
		Reklasifikasi Modal BOS SD ke Extracomptable-	(372.079.972,92)	
		Reklasifikasi Modal BOS SMP ke Extracomptable-	(354.635.000,00)	
		Reklasifikasi Modal BOS SMP ke Extracomptable-	(118.533.900,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(42.961.750,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(52.340.000,00)	
		Reklasifikasi Modal BOP PAUD ke Extracomptable	(2.370.000,00)	
		Reklasifikasi Modal BOP PAUD ke Extracomptable	(391.500,00)	
	at Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas angin PKM Campurdarat	(1.490.050,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas Angin PKM Beji	(3.150.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas Angin PKM Beji	(3.360.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Blender PKM Beji	(966.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kompur Gas PKM Beji	(1.716.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Braket Speaker PKM Beji	(2.100.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Persediaan-Kabel Tasker PKM Beji	(2.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Persediaan-Jek Interconek Fimale PKM Beji	(300.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Persediaan-Jek Interconek Akayska PKM Beji	(210.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Persediaan-Jek Interconek Fimale PKM Beji	(120.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Apar DCP 6 KG PKM Bandung	(1.840.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas Angin PKM Ngunut	(9.600.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Exhause Fan PKM Campurdarat	(2.925.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Layar Proyektor PKM Campurdarat	(540.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(1.425.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.150.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(28.240.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Gorden Rumah Sakit. Rawat Inap PKM Bandung	(14.454.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Foto Presiden dan Wakil Presiden PKM Campurdarat	(720.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas Angin 18. Remote PKM Banjarejo	(6.300.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Ring Light PKM Kedungwaru	(765.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Tripod PKM Kedungwaru	(935.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi Rapat/kursi lipat PKM Kauman	(75.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas Angin PKM Kauman	(1.700.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Tangga ALUMINIUM PKM Kauman	(625.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kipas Angin PKM Kalidawir	(8.400.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi Rapat PKM Besuki	(9.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi Rapat PKM Campurdarat	(28.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Tripod Kamera PKM Campurdarat	(1.030.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Megaphone PKM Beji	(810.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Tabung Apar PKM Kauman	(1.950.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi Rapat PKM Kedungwaru	(49.000.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Tangga Aluminium PKM Kedungwaru	(525.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi Rapat PKM Pagerwojo	(32.900.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi BAR EGOO RS Campurdarat	(18.500.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Kursi Chitose CAESAR N RS Campurdarat	(261.424.800,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Gorden PKM Ngunut	(11.655.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(3.315.939,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(25.464.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(61.495.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(1.434.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(168.490.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(13.014.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(81.950.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.656.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.750.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(36.646.500,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Regulator O2	(1.776.000,00)	
au	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Extracomptable-Gorden Kain	(9.750.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Bed Cover	(15.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Sprei Set King Coil	(10.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera Latihan	(2.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Bendera Merah Putih	(2.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Persediaan-Tali Tiang Bendera	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(792.375.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(30.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(80.650.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(994.925.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(378.550.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(452.461.750,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.150.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.600.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(13.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(7.400.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.675.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.337.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(14.900.000,00)	
	Sub Total 10			(8.476.956.686,65)
	Total Mutasi Berkurang			(8.909.189.186,65)

Adapun rincian alat rumah tangga per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 96 Rincian Alat Rumah Tangga per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	1.237	9.422.309.550,00	1.725	11.776.641.300,00
2	DINAS KESEHATAN	6.212	31.627.723.483,04	6.212	23.588.281.885,34
3	DINAS PETERNAKAN	72	441.230.000,00	58	311.920.000,00
4	BPKAD	214	1.835.269.000,00	220	2.027.281.500,00
5	INSPEKTORAT	34	143.850.000,00	30	174.150.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	91	382.136.773,00	92	365.436.773,00
7	DBMPTSP	128	1.048.540.750,00	118	792.935.500,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	688	2.084.646.550,00	704	2.157.511.150,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	315	1.350.662.866,67	317	1.403.088.400,00
10	BAPENDA	141	777.252.350,00	157	814.269.850,00
11	SATUAN POLISI PP	268	1.865.400.143,00	232	1.469.587.650,00
12	KEC. KEDUNGWARU	85	427.796.500,00	85	368.179.500,00
13	KEC. NGUNUT	69	360.255.080,00	69	358.955.080,00
14	KEC. REJOTANGAN	65	277.905.000,00	66	279.405.000,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	83	316.691.500,00	81	305.751.500,00
16	KEC. KALIDAWIR	24	178.205.000,00	31	193.505.000,00
17	KEC. PUCANGLABAN	69	324.717.500,00	67	295.017.500,00
18	SEKRETARIAT DPRD	251	3.035.001.756,00	236	2.656.886.350,00
19	DINAS PENDIDIKAN	6.234	26.199.619.645,92	5.701	24.172.963.509,67
20	DISPENDUKCAPIL	148	793.357.700,00	174	883.492.700,00
21	DINAS PU PR	371	1.450.547.765,00	252	1.189.817.765,00
22	DINAS KOPERASI	174	896.246.000,00	177	958.805.000,00
23	DINAS PERTANIAN	324	1.611.971.432,00	309	1.545.586.558,00
24	BAPPEDA	258	1.619.966.769,49	224	1.308.581.254,49
25	DINAS KB, PPPA	236	977.708.836,00	236	1.033.148.836,00
26	BADAN KESBANGPOL	85	474.100.000,00	80	444.500.000,00
27	DISKOMINFO	151	962.550.400,00	139	788.329.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
28	KEC. BOYOLANGU	34	149.525.500,00	34	149.525.500,00
29	KEC. KAUMAN	87	363.299.500,00	86	358.899.500,00
30	KEC. GONDANG	66	262.017.000,00	63	231.667.000,00
31	KEC. PAGERWOJO	37	145.620.000,00	36	116.690.000,00
32	KEC. KARANGREJO	93	429.387.775,00	94	426.608.512,40
33	KEC. SENDANG	71	276.832.500,00	67	247.782.500,00
34	DINAS NAKERTRANS	166	1.519.327.500,00	158	1.498.152.500,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	1.518	8.237.953.098,67	1.533	8.577.316.048,67
36	DISPERINDAG	331	1.454.416.000,00	331	1.829.591.000,00
37	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	410	2.227.987.360,00	509	2.428.952.360,00
38	DINAS PERIKANAN	183	1.204.161.024,00	183	1.192.186.024,00
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	158	611.978.920,00	155	593.603.920,00
40	BKD	58	262.068.500,00	61	261.808.500,00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	195	725.555.000,00	199	740.505.000,00
42	BPBD	132	996.149.724,00	148	1.018.661.724,00
43	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	404	1.782.816.417,40	400	1.725.698.917,40
44	KEC. NGANTRU	45	192.247.800,00	46	194.247.800,00
45	KEC. CAMPURDARAT	71	322.401.000,00	69	307.551.000,00
46	KEC. PAKEL	57	209.635.000,00	56	203.885.000,00
47	KEC. BANDUNG	74	380.744.000,00	72	365.969.000,00
48	KEC. BESUKI	90	345.035.000,00	87	310.245.000,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	79	278.937.000,00	82	264.097.000,00
50	DINAS SOSIAL	112	432.491.500,00	111	407.491.500,00
	TOTAL	22.498	113.696.249.469,19	22.372	105.115.164.367,97

14) Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 284.396.405,14 atau naik sebesar 2,95%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	9.649.990.351,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	653.564.600,14	
Belanja Modal BLUD	Rp	121.949.300,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	2.800.000,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	778.313.900,14



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang

Penghapusan	Rp	(0,00)
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(2.800.000,00)
Reklasifikasi keluar	Rp	(491.117.495,00)

Jumlah Mutasi Kurang Rp **(493.917.495,00)**

Saldo Akhir 2022 Rp **9.934.386.756,14**

Tabel 97 Rincian Mutasi Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			653.564.600,14
2	Belanja Modal BLUD	Belanja BLUD dari Dinas Kesehatan		121.949.300,00
3	Mutasi Masuk			
a	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR-Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2.800.000,00	
	Sub Total 3			2.800.000,00
	Total Mutasi Tambah			778.313.900,14
4	Mutasi Keluar			
a	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman-Meja Kerja Pegawai Non struktural	(2.800.000,00)	
	Sub Total 4			(2.800.000,00)
5	Reklas Keluar			
a	Kecamatan Kedungwaru	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	(5.060.000,00)	
b	BPBD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.950.000,00)	
c	BPKAD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.710.000,00)	
d	BAPENDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(24.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(4.455.000,00)	
e	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Kerja Pejabat Eselon	(4.125.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	(1.450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	(4.950.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	(10.800.000,00)	
f	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Staf	(15.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Eselon II	(1.625.000,00)	
g	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(42.050.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(15.750.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
h	Kecamatan Tanggunggunung	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Kerja Pejabat Eselon IV	(1.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kursi Tamu Di Ruang Tunggu Ketua/Wakil Ketua Dprd Dan Kursi Tamu Di Ruang Tunggu Pejabat Eselon I	(2.000.000,00)	
i	Inspektorat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(6.000.000,00)	
j	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Meja Kerja Pegawai Non Struktural	(1.437.495,00)	
k	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.100.000,00)	
l	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(28.280.000,00)	
m	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Extracomptable-Kursi Hadap	(4.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(137.850.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(48.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(75.125.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(5.000.000,00)	
n	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke Alat Rumah Tangga-Kursi Putar	(30.400.000,00)	
	Sub Total 5			(491.117.495,00)
	Total Mutasi Berkurang			(493.917.495,00)

Adapun rincian meja dan kursi kerja pejabat per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Meja dan Kursi Kerja Pejabat per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	182	1.034.916.500,00	227	1.173.041.500,00
2	DINAS KESEHATAN	237	1.690.485.890,14	197	1.584.815.590,00
3	DINAS PETERNAKAN	83	235.422.600,00	10	36.000.000,00
4	BPKAD	136	257.695.000,00	138	260.405.000,00
5	INSPEKTORAT	21	64.900.000,00	21	70.900.000,00
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASY.	50	111.225.000,00	50	111.225.000,00
7	DBMPTSP	39	166.144.300,00	24	123.265.000,00
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	75	144.146.000,00	75	201.946.000,00
9	BAPENDA	64	197.573.000,00	81	226.928.000,00
10	SATUAN POLISI PP	68	138.020.000,00	68	138.020.000,00
11	KEC. KEDUNGWARU	30	102.771.700,00	26	90.660.000,00
12	KEC. NGUNUT	10	53.700.000,00	10	53.700.000,00
13	KEC. SUMBERGEMPOL	4	17.720.000,00	4	17.720.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
14	KEC. KALIDAWIR	17	73.682.000,00	17	73.682.000,00
15	KEC. PUCANGLABAN	3	13.275.000,00	3	13.275.000,00
16	SEKRETARIAT DPRD	52	541.010.000,00	52	541.010.000,00
17	DINAS PENDIDIKAN	51	2.706.208.000,00	51	2.698.808.000,00
18	DISPENDUKCAPIL	4	64.548.000,00	12	65.173.000,00
19	DINAS PU PR	36	155.433.000,00	18	57.133.000,00
20	DINAS KOPERASI	10	65.224.400,00	10	65.224.400,00
21	DINAS PERTANIAN	158	328.290.000,00	158	328.290.000,00
22	BAPPEDA	31	87.768.000,00	29	83.250.000,00
23	DINAS KB, PPPA	52	217.455.000,00	52	217.455.000,00
24	BADAN KESBANGPOL	18	46.000.000,00	17	39.600.000,00
25	DISKOMINFO	89	198.929.000,00	89	198.929.000,00
26	KEC. BOYOLANGU	19	79.100.000,00	19	79.100.000,00
27	KEC. KAUMAN	10	34.030.000,00	1	3.500.000,00
28	KEC. GONDANG	3	9.500.000,00	2	5.000.000,00
29	KEC. PAGERWOJO	19	78.950.000,00	19	78.950.000,00
30	KEC. SENDANG	16	38.100.000,00	16	38.100.000,00
31	DINAS TENAGA KERJA	32	62.380.000,00	32	62.380.000,00
32	DINAS PERHUBUNGAN	146	258.000.000,00	148	274.625.000,00
33	DINAS PERINDUSTRIAN	51	121.130.000,00	46	105.330.000,00
34	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	19	55.990.000,00	19	54.627.495,00
35	DINAS PERIKANAN	12	49.301.000,00	7	30.209.000,00
36	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA	7	21.250.000,00	7	21.250.000,00
37	BADAN KEPEGAWAIAN	27	80.540.000,00	27	80.540.000,00
38	BADAN KETAHANAN PANGAN	30	68.670.000,00	30	68.670.000,00
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	14	86.441.366,00	16	102.791.366,00
40	KEC. TULUNGAGUNG	11	25.875.000,00	11	25.875.000,00
41	KEC. NGANTRU	5	50.950.000,00	5	50.950.000,00
42	KEC. CAMPURDARAT	3	14.000.000,00	3	14.000.000,00
43	KEC. PAKEL	6	15.000.000,00	3	7.500.000,00
44	KEC. BESUKI	9	16.365.000,00	9	16.365.000,00
45	KEC. TANGGUNGUNUNG	1	7.500.000,00	3	11.000.000,00
46	DINAS SOSIAL	15	48.772.000,00	15	48.772.000,00
	TOTAL	1.975	9.934.386.756,14	1.877	9.649.990.351,00

15) Alat Studio

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Studio Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 365.573.975,00 atau naik sebesar 2,62%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	13.955.117.727,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	29.800.000,00	
Belanja Modal BOS	Rp	175.773.553,04	
Belanja Modal BLUD	Rp	1.075.931.994,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	1.281.505.547,04
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(915.931.572,04)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(915.931.572,04)
Saldo Akhir 2022		Rp	14.320.691.702,00

Tabel 99 Rincian Mutasi Alat Studio

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			29.800.000,00
2	Belanja Modal BOS			175.773.553,04
3	Belanja BLUD			1.075.931.994,00
	Total Mutasi Tambah			1.281.505.547,04
4	Reklas Keluar			
a	DPMPTSP	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Multiscan Proyektor	(11.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(50.497.000,00)	
b	Kecamatan Kedungwaru	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera Digital	(1.702.000,00)	
c	DPMD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera	(3.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera	(4.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera	(7.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Multiscan Proyektor	(21.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(16.500.000,00)	
d	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(20.650.000,00)	
e	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.250.000,00)	
f	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(56.800.000,00)	
g	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(11.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(35.400.000,00)	
h	Dinas KB, PP & PA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Proyektor	(47.187.500,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
i	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kamera Video	(4.000.000,00)	
j	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera Digital	(20.640.500,00)	
k	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(78.160.000,00)	
l	Kecamatan Tanggunggunung	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera Digital	(2.000.000,00)	
m	Inspektorat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(9.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.900.000,00)	
n	Kecamatan Campurdarat	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera Digital	(2.700.000,00)	
o	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera Electronic	(46.325.000,00)	
p	Dinas Pendidikan, Pemuda & OR	Reklasifikasi Modal BOS SD ke Extracomptable	(17.553.753,04)	
		Reklasifikasi Modal BOS SMP ke Extracomptable	(4.800.000,00)	
q	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Bel Panggilan Perawat PKM Kauman	(2.750.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(20.249.900,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(14.216.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Bracket LCD Projector PKM Bangunjaya	(120.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Layar LCD Screen Wall PKM Bangunjaya	(450.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(13.317.742,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(4.015.177,00)	
r	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(34.150.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(242.250.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(3.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(8.850.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(25.500.000,00)	
s	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Proyektor / Infokus	(11.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Proyektor	(9.350.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Pengadaan Kamera	(4.497.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kamera	(4.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Camera	(2.450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kamera	(8.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Handycam	(5.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Handycam	(5.000.000,00)	
	Sub Total 4			(915.931.572,04)
	Total Mutasi Kurang			(915.931.572,04)

Adapun rincian Alat Studio per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Alat Studio per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	98	954.214.000,00	143	1.266.114.000,00
2	DINAS KESEHATAN	477	3.502.732.814,00	556	2.481.919.639,00
3	DINAS PETERNAKAN	12	69.560.000,00	23	139.107.000,00
4	BPKAD	30	232.924.000,00	30	232.924.000,00
5	INSPEKTORAT	11	44.250.000,00	11	57.150.000,00
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASY.	11	88.498.062,00	23	141.798.062,00
7	DPMPSTP	2	13.000.000,00	12	74.897.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	146.120.500,00	22	224.280.500,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN	16	117.348.000,00	16	117.348.000,00
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14	107.745.000,00	14	107.745.000,00
11	SATUAN POLISI PP	13	203.730.000,00	12	175.780.000,00
12	KEC. KEDUNGWARU	1	8.910.000,00	2	10.612.000,00
13	KEC. NGUNUT	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
14	KEC.REJOTANGAN	2	7.100.000,00	2	7.100.000,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	2	4.650.000,00	2	4.650.000,00
16	KEC. KALIDAWIR	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00
17	KEC. PUCANGLABAN	1	6.455.000,00	1	6.455.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	46	465.066.250,00	46	465.066.250,00
19	DINAS PENDIDIKAN	430	4.645.957.773,00	399	4.492.537.973,00
20	DISPENDUKCAPIL	7	35.721.000,00	8	39.721.000,00
21	DINAS PU PR	28	206.458.450,00	28	206.458.450,00
22	DINAS KOPERASI	13	104.029.000,00	15	124.669.500,00
23	DINAS PERTANIAN	36	187.798.550,00	43	234.698.550,00
24	BAPPEDA	50	387.609.500,00	56	444.409.500,00
25	DINAS KB, PPPA	23	154.715.500,00	29	201.903.000,00
26	BADAN KESBANGPOL	30	124.325.000,00	30	124.325.000,00
27	DISKOMINFO	38	352.083.370,00	38	352.083.370,00
28	KEC. BOYOLANGU	2	11.800.000,00	2	11.800.000,00
29	KEC. KAUMAN	1	8.415.000,00	1	8.415.000,00
30	KEC. GONDANG	3	19.950.000,00	3	19.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
31	KEC. PAGERWOJO	1	12.960.000,00	1	12.960.000,00
32	KEC. KARANGREJO	2	5.700.000,00	2	5.700.000,00
33	DINAS TENAGA KERJA	44	284.666.750,00	44	284.666.750,00
34	DINAS PERHUBUNGAN	24	875.623.750,00	24	875.623.750,00
35	DINAS PERINDUSTRIAN	21	179.950.000,00	21	179.950.000,00
36	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	29	190.634.300,00	41	236.959.300,00
37	DINAS PERIKANAN	29	137.820.000,00	33	158.470.000,00
39	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA	15	126.623.500,00	15	126.623.500,00
40	BADAN KEPEGAWAIAN	8	42.564.800,00	8	42.564.800,00
41	BADAN KETAHANAN PANGAN	15	81.667.000,00	15	81.667.000,00
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	13	109.617.871,00	13	109.617.871,00
43	KEC. TULUNGAGUNG	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00
44	KEC. NGANTRU	1	8.415.000,00	1	8.415.000,00
45	KEC. CAMPURDARAT	-	-	1	2.700.000,00
46	KEC. PAKEL	3	16.131.962,00	3	16.131.962,00
47	KEC. BANDUNG	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
48	KEC. BESUKI	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	-	-	1	2.000.000,00
50	DINAS SOSIAL	1	9.300.000,00	1	9.300.000,00
	TOTAL	1.615	14.320.691.702,00	1.796	13.955.117.727,00

16) Alat Komunikasi

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.937.868.906,00 atau naik sebesar 31,21%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	6.209.611.981,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	69.022.200,00	
Belanja BLUD	Rp	2.195.937.876,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	2.264.960.076,00
Mutasi Kurang			
Reklasifikasi	Rp		
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(327.091.170,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(327.091.170,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	8.147.480.887,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 101 Rincian Mutasi Alat Komunikasi

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			69.022.200,00
2	Belanja BLUD			2.195.937.876,00
	Total Mutasi Tambah			2.264.960.076,00
3	Reklas Keluar			
a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Telepon Analog	(8.580.000,00)	
b	DPMD	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Telepon	(10.700.000,00)	
c	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Handy Talky	(2.800.000,00)	
d	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(10.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(2.000.000,00)	
e	Dinas KB, PP & PA	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kom Data	(105.124.800,00)	
f	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Faksimile	(15.845.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Faksimile	(12.595.000,00)	
g	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Pesawat Telephone	(2.350.000,00)	
h	Kecamatan Rejotangan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Unit Tranceiver Ssb Portable	(1.000.000,00)	
i	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-HT	(11.330.000,00)	
j	DLH	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(23.850.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(22.500.000,00)	
k	Kecamatan Tanggunggunung	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Kom Data	(2.500.000,00)	
l	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Handy Talky (HT)	(8.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Multiplex System	(9.250.000,00)	
m	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Telephone PKM Ngunut	(450.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(30.677.625,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(424.000,00)	
		Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable	(5.464.745,00)	
n	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(33.250.000,00)	
o	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Faximile	(2.800.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
p	Satpol PP	Reklasifikasi Aset BLUD ke Extracomptable-Handy Talky (HT)	(5.600.000,00)	
	Sub Total 3			(327.091.170,00)
	Total Mutasi Kurang			(327.091.170,00)

Adapun rincian Alat Komunikasi per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Alat komunikasi per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	69	223.639.500,00	72	256.889.500,00
2	DINAS KESEHATAN	381	4.998.508.747,00	304	2.839.587.241,00
3	DINAS PETERNAKAN	1	2.500.000,00	2	5.300.000,00
4	BPKAD	19	89.066.000,00	19	89.066.000,00
5	INSPEKTORAT	2	8.000.000,00	2	8.000.000,00
6	BADAN PEMBERDAYAAN MASY.	1	2.000.000,00	2	12.700.000,00
7	DPMPSTP	4	23.175.000,00	4	23.175.000,00
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	12	17.000.000,00	20	63.350.000,00
9	KANTOR PERPUSTAKAAN	8	231.813.000,00	9	240.393.000,00
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	11	58.834.000,00	12	60.834.000,00
11	SATUAN POLISI PP	59	215.595.000,00	54	186.220.000,00
12	KEC.REJOTANGAN	1	3.000.000,00	2	4.000.000,00
13	KEC. SUMBERGEMPOL	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00
14	KEC. KALIDAWIR	1	6.900.000,00	1	6.900.000,00
15	SEKRETARIAT DPRD	10	130.920.000,00	10	130.920.000,00
16	DINAS PENDIDIKAN	12	68.953.500,00	13	68.953.500,00
17	DISPENDUKCAPIL	3	21.865.000,00	10	50.305.000,00
18	DINAS PU PR	5	63.150.000,00	5	63.150.000,00
19	DINAS KOPERASI	3	10.300.000,00	4	12.650.000,00
20	DINAS PERTANIAN	4	19.447.200,00	-	-
21	BAPPEDA	6	58.990.000,00	7	68.990.000,00
22	DINAS KB, PPPA	78	398.175.220,00	93	503.300.020,00
23	BADAN KESBANGPOL	3	7.350.000,00	3	7.350.000,00
24	DISKOMINFO	28	693.096.904,00	28	693.096.904,00
25	KEC. GONDANG	1	16.155.000,00	1	16.155.000,00
26	KEC. PAGERWOJO	2	6.800.000,00	2	6.800.000,00
27	KEC. SENDANG	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
28	DINAS TENAGA KERJA	8	48.195.000,00	8	48.195.000,00
29	DINAS PERHUBUNGAN	93	260.300.000,00	92	259.830.000,00
30	DINAS PERINDUSTRIAN	8	43.430.000,00	8	43.430.000,00
31	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	23	60.950.000,00	28	78.200.000,00
32	DINAS PERIKANAN	21	84.105.000,00	21	84.105.000,00
33	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA	25	79.125.000,00	25	79.125.000,00
34	BADAN KEPEGAWAIAN	1	7.100.000,00	1	7.100.000,00
35	BADAN KETAHANAN PANGAN	3	12.650.000,00	3	12.650.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah barang	Harga Perolehan
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	31	134.776.316,00	31	134.776.316,00
37	KEC. TULUNGAGUNG	6	12.769.000,00	6	12.769.000,00
38	KEC. NGANTRU	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00
39	KEC. CAMPURDARAT	4	8.400.000,00	4	8.400.000,00
40	KEC. PAKEL	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00
41	KEC. BESUKI	2	8.950.000,00	2	8.950.000,00
42	KEC. TANGGUNGUNUNG	1	1.996.500,00	2	4.496.500,00
	TOTAL	954	8.147.480.887,00	914	6.209.611.981,00

17) Peralatan Pemancar

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Peralatan Pemancar Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp51.925.000,00 atau turun sebesar 4,90%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	1.060.502.620,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	0,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	0,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(51.925.000,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(51.925.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	1.008.577.620,00

Tabel 103 Rincian Mutasi Peralatan Pemancar

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Reklas Keluar			
a	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Radio HF/FM	(10.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain-Radio FM/HF	(11.000.000,00)	
b	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(5.225.000,00)	
c	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	(24.900.000,00)	
	Sub Total 1			(51.925.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(51.925.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adapun rincian peralatan pemancar per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Peralatan Pemancar per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	2	34.000.000,00	4	58.900.000,00
2	DINAS KESEHATAN	26	60.587.670,00	27	65.812.670,00
3	BPKAD	1	59.500.000,00	1	59.500.000,00
4	BADAN PEMBERDAYAAN MASY.	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00
5	BADAN PERPUSTAKAAN	1	8.125.000,00	1	8.125.000,00
6	SATUAN POLISI PP	2	69.350.000,00	2	69.350.000,00
7	KEC.REJOTANGAN	2	7.000.000,00	2	7.000.000,00
8	KEC. KALIDAWIR	1	9.325.000,00	1	9.325.000,00
9	SEKRETARIAT DPRD	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00
10	DINAS PENDIDIKAN	11	42.998.000,00	11	42.998.000,00
11	DINAS PU PR	6	108.175.000,00	6	108.175.000,00
12	DINAS KOPERASI, UKM	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
13	DINAS PERTANIAN	16	65.170.000,00	16	65.170.000,00
14	BADAN KESBANGPOL	1	4.520.000,00	1	4.520.000,00
15	DISKOMINFO	3	248.500.000,00	3	248.500.000,00
16	KEC. GONDANG	1	7.560.000,00	1	7.560.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	1	5.680.000,00	1	5.680.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	1	40.000.000,00	3	61.800.000,00
19	DINAS PU PENGAIRAN	4	15.800.000,00	4	15.800.000,00
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA	1	36.000.000,00	1	36.000.000,00
21	BADAN KEPEGAWAIAN	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00
22	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	13.500.000,00	2	13.500.000,00
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	3	151.886.950,00	3	151.886.950,00
24	KEC. TULUNGAGUNG	1	2.900.000,00	1	2.900.000,00
	TOTAL	90	1.008.577.620,00	95	1.060.502.620,00

18) **Alat Kedokteran**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Kedokteran Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp58.921.516.596,58 atau naik sebesar 15,65%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	376.438.191.784,69
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	13.459.494.680,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	56.915.648.873,00	
Belanja Modal BTT	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	1.984.125,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	70.377.127.678,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(11.455.611.081,42)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(11.455.611.081,42)
Saldo Akhir 2022		Rp	435.359.708.381,27

Tabel 105 Rincian Mutasi Alat Kedokteran

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			13.459.494.680,00
2	Belanja Modal BLUD	Belanja BLUD dari Dinas Kesehatan		56.915.648.873,00
3	Belanja Modal BTT	Belanja BTT dari Dinas Kesehatan		
4	Reklas Masuk			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi dari Bahan Habis Pakai - Suku Cadang Alat Kedokteran Umum	1.984.125,00	
	Sub Total 4			1.984.125,00
	Total Mutasi Tambah			70.377.127.678,00
5	Reklas Keluar			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Kedokteran Lainnya	(445.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Anak	(22.190.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(243.848.700,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Bedah	(3.141.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Gawat Darurat	(24.417.100,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Gigi	(270.342.117,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Jantung	(79.999.625,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran THT	(1.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Umum	(505.528.568,67)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	(29.617.743,75)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Kedokteran Lainnya	(916.860,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Kedokteran Lainnya	(3.675.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Kedokteran Lainnya	(390.000,00)	
		Reklasifikasi ke Suku Cadang Alat Kedokteran – Alat Kedokteran Umum	(13.934.570,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Kedokteran Umum	(43.711.582,00)	
		Reklasifikasi ke Unit Alat Laboratorium – Alat Laboratorium Microbiologi	(1.080.882.462,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Kedokteran Umum	(650.000,00)	
		Reklasifikasi ke Suku Cadang Alat Kedokteran – Alat Kedokteran Umum	(461.468.736,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Umum	(2.730.638.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Gigi	(255.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	(11.918.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(1.515.790.100,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Jantung	(592.520.000,00)	
		Reklasifikasi ke Alat Kantor – Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(203.561.457,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklasifikasi ke Alat Rumah Tangga - Meubelair	(6.327.000,00)	
		Reklasifikasi ke Peralatan Komputer – Peralatan Personal Komputer	(2.200.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Alat Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(295.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Alat Rumah Tangga – Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(226.665.000,00)	
		Reklasifikasi ke Alat Rumah Tangga – alat Pendingin	(190.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Alat Rumah Tangga – alat Pendingin	(238.100.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Umum	(4.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Kedokteran Umum	(82.358.360,00)	
		Reklasifikasi ke Bahan Habis Pakai – Bahan Lainnya	(82.584.000,00)	
		Reklasifikasi ke Bahan Habis Pakai – Suku Cadang Alat Kedokteran	(33.588.600,00)	
	Sub Total 5			(11.455.611.081,42)
	Total Mutasi Kurang			(11.455.611.081,42)

Adapun rincian alat kedokteran per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 106 Rincian Alat Kedokteran Per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	10.927	434.434.502.881,27	9.653	375.589.258.424,69
2	DINAS PETERNAKAN	15	299.764.500,00	11	226.378.360,00
3	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5	12.500.000,00	5	12.500.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN	4	11.875.000,00	4	11.875.000,00
5	DINAS KB, PPPA	81	526.480.000,00	81	526.480.000,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
7	KEC. TULUNGAGUNG	46	68.700.000,00	46	68.700.000,00
8	DPMPSTP	2	2.886.000,00	-	-
	TOTAL	11.082	435.359.708.381,27	9.802	376.438.191.784,69



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

19) Alat Kesehatan Umum

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Kesehatan Umum Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp358.160.375,00 atau sebesar 230,77% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	155.201.999,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	332.826.000,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	33.996.875,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	366.822.875,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(8.662.500,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(8.662.500,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	513.362.374,00

Tabel 107 Rincian Mutasi Alat Kesehatan Umum

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			332.826.000,00
2	Belanja Modal BLUD			33.996.875,00
	Total Mutasi Tambah			366.822.875,00
3	Reklas Keluar			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Extracomptable – Alat Kesehatan Umum Lainnya	(8.662.500,00)	
	Sub Total 3			(8.662.500,00)
	Total Mutasi Kurang			(8.662.500,00)

Adapun alat kesehatan umum senilai Rp. 513.362.374,00 secara keseluruhan dicatatkan pada Dinas kesehatan sebanyak 50 unit barang.

20) Unit Alat Laboratorium

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Unit Alat Laboratorium Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp472.717.114,00 atau naik sebesar 1,72%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	27.508.662.903,99
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	977.380.199,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	98.677.273,00	
Belanja Modal BTT	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	1.130.662.462,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	22.500.000,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	2.229.219.934,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(1.674.002.820,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(22.500.000,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(60.000.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(1.756.502.820,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	27.981.380.017,99

Tabel 108 Rincian Mutasi Unit-Unit Laboratorium

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			977.380.199,00
2	Belanja Modal BLUD	Belanja BLUD dari Dinas Kesehatan		98.677.273,00
3	Belanja Modal BTT	Belanja BTT dari Dinas Kesehatan		
4	Reklas Masuk			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi dari Alat Kedokteran – Alat Laboratorium Kimia	1.080.882.462,00	
b	PUPR	Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Alat Lab Umum - Indicator Digital Compression Machine	18.700.000,00	
		Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan Alat Lab Umum - Electric Digital Hydraulic Concrete Beam Testing	31.080.000,00	
	Sub Total 4			1.130.662.462,00
5	Mutasi Masuk			
a	PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	22.500.000,00	
	Sub Total 5			22.500.000,00
	Total Mutasi Tambah			2.229.219.934,00
6	Reklas Keluar			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Hematologi	(34.650.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Kimia	(273.151.780,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Microbiologi	(31.079.800,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Patologi	(80.448.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Umum	(217.191.740,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Microbiologi Penyehatan	(167.200.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Umum	(231.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
b	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Umum	(5.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(26.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	(49.720.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Lain	(4.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(2.175.000,00)	
c	Dinas Lingkungan Hidup	Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Laboratorium Aspal, Cat dan Kimia	(7.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Laboratorium Umum	(348.109.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Laboratorium Kearsipan	(3.025.000,00)	
		Reklasifikasi ke Bahan Habis Pakai - Suku Cadang Alat Laboratorium	(52.452.000,00)	
		Reklasifikasi ke Bahan Habis Pakai - Suku Cadang Alat Laboratorium	(140.000.000,00)	
	Sub Total 6			(1.674.002.820,00)
7	Mutasi Keluar			
a	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mutasi Ke PUPR	(22.500.000,00)	
	Sub Total 7			(22.500.000,00)
8	Hibah Keluar			
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	Hibah ke Lembaga Swasta	(60.000.000,00)	
	Sub Total 8			(60.000.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(1.756.502.820,00)

Adapun rincian alat unit-unit Laboratorium per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 109 Rincian Unit Alat Laboratorium per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	425	17.361.586.375,99	434	16.591.886.761,99
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN	2	19.900.000,00	8	105.920.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39	1.185.204.300,00	57	1.443.771.800,00
4	DINAS PENDIDIKAN	366	8.544.109.342,00	366	8.544.109.342,00
5	DINAS PUPR	22	505.967.900,00	19	433.687.900,00
6	DINAS PERTANIAN	1	8.400.000,00	2	10.575.000,00
7	DISNAKERTRANS	1	72.210.000,00	1	72.210.000,00
8	DINAS PERUMAHAN, KPSDA	1	28.000.000,00	2	50.500.000,00
9	DINAS PERIKANAN	33	256.002.100,00	33	256.002.100,00
	TOTAL	890	27.981.380.017,99	922	27.508.662.903,99



21) Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

Saldo Awal 2022		Rp	69.450.000,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	0,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	0,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(15.000.000,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(15.000.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	54.450.000,00

Tabel 110 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			0,00
2	Belanja Modal BLUD	Belanja BLUD dari Dinas Kesehatan		0,00
	Total Mutasi Tambah			0,00
3	Reklas Keluar			
a	Dinas Lingkungan Hidup	Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Analytical Instrument	(15.000.000,00)	
	Sub Total 3			(15.000.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(15.000.000,00)

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 senilai Rp.15.000.000,00 atau turun sebesar 21,60% dikarenakan adanya reklas keluar. Keseluruhan alat ini yang tercatat pada Dinas Lingkungan hidup sebanyak (1) satu unit barang

22) Alat Peraga/Praktek Sekolah

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Peraga/Praktek Sekolah Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.53.942.000,00 atau naik sebesar 0,21% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	25.137.053.945,67
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	100.427.100,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	100.427.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang		
Reklas Keluar	Rp	(46.485.100,00)
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)
Reklas Keluar	Rp	(0,00)
Hibah Keluar	Rp	(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang		Rp 46.485.100,00
Saldo Akhir 2022		Rp 25.190.995.945,67

Tabel 111 Rincian Mutasi Alat Peraga/praktek sekolah

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			100.427.100,00
	Total Mutasi Tambah			100.427.100,00
2	Reklas Keluar			
a	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	(4.000.000,00)	
b	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Reklasifikasi ke bahan Habis Pakai - Suku Cadang Alat Laboratorium	(39.926.000,00)	
		Reklasifikasi ke Extracomptable-Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	(1.560.100,00)	
c	DPMPSTP	Reklasifikasi ke Extracomptable-Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	(999.000,00)	
	Sub Total 2			(46.485.100,00)
	Total Mutasi Kurang			(46.485.100,00)

Adapun rincian alat peraga/praktek sekolah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 112 Rincian alat peraga/praktek sekolah per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	39	355.598.866,67	37	311.420.866,67
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0	0	1	4.000.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	45.700.000,00	6	45.700.000,00
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00
5	DINAS PENDIDIKAN	1.166	24.715.984.079,00	1.145	24.711.433.079,00
6	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	62.000.000,00	1	62.000.000,00
7	DPMPSTP	2	9.213.000,00	-	-
	TOTAL	1.215	25.190.995.945,67	1.191	25.137.053.945,67



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

23) Unit Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan atau tetap senilai Rp133.681.300,00 dikarenakan tidak adanya mutasi baik masuk ataupun keluar. Adapun rincian alat laboratorium Nuklir/ Elektronika per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian alat laboratorium fisika Nuklir/ Elektronika per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	4	32.923.500,00	4	32.923.500,00
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	100.757.800,00	1	100.757.800,00
	TOTAL	5	133.681.300,00	5	133.681.300,00

24) Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 28.450.000,00, karena tidak ada mutasi tambah dan kurang. Semua Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan di catatkan pada Dinas Kesehatan sejumlah 1 (satu) unit barang.

25) Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 157.448.000,00 atau sebesar 6,42% dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	2.452.667.300,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	157.448.000,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	157.448.000,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(0,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	2.610.115.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut rincian Alat Laboratorium Lingkungan Hidup per SKPD:

Tabel 114 Rincian Alat Laboratorium Lingkungan Hidup per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	24	2.164.167.300,00	24	2.164.167.300,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	11	315.348.000,00	9	163.500.000,00
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	5.600.000,00	-	-
	Jumlah	47	2.610.115.300,00	44	2.452.667.300,00

26) Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp119.658.000,00 atau sebesar 34% dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	351.913.700,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	121.323.000,00	
Belanja BLUD	Rp	0,00	
Belanja BOS	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	121.323.000,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(1.665.000,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(1.665.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	471.571.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 115 Rincian Mutasi Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			121.323.000,00
	Total Mutasi Tambah			121.323.000,00
2	Reklas Keluar			
a	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke Extracomptable - Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	(1.665.000,00)	
	Sub Total 2			(1.665.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(1.665.000,00)

Tabel 116 Rincian Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	9	152.610.200,00	9	152.610.200,00
2	DINAS PERHUBUNGAN	1	199.303.500,00	1	199.303.500,00
3	DINAS PUPR	20	119.658.000,00	0	0
	TOTAL	30	471.571.700,00	10	351.913.700,00

27) Persenjataan Non Senjata Api

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Persenjataan Non Senjata Api Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.22.000.000,00 atau sebesar 10,60% dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	207.526.850,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	0,00	
Belanja BLUD	Rp	0,00	
Belanja BOS	Rp	0,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	0,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(22.000.000,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(22.000.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	185.526.850,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 117 Rincian Mutasi Persenjataan Non Senjata Api

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Reklas Keluar			
a	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Alat Keamanan	(22.000.000,00)	
	Sub Total 1			(22.000.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(22.000.000,00)

Tabel 118 Rincian Persenjataan Non Senjata Api per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	2	8.880.000	2	8.880.000
2	SATUAN POLISI PP	7	46.219.850	7	46.219.850
3	DINAS PERHUBUNGAN	25	88.000.000,00	27	110.000.000,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	42.427.000,00	3	42.427.000,00
	TOTAL	37	185.526.850,00	39	207.526.850,00

28) Komputer Unit

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Komputer Unit Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.9.913.533.310,93 atau naik sebesar 9,01%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	110.001.906.762,72
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	10.191.016.605,00	
Belanja BLUD	Rp	5.307.736.998,00	
Belanja BOS	Rp	1.681.761.929,65	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	39.716.000,00	
Hibah Masuk	Rp	12.045.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	17.232.276.532,65
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(12.375.000,03)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(39.716.000,00)	
Reklas Keluar	Rp	(6.753.302.221,69)	
Hibah Keluar	Rp	(513.350.000)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(7.318.743.221,72)
Saldo Akhir 2022		Rp	119.915.440.073,65



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 119 Rincian Mutasi Komputer

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			10.191.016.605,00
2	Belanja BLUD			5.307.736.998,00
3	Belanja BOS			1.681.761.929,65
4	Mutasi Masuk			
a	Sekretariat Daerah	Mutasi dari DPMD	17.350.000,00	
b	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.450.000,00	
c	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR	14.916.000,00	
	Sub Total 4			39.716.000,00
5	Hibah Masuk			
	DPMPSTSP	Hibah dari Kementerian Investasi BKPM	12.045.000,00	
	Sub Total 5			12.045.000,00
	Total Mutasi Masuk			17.232.276.532,65
6	Reklas Keluar			
a	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(18.725.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(111.250.500,00)	
b	DPMPSTSP	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(141.037.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(329.118.000,00)	
c	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(13.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(8.495.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(136.040.000,00)	
d	Kecamatan Bandung	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(27.275.000,00)	
e	DPMD	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(204.450.000,00)	
f	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(495.000.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(507.059.500,00)	
		Reklasifikasi ke Aset TAK Berwujud - Software	(34.000.000,00)	
g	Dinas Perikanan	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(29.000.000,00)	
h	Dinas Peternakan & Keswan	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(19.500.000,00)	
i	BPBD	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(17.000.000,00)	
j	Dinas Pertanian	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(29.600.000,00)	
k	Kecamatan Besuki	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(14.500.000,00)	
l	BKPSDM	Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(285.810.000,00)	
m	BPKAD	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(23.500.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain-Personal Komputer	(304.285.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
n	Kecamatan Kalidawir	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(48.850.000,00)	
o	BAPENDA	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(338.219.700,00)	
p	Kecamatan Ngantru	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(4.500.000,00)	
q	Kecamatan Pagerwojo	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(11.400.000,00)	
r	Dinas KB	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(361.506.618,00)	
s	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(41.446.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(164.898.600,00)	
t	Dinas Koperasi dan UM	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(90.125.000,00)	
u	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(110.500.000,00)	
v	Kecamatan Rejotangan	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(15.500.000,00)	
w	Kecamatan Pucanglaban	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(23.600.000,00)	
x	Dinas Perhubungan	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(194.675.000,00)	
y	Dinas Lingkungan Hidup	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(16.200.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(250.545.000,00)	
z	Kecamatan Tanggunggunung	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(18.000.000,00)	
aa	Inspektorat	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(15.900.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(139.550.000,00)	
ab	Kecamatan Gondang	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(19.200.000,00)	
ac	Kecamatan Campurdarat	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(13.000.000,00)	
ad	Kecamatan Ngunut	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(9.000.000,00)	
ae	Kecamatan Pakel	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(18.750.000,00)	
af	Kecamatan Sumbergempol	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(3.000.000,00)	
ag	Kecamatan Kauman	Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(12.000.000,00)	
ah	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(79.050.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(315.243.100,00)	
ai	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Reklasifikasi ke Extracomptable - Personal Komputer	(3.923.779,65)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(114.600.000,00)	
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(157.276.000,00)	
aj	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(12.434.074,04)	
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(348.770.000,00)	
ak	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset lain-lain - Komputer Jaringan	(32.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas ke aset lain-lain- Personal Komputer	(1.020.994.350,00)	
	Sub Total 6			(6.753.302.221,69)
7	Mutasi Keluar			
a	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	(14.916.000,00)	
b	DPMD	Mutasi ke bag. Umum	(17.350.000,00)	
c	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi Ke PUPR	(7.450.000,00)	
	Sub Total 7			(39.716.000,00)
8	Koreksi Pencatatan			
d	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		(0,03)	
e	Sekretariat DPRD		(12.375.000,00)	
	Sub Total 8			(12.375.000,03)
9	Hibah Keluar			
a	Dinas KB		(10.000.000,00)	
b	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		(503.350.000,00)	
	Sub Total 9			(513.350.000,00)
	Total Mutasi Keluar			(7.318.743.221,72)

Adapun rincian Komputer per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Komputer Unit per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	308	3.545.713.700,00	373	3.915.158.050,00
2	DINAS KESEHATAN	2.040	26.628.705.804,68	1.694	21.121.770.780,72
3	DINAS PETERNAKAN	41	493.025.000,00	27	304.075.000,00
4	BPKAD	164	2.051.398.750,00	195	2.291.783.750,00
5	INSPEKTORAT	85	569.612.500,00	85	725.062.500,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	44	627.337.875,00	63	795.137.875,00
7	DBMPTSP	71	1.068.297.000,00	92	874.407.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	55	580.927.930,00	86	847.672.930,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	63	504.660.000,00	79	569.445.000,00
10	BAPENDA	109	1.371.132.530,00	145	1.662.552.230,00
11	SATUAN POLISI PP	36	413.534.000,00	25	264.140.000,00
12	KEC. KEDUNGGWARU	22	188.534.000,00	21	178.084.000,00
13	KEC. NGUNUT	22	208.941.300,00	23	203.991.300,00
14	KEC.REJOTANGAN	13	110.200.000,00	16	125.700.000,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	24	225.434.000,00	24	215.434.000,00
16	KEC. KALIDAWIR	14	144.133.000,00	19	192.983.000,00
17	KEC. PUCANGLABAN	16	204.480.000,00	17	199.080.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	80	1.136.046.160,00	107	1.259.880.660,00
19	DINAS PENDIDIKAN	10.310	58.537.254.458,97	9.693	52.929.642.309,00
20	DISPENDUKCAPIL	76	1.293.919.425,00	90	1.371.608.740,00
21	DINAS PU PR	181	1.787.840.000,00	176	1.720.381.000,00
22	DINAS KOPERASI	64	692.530.000,00	68	782.655.000,00
23	DINAS PERTANIAN	201	1.876.658.570,00	177	1.466.971.400,00
24	BAPPEDA	189	1.937.423.650,00	176	1.762.548.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
25	DINAS KB, PPPA	152	875.567.000,00	112	1.237.073.618,00
26	BADAN KESBANGPOL	40	405.740.000,00	39	391.340.000,00
27	DISKOMINFO	95	1.185.862.750,00	93	1.149.976.950,00
28	KEC. BOYOLANGU	25	275.350.000,00	20	216.000.000,00
29	KEC. KAUMAN	16	183.732.500,00	16	170.782.500,00
30	KEC. GONDANG	25	223.758.000,00	21	183.958.000,00
31	KEC. PAGERWOJO	16	200.440.000,00	16	168.440.000,00
32	KEC. KARANGREJO	23	234.285.000,00	21	211.785.000,00
33	KEC. SENDANG	21	256.681.000,00	20	227.681.000,00
34	DINAS NAKERTRANS	118	1.137.005.000,00	102	949.005.000,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	54	626.110.000,00	70	807.285.000,00
36	DISPERINDAG	118	1.161.073.250,00	124	1.228.171.000,00
37	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	105	1.254.388.700,00	150	1.641.215.800,00
38	DINAS PERIKANAN	60	782.097.340,00	60	756.310.840,00
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	66	640.712.600,00	66	640.712.600,00
40	BKD	57	606.824.800,00	81	881.704.800,00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	41	357.733.000,00	55	447.608.500,00
42	BPBD	23	297.018.980,00	21	258.118.980,00
43	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	139	1.414.199.500,00	122	1.173.456.000,00
44	KEC. NGANTRU	11	150.310.000,00	11	137.310.000,00
45	KEC. CAMPURDARAT	15	161.616.000,00	16	162.966.000,00
46	KEC. PAKEL	20	165.315.000,00	21	161.265.000,00
47	KEC. BANDUNG	22	226.130.000,00	44	206.505.000,00
48	KEC. BESUKI	21	181.685.000,00	22	152.485.000,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	22	235.345.000,00	22	209.615.000,00
50	DINAS SOSIAL	48	478.720.000,00	46	450.970.000,00
	TOTAL	15.581	119.915.440.073,65	14.862	110.001.906.762,72

29) Peralatan Komputer

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai peralatan komputer Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.8.267.851.712,39 atau naik sebesar 23,78%, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	34.762.902.810,83
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	3.494.676.855,00	
Belanja BLUD	Rp	3.778.025.220,00	
Belanja BOS	Rp	534.972.084,86	
Reklasifikasi Masuk	Rp	2.200.000.000,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	49.600.000,00	
Hibah Masuk	Rp	2.600.400,00	
Jumlah Mutasi Tambah			Rp 10.059.874.559,86
Mutasi Kurang			
Hibah ke Luar	Rp	(11.850.000,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(49.600.000,00)	
Reklasifikasi keluar	Rp	(1.730.572.847,47)	
Jumlah Mutasi Kurang			Rp (1.792.022.847,47)
Saldo Akhir 2022			Rp 43.030.754.523,22



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 121 Rincian Mutasi Peralatan Komputer

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			3.494.676.855,00
2	Belanja BLUD			3.778.025.220,00
3	Belanja BOS			534.972.084,86
4	Reklas Masuk			
a	DINAS KESEHATAN	Reklasifikasi aset BLUD- Peralatan Personal Komputer	2.200.000.000,00	
	Sub Total 4			2.200.000.000,00
5	Mutasi Masuk			
	PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan	42.100.000,00	
	Sekretariat Daerah	Mutasi dari DPMD	4.900.000,00	
	Dinas Perumahan	Mutasi dari PUPR	2.600.000,00	
	Sub Total 5			49.600.000,00
6	Hibah Masuk			
a	DPMPSTP	Hibah dari Kementerian Investasi BKPM	2.600.400,00	
	Sub Total 6			2.600.400,00
	Total Mutasi Tambah			10.059.874.559,86
7	Mutasi Keluar			
a	DPMD	Mutasi ke Sekretariat Daerah	(4.900.000,00)	
b	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	(2.600.000,00)	
c	Dinas Perumahan	Mutasi ke Dinas PUPR	(42.100.000,00)	
	Sub Total 7			(49.600.000,00)
8	Hibah Keluar			
a	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	Hibah ke Lembaga Swasta	(10.600.000,00)	
b	Dinas KB	Hibah ke Desa	(1.250.000,00)	
	Sub Total 8			(11.850.000,00)
	Reklas Keluar			
a	BKPSDM	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(1.800.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(75.380.000,00)	
b	Dinas Lingkungan Hidup	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(72.220.000,00)	
	Kecamatan Campurdarat	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(4.950.000,00)	
	Dinas Ketahanan Pangan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(39.625.000,00)	
	DPMPSTP	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(46.925.000,00)	
	BAPENDA	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(82.400.000,00)	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(16.225.000,00)	
	Kecamatan Bandung	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(4.950.000,00)	
	DPMD	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(58.305.000,00)	
	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(79.301.000,00)	
	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(2.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(970.000,00)	
	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(11.300.000,00)	
	BAPPEDA	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(2.068.000,00)	
	BPBD	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(14.476.500,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(18.425.000,00)	
	KECAMATAN BESUKI	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(900.000,00)	
	BPKAD	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(44.325.000,00)	
	Kecamatan Kalidawir	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(6.250.000,00)	
	Dinas KB	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(10.312.000,00)	
	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(2.409.238,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(202.118.000,00)	
	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(7.880.000,00)	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(38.200.000,00)	
	Kecamatan Rejotangan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(5.750.000,00)	
	Kecamatan Pucanglaban	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(3.450.000,00)	
	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(48.900.000,00)	
	Kecamatan Tanggunggunung	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(10.450.000,00)	
	Inspektorat	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(27.200.000,00)	
	Kecamatan Gondang	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(3.200.000,00)	
	Kecamatan Ngunut	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(1.250.000,00)	
		Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(950.000,00)	
	Kecamatan Pakel	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(5.525.000,00)	
	Kecamatan Sumbergempol	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(5.950.000,00)	
		Reklasifikasi ke Bahan Habis Pakai – Bahan Komputer	(1.000.000,00)	
	Kecamatan Kauman	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(4.750.000,00)	
	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(57.680.000,00)	
	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(42.236.334,86)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(79.565.000,00)	
	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(44.036.985,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(226.218.989,61)	
	Sekretariat Daerah	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(317.795.800,00)	
	Kecamatan Tulungagung	Reklasifikasi ke Ekstrakomptabel	(450.000,00)	
	Sub Total			(1.730.572.847,47)
	Total Mutasi Kurang			(1.792.022.847,47)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adapun rincian peralatan komputer per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian peralatan komputer per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	354	1.453.435.745,00	380	1.613.619.045,00
2	DINAS KESEHATAN	1.733	15.502.338.058,00	1.733	8.716.183.862,61
3	DINAS PETERNAKAN	36	159.152.000,00	32	152.350.000,00
4	BPKAD	208	1.583.759.731,00	215	1.537.184.731,00
5	INSPEKTORAT	89	282.673.900,00	82	265.770.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	40	179.103.024,00	66	235.408.024,00
7	DBMPTSP	102	414.202.400,00	79	318.027.000,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	65	248.921.220,00	88	321.141.220,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	73	423.000.000,00	81	439.225.000,00
10	BAPENDA	197	2.283.457.820,00	215	2.338.582.820,00
11	SATUAN POLISI PP	42	178.721.000,00	33	146.997.500,00
12	KEC. KEDUNGWARU	14	68.971.500,00	13	65.021.500,00
13	KEC. NGUNUT	23	112.606.130,00	23	108.856.130,00
14	KEC.REJOTANGAN	16	116.695.000,00	19	122.445.000,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	10	87.460.000,00	13	93.410.000,00
16	KEC. KALIDAWIR	16	63.570.750,00	19	69.820.750,00
17	KEC. PUCANGLABAN	16	102.001.000,00	17	49.861.000,00
18	SEKRETARIAT DPRD	77	295.079.500,00	101	317.960.500,00
19	DINAS PENDIDIKAN	1.697	5.689.497.368,22	1.516	5.127.076.618,22
20	DISPENDUKCAPIL	178	2.127.495.705,00	198	2.177.494.938,00
21	DINAS PU PR	174	639.381.200,00	165	585.673.200,00
22	DINAS KOPERASI	61	176.240.500,00	62	174.320.500,00
23	DINAS PERTANIAN	150	407.280.000,00	146	390.305.000,00
24	BAPPEDA	253	1.567.557.450,00	251	1.524.925.450,00
25	DINAS KB, PPPA	124	454.195.591,00	130	464.507.591,00
26	BADAN KESBANGPOL	29	81.275.000,00	29	81.275.000,00
27	DISKOMINFO	163	2.005.400.300,00	149	1.350.627.300,00
28	KEC. BOYOLANGU	22	159.850.000,00	19	149.350.000,00
29	KEC. KAUMAN	20	105.631.130,00	19	97.631.130,00
30	KEC. GONDANG	20	116.669.000,00	15	43.069.000,00
31	KEC. PAGERWOJO	21	121.975.000,00	17	49.850.000,00
32	KEC. KARANGREJO	22	76.835.000,00	17	57.035.000,00
33	KEC. SENDANG	23	122.130.500,00	20	51.430.500,00
34	DINAS NAKERTRANS	104	316.563.900,00	99	293.958.900,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	77	1.916.366.000,00	97	1.935.866.000,00
36	DISPERINDAG	114	431.861.000,00	129	449.185.000,00
37	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	142	581.581.000,00	166	678.761.000,00
38	DINAS PERIKANAN	39	214.852.700,00	39	210.272.700,00
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	48	215.663.400,00	47	209.663.400,00
40	BKD	71	363.814.350,00	90	424.344.350,00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	33	98.397.000,00	49	136.872.000,00
42	BPBD	25	160.894.441,00	27	167.570.941,00
43	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	124	533.439.880,00	105	456.379.880,00
44	KEC. NGANTRU	14	48.276.150,00	11	40.076.150,00
45	KEC. CAMPURDARAT	23	108.292.130,00	25	113.242.130,00
46	KEC. PAKEL	14	109.997.550,00	13	90.672.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
47	KEC. BANDUNG	23	125.690.000,00	21	62.150.000,00
48	KEC. BESUKI	14	126.675.000,00	21	56.500.000,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	22	133.272.000,00	22	64.947.000,00
50	DINAS SOSIAL	30	138.555.500,00	29	136.005.500,00
	TOTAL	6.985	43.030.754.523,22	6.952	34.762.902.810,83

30) Alat Pelindung

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Alat keamanan dan perlindungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp73.342.500,00, karena tidak ada mutasi tambah dan kurang. Semua Alat keamanan dan perlindungan di catat pada Satuan Polisi Pamong Praja sejumlah 21 (dua puluh satu) unit barang.

31) Rambu Lalu Lintas Darat

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Rambu Lalu Lintas Darat Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.645.997.958,53 atau sebesar 15,76% dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	4.099.184.466,13
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	948.747.958,53	
Belanja Modal BLUD	Rp	17.250.000,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	965.997.958,53
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(320.000.000,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(320.000.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	4.745.182.424,66

Tabel 123 Rincian Mutasi Rambu Lalu Lintas Darat

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			948.747.958,53
2	Belanja Modal BLUD			17.250.000,00
	Total Mutasi Tambah			965.997.958,53
3	Reklas Keluar			
	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi ke Alat Bantu - Electric Generating Set	(320.000.000,00)	
	Sub Total 3			(320.000.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(320.000.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut rincian Rambu Lalu Lintas Darat per SKPD:

Tabel 124 Rincian Rambu Lalu Lintas Darat per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PERHUBUNGAN	130	4.670.157.424,66	63	4.045.934.466,13
2	KEC. NGANTRU	1	16.500.000,00	1	16.500.000,00
3	DINAS PENDIDIKAN	1	36.750.000,00	1	36.750.000,00
4	DINAS KESEHATAN	1	17.250.000,00	-	-
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	2.775.000,00	-	-
6	KECAMATAN SENDANG	1	1.750.000,00	-	-
	TOTAL	135	4.745.182.424,66	65	4.099.184.466,13

32) Peralatan Olahraga

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai peralatan olahraga lainnya per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp10.066.000,00 atau sebesar 1,80% dikarenakan adanya realisasi dari belanja modal BOS di dinas pendidikan, dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	557.928.403,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	0,00	
Belanja Modal BOS	Rp	51.168.448,00	
Reklas Masuk	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	51.168.448,00
Mutasi Kurang			
Reklas Keluar	Rp	(41.102.448,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklas Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(41.102.448,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	567.994.403,00

Tabel 125 Rincian Mutasi Peralatan Olahraga

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal BOS			51.168.448,00
	Total Mutasi Tambah			51.168.448,00
2	Reklas Keluar			
a	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Reklasifikasi Peralatan Permainan ke Extracomptable	(41.102.448,00)	
	Sub Total 2			(41.102.448,00)
	Total Mutasi Kurang			(41.102.448,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut rincian Peralatan Olahraga per SKPD:

Tabel 126 Rincian Peralatan Olahraga per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	429	560.494.403,00	422	550.428.403,00
2	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00
	TOTAL	430	567.994.403,00	423	557.928.403,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
c. Gedung dan Bangunan	1.060.414.146.971,4	995.632.300.854,91

Nilai gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi, meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi, dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.

Rincian mutasi nilai gedung dan bangunan Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp 995.632.300.854,91
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 73.160.519.435,28	
Belanja BLUD	Rp 20.922.794.550,00	
Mutasi Masuk	Rp 7.994.182.693,43	
Reklasifikasi Masuk	Rp 9.142.270.494,28	
Hibah Masuk	Rp 3.492.550.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 114.712.317.172,99
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp (465.945.738,06)	
Koreksi Pencatatan	Rp (0,00)	
Mutasi Keluar	Rp (7.994.182.693,43)	
Hibah Keluar	Rp (0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (41.470.342.625,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp (49.930.471.056,49)
Saldo Akhir 2022		Rp 1.060.414.146.971,41

Mutasi gedung dan bangunan terdiri dari:

Tabel 127 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			73.160.519.435,28
2	Belanja Modal BLUD			20.922.794.550,00
3	Reklas Masuk			
a	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi dari Jalan Kabupaten	150.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
b	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi dari Alat Bantu Lainnya	161.325.000,00	
		Reklasifikasi dari KDP	5.480.914.502,00	
c	BPKAD	Reklasifikasi dari Belanja Jasa Konsultasi Penilaian Tanah dan Bangunan	9.656.648,88	
d	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklasifikasi dari Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.707.060.023,40	
e	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Gedung Puskesmas Kedungwaru	393.785.000,00	
		Reklasifikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Gedung Puskesmas Rejotangan	393.285.000,00	
		Reklasifikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Gedung Puskesmas Campurdarat	414.477.820,00	
f	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Gedung Dekranasda	185.722.500,00	
		Reklasifikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Gedung Kantor I	47.944.500,00	
		Reklasifikasi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – Gedung Kantor II	198.099.500,00	
	Sub Total 3			9.142.270.494,28
4	Mutasi dari SKPD lain			
a	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman - Gedung Kantor Permanen UPTD	1.662.793.244,55	
b	Kecamatan Kedungwaru	Mutasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Gedung tenis	2.910.174.000,00	
		Mutasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Bangunan Mandala Krida	198.294.000,00	
c	DPMPSTP	Mutasi dari Sekretariat Daerah - Gedung MPP	259.841.400,00	
d	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi dari PUPR - Bangunan Gedung Kantor Permanen	225.895.000,00	
		Mutasi dari PUPR - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	997.442.000,00	
		Mutasi dari PUPR - Gedung Instalasi Studio	1.730.086.400,00	
e	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mutasi dari BPKAD - Bangunan Peninggalan	9.656.648,88	
	Sub Total 4			7.994.182.693,43
5	Hibah Masuk			
a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Hibah dari Kemenperindag - Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar - Bangunan Pasar Ngunut	3.004.100.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
b	Dinas Lingkungan Hidup	Hibah dari Bank Jatim - Taman Titik Nol	488.450.000,00	
	Sub Total 5			3.492.550.000,00
	Total Mutasi Tambah			114.712.317.172,99
6	Reklas Keluar			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke KDP – Puskesmas Kedungwaru	(294.400.000,00)	
		Reklasifikasi ke Pemeliharaan - Ruang WH	(203.350.000,00)	
		Reklasifikasi ke Pemeliharaan - Ruang Kepala Dinas Kesehatan	(219.448.400,00)	
		Reklasifikasi ke Pemeliharaan - Gedung Sabha Husada Bhakti	(190.900.000,00)	
		Reklasifikasi ke KDP - Jasa Konsultansi Penyusunan MasterPlan dan DED	(302.373.900,00)	
		Reklasifikasi ke KDP – RSUD Iskak	(1.150.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jembatan – Puskesmas Gondang	(299.500.000,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain – Rumdin Dokter	(25.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke KDP – Gedung RSUD Campurdarat	(38.641.679.760,00)	
b	Kecamatan Sumbergempol	Reklasifikasi ke Pemeliharaan - Pemeliharaan Pengecatan Gedung	(19.797.000,00)	
c	Dinas Pendidikan, Pemuda dan OR	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(74.286.000,00)	
d	Dinas Lingkungan Hidup	Reklasifikasi ke Bahan Habis Pakai - Bahan/Bibit Tanaman Lainnya	(49.607.565,00)	
	Sub Total 6			(41.470.342.625,00)
7	Mutasi ke SKPD lain			
a	Sekretariat Daerah	Mutasi ke DPMPSTSP - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(117.920.000,00)	
		Mutasi ke DPMPSTSP - Bangunan Gedung Balai Rakyat	(82.000.000,00)	
		Mutasi ke DPMPSTSP - Paving Tempat Parkir Balai Rakyat	(59.921.400,00)	
b	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	(997.442.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Gedung IPLT Moyoketen	(225.895.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Gedung Instalasi Studio	(1.730.086.400,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
c	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mutasi Ke PUPR - Gedung Kantor Permanen UPTD	(1.662.793.244,55)	
d	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Mutasi ke Kecamatan Kedungwaru - Gedung tenis	(2.910.174.000,00)	
		Mutasi ke Kecamatan Kedungwaru - Bangunan Mandala Krida	(198.294.000,00)	
e	BPKAD	Mutasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(9.656.648,88)	
	Sub Total 7			(7.994.182.693,43)
8	Penghapusan			
a	Dinas Kesehatan	Penghapusan - UPT Puskesmas Campurdarat	(211.767.404,73)	
		Penghapusan - Rumdin Dokter PKM Campurdarat	(15.000.000,00)	
		Penghapusan - Gedung Poskesdes Tunggulsari	(95.028.000,00)	
		Penghapusan - Tempat Sepeda	(31.000.000,00)	
b	Kecamatan Karangrejo	Penghapusan - Pagar	(41.150.333,33)	
c	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penghapusan - Paving Dekranasda	(72.000.000,00)	
	Sub Total 8			(465.945.738,06)
	Total Mutasi Kurang			(49.930.471.056,49)

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp64.781.846.116,50 atau 6,51%. Berikut rincian gedung per SKPD Pemerintah Kabupaten Tulungagung:

Tabel 128 Rincian Gedung dan Bangunan per SKPD

(Dalam rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	45	15.440.759.475,00	49	15.700.600.875,00
2	DINAS KESEHATAN	524	215.843.634.904,70	525	190.048.456.264,05
3	DINAS PETERNAKAN	46	8.174.769.377,56	44	5.802.574.746,56
4	BPKAD	12	21.676.878.500,00	12	21.676.878.500,00
5	INSPEKTORAT	2	909.100.000,00	2	909.100.000,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASY	9	2.060.447.125,00	11	2.060.447.125,00
7	DBMPTSP	8	1.193.783.860,00	5	933.942.460,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	82	17.341.615.946,90	77	16.213.680.467,00
9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	13	3.358.502.500,00	13	3.358.502.500,00
10	BAPENDA	18	1.103.214.908,00	21	1.103.214.908,00
11	SATUAN POLISI PP	3	604.119.500,00	3	604.119.500,00
12	KEC. KEDUNGWARU	8	4.100.411.750,00	5	991.943.750,00
13	KEC. NGUNUT	5	695.488.500,00	5	695.488.500,00
14	KEC.REJOTANGAN	2	1.079.737.000,00	3	1.079.737.000,00
15	KEC. SUMBERGEMPOL	6	551.628.000,00	4	452.775.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
16	KEC. KALIDAWIR	3	647.381.000,00	3	647.381.000,00
17	KEC. PUCANGLABAN	9	1.029.281.750,00	9	1.029.281.750,00
18	SEKRETARIAT DPRD	8	6.127.639.750,00	7	6.079.542.450,00
19	DINAS PENDIDIKAN	3.175	424.811.141.803,48	3.094	402.102.618.803,48
20	DISPENDUKCAPIL	6	2.999.664.078,88	6	2.999.664.078,88
21	DINAS PU PR	116	30.140.324.189,80	84	29.813.732.545,25
22	DINAS KOPERASI	16	3.866.224.056,35	16	3.866.224.056,35
23	DINAS PERTANIAN	90	10.323.586.080,50	90	10.323.586.080,50
24	DINAS KB, PPPA	49	6.088.455.375,22	49	6.088.455.375,22
25	BADAN KESBANGPOL	4	1.504.316.000,00	5	1.504.316.000,00
26	BAPPEDA	2	2.058.124.800,00	2	2.058.124.800,00
27	DISKOMINFO	12	1.704.144.662,00	14	1.704.144.662,00
28	KEC. BOYOLANGU	1	85.198.000,00	1	85.198.000,00
29	KEC. KAUMAN	12	1.579.528.000,00	12	1.579.528.000,00
30	KEC. GONDANG	6	1.825.816.459,54	6	1.825.816.459,54
31	KEC. PAGERWOJO	3	381.585.000,00	3	381.585.000,00
32	KEC. KARANGREJO	10	993.865.666,67	11	1.035.016.000,00
33	KEC. SENDANG	4	1.000.586.000,00	4	1.000.586.000,00
34	DINAS NAKERTRANS	15	7.807.861.580,00	15	7.807.861.580,00
35	DINAS PERHUBUNGAN	56	14.104.833.751,44	61	13.418.919.251,44
36	DISPERINDAG	2.144	142.936.530.705,44	2.070	135.809.701.819,44
37	DINAS PERUMAHAN, KP SDA	105	33.203.396.109,89	155	31.635.690.954,44
38	DINAS PERIKANAN	65	13.075.148.118,58	64	13.075.148.118,58
39	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	80	28.922.583.362,27	80	29.771.353.989,99
40	BKD	2	800.202.000,00	2	585.120.000,00
41	DINAS KETAHANAN PANGAN	32	5.032.077.250,00	31	4.833.227.250,00
42	BPBD	6	478.007.000,00	6	478.007.000,00
43	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	89	8.693.438.434,19	71	8.421.893.594,19
44	KEC. NGANTRU	9	2.943.656.300,00	9	2.943.656.300,00
45	KEC. CAMPURDARAT	9	1.382.457.000,00	9	1.362.457.000,00
46	KEC. PAKEL	5	1.773.464.000,00	5	1.773.464.000,00
47	KEC. BANDUNG	4	2.113.492.250,00	4	2.113.492.250,00
48	KEC. BESUKI	11	3.133.368.000,00	11	3.133.368.000,00
49	KEC. TANGGUNGUNUNG	11	1.477.452.790,00	11	1.477.452.790,00
50	DINAS SOSIAL	13	1.235.224.300,00	13	1.235.224.300,00
	TOTAL	6.965	1.060.414.146.971,41	6.812	995.632.300.854,91

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

2.428.275.773.714,46

2.365.612.150.503,26

Nilai dari jalan, irigasi dan jaringan di sini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau membuat jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Termasuk dalam nilai jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan peningkatan yang dapat menambah manfaat dan efektifitas fungsi.

Adapun mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp 2.365.612.150.503,26
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 98.754.888.169,07	
Belanja Modal BLUD	Rp 6.165.474.913,00	
Reklas Masuk	Rp 3.863.383.080,00	
Mutasi dari SKPD	Rp 453.317.865.522,90	
Lain		
Koreksi Pencatatan	Rp 0,78	
Jumlah Mutasi Tambah		562.101.611.685,75
Mutasi Kurang		
Hibah Keluar	Rp (208.099.645,87)	
Koreksi pencatatan	Rp (2.967.924.620,37)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp (488.509.037.258,31)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (7.752.926.950,00)	
Juml Mutasi Kurang		(499.437.988.474,55)
Saldo Akhir 2022		2.428.275.773.714,46

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, maka jumlah keseluruhan aset tetap-jalan, irigasi, dan jaringan Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp62.663.623.211,20 atau 2,65%.

Berikut nilai dan rincian jenis aset tetap jalan, irigasi dan jaringan adalah:

Tabel 129 Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Jalan	1.082	1.634.714.657.038,75	1.235	1.602.918.920.369,56
2	Jembatan	343	177.506.022.981,43	335	171.091.180.531,43
3	Bangunan Air Irigasi	1.406	402.312.606.687,39	1.403	387.074.107.658,40
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	13	1.287.584.778,85	13	1.287.584.778,85
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1	198.275.000,00	1	198.275.000,00
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	48	13.759.552.293,73	47	13.742.739.293,73
7	Bangunan Air Bersih/Air baku	79	14.515.196.144,80	65	14.460.496.144,80
8	Bangunan Air Kotor	155	27.468.529.470,67	156	26.803.896.116,54
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	11	1.527.765.083,77	8	412.052.083,77
10	Instalasi Air Kotor	56	5.837.669.337,96	55	4.611.915.237,97
11	Instalasi Pengolahan Sampah	4	5.331.061.000,00	2	68.161.000,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	24	2.131.056.888,00	24	2.131.056.888,00
13	Instalasi Gardu Listrik	118	10.448.434.476,00	118	10.448.434.476,00
14	Instalasi Pertahanan	1	47.650.000,00	1	47.650.000,00
15	Instalasi Gas	5	476.871.733,00	5	476.871.733,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
16	Instalasi Pengaman	2	21.385.000,00	2	21.385.000,00
17	Jaringan Air Minum	786	94.625.888.831,84	684	94.625.888.831,84
18	Jaringan Listrik	233	32.306.744.078,27	221	31.579.022.178,37
19	Jaringan Telepon	19	498.350.250,00	19	498.350.250,00
20	Jaringan Gas	193	3.260.472.640,00	191	3.114.162.931,00
	Jumlah	4.579	2.428.275.773.714,46	4.585	2.365.612.150.503,26

1) **Jalan**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai jalan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.31.795.736.669,19 atau 1,98%. Rincian mutasi jalan Tahun 2021 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp 1.602.918.920.369,56
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 72.878.639.094,19	
Koreksi Pencatatan	Rp 0,78	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp 1.294.026.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp 2.697.841.630,00	
Hibah Masuk	Rp 0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		76.870.506.724,97
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp (0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp (2.967.924.620,37)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp (1.294.026.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (5.621.647.700,00)	
Hibah Keluar	Rp (35.191.171.735,41)	
Jumlah Mutasi Kurang		(45.074.770.055,78)
Saldo Akhir 2022		1.634.714.657.038,75

Tabel 130 Rincian Mutasi Jalan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			72.878.639.094,19
2	Reklas Masuk			
a	Dinas PUPR	Reklasifikasi dari KDP ke Jalan Kabupaten/Kota - Jalan Kabupaten Lokal	752.381.500,00	
		Reklasifikasi dari KDP ke Jalan Kabupaten/Kota - Jalan Kabupaten Lokal	750.434.400,00	
		Reklasifikasi dari KDP ke Jalan Kabupaten/Kota - Jalan Kabupaten Lokal	1.195.025.730,00	
	Sub Total 2			2.697.841.630,00
3	Koreksi Bertambah	Koreksi Tambah Harga Perolehan Sebab Salah Hitung	0,78	
	Sub Total 3			0,78
4	Mutasi Masuk			
a	Dinas Peternakan & Keswan	Mutasi dari Dinas PUPR - Tanah Urug Jalan RPH Bandung	746.877.000,00	
b	Dinas Perhubungan	Mutasi dari PUPR - Terminal Bus Tulungagung	150.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
c	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mutasi dari PUPR - Paving/Saluran/MCK	74.429.000,00	
		Mutasi dari PUPR - Aspal Jalan Umum	322.720.000,00	
	Sub Total 4			1.294.026.000,00
	Total Mutasi Tambah			76.870.506.724,97
5	Hibah Keluar			
a	Dinas PUPR	Hibah ke Pusat Jln.Jayengkusuma	(1.950.000.000,00)	
		Hibah ke Pusat Jln.Pahlawan	(2.808.000.000,00)	
		Hibah ke Pusat Saluran Pengering Jalan dan Trotoar Jln.Pahlawan	(737.910.000,00)	
		Hibah ke Pusat Pembuatan Plat Saluran I Gusti Ngurah Rai (Muka Perum Wabup Lama)	(18.350.000,00)	
		Hibah ke Pusat Ruas Jalan Pahlawan dan Ruas Jalan Jayeng Kusuma	(5.032.025.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Ngrejo	(147.041.250,00)	
		Hibah ke Desa Jalan menuju Makam Mbah Mundir	(97.564.000,00)	
		Hibah ke Desa Desa Sanan menuju Makam	(97.925.000,00)	
		Hibah ke Desa Dusun Sumberbendo Desa Sumberdadap	(361.050.000,00)	
		Hibah ke Desa Desa Kacangan	(410.525.000,00)	
		Hibah ke Desa Desa Banyu Urip	(149.213.500,00)	
		Hibah ke Desa Desa Betak (DAK Transportasi - Perdesaan)	(362.967.874,37)	
		Hibah ke Desa Jalan Sumberejo Kulon - Sumberingin Kidul	(434.897.800,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Blimbing	(385.868.600,00)	
		Hibah ke Desa Lingkar Desa Kaligentong (BK)	(196.735.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Segawe - Berak	(195.828.800,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Kalangan	(97.919.250,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Campurdarat - Ngebong (BK)	(810.275.750,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Demuk	(196.055.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Betak	(196.055.000,00)	
		Hibah ke Desa jalan Jembatan Wates	(338.353.393,64)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Banyuurip	(195.885.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Sumberejo Kulon	(195.830.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan di Kawasan Pantai Kedungtumpang	(772.640.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Rintisan menuju Pantai Sanggar	(729.740.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Sumberejo Kulon - Sumberingin Kulon	(196.934.600,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Kates	(98.428.550,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Demuk (BK Provinsi)	(198.814.300,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Campurdarat - Ngebong	(195.730.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Pakel-Desa Bangunmulyo ((176.305.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Demuk (BK Provinsi)	(196.585.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Sumberingin Kulon (BK Provinsi)	(196.140.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Campurdarat-Ngebong (BK Provinsi)	(195.728.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Talapan - Waung	(197.035.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Demuk (BK Provinsi)	(198.009.300,00)	
		Hibah ke Desa Peningkatan/Pelebaran Jalan Desa Sobontoro	(172.386.500,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Pulosari	(638.650.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Pucung Lor	(196.495.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Dukuh - Kalitelu	(839.861.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Kalibatur	(198.855.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Betak	(196.460.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Banyuurip	(198.565.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Rejosari Kec. Kalidawir	(194.865.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Demuk	(196.500.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Sumberejo kulon	(201.280.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Boyolangu	(132.470.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Tanggung	(147.420.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Jengglungharjo	(196.352.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Buntaran	(147.375.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Tenggong	(147.375.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Sukorejo Wetan	(196.750.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Karang Sari	(147.375.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Tanen	(201.550.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Mulyosari	(196.395.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Nyawangan	(147.320.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Keboireng-Pantai Klatak	(195.790.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Mirigambar	(201.485.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Jabalsari	(191.670.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Wates	(196.730.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Gesikan - Wates (Paving)	(246.802.749,92)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Saluran Pengereng Jalan Desa Sambijajar	(171.890.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Saluran Pengereng Jalan Desa Wonorejo	(171.890.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Gorong - gorong Kotak Desa Sanan	(151.095.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Bendungan	(191.498.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Demuk	(201.420.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Bungur	(199.103.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Ngunggahan	(193.880.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Tenggarejo	(147.260.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Pulotondo	(196.455.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Tapan	(196.495.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Pakisaji	(196.075.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Karangtalun	(196.565.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Blimbing	(196.565.000,00)	
		Hibah ke Desa Rehabilitasi Jalan Desa Panjerejo	(196.480.000,00)	
		Hibah ke Desa Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sumberdadap - Demuk	(192.205.000,00)	
		Hibah ke Desa Rehabilitasi Jalan Lingkar Desa Kaligentong	(201.437.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Sumberingin Kidul (BK Provinsi)	(201.422.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Kalibatur (BK Provinsi)	(191.560.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Rejoagung (BK Provinsi)	(147.330.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Aryojeding (BK Provinsi)	(718.410.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Tanen (BK Provinsi)	(154.145.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Hibah ke Desa Pembangunan Saluran Pengeriing Jalan Desa Pojok (BK Provinsi)	(193.958.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Waung menuju Talapan (BK Provinsi)	(191.320.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Waung - Talapan (Sisa BK)	(128.455.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Ngunggahan (BK Provinsi)	(186.140.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Kresikan	(178.205.500,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Doroampel	(245.558.105,57)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Nyawangan	(198.899.212,27)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Jatimulyo – Bungur	(613.317.250,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Gamping	(164.758.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Sukorejo Wetan	(286.612.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Tenggur	(224.137.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Rejotangan – Buntaran	(836.427.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Sumberejo Kulon	(367.535.366,48)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Ruas Jalan Pulosari – Ngunut	(255.851.859,26)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Kaligentong	(169.166.000,00)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Desa Domasan	(152.874.000,00)	
		Hibah ke Desa Rehabilitasi Jalan Desa Karangrejo Kec. Boyolangu	(164.791.132,52)	
		Hibah ke Desa Pembangunan Jalan Desa Panggungrejo	(195.911.600,00)	
		Hibah ke Desa Jln. Ds. Talapan	(292.500.000,00)	
		Hibah ke Desa Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Desa Gedangan Kec. Karangrejo (Belum Masuk Ruas)	(325.415.000,00)	
		Hibah ke Desa Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Karangtalun (Belum Masuk Ruas)	(911.017.491,38)	
		Sub Total 5		(35.191.171.735,41)
6	Mutasi Keluar			
a	Dinas PUPR	Mutasi ke Disperindag Paving Pasar Rejotangan dan Pasar Karangrejo	(74.429.000,00)	
		Mutasi ke Disperindag Jalan Lingkar Pasar Ngemplak	(322.720.000,00)	
		Mutasi ke Disperindag Paving Pasar Rejotangan dan Pasar Karangrejo	(746.877.000,00)	
		Mutasi ke Dishub - Terminal Bus	(150.000.000,00)	
		Sub Total 6		(1.294.026.000,00)
7	Reklas Keluar			
a	Dinas Perhubungan	Reklasifikasi ke Gedung Bangunan – Terminal Bus	(150.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
b	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Boyolangu - Campurdarat	(404.135.400,00)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Jarakan-Gondang	(286.989.300,00)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 1 Kec. Campurdarat	(243.415.522,56)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 2 Kec. Campurdarat	(161.668.840,44)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalana Desa Campurdarat - Wates	(234.059.637,00)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 1	(5.252.411,04)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 2	(560.198.377,92)	
		Reklasifikasi ke KDP - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Mojoarum – Sidem	(575.981.211,04)	
		Reklasifikasi ke KDP - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Besuki - Sawentar	(1.346.339.000,00)	
		Reklasifikasi ke KDP - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pakisrejo-Winong	(849.023.000,00)	
		Reklasifikasi ke KDP - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karangsono-Sumberdadap	(804.585.000,00)	
	Sub Total 7			(5.621.647.700,00)
8	Koreksi Keluar			
a	Dinas PUPR	Koreksi pencatatan karena kurang volume - Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Bandung - Besuki (DAK) pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	(581.877.963,88)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Bandung - Sodo (DAK) pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	(651.003.257,26)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sodo - Campurdarat pada Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan	(386.373.705,21)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Jabalsari - Sambirobyong 1 pada Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan	(14.377.635,95)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Podorejo - Tunggangri (DAK) pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	(142.719.334,41)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Pucanglaban - Molang pada Sub-Kegiatan Pembangunan Jalan	(632.506.167,82)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Mojoarum - Sidem	(19.664.445,52)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Picisan - Nyawangan pada Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan	(17.880.193,44)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - - Ruas Jalan Kelurahan Bago 1 pada Sub-Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	(14.193.350,28)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Gambiran - Geger 1 pada Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan	(21.600.000,00)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Desa Ngubalan pada Sub-Kegiatan Pembangunan Jalan	(2.244.679,15)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Sumberingin Kidul - Pandansari	(136.422.065,22)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Bangoan 1 pada Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan	(8.274.670,18)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sumberdadi - Pulotondo pada Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan	(218.861.889,26)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Panjerejo - Aryojeding	(9.690.200,93)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Desa Kauman	(6.056.419,19)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Sumberagung 4	(38.550.861,75)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Kendalbulur - Pasar Gempolan pada Sub-Kegiatan Rehabilitasi Jalan	(11.835.651,10)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Ruas Jalan Karanganom - Tiudan	(36.772.622,37)	
		Koreksi pencatatan karena kurang volume - Rehabilitasi Jalan Desa Sembon	(17.019.507,30)	
		Koreksi kurang Nilai perolehan Jalan Kabupaten (sbb pembulatan)	(0,15)	
	Sub Total 8			(2.967.924.620,37)
	Total Mutasi Kurang			(45.074.770.055,78)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut rincian jalan berdasarkan SKPD:

Tabel 131 Rincian Jalan per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2	768.627.000,00	1	21.750.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7	250.464.500,00	7	250.464.500,00
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	5	33.500.000,00	5	33.500.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	931	1.588.278.586.571,05	1.094	1.558.821.078.802,64
5	DINAS PERTANIAN	4	752.725.600,00	4	752.725.600,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	1.003.914.390,00	5	1.003.914.390,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	6	931.907.000,00	6	931.907.000,00
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	397.149.000,00		
9	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	88	33.287.957.433,50	86	32.683.980.832,72
10	DINAS PERIKANAN	14	2.540.133.244,20	14	2.540.133.244,20
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	5	842.907.500,00	3	446.912.000,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	5.432.554.000,00	10	5.432.554.000,00
13	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	3	194.230.800,00		
	TOTAL	1.082	1.634.714.657.038,75	1.235	1.602.918.920.369,56

2) Jembatan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai jembatan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp6.414.842.450,00 atau meningkat sebesar 3,75%. Rincian mutasi Jembatan Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	171.091.180.531,43
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	6.083.214.100,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	611.488.450,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah			6.694.702.550,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(279.860.100,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(279.860.100,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	177.506.022.981,43



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut rincian jembatan berdasarkan SPKD:

Tabel 132 Rincian Mutasi Jembatan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			6.083.214.100,00
2	Reklas masuk			
a	Dinas PUPR	Reklasifikasi dari Perencanaan – Jembatan Pada Jalan Desa	118.923.000,00	
		Reklasifikasi dari Pengawasan – Jembatan Pada Jalan Desa	193.065.450,00	
b	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Jembatan Titian	88.650.000,00	
		Reklasifikasi dari Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Jembatan Titian	210.850.000,00	
	Sub Total 2			611.488.450,00
	Total Mutasi masuk			6.694.702.550,00
3	Reklas Keluar			
		Reklasifikasi ke KDP - Penggantian Jembatan Ruas Jalan Dono - Krosok	(279.860.100,00)	
	Sub Total 3			(279.860.100,00)
	Total Mutasi keluar			(279.860.100,00)

Tabel 133 Rincian Jembatan per SKPD

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	2	359.050.000,00	1	59.550.000,00
2	DINAS PEKERJAAN MUM DAN PENATAAN RUANG	339	176.108.702.981,43	332	169.993.360.531,43
3	DINAS SOSIAL, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	66.940.000,00	1	66.940.000,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	971.330.000,00	1	971.330.000,00
	TOTAL	343	177.506.022.981,43	335	171.091.180.531,43

3) Bangunan Air Irigasi

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Bangunan Air Irigasi per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp15.238.499.028,99 atau 3,94%. Rincian mutasi Bangunan Air Irigasi Tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp 387.074.107.658,40
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 17.089.918.178,99	
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp 378.714.366.756,40	
Reklasifikasi Masuk	Rp 0,00	
Hibah Masuk	Rp 0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 395.804.284.935,39
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp (0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp (0,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp (378.714.366.756,40)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (1.851.419.150,00)	
Hibah Keluar	Rp (0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp (380.565.785.906,40)
Saldo Akhir 2022		Rp 402.312.606.687,39

Tabel 134 Rincian Mutasi Bangunan Air

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			17.089.918.178,99
2	Mutasi Masuk			
a	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – Bangunan Pengambilan Irigasi	3.248.016.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – Bangunan Pembawa Irigasi	321.987.836.650,57	
		Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – Bangunan Pembuang Irigasi	37.886.386.955,83	
		Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – Bangunan Pelengkap Irigasi	11.590.769.000,00	
		Mutasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman – Bangunan Pembuang Irigasi	70.936.600,00	
b	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR - Bangunan Pengambilan Irigasi	15.000.000,00	
		Mutasi dari Dinas PUPR - Bangunan Pembuang Irigasi	3.915.421.550,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	Sub Total 2			378.714.366.756,40
	Total Mutasi Tambah			395.804.284.935,39
3	Mutasi Keluar			
a	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Broncaptering Dsn. Sine Ds. Kalibatur	(15.000.000,00)	
		Mutasi ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Bangunan Pembuang Irigasi	(3.915.421.550,00)	
b	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi Ke PUPR - Bangunan Pengambilan Irigasi	(3.248.016.000,00)	
		Mutasi Ke PUPR - Bangunan Pembawa Irigasi	(321.987.836.650,57)	
		Mutasi Ke PUPR - Bangunan Pembuang Irigasi	(37.886.386.955,83)	
		Mutasi Ke PUPR - Bangunan Pelengkap Irigasi	(11.590.769.000,00)	
		Mutasi Ke PUPR - Bangunan Pembuang Irigasi	(70.936.600,00)	
	Sub Total 2			(378.714.366.756,40)
3	Reklas Keluar			
a	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke KDP	(1.027.483.550,00)	
			(823.935.600,00)	
	Sub Total 3			(1.851.419.150,00)
	Total Mutasi Kurang			(380.565.785.906,40)

Adapun rincian Bangunan Air irigasi berdasarkan SKPD adalah:

Tabel 135 Rincian Bangunan Air irigasi per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2	244.199.000,00	1	96.750.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	103.900.000,00	3	103.900.000,00
3	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	199.370.100,00	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.348	389.642.837.035,39	20	3.987.841.550,00
5	DINAS PERTANIAN	7	930.988.000,00	7	930.988.000,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	196.500.002,00	6	196.500.002,00
7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	19	3.930.421.550,00	1.346	374.693.737.106,40
9	DINAS PERIKANAN	11	1.613.741.000,00	11	1.613.741.000,00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6	5.339.550.000,00	6	5.339.550.000,00
11	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	2	109.100.000,00	2	109.100.000,00
	TOTAL	1.406	402.312.606.687,39	1.403	387.074.107.658,40

4) **Bangunan Pengairan Pasang Surut**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Bangunan Pengairan Pasang Surut Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.1.287.584.778,85, karena tidak ada mutasi tambah dan kurang.

Adapun rincian Bangunan Pengairan Pasang Surut berdasarkan SKPD adalah:

Tabel 136 Rincian Bangunan Pengairan Pasang Surut per SKPD

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2	4.675.000,00	2	4.675.000,00
2	DINAS PERIKANAN	9	1.116.701.778,85	9	1.116.701.778,85
3	DINAS KETAHANAN PANGAN	2	166.208.000,00	2	166.208.000,00
	TOTAL	13	1.287.584.778,85	13	1.287.584.778,85

5) **Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Bangunan Pengairan Pasang Surut Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 198.275.000,00, karena tidak ada mutasi tambah dan kurang.

Adapun rincian Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam SKPD adalah:

Tabel 137 Rincian Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam per SKPD

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	198.275.000,00	1	198.275.000,00
	TOTAL	1	198.275.000,00	1	198.275.000,00

6) **Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 16.813.000,00 atau sebesar 0,12%. Rincian mutasi Tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	13.742.739.293,73
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	16.813.000,00	
Mutasi Masuk	Rp	13.507.941.293,73	
Reklasifikasi Masuk	Rp		
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	13.524.754.293,73
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi Keluar	Rp	(13.507.941.293,73)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(13.507.941.293,73)
Saldo Akhir 2022		Rp	13.759.552.293,73

Tabel 138 Rincian Mutasi Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			16.813.000,00
2	Mutasi Masuk			
	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari PUPR dengan barang Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	197.675.000,00	
		Mutasi bertambah dari PUPR dengan barang Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	1.075.704.600,00	
		Mutasi bertambah dari PUPR dengan barang Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	12.234.561.693,73	
	Sub Total 2			13.507.941.293,73
	Total Mutasi Tambah			13.524.754.293,73
3	Mutasi Keluar			
	Dinas PUPR	Mutasi keluar ke Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman dengan barang Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	(197.675.000,00)	
		Mutasi keluar ke Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman dengan barang Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air)	(1.075.704.600,00)	
		Mutasi keluar ke Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman dengan barang	(12.234.561.693,73)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)		
	Sub Total 3			(13.507.941.293,73)
	Total Mutasi keluar			(13.507.941.293,73)

Berikut rincian per SKPD atas nilai Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah:

Tabel 139 Rincian Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	209.798.000,00	1	209.798.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	45	13.507.941.293,73
3	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	45	13.507.941.293,73	-	-
5	DINAS PERIKANAN	1	16.813.000,00	-	-
	TOTAL	48	13.759.552.293,73	47	13.742.739.293,73

7) Bangunan Air Bersih/Baku

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai bangunan air bersih/baku per 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan maupun penurunan dengan nilai aset sebesar Rp 54.700.000,00 atau sebesar 0,38% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp 14.460.496.144,80
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 0,00	
Mutasi Masuk	Rp 2.920.913.466,80	
Reklasifikasi Masuk	Rp 54.700.000,00	
Hibah Masuk	Rp 0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 2.975.613.466,80
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp (0,00)	
Mutasi Keluar	Rp (2.920.913.466,80)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (0,00)	
Hibah Keluar	Rp (0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp (2.920.913.466,80)
Saldo Akhir 2022		Rp 14.515.196.144,80



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 140 Rincian Mutasi Bangunan Air Bersih/Baku

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			
2	Mutasi Masuk			
	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari PUPR dengan barang Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	2.920.913.466,80	
	Sub Total 2			2.920.913.466,80
3	Reklasifikasi Masuk			
	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD dari Alat Bantu	54.700.000,00	
	Sub Total 3			54.700.000,00
	Total Mutasi Bertambah			2.975.613.466,80
4	Reklasifikasi Keluar			
	Dinas PUPR	Mutasi Keluar ke Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman dengan barang Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	(2.920.913.466,80)	
	Sub Total 4			(2.920.913.466,80)
	Total Mutasi Berkurang			(2.920.913.466,80)

Adapun rincian per SKPD atas nilai bangunan air bersih/baku:

Tabel 141 Rincian Bangunan Air Bersih/Baku per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14	173.833.338,00	1	173.833.338,00
2	Dinas Penataan Ruang	-	-	11	2.920.913.466,80
3	Disperum KP SDA	61	14.124.757.144,80	50	11.203.843.678,00
4	Dinas Peternakan	1	60.759.000,00	1	60.759.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	1	12.416.662,00	1	12.416.662,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1	88.730.000,00	1	88.730.000,00
7	Dinas Kesehatan	1	54.700.000,00	-	-
	Jumlah	79	14.515.196.144,80	65	14.460.496.144,80

8) **Bangunan Air Kotor**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai bangunan air kotor per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar perubahan yakni sebesar Rp664.633.354,13 atau naik sebesar 2.48%. Rincian mutasi Tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	26.803.896.116,54
Mutasi Tambah			
Belanja Modal BLUD	Rp	373.380.000,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	21.864.246.930,54	
Reklasifikasi Masuk	Rp	499.353.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	22.736.979.930,54
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(208.099.645,87)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	(21.864.246.930,54)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(22.072.346.576,41)
Saldo Akhir 2022		Rp	27.468.529.470,67

Tabel 142 Rincian Mutasi Bangunan Air Kotor

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal BLUD			373.380.000,00
2	Reklas Masuk			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi dari Alat Bantu dengan barang IPAL	499.353.000,00	
	Sub Total 2			499.353.000,00
3	Mutasi Masuk			
	Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman	Mutasi dari Dinas PUPR dengan Barang Bangunan Tadah Air Hujan dan Talang	21.864.246.930,54	
	Sub Total 3			21.864.246.930,54
	Total Mutasi Tambah			22.736.979.930,54
4	Mutasi Keluar			
	Dinas PUPR	Mutasi dari Dinas PUPR dengan Barang Bangunan Tadah Air Hujan dan Talang	(21.864.246.930,54)	
	Sub Total 4			(21.864.246.930,54)
5	Penghapusan			
	Dinas Kesehatan	Penghapusan IPAL Campurdarat	(208.099.645,87)	
	Sub Total 5			(208.099.645,87)
	Total Mutasi Berkurang			(22.072.346.576,41)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut rincian nilai bangunan air kotor per SKPD:

Tabel 143 Rincian Bangunan air kotor per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	25	3.921.906.840,13	26	3.257.273.486,00
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2	101.830.000,00	2	101.830.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	407.894.000,00	5	407.894.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	116	21.864.246.930,54
5	KECAMATAN KARANGREJO	1	99.227.500,00	1	99.227.500,00
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	122	22.937.671.130,54	6	1.073.424.200,00
	TOTAL	155	27.468.529.470,67	156	26.803.896.116,54

9) Instalasi Air Bersih/Air Baku

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Instalasi Air Bersih/Baku per 31 Desember 2022 mengalami penambahan dengan nilai penambahan sebesar Rp. 1.115.713.000,00 atau 270,77% dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	412.052.083,77
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	1.115.713.000,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	290.000.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	1.405.713.000,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	(290.000.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(290.000.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	1.527.765.083,77

Tabel 144 Rincian Mutasi Bangunan Air Kotor

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			1.115.713.000,00
2	Mutasi Masuk			
	Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari PUPR dengan Barang berupa Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	290.000.000,00	
	Sub Total 2			290.000.000,00
	Total Mutasi Bertambah			1.405.713.000,00
3	Mutasi Keluar			



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Pengairan dan Kawasan Permukiman	(290.000.000)	
	Sub Total 3			(290.000.000,00)
	Total Mutasi Berkurang			(290.000.000,00)

Adapun rincian per SKPD atas nilai bangunan air bersih/baku:

Tabel 145 Rincian Instalasi Air Bersih /Air Baku per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas PUPR	-	0	2	290.000.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	5	1.192.458.500,00	3	81.745.500,00
3	Dinas Perhubungan	1	19.800.000,00	1	19.800.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	9.725.000,00	1	9.725.000,00
5	Dinas Perikanan	1	10.781.583,77	1	10.781.583,77
6	Dinas pengairan & Kawasan Permukiman	2	290.000.000,00	-	-
7	Tulungagung & Kelurahan	1	5.000.000,00	-	-
	Jumlah	11	1.527.765.083,77	8	412.052.083,77

10) Instalasi air kotor

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai instalasi air kotor per 31 Desember 2022 mengalami penambahan nilai aset sebesar sebesar Rp.1.225.754.099,99 atau 26,58% dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	4.611.915.237,97
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	1.225.754.099,99	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	1.598.983.707,75	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	2.824.737.807,74
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	(1.598.983.707,75)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(1.598.983.707,75)
Saldo Akhir 2022		Rp	5.837.669.337,96



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 146 Rincian Mutasi Instalasi Air Kotor

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			1.225.754.099,99
2	Mutasi Masuk			
	Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari PUPR dengan Barang berupa Sistem Pengolahan Air Sederhana (SIPAS)	1.598.983.707,75	
	Sub Total 2			1.598.983.707,75
	Total Mutasi Bertambah			2.824.737.807,74
3	Mutasi Keluar			
	Dinas PUPR	Mutasi ke Dinas Pengairan dan Kawasan Permukiman	(1.598.983.707,75)	
	Sub Total 3			(1.598.983.707,75)
	Total Mutasi Berkurang			(1.598.983.707,75)

Adapun rincian per SKPD atas nilai instalasi air kotor sebagai berikut:

Tabel 147 Rincian Instalasi Air Kotor per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinkes	34	2.402.489.452,94	34	2.402.489.452,94
2	Dinas Peternakan	3	265.924.534,36	3	265.924.534,36
3	BPKAD	1	73.450.000,00	1	73.450.000,00
4	Dispenduk Capil	2	5.770.821,12	2	5.770.821,12
5	DPUPR	-	-	8	1.598.983.707,75
6	Dinas Koperasi	1	33.665.331,65	1	33.665.331,65
7	Dinas Kesehatan	1	59.084.625,00	1	59.084.625,00
8	Dinsos,KB	1	22.779.526,30	1	22.779.526,30
9	Kec Gondang	1	42.093.540,46	1	42.093.540,46
10	Dinas Perhubungan	1	92.385.173,39	1	92.385.173,39
11	Disperindag	1	14.150.000,00	1	14.150.000,00
12	Kec Ngantru	1	1.138.525,00	1	1.138.525,00
13	Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman	9	2.824.737.807,74	-	-
	Jumlah	56	5.837.669.337,96	55	4.611.915.237,97

11) Instalasi Pengolahan Sampah

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Instalasi Pengolahan Sampah per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.262.900.000,00 atau naik 7721,28% dengan rincian mutasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	68.161.000,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal BLUD	Rp	5.262.900.000,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	5.262.900.000,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	(0,00)	
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(0,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	5.331.061.000,00

Berikut rincian per SKPD atas nilai Instalasi Pengolah Sampah:

Tabel 148 Instalasi Pengolah Sampah per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	14.800.000,00	1	14.800.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	53.361.000,00	1	53.361.000,00
3	DINAS KESEHATAN	2	5.262.900.000,00	-	-
	TOTAL	4	5.331.061.000,00	2	68.161.000,00

12) **Instalasi Pembangkit listrik**

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai instalasi gardu listrik per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi tambah dan kurang yakni sebesar Rp2.131.056.888,00. Berikut rincian instalasi gardu listrik per SKPD:

Tabel 149 Rincian Instalasi Pembangkit Listrik per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas PU Penataan Ruang	3	423.163.500,00	3	423.163.500,00
2	Dinas Perumahan KPSDA	10	1.259.238.388,00	10	1.259.238.388,00
3	Dinas Pertanian	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00
4	Dinas Peternakan	5	33.655.000,00	5	33.655.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	1	56.500.000,00	1	56.500.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	3	124.000.000,00	3	124.000.000,00
7	Dinas Perikanan	1	185.500.000,00	1	185.500.000,00
	Jumlah	24	2.131.056.888,00	24	2.131.056.888,00



13) Instalasi Gardu Listrik

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai instalasi gardu listrik per 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan yakni sebesar Rp. 10.448.434.476,00 dengan rincian OPD sebagai berikut:

Berikut rincian per SKPD atas nilai Instalasi gardu Listrik:

Tabel 150 Rincian Instalasi Gardu Listrik per SKPD

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	4	14.649.000,00	4	14.649.000,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	783.351.400,00	3	783.351.400,00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	115.600.400,00	3	115.600.400,00
4	KEC. KEDUNGWARU	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
5	KEC. NGUNUT	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
6	KEC. REJOTANGAN	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
7	KEC. SUMBERGEMPOL	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
8	KEC. KALIDAWIR	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
9	KEC. PUCANGLABAN	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
10	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3	104.430.000,00	3	104.430.000,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2	84.093.000,00	2	84.093.000,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	49.159.000,00	1	49.159.000,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	2	49.995.000,00	2	49.995.000,00
14	DINAS PERTANIAN	1	74.148.000,00	1	74.148.000,00
15	KEC. BOYOLANGU	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
16	KEC. KAUMAN	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
17	KEC. GONDANG	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
18	KEC. PAGERWOJO	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
19	KEC. KARANGREJO	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
20	KEC. SENDANG	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
21	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12	50.055.350,00	12	50.055.350,00
22	DINAS PERHUBUNGAN	38	6.797.780.100,00	38	6.797.780.100,00
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	44.135.000,00	5	44.135.000,00
24	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	18	1.699.195.888,00	18	1.699.195.888,00
25	DINAS PERIKANAN	5	431.942.338,00	5	431.942.338,00
26	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	13.900.000,00	1	13.900.000,00
27	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00
28	KEC. NGANTRU	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
29	KEC. CAMPURDARAT	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
30	KEC. PAKEL	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
31	KEC. BANDUNG	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
32	KEC. BESUKI	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
33	KEC. TANGGUNGUNUNG	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00
	TOTAL	118	10.448.434.476,00	118	10.448.434.476,00

14) Instalasi Pertahanan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai instalasi Pertahanan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp47.650.000,00, karena tidak ada mutasi tambah dan kurang. Sebanyak satu unit instalasi pertahanan senilai Rp47.650.000,00 tersebut dicatat pada Dinas PU Penataan Ruang.

15) Instalasi Gas

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Instalasi Gas per 31 Desember 2022 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan dengan perincian OPD sebagai berikut :

Berikut rincian per SKPD atas nilai Instalasi Gas:

Tabel 151 Instalasi Pengolah Gas per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	4	424.006.055,00	4	424.006.055,00
2	DINAS PERIKANAN	1	52.865.678,00	1	52.865.678,00
	TOTAL	5	476.871.733,00	5	476.871.733,00

16) Instalasi Pengaman

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Instalasi Pengaman per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan karena tidak ada mutasi tambah dan kurang. Adapun rincian instalasi pengaman per SKPD sebagai berikut:

Tabel 152 Rincian Instalasi Pengaman per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas Peternakan	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	1	6.385.000,00	1	6.385.000,00
	Jumlah	2	21.385.000,00	2	21.385.000,00

17) Jaringan Air Minum

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Jaringan air minum per 31 Desember 2022 mengalami tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebesar Rp94.625.888.831,84. Adapun rincian Jaringan Air Minum yang dicatat SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 153 Rincian Jaringan Air minum per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	DINAS KESEHATAN	105	7.319.248.130,00	105	7.319.248.130,00
2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	50.225.000,00	1	50.225.000,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	12	268.000.000,00	12	268.000.000,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	102	31.510.408.867,68	102	31.510.408.867,68
6	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
7	DINAS PERTANIAN	1	28.000.000,00	1	28.000.000,00
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8	496.258.000,00	8	496.258.000,00
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3	100.235.400,00	3	100.235.400,00
10	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	435	53.249.912.860,16	435	53.249.912.860,16
11	DINAS PERIKANAN	14	1.599.100.574,00	14	1.599.100.574,00
	TOTAL	684	94.625.888.831,84	684	94.625.888.831,84

18) Jaringan Listrik

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Jaringan listrik per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 727.721.899,90 atau 2,30%. Adapun rincian mutasinya sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	31.579.022.178,37
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	344.836.695,90	
Belanja Modal BLUD	RP	382.885.204,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	727.721.899,90
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(0,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	32.306.744.078,27



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 154 Rincian Mutasi Jaringan Listrik

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal	Belanja Modal	344.836.695,90	344.836.695,90
		Belanja Modal BLUD	382.885.204,00	382.885.204,00
	Total Mutasi Tambah		727.721.899,90	727.721.899,90

Adapun rincian per SKPD atas nilai jaringan listrik sebagai berikut:

Tabel 155 Rincian Jaringan listrik per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	5	404.195.000,00	5	404.195.000,00
2	DINAS KESEHATAN	70	10.956.462.717,00	66	10.573.577.513,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3	183.954.175,00	2	183.954.175,00
4	BPKAD	1	504.744.750,00	1	504.744.750,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	401.948.200,00	8	401.948.200,00
6	KEC.REJOTANGAN	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00
7	SEKRETARIAT DPRD	2	47.300.000,00	2	47.300.000,00
8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1	31.000.000,00	1	31.000.000,00
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3	76.740.500,00	3	76.740.500,00
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	220.189.000,00	4	220.189.000,00
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1	82.806.230,00	1	82.806.230,00
11	DINAS PERTANIAN	1	36.764.000,00	1	36.764.000,00
12	KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	14.065.968,48	1	14.065.968,48
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2	201.520.000,00	2	201.520.000,00
14	KEC. KAUMAN	2	43.200.000,00	2	43.200.000,00
15	KEC. GONDANG	1	31.450.000,00	1	31.450.000,00
16	KEC. KARANGREJO	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00
17	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	20.780.000,00	3	20.780.000,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	95	13.631.776.614,79	90	13.286.939.918,89
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	6	225.763.667,00	6	225.763.667,00
20	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR	11	4.509.271.110,00	11	4.509.271.110,00
21	DINAS PERIKANAN	5	362.679.571,00	5	362.679.571,00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	195.080.000,00	1	195.080.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
23	DINAS KETAHANAN PANGAN	3	9.992.900,00	1	9.992.900,00
24	KEC. NGANTRU	2	99.059.675,00	2	99.059.675,00
	TOTAL	233	32.306.744.078,27	221	31.579.022.178,37

19) Jaringan Telepon

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai jaringan telepon per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan mutasi Bertambah maupun berkurang dengan nilai aset sebesar Rp498.350.250,00 Berikut rincian nilai jaringan telepon per SKPD:

Tabel 156 Jaringan Telepon per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas Kependudukan Catatan Sipil	1	24.887.500,00	1	24.887.500,00
2	Dinas Perindustrian	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00
3	Disperum KPSDA	1	9.750.000,00	1	9.750.000,00
4	Dinas Kelautan	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00
5	Dinas Kesehatan	3	267.225.000,00	3	267.225.000,00
6	Dinkes	2	10.322.000,00	2	10.322.000,00
7	BPKAD	1	48.500.000,00	1	48.500.000,00
8	DBMPTSP	4	74.100.000,00	4	74.100.000,00
9	Bag Umum	4	47.565.750,00	4	47.565.750,00
	Jumlah	19	498.350.250,00	19	498.350.250,00

20) Jaringan Gas

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai jaringan gas per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dengan nilai aset sebesar Rp.146.309.709,00 atau 4,70% dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	3.114.162.931,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp		0,00
Belanja Modal BLUD	RP	146.309.709,00	
Koreksi Pencatatan	Rp		0,00
Mutasi dari SKPD lain	Rp	1.616.978.500,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp		0,00
Hibah Masuk	Rp		
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	1.763.288.209,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp		(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(1.616.978.500,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp		(0,00)
Hibah Keluar	Rp		(0,00)
Jumlah Mutasi Kurang			Rp (1.616.978.500,00)
Saldo Akhir 2022			Rp 3.260.472.640,00

Tabel 157 Rincian Mutasi Jaringan Gas

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			146.309.709,00
2	Mutasi Bertambah			
	Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman	Mutasi bertambah dari PUPR dengan barang Jaringan Pipa Distribusi tekanan Tinggi	1.616.978.500,00	
	Sub Total 2			1.616.978.500,00
	Total Mutasi Tambah			1.763.288.209,00
3	Mutasi Berkurang			
	Dinas PUPR	Mutasi keluar ke Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman dengan barang Jaringan Pipa Distribusi tekanan Tinggi	(1.616.978.500,00)	
	Sub Total 3			(1.616.978.500,00)
	Total Mutasi Berkurang			(1.616.978.500,00)

Adapun rincian per SKPD atas nilai Jaringan Gas sebagai berikut:

Tabel 158 Rincian Jaringan Gas per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas PUPR	-	-	7	1.616.978.500,00
2	Dinas Kesehatan	179	1.224.148.140,00	177	1.077.838.431,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	7	419.346.000,00	7	419.346.000,00
4	Dinas Pengairan & Kawasan Permukiman	7	1.616.978.500,00	-	-
	Jumlah	193	3.260.472.640,00	191	3.114.162.931,00

		31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
e.	Aset Tetap Lainnya	127.396.438.712,34	117.249.497.003,81

Nilai aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk aset lainnya yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Rincian mutasi aset tetap lainnya Tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp 117.249.497.003,81
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 575.324.200,00	
Belanja Modal BOS	Rp 4.716.704.900,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp 120.000,00	
Mutasi dari SKPD Lain	Rp 342.081.800,00	
Koreksi Pencatatan	Rp 4.907.686.008,53	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 10.541.916.908,53
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp (0,00)	
Mutasi ke SKPD Lain	Rp (342.081.800,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (52.893.400,00)	
Hibah Keluar	Rp (0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp (394.975.200,00)
Saldo Akhir 2022		Rp 127.396.438.712,34

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.10.146.941.708,53 atau 8,65%. Rincian jenis dan nilai aset tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 159 Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Jumlah barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	3.260.161	111.044.676.098,84	1.852.604	106.193.451.390,31
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00
3	Barang Bercorak Kesenian	2.307	9.053.916.110,22	3.500	8.769.036.110,22
4	Barang Bercorak Kebudayaan	45	159.635.000,00	20	76.134.000,00
5	Hewan Piaraan	11	20.000.000,00	11	20.000.000,00
6	Tanaman	165	7.033.661.503,28	60	2.125.975.503,28
7	Kartografi, Naskah dan Lukisan	45	69.550.000,00	44	49.900.000,00
	Jumlah	3.262.735	127.396.438.712,34	1.856.240	117.249.497.003,81

Nilai Belanja Modal dana BLUD sebesar Rp106.893.632.978,50 diklasifikasikan ke dalam rincian objek aset tetap sebagai berikut:

Belanja Modal BLUD sebagai berikut:

Tabel 160 Rincian Belanja Modal BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	55.182.832,00
2.	Alat Besar Darat	4.745.250,00
3.	Alat Bantu	1.209.996.470,00
4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.120.024.000,00
5.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	29.589.500,00
6.	Alat Bengkel Tak Bermesin	19.097.395,00
7.	Alat Ukur	36.545.313,50
8.	Alat Pengolah	46.955.000,00
9.	Alat Kantor	1.308.260.870,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Uraian	Jumlah
10.	Alat Kedokteran	56.915.648.873,00
11.	Alat Komunikasi	2.195.937.876,00
12.	Alat Rumah Tangga	6.421.312.476,00
13.	Alat Studio	1.075.931.994,00
14.	Komputer Unit	5.307.736.998,00
15.	Peralatan Komputer	3.778.025.220,00
16.	Unit Alat Laboratorium	98.677.273,00
17.	Alat Kesehatan	33.996.875,00
18.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	121.949.300,00
19.	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.250.000,00
20.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.922.794.550,00
21.	Bangunan Air Kotor	373.380.000,00
22.	Instalasi pengolahan Sampah	5.262.900.000,00
23.	Jaringan Listrik	382.885.204,00
24.	Jaringan gas	146.309.709,00
25.	Barang Perpustakaan Tercetak	8.500.000,00
Jumlah		106.893.632.978,50

Belanja Modal BOS senilai Rp10.172.259.666,72 diklasifikasikan ke dalam rincian objek aset tetap sebagai berikut:

Tabel 161 Rincian Belanja Modal BOS

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Alat Kantor	605.606.542,00
2.	Alat Rumah Tangga	2.414.772.209,17
3.	Komputer Unit	1.681.761.929,65
4.	Peralatan Komputer	534.972.084,86
5.	Alat Studio	175.773.553,04
6.	Peralatan Olahraga	51.168.448,00
7.	Barang Perpustakaan tercetak	4.585.428.500,00
8.	Barang Bercorak Kebudayaan	122.776.400,00
Jumlah		10.172.259.666,72

1. Bahan Perpustakaan Tercetak

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.4.851.224.708,53 atau 4,57%. Rincian mutasi nilai bahan kepustakaan tercetak Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	106.193.451.390,31
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	265.796.200,00	
Belanja Modal BOS	Rp	4.585.428.500,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	8,53	
Belanja Modal BLUD	Rp	8.500.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	4.859.724.708,53



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(8.500.000,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(8.500.000,00)	
Saldo Akhir 2022	Rp	111.044.676.098,84	

Tabel 162 Rincian Mutasi Bahan Perpustakaan Tercetak

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			265.796.200,00
2	Belanja BOS			
	Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga	Relaisasi Belanja Modal BOS SD & SMP	4.585.428.500,00	
	Sub Total 2			4.585.428.500,00
3	Belanja BLUD			
	Dinas Kesehatan	Realisasi Belanja Modal BLUD	8.500.000,00	
	Sub Total 3			8.500.000,00
4	Koreksi Pencatatan			
	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	Koreksi Tambah Saldo Awal	8,53	
	Sub Total 4			8,53
	Total Mutasi Tambah			4.859.724.708,53
5	Reklasifikasi Keluar			
	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset keluar ke Aset tak Berwujud	(8.500.000,00)	
	Sub Total 5			(8.500.000,00)
	Total Mutasi Berkurang			(8.500.000,00)

Berikut tabel yang menunjukkan rincian Bahan Perpustakaan Tercetak per SKPD:

Tabel 163 Rincian Bahan Perpustakaan Tercetak per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	222	83.777.540,00	222	83.777.540,00
2	DINAS KESEHATAN	340	122.089.200,00	340	122.089.200,00
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6	92.900.000,00	6	92.900.000,00
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35.606	3.312.631.470,00	35.511	3.301.772.270,00
6	KEC. SUMBERGEMPOL	678	8.240.000,00	678	8.240.000,00
7	SEKRETARIAT DPRD	945	490.082.750,00	719	437.282.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
8	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.222.302	106.863.878.938,84	1.815.066	102.076.313.430,31
9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	5.040.000,00	1	5.040.000,00
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	52	26.875.700,00	52	26.875.700,00
11	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	6	5.150.500,00	6	5.150.500,00
12	KEC. NGANTRU	2	10.000,00	2	10.000,00
	TOTAL	3.260.161	111.044.676.098,84	1.852.604	106.193.451.390,31

2. Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai aset tetap lainnya – Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp15.000.000,00. Pencatatan atas Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro, seluruhnya berada pada Dinas Penanaman Modal PTSP yaitu sebanyak 1 unit barang.

3. Kartografi, Naskah dan Lukisan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai aset tetap lainnya – Kartografi, Naskah dan Lukisan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp19.650.000,00 atau 39,38% dengan perincian sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp	49.900.000,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	24.450.000,00	
Belanja Modal BOS	Rp	0,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Belanja Modal BLUD	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	24.450.000,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(4.800.000,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(4.800.000,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	69.550.000,00

Tabel 164 Rincian Mutasi Kartografi, Naskah dan Lukisan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			24.450.000,00
	Total Mutasi Tambah			24.450.000,00
2	Reklasifikasi Keluar			
	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi Aset keluar ke extracomptable	(4.800.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		dengan barang gambar presiden		
	Sub Total 2			(4.800.000,00)
	Total Mutasi Berkurang			(4.800.000,00)

Berikut tabel yang menunjukkan rincian Kartografi, Naskah dan Lukisan per SKPD:

Tabel 165 Rincian Kartografi, Naskah dan Lukisan per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	19.650.000,00	0	-
2	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAH RAGA	44	49.900.000,00	44	49.900.000,00
	Jumlah	45	69.550.000,00	44	49.900.000,00

4. Barang Bercorak Kesenian

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Barang Bercorak Kesenian per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp284.880.000,00 atau 103,25%. Rincian mutasi nilai Barang Bercorak Kesenian tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022 Rp **8.769.036.110,22**

Mutasi Tambah

Belanja Modal	Rp	285.078.000,00
Belanja Modal BOS	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Mutasi dari SKPD lain	Rp	342.081.800,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00
Hibah Masuk	Rp	0,00

Jumlah Mutasi Tambah Rp **627.159.800,00**

Mutasi Kurang

Penghapusan	Rp	(0,00)
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(342.081.800,00)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(198.000,00)
Hibah Keluar	Rp	(0,00)

Jumlah Mutasi Kurang Rp **(342.279.800,00)**

Saldo Akhir 2022 Rp **9.053.916.110,22**

Tabel 166 Rincian Mutasi Barang Bercorak Kesenian

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			285.078.000,00
2	Mutasi bertambah			
a	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Mutasi bertambah dari Sekretariat Daerah dengan barang berupa gamelan	197.492.800	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
b	DPMPSTSP	Mutasi bertambah dari Sekretariat Daerah	104.450.000,00	
c	Sekretariat Daerah	Mutasi Bertambah dari Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	40.139.000	
	Sub Total 2			342.081.800,00
	Total Mutasi Tambah			627.159.800,00
3	Mutasi Keluar			
a	Sekretariat Daerah	Mutasi keluar ke Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan DPMPSTSP	(301.942.800,00)	
b	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	Mutasi keluar ke Sekretariat Daerah	(40.139.000,00)	
	Sub Total 3			(342.081.800,00)
4	Reklasifikasi Keluar			
a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa	Reklas ke aset lain-lain	(50.000,00)	
b	Kecamatan Kedungwaru	Reklas ke aset lain-lain	(3.000,00)	
c	Kecamatan Kalidawir	Reklas ke aset lain-lain	(25.000,00)	
d	Kecamatan Sendang	Reklas ke barang Bercorak Kebudayaan	(120.000,00)	
	Sub Total 4			(198.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(342.279.800,00)

Berikut tabel yang menunjukkan rincian Barang Bercorak Kesenian per SKPD:

Tabel 167 Rincian Barang Bercorak Kesenian per SKPD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	44	319.594.000,00	19	581.397.800,00
2	DINAS KESEHATAN	86	302.841.000,00	1	302.841.000,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2	11.890.000,00	2	11.890.000,00
4	BPKAD	1	34.750.000,00	1	34.750.000,00
5	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	-	1	50.000,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	126.105.000,00	2	126.105.000,00
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	490.000,00	2	490.000,00
8	KEC. KEDUNGGWARU		-	1	3.000,00
9	KEC. SUMBERGEMPOL	42	482.000,00	42	482.000,00
10	KEC. KALIDAWIR		-	1	25.000,00
11	SEKRETARIAT DPRD	1	300.000,00	1	300.000,00
12	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.936	7.629.595.810,22	3.253	7.639.734.810,22
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1	185.000,00	1	185.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	2022		2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
16	KEC. GONDANG	3	35.000,00	3	35.000,00
17	KEC. PAGERWOJO	1	200.000,00	1	200.000,00
18	KEC. KARANGREJO	2	20.000,00	2	20.000,00
19	KEC. SENDANG		-	2	120.000,00
20	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	200.000,00	3	200.000,00
21	DINAS PERHUBUNGAN	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	129	424.705.800,00	127	29.300.000,00
23	KEC. TULUNGAGUNG DAN KELURAHAN	28	15.854.500,00	26	15.854.500,00
24	KEC. NGANTRU	1	3.000,00	1	3.000,00
25	KEC. CAMPURDARAT	2	425.000,00	2	425.000,00
26	KEC. PAKEL	1	50.000,00	1	50.000,00
27	KEC. BESUKI	1	45.000,00	1	45.000,00
28	KEC. TANGGUNGUNUNG	1	30.000,00	1	30.000,00
29	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU	7	104.450.000,00	-	-
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8	57.165.000,00	-	-
	TOTAL	2.307	9.053.916.110,22	3.500	8.769.036.110,22

5. Alat Bercorak Kebudayaan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai aset tetap lainnya – Alat bercorak Kebudayaan per 31 Desember 2022 mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 83.501.000,00. Atau 109,68% Rincian mutasi nilai Barang Bercorak Kebudayaan tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	76.134.000,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	0,00	
Belanja Modal BOS	Rp	122.776.400,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	120.000,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	122.896.400,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(39.395.400,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(39.395.400,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	159.635.000,00

Tabel 168 Rincian Mutasi Barang Bercorak Kebudayaan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal BOS			122.776.400,00
2	Reklasifikasi Masuk			
a	Kecamatan Sendang	Reklas Masuk dari Barang Bercorak Kesenian	120.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	Sub Total 2			120.000,00
	Total Mutasi Tambah			122.896.400,00
3	Reklasifikasi Keluar			
a	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	Reklasifikasi ke Extra Comptable	(39.395.400,00)	
	Sub Total 3			(39.395.400,00)
	Total Mutasi Kurang			(39.395.400,00)

Berikut tabel yang menunjukkan rincian Alat bercorak Kebudayaan per SKPD:

Tabel 169 Alat Bercorak Kebudayaan

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	SEKRETARIAT DAERAH	5	37.230.000,00	5	37.230.000,00
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3	5.324.000,00	3	5.324.000,00
3	KEC. NGUNUT	1	25.000,00	1	25.000,00
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	32	87.836.000,00	20	4.455.000,00
5	DINAS PERIKANAN	1	28.800.000,00	1	28.800.000,00
6	KEC. BANDUNG	1	300.000,00	1	300.000,00
7	KEC. SENDANG	2	120.000,00	-	-
	TOTAL	45	159.635.000,00	31	76.134.000,00

6. Hewan Piaraan

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Hewan Piaraan per 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan sebab tidak ada mutasi kurang dan tambah selama tahun 2021. Nilai Hewan Piaraan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.000.000,00 yang secara keseluruhan dicatat oleh Setda Kabupaten Tulungagung.

Tabel 170 Rincian Hewan SKPD

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Sekretariat Daerah	11	20.000.000,00	11	20.000.000,00
	TOTAL	11	20.000.000,00	11	20.000.000,00

7. Tanaman

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai Tanaman per 31 Desember 2022 mengalami perubahan sebesar Rp 4.907.686.000,00. Atau 230,84% Rincian mutasi nilai Tanaman tahun 2022 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Saldo Awal 2022		Rp	2.125.975.503,28
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	0,00	
Belanja Modal BOS	Rp	0,00	
Koreksi Pencatatan	Rp	4.907.686.000,00	
Mutasi dari SKPD lain	Rp	0,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp	0,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	4.907.686.000,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	Rp	(0,00)	
Mutasi ke SKPD lain	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(0,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(0,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	7.033.661.503,28

Tabel 171 Rincian Mutasi Tanaman

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Koreksi Pencatatan Tambah			4.907.686.000,00
a	Dinas lingkungan Hidup	Koreksi Pencatatan tanaman Sonokeling sebanyak 105 buah	4.907.686.000,00	
	Total Mutasi Tambah			4.907.686.000,00

Tabel 172 Rincian Tanaman SKPD

(Dalam Rupiah)

No	SKPD	Per 31 Desember 2022		Per 31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Dinas PU PR	34	799.767.525,00	34	799.767.525,00
2	Dinas Pertanian	3	16.262.000,00	3	16.262.000,00
3	Kec Tulungagung	6	21.000,00	6	21.000,00
4	Kec Rejotangan	2	125.000,00	2	125.000,00
5	Kec Besuki	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00
6	Dinas Kesehatan	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	112	6.197.012.155,00	7	1.289.326.155,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	6.473.823,28	6	6.473.823,28
	TOTAL	165	7.033.661.503,28	60	2.125.975.503,28

		31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.770.062.210,00	7.445.729.040,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atas perolehan aset.

Dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp41.324.333.170,00 atau 555,01%. Rincian mutasi nilai konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	7.445.729.040,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp		0,00
Belanja Modal BLUD	Rp		0,00
Koreksi Pencatatan	Rp		0,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	48.639.552.210,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	48.639.552.210,00
Mutasi Kurang			
Koreksi Pencatatan	Rp	(752.381.500,00)	
Mutasi Keluar	Rp	(0,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp	(6.562.837.540,00)	
Hibah Keluar	Rp	(0,00)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(7.315.219.040,00)
Saldo Akhir 2022		Rp	48.770.062.210,00

Tabel 173 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Reklas Masuk			
a	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi masuk dari aset BLUD bangunan Kesehatan	1.150.000.000,00	
		Reklasifikasi masuk dari aset BLUD bangunan Kesehatan Termin I (50%)	147.200.000,00	
		Reklasifikasi masuk dari aset BLUD bangunan Kesehatan Termin II	147.200.000,00	
		Reklasifikasi masuk dari aset BLUD bangunan Gedung Kantor Pengadaan Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan MasterPlan dan DED	302.373.900,00	
		Reklasifikasi masuk dari aset bangunan kesehatan RSUD Campurdarat	38.641.679.760,00	
	b. Dinas PUPR	Reklas dari Bangunan Pembuang irigasi - DED Rehabilitasi Saluran Pembuang Sumber Pandan Desa Sendang Kecamatan Sendang	9.733.600,00	
		Reklas dari Bangunan Pembuang irigasi - Fisik Rehabilitasi Saluran Pembuang	375.672.977,52	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Pelem Ds. Pelem Kec. Campurdarat		
		Reklas dari Bangunan Pembuang irigasi - Rehabilitasi Saluran Pembuang Serbung Ds. Talun Kulon Kec. Bandung	642.076.972,48	
		Reklas dari Bangunan Pembuang irigasi - Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Ngelo II Desa Nglutung Kecamatan Sendang	823.935.600,00	
		Reklas dari Jalan- Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Plosokandang 1	6.599.000,00	
		Reklas dari Jalan -Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kedungsoko - Bendo, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ngrendeng - Bendo, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kelurahan Kampungdalem 2	34.210.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pembangunan Saluran Pengereng Jalan Ruas Jalan Bandung - Sodo dan Ruas Jalan Bandung – Besuki	59.163.000,00	
		Reklas dari Jalan -Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Tertek - Kutoanyar dan Jalan Ruas Jalan Desa Bungur	59.829.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Doroampel 1	14.800.000,00	
		Reklas dari Jalan - Penggantian Gorong - Gorong Ruas Jalan Mojosari - TPA (ded fisiknya th depan)	5.947.000,00	
		Reklas dari Jalan - Penggantian Gorong - gorong Ruas Jalan Gandong – Bantengan	5.947.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Kresikan	17.471.500,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mangunsari – Bungur	6.800.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Boyolangu – Campurdarat	36.753.500,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Jarakan-Gondang	14.866.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sawo-Tumpakmergo	26.920.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tanggulkundung-Siyotobagus	22.290.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Gamping-Sawo	14.860.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mergayu-Sebalor	22.290.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pucanglaban 3, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tawang Sari 4, Ruas Jalan Winong 5 dan Ruas Jalan Winong 6, Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Mangunsari - Majan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Plosokandang 1	7.332.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sendang-Penampean	21.763.500,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 1 Kec. Campurdarat	4.477.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 2 Kec. Campurdarat	2.972.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalana Desa Campurdarat - Wates	4.304.500,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 1	99.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 2	10.600.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Mojoarum - Sidem	10.901.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Besuki - Sawentar	14.930.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pakisrejo-Winong	14.930.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karangsono-Sumberdadap	14.930.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mangunsari - Bungur	6.993.000,00	
		Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tanggunggunung - Rejosari	6.993.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Ngrance dan Ruas Jalan Mojoarum-Sidem dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Suwaru-Wateskroyo dan Ruas Jalan Suwaru-Tulungrejo	29.500.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Kradinan-Sidomulyo	6.763.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Geger-Kedoyo 1	9.850.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Krosok-Nglurup	29.947.800,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pucung Lor 1	9.950.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Pinggirsari	12.967.500,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Padangan 5	6.982.500,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lingkar Desa Kates	6.939.100,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kelurahan Kenayan	5.948.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pembangunan Jalan Ruas Jalan Kalitalun – Sine	4.850.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Pagerwojo-Judeg (Desa Sidomulyo)	6.915.700,00	
		Reklas dari Jalan - Pembangunan Saluran Pengereng Jalan Ruas Jalan Boyolangu-Campurdarat, Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Tulungrejo-Pabrik Karet, Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Pagerwojo-Judeg (Desa Sidomulyo), Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Karangrejo-Sendang dan Ruas Jalan Sendang-Penampean dan Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan TPA-Segawe	5.960.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Besuki-Sawentar	27.751.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Panjerejo – Tenggong	13.875.000,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Boyolangu – Campurdarat	404.135.400,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Jarakan-Gondang	286.989.300,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 1 Kec. Campurdarat	243.415.522,56	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan	161.668.840,44	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Ruas Jalan Desa Wates 2 Kec. Campurdarat		
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalana Desa Campurdarat – Wates	234.059.637,00	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 1	5.252.411,04	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 2	560.198.377,92	
		Reklas dari Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Mojoarum – Sidem	575.981.211,04	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Besuki – Sawentar	1.346.339.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pakisrejo-Winong	849.023.000,00	
		Reklas dari Jalan - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karangsono-Sumberdadap	804.585.000,00	
		Reklas dari Jalan -Reklas dari bangunan Jembatan-Penggantian Jembatan Ruas Jalan Dono – Krosok	279.860.100,00	
	Sub Total 2			48.639.552.210,00
	Total Mutasi Tambah			48.639.552.210,00
2	Reklas Keluar			
a	Dinas PUPR	Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Sembung - kelurahan Panggungrejo(DED)	(8.730.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Bandung – Besuki	(58.000.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Cuwiri – Karangrejo	(87.025.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Padangan – Srikaton	(16.091.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Sumberdadi 2	(15.642.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Pulosari – Bukur	(95.535.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Tumpakmergo – Brumbun	(95.755.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan	(92.125.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Selorejo – Tunggangri		
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sukorejo Kulon – Krenggan	(12.259.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Padangan 3	(14.054.500,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Pembangunan Jalan Ruas Jalan Kalangan – Rejotangan	(24.068.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Talun Kulon	(16.990.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Suwaru – Tulungrejo	(34.676.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Bulus - Suruhan Lor	(17.018.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Suwaru – Wateskroyo	(6.468.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Gragalan – Podorejo	(33.440.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Gesikan – Gebang	(30.851.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Tunggulsari – Sumberdadi	(14.546.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kacangan – Karangsono	(43.285.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Tunggulsari 6	(18.704.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten -Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Serut	(10.322.000,00)	
		Reklasifikasi ke Jalan Pada Jalan kabupaten - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Desa Tunggulsari 8	(6.797.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kepuhrejo – Batokan	(22.694.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan	(21.385.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Tamban – Pakel		
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Duwet – Tamban	(7.545.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan dr. Soetomo Gg. II	(3.879.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kelurahan Tertek – Kutoanyar	(7.839.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Halaman Pemkab Tulungagung	(17.424.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Sumberdadap – Ngampon	(85.855.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Wates – Betak	(33.442.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Rejotangan – Pakisrejo	(11.762.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Aryojeding – Tegalrejo	(18.918.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Pucung Kidul – Sanggarahan	(13.625.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Hasanudin Gg. 1	(12.362.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kedungsoko 1	(3.795.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kedungsoko 2	(5.934.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Boyolangu - Pucung Kidul	(19.398.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sukorejo Kulon – Panggunguni	(12.259.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Pakel - Wonodadi (Blitar)	(15.612.500,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan	(16.572.500,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
		Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Bolorejo – Mojosari		
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Campurdarat – Wates	(23.556.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Pembangunan Saluran Pengering Jalan Ruas Jalan A. Yani Timur	(97.780.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Dono – Picisan	(37.725.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Karangtalun -	(39.550.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Wates – Mirigambar	(43.213.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kradinan – Gondanggunung	(38.406.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Gilang - Karangsari 1	(27.775.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Cuwiri - Mangunsari (Silpa BK)	(50.445.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Pembangunan Saluran Pengering Jalan Ruas Jalan Sawo – Tumpakmergo	(19.282.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) Jalan Ruas Jalan Kelurahan Bago 4	(9.664.900,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Pembangunan Jembatan Jeli	(97.570.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Pembangunan Jembatan Kedungsoko	(58.355.000,00)	
		Reklas ke aset Lai-lain - Perencanaan Pembangunan Kantor Pelayanan Publik Terpadu Kabupaten Tulungagung (Tahap 1 / DED)	(159.719.200,00)	
b	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi ke Bangunan Kesehatan - Bangunan Kesehatan	(5.480.914.502,00)	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(19.280.938,00)	
c	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	(29.300.000,00)	
	Sub Total 3			(7.315.219.040,00)
	Total Mutasi Kurang			(7.315.219.040,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Adapun rincian KDP yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 174 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

(dalam Rupiah)

No.	Kegiatan	Nilai Realisasi	No Kontrak	Penyedia Jasa	Progres Fisik
A.	DINAS PUPR	8.381.608.550,00			
1	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Geger - Kedoyo 1	80.960.000,00	602.1/28.007.AS/PAPBD/DED.JL/X/101/2019	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
2	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tanggunggunung - Rejosari	49.550.000,00	602.1/28.005.AS/PAPBD/DED.JL/X/101/2019	CV. MULIA KARYA	Dokumen Perencanaan
3	DED Rehabilitasi Saluran Pembuang Sumber Pandan Desa Sendang Kecamatan Sendang	9.733.600,00	602/13.4/KPA-PL.KL1/102/2022	CV. KUSUMA ABADI	Dokumen Perencanaan
4	Rehabilitasi Saluran Pembuang Pelem Ds. Pelem Kec. Campurdarat	375.672.977,52	602/80/KPA-KONSTR.1/101/2022	CV. TIRTO KENCONO	s.d. Desember 2022, Fisik 50%
5	Rehabilitasi Saluran Pembuang Serbung Ds. Talun Kulon Kec. Bandung	642.076.972,48	602/80/KPA-KONSTR.1/101/2022	CV. TIRTO KENCONO	s.d. Desember 2022, Fisik 50%
6	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Ngelo II Desa Nglutung Kecamatan Sendang	823.935.600,00	602/25/KPA-KONSTR.1/101/2022	CV. NINDYA RAYA UTAMA	s.d. Desember 2022, Fisik 72%
7	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Plosokandang 1 (D.27)	6.599.000,00	602.1/22.019.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. MEGA YASA KONSULTAN	Dokumen Perencanaan
8	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kedungsoko - Bendo, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ngrendeng - Bendo, Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kelurahan Kampungdalem 2 (D.44)	34.210.000,00	602.1/04.003.ARS/APBD/DED.JL/XI/22.02/2022	CV. DAIVA PLAN CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
9	DED Pembangunan Saluran Pengering Jalan Ruas Jalan Bandung - Sodo dan Ruas Jalan Bandung - Besuki (D.43)	59.163.000,00	602.1/04.001.ARS/APBD/DED.JL/XI/22.02/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
10	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Tertek - Kutoanyar (D. 46)	59.829.000,00	602.1/04.007.ARS/APBD/DED.JL/XI/22.02/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
11	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Doroampel 1 (D.45)	14.800.000,00	602.1/04.005.ARS/APBD/DED.JL/XI/22.02/2022	CV. MEGA YASA KONSULTAN	Dokumen Perencanaan
12	DED Penggantian Gorong - Gorong Ruas Jalan Mojosari - TPA (ded fisiknya th depan) (D. 51)	5.947.000,00	602.1/04.017.ARS/APBD/DED.JMB/XI/22.02/2022	CV. FIGIMA AJICON KONSULTAN	Dokumen Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Kegiatan	Nilai Realisasi	No Kontrak	Penyedia Jasa	Progres Fisik
13	DED Penggantian Gorong - gorong Ruas Jalan Gandong - Bantengan (D.51)	5.947.000,00	602.1/04.017.ARS/APBD/DED.JMB/XI/22.02/2022	CV. FIGIMA AJICON KONSULTAN	Dokumen Perencanaan
14	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Kresikan (D.50)	17.471.500,00	602.1/04.015.ARS/APBD/DED.JL/XI/22.02/2022	CV. MULIA KARYA	Dokumen Perencanaan
15	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mangunsari - Bungur (D.10)	6.800.000,00	602.1/04.015.ARS/APBD/DED.JL/III/101/2022	CV. MEGA YASA KONSULTAN	Dokumen Perencanaan
16	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sawo-Tumpakmergo (D.13)	26.920.000,00	602.1/15.001.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. KUSUMA ABADI	Dokumen Perencanaan
17	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tanggukundung-Siyotobagus (D.26)	22.290.000,00	602.1/22.017.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
18	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Gamping-Sawo (D.26)	14.860.500,00	602.1/22.017.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
19	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mergayu-Sebalor (D.26)	22.290.000,00	602.1/22.017.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
20	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tawangsari 4, Ruas Jalan Winong 5 dan Ruas Jalan Winong 6, (D.27)	7.332.000,00	602.1/22.019.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. MEGA YASA KONSULTAN	Dokumen Perencanaan
21	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Sendang-Penampean (D.15)	21.763.500,00	602.1/15.005.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. BINTANG SURYA MANDIRI	Dokumen Perencanaan
22	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Mangunsari - Bungur (S.13)	6.993.000,00	602.1/31.001.ARS/APBD/SUP.JL/VII/22.02/2022	CV. MULIA KARYA	Dokumen Pengawasan
23	Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tanggungnung - Rejosari (S.13)	6.993.000,00	602.1/31.001.ARS/APBD/SUP.JL/VII/22.02/2022	CV. MULIA KARYA	Dokumen Pengawasan
24	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Ngrance dan Ruas Jalan Mojoarum-Sidem dan Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Suwaru-Wateskroyo dan Ruas Jalan Suwaru-Tulungrejo (D.31)	29.500.000,00	602.1/27.005.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. UNICON	Dokumen Perencanaan
25	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Kradinan-Sidomulyo (D.15)	6.763.500,00	602.1/15.005.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. BINTANG SURYA MANDIRI	Dokumen Perencanaan
26	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Geger-Kedoyo 1 (D.16)	9.850.000,00	602.1/15.007.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. SENTOSA KARYA TEKNIK	Dokumen Perencanaan
27	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Krosok-Nglurup (D.29)	29.947.800,00	602.1/22.023.THS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. MULIA KARYA	Dokumen Perencanaan
28	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pucung Lor 1 (D.38)	9.950.000,00	602.1/14.011.THS/APBD/DED.JL/X/22.02/2022	CV. CIPTA MANUNGAL ABADI	Dokumen Perencanaan
29	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Pinggirsari (D.41)	12.967.500,00	602.1/14.017.ARS/APBD/DED.JL/X/22.02/2022	CV. CIPTA MANUNGAL ABADI	Dokumen Perencanaan
30	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Padangan 5 (D.41)	6.982.500,00	602.1/14.017.ARS/APBD/DED.JL/X/22.02/2022	CV. CIPTA MANUNGAL ABADI	Dokumen Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Kegiatan	Nilai Realisasi	No Kontrak	Penyedia Jasa	Progres Fisik
31	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Lingkar Desa Kates (D.42)	6.939.100,00	602.1/14.019,.ARS/APBD/DED.JL/X/22.02/2022	CV. LIMA PILAR CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
32	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Kelurahan Kenayan (D.42)	5.948.000,00	602.1/14.019,.ARS/APBD/DED.JL/X/22.02/2022	CV. LIMA PILAR CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
33	DED Pembangunan Jalan Ruas Jalan Kalitalun - Sine (D.4)	4.850.000,00	602.1/04.003.WB/APBD/DED.JL/III/101/2022	CV. LIMA PILAR CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
34	DED Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Pagerwojo-Judeg (Desa Sidomulyo) (D.12)	6.915.700,00	601.1/22.015.THS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
35	DED Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan Karangrejo-Sendang dan Ruas Jalan Sendang-Penampean dan Pembangunan Tembok Penahan Badan Jalan Ruas Jalan TPA-Segawe (D.12)	5.960.000,00	601.1/22.015.THS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. ERCON	Dokumen Perencanaan
36	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Besuki-Sawentar (D.33)	27.751.000,00	602.1/22.029.ARS/APBD/DED.JL/VII/101/2022	CV. DAIVA PLAN CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
37	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Panjerejo - Tenggong (D.40)	13.875.000,00	602.1/14.015.ARS/APBD/DED.JL/X/22.02/2022	CV. LIMA PILAR CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
38	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Boyolangu - Campurdarat	404.135.400,00	602.1/22.035.ARS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. PRISMA SAHAJA	s.d. Desember 2022, Fisik 30%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Boyolangu - Campurdarat (D.20)	36.753.500,00	602.1/15.015.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. DAIVA PLAN CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
39	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Jarakan-Gondang	286.989.300,00	602.1/29.001.AS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. AKSA ADICANDRA	s.d. Desember 2022, Fisik 80%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Jarakan-Gondang (D.19)	14.866.000,00	602.1/15.013.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. CIPTA MANUNGAL ABADI	Dokumen Perencanaan
40	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 1 Kec. Campurdarat	243.415.522,56	602.1/22.035.ARS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. PRISMA SAHAJA	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 1 Kec. Campurdarat (D.20)	4.477.000,00	602.1/15.015.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. DAIVA PLAN CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
41	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 2 Kec. Campurdarat	161.668.840,44	602.1/22.035.ARS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. PRISMA SAHAJA	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Wates 2 Kec. Campurdarat (D.20)	2.972.000,00	602.1/15.015.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. DAIVA PLAN CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
42	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalana Desa Campurdarat - Wates	234.059.637,00	602.1/22.035.ARS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. PRISMA SAHAJA	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalana Desa Campurdarat - Wates (D.20)	4.304.500,00	602.1/15.015.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. DAIVA PLAN CONSULTANT	Dokumen Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Kegiatan	Nilai Realisasi	No Kontrak	Penyedia Jasa	Progres Fisik
43	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 1	5.252.411,04	602.1/29.001.AS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV.AKSA ADICANDRA	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 1 (D.19)	99.000,00	602.1/15.013.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. CIPTA MANUNGGAL ABADI	Dokumen Perencanaan
44	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 2	560.198.377,92	602.1/29.001.AS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV.AKSA ADICANDRA	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Desa Notorejo 2 (D.19)	10.600.000,00	602.1/15.013.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. CIPTA MANUNGGAL ABADI	Dokumen Perencanaan
45	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Mojoarum - Sidem	575.981.211,04	602.1/29.001.AS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV.AKSA ADICANDRA	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Ruas Jalan Mojoarum - Sidem (D.19)	10.901.000,00	602.1/15.013.ARS/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. CIPTA MANUNGGAL ABADI	Dokumen Perencanaan
46	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Besuki - Sawentar	1.346.339.000,00	602.1/22.001.THS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. ELOK LESTARI	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Besuki - Sawentar (D.13)	14.930.000,00	602.1/15.001.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. KUSUMA ABADI	Dokumen Perencanaan
47	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pakisrejo-Winong	849.023.000,00	602.1/22.003.THS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. SAHABAT	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Pakisrejo-Winong (D.13)	14.930.000,00	602.1/15.001.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. KUSUMA ABADI	Dokumen Perencanaan
48	Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karangsono-Sumberdadap	804.585.000,00	602.1/23.005.THS/APBD/KONST.JL/IX/22.02/2022	CV. CIPTO DADI	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
	DED Rekonstruksi Jalan Ruas Jalan Karangsono-Sumberdadap (D.13)	14.930.000,00	602.1/15.001.WB/APBD/DED.JL/VI/101/2022	CV. KUSUMA ABADI	Dokumen Perencanaan
49	Penggantian Jembatan Ruas Jalan Dono - Krosok	279.860.100,00	602.1/22.019.ARS/APBD/KONST.JMB/IX/22.02/2022	CV. ANDIKA JAYA MULYA	s.d. Desember 2022, Fisik 90%
B	DINAS KESEHATAN	40.388.453.660,00			
50	Termin I (50%) pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung dan bangunan puskesmas kedungwaru	147.200.000,00	SPK-027/442/103.02/2022	CV.SAEKARYA CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
51	Termin II pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung dan bangunan puskesmas kedungwaru	147.200.000,00	SPK-027/442/103.02/2022	CV.SAEKARYA CONSULTANT	Dokumen Perencanaan
52	PengadaanBelanja Jasa Konsultansi Penyusunan MasterPlan dan DED	302.373.900,00	SPK-027/130/KPA/103.02/2022	PT EPITHU LOGICA SEMBADA	Dokumen Perencanaan
53	Perencanaan Teknis (DED): 1.Pengembangan Gedung Perkantoran dan Rawat Jalan RSUD Dr. Iskak 2.Pembangunan Gedung Gudang Terpadu,Gudang Farmasi,Gedung Laboratorium Mikro TB dan Parkir RSUD Dr. Iskak 3.Pembangunan Bangunan Parkir Motor RSUD Dr. Iskak	1.150.000.000	028.1 /171.1 / 35.04.24.09.02.02 / 2022	PT. Bangun Gagas Karyatama	Dokumen Perencanaan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Kegiatan	Nilai Realisasi	No Kontrak	Penyedia Jasa	Progres Fisik
54	Bangunan RSUD Campurdarat	38.641.679.760,00	BAPHP-602.1/951/PPK/24.10/2022	PT. EN Handayani	s.d. Desember 2022, Fisik 100%
TOTAL		48.770.062.210,00			

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
g. Akumulasi Penyusutan	(2.307.000.795.625,61)	(2.116.770.445.208,85)

Akumulasi penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp2.307.000.795.625,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 175 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2021	Tambah	Kurang	31 Desember 2022
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	710.038.787.641,46	97.107.729.552,40	33.134.844.119,95	774.011.673.073,91
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	225.828.268.060,77	34.789.060.355,91	6.141.394.083,40	254.475.934.333,28
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.180.903.389.506,62	206.410.279.527,51	117.034.844.359,88	1.270.278.824.674,25
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	0,00	8.576.523.344,17	342.159.800,00	8.234.363.544,17
Jumlah		2.116.770.445.208,85	346.883.592.779,99	156.653.242.363,23	2.307.000.795.625,61

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan metode semesteran dengan umur ekonomis sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Untuk Aset yang dikapitalisasi namun memiliki induk di atas Neraca awal lebih dari satu maka tahun yang digunakan adalah tahun yang tertua.

7.5.3.2.4 Dana Cadangan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Dana Cadangan	20.000.000.000,00	0,00

Dana Cadangan Tahun 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00, sedangkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00. Penempatan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan.

Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pilkada tahun 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan kegiatan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 sebesar Rp15.000.000.000,00 yang pembiayaannya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

7.5.3.2.5 Aset Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lainnya	111.091.152.098,79	97.883.463.493,46

Aset Lainnya merupakan kelompok Aset selain Aset Lancar maupun Aset Tetap, kelompok ini menggambarkan Aset yang tidak termasuk klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap.

Mutasi Aset Lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal 2022		Rp 97.883.463.493,46
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp 1.981.414.970,00	
Mutasi Masuk	Rp 30.000.000,00	
Reklasifikasi Masuk	Rp 33.097.256.021,11	
Koreksi Pencatatan	Rp 0,00	
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	Rp 340.541.739,24	
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp 13.627.596.948,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp 49.076.809.678,35
Mutasi Kurang		
Koreksi Kurang	Rp (0,00)	
Mutasi keluar	Rp (30.000.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	Rp (3.913.810.665,00)	
Penghapusan	Rp (20.488.419.588,58)	
Tambahkan Akumulasi Amortisasi	Rp 1.625.419.757,50	
Tambahkan Akumulasi Aset Kemitraan Dg Pihak ke 3	Rp (500.000,00)	
Tambahkan Akumulasi Aset Lain-lain	Rp (13.061.810.576,94)	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp (35.869.121.073,02)
Saldo Akhir 2022		Rp 111.091.152.098,79

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 176 Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
		Jumlah Barang	Harga Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	253	70.369.599.415,00	253	70.370.099.415,00
2	Aset Tidak Berwujud	714	3.542.840.567,50	740	2.910.811.200,00
3	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0	689.439.136,05	0	348.897.396,81
4	Aset Lain-lain	4.234	22.861.676.032,24	4.532	24.253.655.481,65



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	13.627.596.948,00	0	0,00
	Jumlah	5.201	111.091.152.098,79	5.525	97.883.463.493,46

Jika dibandingkan posisi per 31 Desember 2021, jumlah keseluruhan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp13.207.688.605,33 atau 13,49%. Peningkatan jumlah aset lainnya disebabkan adanya pengakuan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam bentuk non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Bank Indonesia senilai Rp13.627.596.948,00.

Berdasarkan Nota Dinas dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. ND-202/PB.6/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penyesuaian Kebijakan Akuntansi atas Penyaluran Dana Bagi Hasil/Dana Alikasi Umum melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi atas dana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perlakuan akuntansi atas penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas TDF adalah:
 - 1) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer- Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
 - 2) Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
- b. Perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF adalah:
 - 1) Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
 - 2) Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis (LRA).

Dan untuk pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pembayaran DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF dipertegas dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 hal pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui fasilitas TDF dan Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah

a. Kemitraan Pihak Ketiga

Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 70.374.599.415,00 merupakan bentuk pemanfaatan aset tetap dengan pihak ketiga melalui pola sewa dan bangun, guna, serah. Nilai aset Kemitraan dengan Pihak ketiga salah satunya



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

merupakan SPBU di kawasan terminal didasarkan pada harga perolehan dari aset tetap tanah yang diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu sebesar Rp3.750.000.000,00. Kemitraan didasarkan pada surat perjanjian dengan PT Muji Karunia Jaya No.640/630/209/2012 tanggal 6 November 2012 dengan masa pengelolaan 30 tahun atas tanah seluas 1.500 m². Pada akhir periode kerjasama, tanah beserta seluruh bangunan di atasnya menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dan aset Kemitraan dengan Pihak ketiga yang lain adalah kawasan Pasar Pahing senilai Rp272.250.000,00 yang didasarkan pada surat perjanjian dengan PT Triples Nomor 644.2//256.A/424.22/1994 dengan addendum Nomor 181/131A/013/2013 tanggal 25 Februari 2013 serta aset berupa tanah-tanah baik tanah eks bengkok maupun tanah dan gedung SKPD yang dimanfaatkan oleh pihak lain dengan sewa yaitu sebesar Rp65.744.321.415,00.

Tabel 177 Rincian Kemitraan Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Pihak Ketiga	Uraian	Jumlah
1	PT Triples	Kawasan pasar pahing, dengan surat perjanjian Nomor 644.2//256.A/424.22/1994 dengan addendum Nomor 181/131A/013/2013 tanggal 25 Februari 2013 16 kios yang pada akhir perjanjian akan menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung	272.250.000,00
2	PT Muji Karunia Jaya	SPBU di kawasan terminal, surat perjanjian Nomor 640/630/209/2012 tanggal 6 November 2012 dengan masa pengelolaan 30 tahun atas tanah seluas 1.500 m ² . Pada akhir periode kerjasama, tanah beserta seluruh bangunan di atasnya menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung	3.750.000.000,00
3	Masyarakat	Tanah Eks Bengkok yang dimanfaatkan melalui sewa	65.744.321.415,00
4	Masyarakat	Tanah yang dimanfaatkan melalui sewa	583.028.000,00
5	Masyarakat	Bangunan Gedung yang dimanfaatkan melalui sewa	20.000.000,00
	Jumlah		70.369.599.415,00

b. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan Aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Berikut rincian mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2022 sebagai berikut:

Saldo Awal 2022		Rp	11.371.277.856,00
Mutasi Tambah			
Belanja Modal	Rp	1.981.414.970,00	
Reklasifikasi tambah	Rp	96.568.100,00	
Mutasi Masuk	Rp	30.000.000,00	
Hibah Masuk	Rp	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	2.107.983.070,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mutasi Kurang

Penghapusan	Rp	(0,00)
Mutasi Keluar	Rp	(30.000.000,00)
Reklasifikasi kurang	Rp	(3.071.373.460,00)
Hibah Keluar	Rp	(0,00)

Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(3.101.373.460,00)
Saldo Akhir 2022	Rp	10.377.887.466,00
Amortisasi 2022	Rp	(6.835.046.898,50)
Nilai Buku 2022	Rp	3.542.840.567,50

Tabel 178 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

(dalam Rupiah)

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Belanja Modal			1.981.414.970,00
2	Reklas Masuk			
A	Dinas Kesehatan	Reklasifikasi Aset BLUD dari Barang perpustakaan Tercetak-software pendaftaran online dan panggilan pasien	8.500.000,00	
B	DPMP TSP	Reklasifikasi dari Belanja Belanja Jasa Konsultasi berorientasi Bidang Telematika	54.068.100,00	
C	Sekretariat DPRD	Reklasifikasi dari Komputer unit	34.000.000,00	
	Sub Total 2			96.568.100,00
3	Mutasi Masuk			
A	DPMD	Mutasi Masuk dari bagian Pemerintahan Setda dengan barang Website	30.000.000,00	
	Sub Total 3			30.000.000,00
	Total Mutasi Tambah			2.107.983.070,00
4	Reklas Keluar			
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(87.733.360,00)	
	Kecamatan Kedungwaru	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(33.900.000,00)	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(37.900.000,00)	
	DPMP TSP	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(446.250.000,00)	
	Dinas Perikanan	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(49.400.000,00)	
	Dinas Peternakan & Keswan	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(20.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jenis Mutasi	Uraian	Nilai	Jumlah
	BAPPEDA	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(433.600.000,00)	
	Dinas Pertanian	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(61.250.000,00)	
	BKPSDM	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(131.875.000,00)	
	SATPOL PP	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(49.250.000,00)	
	BPKAD	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(504.680.000,00)	
	BAPENDA	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(262.388.800,00)	
	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(537.256.300,00)	
	Dinas Koperasi dan UM	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(5.000.000,00)	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(89.000.000,00)	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(63.900.000,00)	
	DLH	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(15.000.000,00)	
	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(50.600.000,00)	
	RSUD Iskak	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(33.302.500,00)	
	Bagian Umum	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(60.500.000,00)	
	Bagian Administrasi Pembangunan	Reklasifikasi ke aset lain-lain	(98.587.500,00)	
	Sub Total 4			(3.071.373.460,00)
5	Mutasi Keluar			
A	Bagian Pemerintahan Setda	Mutasi Keluar ke DPMD	(30.000.000,00)	
	Sub Total 5			(30.000.000,00)
	Total Mutasi Kurang			(3.101.373.460,00)

Berikut rincian aset tak berwujud – *software* yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tulungagung per 31 Desember 2022 per SKPD:

Tabel 179 Rincian Aset Tak Berwujud – Software

(dalam Rupiah)

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
A	BAGIAN ORGANISASI						



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
1	Software aplikasi Online (Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tulungagung) SIAKIP Kabupaten Tulungagung	2016	1	49.940.000,00	Aktif	49.940.000,00	0,00
2	Software aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab dan ABK)	2019	1	67.650.000,00	Aktif	67.650.000,00	0,00
3	Software Aplikasi (Tulungagung Berakhlak)	2021	1	34.999.800,00	Aktif	17.499.900,00	17.499.900,00
4	Software Aplikasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integ	2021	1	33.495.000,00	Aktif	16.747.500,00	16.747.500,00
	Total		4	186.084.800,00		151.837.400,00	34.247.400,00
B	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						
1	Software Sistem Informasi Adm dan Register Kependudukan	2012	1	28.000.000,00	Tidak	28.000.000,00	0,00
	Total		1	28.000.000,00		28.000.000,00	0,00
C	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						
1	Website Koperasi dan Usaha Mikro	2020	1	60.000.000,00	Aktif	45.000.000,00	15.000.000,00
2	Aplikasi Pemasaran Lapak UMKM online	2020	1	40.000.000,00	Aktif	30.000.000,00	10.000.000,00
	Total		2	100.000.000,00		75.000.000,00	25.000.000,00
D	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
1	Software	2022	1	50.000.000,00	Aktif	6.250.000,00	43.750.000,00
	Total		1	50.000.000,00		6.250.000,00	43.750.000,00
E	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
3	Pengadaan website Dinas	2014	1	15.000.000,00	Tidak	15.000.000,00	0
4	Aplikasi entry harga kebutuhan pokok	2014	1	3.000.000,00	Aktif	3.000.000,00	0
5	Software IKM-MART	2017	1	92.590.000,00	Aktif	92.590.000,00	0
6	Software Data Base Pedagang Pasar	2015	1	14.800.000,00	Aktif	14.800.000,00	0
7	Software Komputer	2015	1	54.450.000,00	Aktif	54.450.000,00	0
	Total		5	179.840.000,00		179.840.000,00	0,00
F	BAGIAN HUKUM						
1	Software aplikasi Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDHI)	2015	1	25.000.000,00	Aktif	25.000.000,00	0
	Total		1	25.000.000,00		25.000.000,00	0



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
G	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
1	Aplikasi RFK	2020	1	49.200.000,00	Aktif	36.900.000,00	12.300.000,00
2	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIAP)	2021	1	74.250.000,00	Aktif	37.125.000,00	37.125.000,00
	Total		2	123.450.000,00		74.025.000,00	49.425.000,00
H	KECAMATAN CAMPURDARAT						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
I	KECAMATAN GONDANG						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
J	KECAMATAN KALIDAWIR						
1	Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website dan Integrasi Layanan PATEN	2018	1	20.610.000,00	Aktif	20.610.000,00	0,00
	Total		1	20.610.000,00		20.610.000,00	0,00
K	KECAMATAN KAUMAN						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
2	Software.....	2022	1	33.500.000,00	Aktif	4.187.500,00	29.312.500,00
	Total		2	58.000.000,00		28.687.500,00	29.312.500,00
L	KECAMATAN NGANTRU						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
M	KECAMATAN PAGERWOJO						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
N	KECAMATAN PUCANGLABAN						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
O	KECAMATAN TANGGUNGUNUNG						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
P	KECAMATAN BANDUNG						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
Q	KECAMATAN BESUKI						



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
R	KECAMATAN KARANGREJO						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	19.500.000,00	Aktif	19.500.000,00	0,00
2	Aplikasi TANKARA	2022	1	20.700.000,00	Aktif	2.587.500,00	18.112.500,00
	Total		2	40.200.000,00		22.087.500,00	18.112.500,00
S	KECAMATAN PAKEL						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
T	KECAMATAN SUMBERGEMPOL						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
U	KECAMATAN SENDANG						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
V	KECAMATAN BOYOLANGU						
1	Website Paten Kantor Kecamatan	2019	1	24.500.000,00	Aktif	24.500.000,00	0,00
	Total		1	24.500.000,00		24.500.000,00	0,00
W	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH						
1	Software E-KMS	2016	1	34.450.000,00	Aktif	34.450.000,00	0,00
2	Gabungan dari Upgrade SIPO tahun 2017, Aplikasi Rekap Nilai SKP Tahunan PNS dan Pemetaan Jabatan PNS tahun 2018 dan Pengembangan Aplikasi SIPO tahun 2020	2017	1	127.150.000,00	Aktif	127.150.000,00	0,00
3	Perangkat Lunak (software) Perekam Sidik Jari dan Wajah Online	2018	1	77.000.000,00	Aktif	77.000.000,00	0,00
4	IDAMAN	2019	1	45.000.000,00	Aktif	45.000.000,00	0,00
5	Software e-kinerja kab TA	2018	1	49.775.000,00	Aktif	49.775.000,00	
6	Pengembangan Aplikasi Cuti Online	2020	1	27.500.000,00	Aktif	20.625.000,00	6.875.000,00
	Total		6	360.875.000,00	-	354.000.000,00	6.875.000,00
X	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2	Software Pengembangan program otomasi perpustakaan (INLIS)	2015	1	34.925.000,00	Aktif	34.925.000,00	0
3	Aplikasi Sistem Pengelolaan Kearsipan	2016	1	24.915.000,00	Aktif	24.915.000,00	0
4	Aplikasi Sistem Pengelolaan Kearsipan	2016	1	24.585.000,00	Aktif	24.585.000,00	0
5	Aplikasi Kopi tawar dan apem (Pengelolaan kopi tanah warga dan pengolahan pemerintah)	2017	1	31.000.000,00	Aktif	31.000.000,00	0
	Total		4	115.425.000,00	-	115.425.000,00	0,00
Y	DINAS PERTANIAN						
1	Modul Sistem (website Dinas Pertanian)	2012	1	14.400.000,00	Aktif	14.400.000,00	0
2	Software (Prasarana)	2022	1	49.500.000,00	Aktif	6.187.500,00	43.312.500,00
	Total		2	63.900.000,00	-	20.587.500,00	43.312.500,00
Z	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
1	Aplikasi SiPKu (Keuangan Unit)	2022	1	73.815.000,00	Aktif	9.226.875,00	64.588.125,00
	Total		1	73.815.000,00		9.226.875,00	64.588.125,00
AA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
1	Software	2014	1	3.838.596,00	Aktif	3.838.596,00	0
	Total		1	3.838.596,00		3.838.596,00	0
AB	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
1	Oracle Internet Developer Suite	2012	1	85.210.400,00	Aktif	85.210.400,00	
2	Software Licence Server	2012	1	104.560.500,00	Aktif	104.560.500,00	
3	Close Rack Server	2012	1	22.843.700,00	Aktif	22.843.700,00	
4	Software Licence Server Operation Syestem/Pusat/Induk	2012	1	11.721.600,00	Aktif	11.721.600,00	0,00
5	Software Licence Server Operation Syestem/Pusat/Induk	2012	1	11.721.600,00	Aktif	11.721.600,00	0,00
6	Software Licence Editing Peta Digital	2012	1	16.735.400,00	Aktif	16.735.400,00	0,00
7	Software Licence Editing Peta Digital	2012	1	16.735.400,00	Aktif	16.735.400,00	0,00
8	Pengadaan Aplikasi Pelayanan Terpadu BPHTB	2013	1	89.450.000,00	Aktif	89.450.000,00	0,00
9	Penggabungan pendukung aplikasi pajak daerah 149.400.000 dan Simpada 187.000.000	2013	1	336.400.000,00	Aktif	336.400.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
10	Software Aplikasi Pelaporan SPTPD (e-SPTPD)	2018	1	55.000.000,00	Aktif	55.000.000,00	0,00
11	Software Online Pembayaran Pajak Daerah Host to Host H2H	2018	1	33.000.000,00	Aktif	33.000.000,00	0,00
12	Software Aplikasi Dashboard Monitoring Transaksi Wajib Pajak	2018	1	71.500.000,00	Aktif	71.500.000,00	0,00
13	Software Portal Website Bapenda Kab. Tulungagung	2018	1	33.000.000,00	Aktif	33.000.000,00	0,00
14	Aplikasi E-Potensi Pajak Daerah	2022	1	147.900.000,00	Aktif	18.487.500,00	129.412.500,00
	Total		14	1.035.778.600,00	-	906.366.100,00	129.412.500,00
AC	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
1	Sistem Website Online (TABAPPEDA)	2014	1	87.000.000,00	Aktif	87.000.000,00	0
2	Software Kustomisasi	2017	1	31.600.000,00	Aktif	31.600.000,00	0
3	Software Mirroring Linux	2017	1	64.800.000,00	Aktif	64.800.000,00	0
	Total		3	183.400.000,00	-	183.400.000,00	0,00
AD	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL						
1	Website Bag Humas (humas.tulungagung.go.id)	2016	1	9.850.000,00	Aktif	9.850.000,00	0,00
	Total		1	9.850.000,00		9.850.000,00	0,00
AE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
1	Software PHP,MySQL,Apache untuk situs website Capil	2014	1	23.400.000,00	Aktif	6.600.000,00	16.800.000,00
2	Software Kegiatan Penyimpanan Dokumen Arsip Pencatatan Sipil Secara Elektronik	2016	1	28.000.000,00	Aktif	28.000.000,00	0,00
3	Tableau Dekstop Professional (Pertual License + 1 Year ATS)	2020	1	39.215.300,00	Aktif	29.411.475,00	9.803.825,00
4	Aplikasi "KABAR PASUTRI"	2022	1	15.000.000,00	Aktif	1.875.000,00	13.125.000,00
5	Aplikasi "SIAP PADUKA AGUNG"	2022	1	20.000.000,00	Aktif	2.500.000,00	17.500.000,00
6	Penambahan Fitur PANDUCAKTI	2022	1	12.000.000,00	Aktif	1.500.000,00	10.500.000,00
	Total		6	137.615.300,00	-	69.886.475,00	67.728.825,00
AF	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
6	Software	2017	1	24.750.000,00	Aktif	24.750.000,00	0,00
7	Website PPID	2019	1	24.200.000,00	Aktif	24.200.000,00	0,00
8	Website E-OFFICE (E GOV)	2019	1	92.180.000,00	Aktif	92.180.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
	Total		3	141.130.000,00	-	141.130.000,00	0,00
AG	DPMPTSP						
1	aplikasi penyajian data	2021	1	35.000.000,00	Aktif	17.500.000,00	17.500.000,00
2	Aplikasi Website MAL PELAYANAN PUBLIK	2022	1	24.397.800,00	Aktif	3.049.725,00	21.348.075,00
3	DASHBOARD OSS	2022	1	29.670.300,00	Aktif	3.708.787,50	25.961.512,50
	Total		3	89.068.100,00	-	24.258.512,50	64.809.587,50
AH	DINAS PERIKANAN						
1	Software Website Dinas	2022	1	19.702.500,00	Aktif	2.462.812,50	17.239.687,50
	Total		1	19.702.500,00		2.462.812,50	17.239.687,50
AI	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						
1	Software Informasi Peternakan dan Keswan	2022	1	48.500.000,00	Aktif	6.062.500,00	42.437.500,00
	Total		1	48.500.000,00		6.062.500,00	42.437.500,00
AJ	SEKRETARIAT DPRD						
1	Pembuatan Portal website	2010	1	97.915.000,00	Aktif	97.915.000,00	0,00
2	Aplikasi e-asmat	2020	1	65.000.000,00	Aktif	48.750.000,00	16.250.000,00
3	Software persuratan	2022	1	34.000.000,00	Aktif	4.250.000,00	29.750.000,00
	Total		3	196.915.000,00	-	150.915.000,00	46.000.000,00
AK	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						
1	Website Dinas Pariwisata (disbudpar.tulungagung.go.id)	2016	1	29.885.000,00	Aktif	29.885.000,00	0,00
2	Digital Mobile Application (Tulungagung Tourism Digital Map)	2016	1	89.865.000,00	Aktif	89.865.000,00	0,00
3	Software PARDUTA	2022	1	99.900.000,00	Aktif	12.487.500,00	87.412.500,00
	Total		3	219.650.000,00	-	132.237.500,00	87.412.500,00
AL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
1	Software Website Official DLH	2018	1	10.000.000,00	Aktif	10.000.000,00	0,00
2	Software	2019	1	15.000.000,00	Aktif	15.000.000,00	0,00
	Total		2	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
AM	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN SUMBERDAYA AIR						
1	Software – pemasangan speedy	2011	1	345.000,00	Tidak	345.000,00	0,00
4	Pembuatan website	2020	1	79.290.000,00	Aktif	59.467.500,00	19.822.500,00
	Total		2	79.635.000,00	-	59.812.500,00	19.822.500,00
AN	BPKAD						
1	Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu	2016	1	148.500.000,00	Aktif	148.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai (Rp)		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
2	Sistem Informasi Pengelolaan persediaan	2017	1	149.000.000,00	Aktif	149.000.000,00	0,00
3	Sistem Informasi Keuangan	2017	1	98.000.000,00	Aktif	98.000.000,00	0,00
4	Aplikasi Otomatisasi Perkantoran pada SIPKD	2018	1	97.680.000,00	Aktif	97.680.000,00	0,00
5	Aplikasi SIHOO (Sistem Informasi Harta Overlay Online) Kabupaten Tulungagung	2020	1	49.000.000,00	Aktif	36.750.000,00	12.250.000,00
6	Aplikasi Sistem Standar Satuan Harga	2021	1	74.500.000,00	Aktif	37.250.000,00	37.250.000,00
7	Aplikasi E- BLUD	2021	1	97.900.000,00	Aktif	48.950.000,00	48.950.000,00
8	Aplikasi proyeksi gaji	2022	1	68.936.550,00	Aktif	17.234.137,50	51.702.412,50
	Total		8	783.516.550,00	-	633.364.137,50	150.152.412,50
AO	KECAMATAN TULUNGAGUNG						
1	Software Aplikasi berbasis Web dengan menggunakan frame work code igneter	2016	1	19.250.000,00	Aktif	19.250.000,00	0,00
2	Aplikasi	2019	1	6.800.000,00	Aktif	6.800.000,00	0,00
3	Software Sipandu	2020	1	63.500.000,00	Aktif	47.625.000,00	15.875.000,00
	Total		3	89.550.000,00	-	73.675.000,00	15.875.000,00
AP	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						
1	Software Aplikasi keuangan dan perpustakaan sekolah	2011	1	995.000,00	Aktif	995.000,00	0,00
2	Software Manajemen Perpustakaan dan Penunjang Pembelajaran	2012	106	290.853.400,00	Aktif	290.853.400,00	0,00
3	Software Manajemen Perpustakaan dan Penunjang Pembelajaran	2012	121	402.240.300,00	Aktif	402.240.300,00	0,00
4	Software Komputer	2012	1	5.000.000,00	Aktif	5.000.000,00	0,00
5	Software Pemutakhiran Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2015	1	148.600.000,00	Aktif	148.600.000,00	0,00
6	Sarana Pembelajaran Laboratorium Multimedia dan Property	2015	1	30.000.000,00	Aktif	30.000.000,00	0,00
7	Pemasangan instalasi internet	2015	1	1.254.000,00	Aktif	1.254.000,00	0,00
8	Data Software Scanner	2015	1	5.000.000,00	Aktif	5.000.000,00	0,00
9	Software untuk Laboratorium Bahasa (Smart Software)	2015	1	12.500.000,00	Aktif	12.500.000,00	0,00
10	Software Aplikasi KIB	2016	1	30.000.000,00	Aktif	30.000.000,00	0,00
11	Jaringan Broadband	2016	1	14.700.000,00	Aktif	14.700.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
12	Paket Visual Grow With English With E-PEN# Mukarto	2018	110	2.300.000,00	Aktif	2.300.000,00	0,00
13	MICROSOFT [Office Standard] Office 2016 Sngl Academic OPL 1license Nolevel [Pendidikan] [021-10539]	2018	115	133.550.000,00	Aktif	133.550.000,00	0,00
14	Software Aplikasi LI - Disdikpora - Sub Perencanaan	2019	1	50.000.000,00	Aktif	50.000.000,00	0,00
15	Software E-PENGAJUAN DUPAK - Penataan Pendistribusian Pendidik & Tenaga Kependidikan - BID. GTK	2022	1	45.000.000,00	Aktif	11.250.000,00	33.750.000,00
16	E-GURU CREATIVE TEACHING EDUCATION (CD)	2022	107	356.298.100,00	Aktif	44.537.262,50	311.760.837,50
	Total		570	1.528.290.800,00	-	1.182.779.962,50	345.510.837,50
AQ	DINAS KESEHATAN						
1	Software Perijinan Dinkesta Online	2017	1	12.889.500,00	Aktif	12.889.500,00	0,00
2	Software Menu Tata Usaha, SIP, RT, Kepegawaian, Keuangan	2018	1	45.000.000,00	Aktif	45.000.000,00	0,00
3	Software KIA	2019	1	47.500.000,00	Aktif	47.500.000,00	0,00
4	Software Aplikasi IKM	2020	1	6.994.900,00	Aktif	5.246.175,00	1.748.725,00
5	Aplikasi Sikesta Integrasi	2020	1	33.000.000,00	Aktif	24.750.000,00	8.250.000,00
6	Aplikasi Depo Arsip PKM Tulungagung	2020	1	3.000.000,00	Aktif	2.250.000,00	750.000,00
7	Software Aplikasi Satu Data Kesehatan Kabupaten Tulungagung(Integrasi API Interface) Sekretariat	2022	1	77.600.000,00	Aktif	9.700.000,00	67.900.000,00
8	software pendaftaran online dan panggilan pasien	2022	1	8.500.000,00	Aktif	1.062.500,00	7.437.500,00
9	SOFTWARE/APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT	2022	1	537.795.000,00	Aktif	67.224.375,00	470.570.625,00
10	Software Aplikasi Penilaian Kinerja Puskesmas (Sekretariat)	2022	1	44.500.000,00	Aktif	5.562.500,00	38.937.500,00
11	SSLDinas Kesehatan-Perencanaan	2022	1	12.167.820,00	Aktif	1.520.977,50	10.646.842,50
	Total		11	828.947.220,00	-	222.706.027,50	606.241.192,50
AR	KECAMATAN REJOTANGAN						



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
1	Aplikasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website dan Integrasi Layanan PATEN	2019	1	25.000.000,00	Aktif	25.000.000,00	0,00
	Total		1	25.000.000,00	Aktif	25.000.000,00	0,00
AS	RSUD dr. ISKAK TULUNGAGUNG						
	CARESTREAM PACS (Software)	2021	1	2.599.500.000,00	Aktif	1.299.750.000,00	1.299.750.000,00
	Total		1	2.599.500.000,00	Aktif	1.299.750.000,00	1.299.750.000,00
AT	DINAS PERHUBUNGAN						
1	Software PKB	2021	1	150.000.000,00	Aktif	75.000.000,00	75.000.000,00
	Total		1	150.000.000,00	Aktif	75.000.000,00	75.000.000,00
AU	DINAS KETAHANAN PANGAN						
1	Sistem Aplikasi Publikasi Harga	2020	1	7.000.000,00	Aktif	5.250.000,00	1.750.000,00
	Total		1	7.000.000,00	Aktif	5.250.000,00	1.750.000,00
AV	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
1	Web Pasar Desa	2020	1	30.000.000,00	Aktif	22.500.000,00	7.500.000,00
2	Pengembangan website bag.pemerintahan dan aplikasi berbasis website database aparatur desa	2019	1	30.000.000,00	Aktif	30.000.000,00	0,00
	Total		2	60.000.000,00	Aktif	52.500.000,00	7.500.000,00
AW	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN						
1	Software SIMPETAS	2021	1	30.000.000,00	Aktif	15.000.000,00	15.000.000,00
	Total		1	30.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00
	INSPEKTORAT						
1	Sistem Informasi Pengawasan	2020	1	50.000.000,00	Aktif	37.500.000,00	12.500.000,00
	Total		1	50.000.000,00		37.500.000,00	12.500.000,00
AX	PUPR						
1	Website SIPUT (Sistem Informasi Pekerjaan Umum Terpadu)	2020	1	85.000.000,00	Aktif	63.750.000,00	21.250.000,00
2	Aplikasi SIPUTRA	2022	1	94.300.000,00	Aktif	11.787.500,00	82.512.500,00
	Total		2	179.300.000,00		75.537.500,00	103.762.500,00
AY	DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No.	Nama Aset	Perolehan			Kondisi	Amortisasi	Nilai Buku
		Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai		(Rp)	(Rp)
				(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8=5-7
1	Software SIPANDA (sistem informasi perlindungan perempuan dan anak)	2022	1	98.500.000,00	Aktif	12.312.500,00	86.187.500,00
2	Software Pelaporan data Bangsa Kencana Program KKBPK "CINTA"	2022	1	39.000.000,00	Aktif	4.875.000,00	34.125.000,00
	Total		2	137.500.000,00		17.187.500,00	120.312.500,00
	TOTAL		693	10.377.887.466,00		6.835.046.898,50	3.542.840.567,50

c. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2022 sebesar Rp689.439.136,05 terdiri dari:

Tabel 180 Rincian Kas yang Dibatasi Penggunaannya

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021
1. Saldo Kas di Bendahara Jaminan Bongkar (DPMPTSP)	637.914.136,05	296.697.396,81
2. Saldo Kas di Bendahara Jaminan Sewa Rusunawa (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan SDA)	51.525.000,00	52.200.000,00
JUMLAH	689.439.136,05	348.897.396,81

1. Saldo Kas di Bendahara Jaminan Bongkar (DPMPTSP)

Saldo Kas di Bendahara Jaminan Bongkar sebesar Rp637.914.136,05 Merupakan Jaminan Jasa Bongkar Reklame yang belum jatuh tempo sebesar Rp637.553.477,00 dan terdapat jasa giro Bulan Desember 2022 sebesar Rp360.659,05 yang belum disetorkan ke kas daerah.

Tabel 181 Rincian Jaminan Bongkar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Jaminan Bongkar	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Jaminan Bongkar Tahun 2022	296.697.396,81
Penerimaan Jaminan Bongkar Tahun 2022	419.063.073,00
Jasa giro Tahun 2022	2.531.844,18
Jaminan Bongkar Tahun 2022 yang diambil pemohon/pihak ketiga	(69.800.536,00)
Jaminan Bongkar Tahun 2022 yang menjadi hak Pemda dan sudah disetorkan ke kas daerah	(8.243.635,00)
Jasa giro rekening jaminan bongkar disetorkan ke kas daerah	(2.334.006,94)
- Tahun 2021 : Rp162.821,81	
- Tahun 2022 : Rp2.171.185,13	
Kas di Bendahara Jaminan Bongkar per 31 Desember 2022	637.914.136,05

2. Saldo Kas di Bendahara Jaminan Sewa Rusunawa (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan SDA)

Terdapat saldo kas tunai sebesar Rp51.525.000,00 yang berasal dari uang jaminan sewa yang dibayarkan penyewa Rusunawa saat awal menempati unitnya. Besaran uang sewa jaminan ditetapkan sebesar tiga kali uang sewa dan dapat dipergunakan untuk membayar



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

uang sewa sewaktu-waktu jika penghuni melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap kewajibannya. Adanya uang jaminan telah diregulasi dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Tabel 182 Rincian Jaminan Sewa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Jaminan Bongkar	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Jaminan Sewa Tahun 2022	52.200.000,00
Penerimaan Jaminan Sewa Tahun 2022	21.675.000,00
Jaminan Bongkar Tahun 2022 yang diambil pemohon/pihak ketiga	(22.350.000,00)
Kas di Bendahara Jaminan Bongkar per 31 Desember 2022	51.525.000,00

d. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang rusak dan sudah tidak bisa dipergunakan serta akan dihapuskan, aset yang dihibahkan, tetapi belum didukung naskah hibah dan SK Penghapusan, aset lain-lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap, serta aset yang digunakan oleh pihak ketiga melalui pinjam pakai. Rincian mutasi Aset Lain-lain Tahun 2022 sebagai berikut.

Saldo Awal 2022	Rp	45.359.675.169,81
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	Rp	0,00
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	33.000.687.921,44
Mutasi Masuk	Rp	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	33.000.687.921,44
Mutasi Kurang		
Penghapusan	Rp	(20.488.419.588,91)
Koreksi Pencatatan	Rp	(0,00)
Mutasi Keluar	Rp	(0,00)
Reklas Keluar	Rp	(842.437.205,00)
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	(21.330.856.793,59)
Saldo Akhir 2022	Rp	57.029.506.297,34
Penyusutan 2022	Rp	(34.167.830.265,10)
Nilai Buku 2022	Rp	22.861.676.032,24

Mutasi Aset lain-lain terdiri dari:

Tabel 183 Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
1	Reklasifikasi masuk			
a	Dinas Ketahanan Pangan	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	21.250.000,00	
		Reklas dari Alat Bantu	1.000.000,00	
		Reklas dari Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Pengolahan	2.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.050.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	7.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	18.725.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	111.250.500,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	39.625.000,00	
b	DPMPTSP	Reklas dari Alat kantor	2.210.000,00	
		Reklas dari Alat kantor	7.500.000,00	
		Reklas dari Alat kantor	31.947.000,00	
		Reklas dari Alat kantor	48.680.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	19.080.750,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.030.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	20.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	84.112.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	11.400.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	50.497.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	141.037.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	329.118.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	46.925.000,00	
		Reklas dari Aset Tak Berwujud	446.250.000,00	
c	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Reklas dari Aset Tak Berwujud	87.733.360,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	43.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	98.422.000,00	
d	Kecamatan Kedungwaru	Reklasifikasi ke Aset lain-lain	3.450.000,00	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	5.060.000,00	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	1.702.000,00	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	3.000,00	
		Reklasifikasi ke Aset lain-lain	33.900.000,00	
e	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Reklas dari Alat Rumah Tangga	11.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Kantor	4.200.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.033.333,33	
		Reklas dari Alat Kantor	1.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	13.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.750.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	1.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	3.350.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	8.475.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	58.832.500,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	17.700.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	10.150.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	8.580.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	8.495.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	136.040.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	11.125.000,00	
		Reklas dari Aset Tak Berwujud	37.900.000,00	
f	Kecamatan Bandung	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	10.900.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	27.275.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	4.950.000,00	
g	DPMD	Reklas dari Alat Kantor	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	2.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	14.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	25.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	15.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	6.750.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.200.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.200.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.200.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	3.500.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	4.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	7.500.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	8.200.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Pengolahan	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	3.750.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.450.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	16.950.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	21.800.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	16.500.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	10.700.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	143.700.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	54.705.000,00	
		Reklas dari Barang Bercorak Kesenian	50.000,00	
h	Sekretariat DPRD	Reklas dari Komputer Unit	495.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	54.510.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	157.790.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	507.059.500,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	79.301.000,00	
i	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklas dari Alat kantor	1.100.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.540.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.953.000,00	
j	Dinas Perikanan	Reklas dari Alat Besar Darat	32.840.000,00	
		Reklas dari Alat Bengkel Bermesin	3.750.000,00	
		Reklas dari Alat Bengkel Tak Bermesin	2.000.000,00	
		Reklas dari Alat Ukur	9.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	2.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.175.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	20.650.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	29.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	2.500.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	49.400.000,00	
k	Dinas Peternakan & Keswan	Reklas dari Alat Timbangan/Biara	4.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	9.955.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.900.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.500.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Kantor	3.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	7.250.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	5.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Video Dan Film	4.497.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Video Dan Film	4.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Audio	11.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Audio	9.350.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	4.900.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.840.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Video Dan Film	2.450.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	2.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.990.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Video Dan Film	8.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Video Dan Film	5.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Studio Video Dan Film	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	6.100.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	6.100.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi Telephone	2.800.000,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium Umum	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	4.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	1.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	3.000.000,00	
		Reklas dari Alat Besar Darat	17.200.000,00	
		Reklas dari Alat Bantu	6.750.000,00	
		Reklas dari Alat Pengolahan	12.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	210.083.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	9.500.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	10.250.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	82.358.360,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	26.800.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	49.720.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	4.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	19.500.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Peralatan Komputer	11.300.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	
		Reklas dari KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	29.300.000,00	
I	BAPPEDA	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	46.570.000,00	
		Reklas dari Alat Ukur	8.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.687.500,00	
		Reklas dari Alat Kantor	26.900.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	20.650.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	56.800.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	10.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	2.068.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	433.600.000,00	
m	BPBD	Reklas dari Alat Rumah Tangga	23.672.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.700.000,00	
		Reklas dari Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	6.400.000,00	
		Reklas dari Meja dan Kursi Kerja/rapat Pejabat	9.950.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	17.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	6.876.500,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	7.600.000,00	
n	Dinas Pertanian	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	44.750.000,00	
		Reklas dari Alat Pengolahan	20.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	3.700.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	11.480.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	21.118.200,00	
		Reklas dari Alat Kantor	24.643.500,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	26.937.500,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	14.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	52.100.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	11.500.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	35.400.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	2.175.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	29.600.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	18.425.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	61.250.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
o	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	17.000.000,00	
p	Kecamatan Besuki	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	14.500.000,00	
q	BKPSDM	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	31.850.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	13.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.800.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	11.640.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	285.810.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	60.880.000,00	
		Reklas dari Aset Tak Berwujud	131.875.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	14.500.000,00	
r	SATPOL PP	Reklas dari Aset Tak Berwujud	49.250.000,00	
s	BPKAD	Reklas dari Alat Kantor	4.100.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	6.025.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	103.950.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.710.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	23.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	304.285.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	44.325.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	504.680.000,00	
t	Kec. Kalidawir	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	4.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	12.800.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	48.850.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	6.250.000,00	
		Reklas dari Barang Bercorak Kesenian	25.000,00	
u	BAPENDA	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	7.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	8.125.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	29.010.500,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	10.617.500,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	18.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	13.500.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.900.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.455.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	2.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	338.219.700,00	
		Reklas dari Komputer Unit	82.400.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	262.388.800,00	
v	Kecamatan Ngantru	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	7.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	4.500.000,00	
w	Kecamatan Pagerwojo	Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	6.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	4.900.000,00	
x	Dinas KB	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	3.750.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	55.440.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	47.187.500,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	105.124.800,00	
		Reklas dari Komputer Unit	361.506.618,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	10.312.000,00	
y	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Reklas dari Alat Kantor	37.620.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	11.660.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	3.025.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	17.600.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	3.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.050.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	23.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	9.435.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	15.510.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.275.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	9.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	13.700.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.340.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.500.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	23.225.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	5.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.200.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.260.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.600.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	4.125.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.450.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	4.000.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	15.845.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	12.595.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	8.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	8.900.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	24.046.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	22.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	20.904.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	6.400.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	35.674.600,00	
		Reklas dari Komputer Unit	12.750.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	6.820.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	17.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	34.350.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	8.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	19.300.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	5.334.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	28.325.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	22.910.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	22.900.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	45.264.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	39.665.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	18.420.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	513.276.300,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	23.980.000,00	
z	Dinas Koperasi dan UM	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Kantor	7.064.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	10.309.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	52.250.000	
		Reklas dari Alat Studio	20.640.500	
		Reklas dari Alat Komunikasi	2.350.000	
		Reklas dari Komputer Unit	90.125.000	
		Reklas dari Peralatan Komputer	7.880.000	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	5.000.000	
ab	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	8.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	358.765.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	32.480.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	223.450.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	151.725.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	110.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	38.200.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	89.000.000,00	
ac	Kecamatan Rejotangan	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	10.000.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.500.000	
		Reklas dari Alat Komunikasi	1.000.000	
		Reklas dari Komputer Unit	15.500.000	
		Reklas dari Peralatan Komputer	5.750.000	
ad	Dinas Komunikasi dan Informatika	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	10.500.000	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	63.900.000	
ae	Kecamatan Pucanglaban	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	1.200.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.200.000	
		Reklas dari Komputer Unit	9.000.000	
		Reklas dari Komputer Unit	8.000.000	
		Reklas dari Komputer Unit	6.600.000	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.000.000	
		Reklas dari Peralatan Komputer	2.450.000	
af	Dinas Perhubungan	Reklas dari Alat Bengkel Tak Bermesin	18.700.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	6.250.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	37.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	157.104.950,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	74.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	12.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	6.490.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	15.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	15.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	10.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	18.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	10.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	10.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	9.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	5.000.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.000.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	11.330.000,00	
		Reklas dari Peralatan Pemancar	10.800.000,00	
		Reklas dari Peralatan Pemancar	11.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.625.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	2.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	11.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.300.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	103.000.000,00	
		Reklas dari Alat Bengkel Tak Bermesin	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Pengolahan	2.700.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	6.318.000,00	
		Reklas dari Persenjataan Non Senjata Api	22.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	95.675.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	14.400.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	29.500.000,00	
ag	DLH	Reklas dari Alat Besar Darat	100.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	235.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	87.200.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	159.606.779,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	153.577.600,00	
		Reklas dari Alat Pengolahan	42.835.000,00	
		Reklas dari Alat Pengolahan	19.107.000,00	
		Reklas dari Alat Pengolahan	53.342.850,00	
		Reklas dari Alat Kantor	24.900.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	103.775.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	62.230.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	39.450.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	63.509.600,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.050.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	15.750.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	78.160.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	23.850.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	22.500.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	7.500.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	348.109.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	3.025.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	16.200.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	250.545.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	72.220.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	
ah	Kecamatan Tanggunggunung	Reklas dari Alat Rumah Tangga	7.700.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	7.000.000	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.500.000	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.000.000	
		Reklas dari Alat Studio	2.000.000	
		Reklas dari Alat Komunikasi	2.500.000	
		Reklas dari Komputer Unit	18.000.000	
		Reklas dari Peralatan Komputer	10.450.000	
ai	Inspektorat	Reklas dari Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Studio	9.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	3.900.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	15.900.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	139.550.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	3.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	23.700.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	33.900.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	60.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	4.000.000,00	
aj	Kecamatan Gondang	Reklas dari Alat Kantor	3.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	19.200.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	3.200.000,00	
ak	Kecamatan Campurdarat	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	4.200.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	9.044.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	2.700.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	8.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	5.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	2.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	2.450.000,00	
al	Kecamatan Ngunut	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	12.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	6.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	9.000.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.250.000,00	
am	Kecamatan Pakel	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	14.800.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	11.250.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	18.750.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	5.525.000,00	
an	Kecamatan Sumbergempol	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	9.000.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.200.000	
		Reklas dari Komputer Unit	3.000.000	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Peralatan Komputer	5.950.000	
ao	Kecamatan Kauman	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	7.000.000	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.000.000	
		Reklas dari Komputer Unit	12.000.000	
		Reklas dari Peralatan Komputer	4.750.000	
ap	Kec. Boyolangu	Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	3.000.000,00	
aq	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Reklas dari Alat Bantu	2.995.000,00	
		Reklas dari Alat Bengkel Tak Bermesin	4.400.000,00	
		Reklas dari Alat Ukur	18.440.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	13.528.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	7.100.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	37.055.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.437.495,00	
		Reklas dari Alat Studio	46.325.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	8.000.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	9.250.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	79.050.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	315.243.100,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	57.680.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	50.600.000,00	
ar	Dinas Pendidikan, Pemuda & olah Raga	Reklas dari Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.000.000,00	
		Reklas dari Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.286.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	117.980.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	35.816.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	54.810.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	9.520.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	79.755.320,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	42.961.750,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	52.340.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.100.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	114.600.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	157.276.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	5.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Peralatan Komputer	30.200.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	44.365.000,00	
as	Dinas Kesehatan	Reklas dari Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.200.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	29.525.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	22.190.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	243.848.700,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	3.141.500,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	24.417.100,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	270.342.117,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	79.999.625,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	1.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	505.528.568,67	
		Reklas dari Alat Kedokteran	29.617.743,75	
		Reklas dari Alat Komunikasi	30.677.625,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium	34.650.000,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium	273.151.780,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium	31.079.800,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium	80.448.500,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium	217.191.740,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	1.425.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	3.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	1.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	9.150.000,00	
		Reklas dari Alat Ukur	11.575.000,00	
		Reklas dari Alat Bantu	8.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	12.434.074,04	
		Reklas dari Alat Kantor	19.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	28.240.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	35.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	72.600.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	1.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	101.801.739,61	
		Reklas dari Alat Studio	20.249.900,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Studio	14.216.000,00	
		Reklas dari Alat Bengkel Bermesin	5.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	288.710.000,00	
		Reklas dari Alat Laboratorium	167.200.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	1.700.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	7.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	1.500.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	6.500.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	208.500.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	115.900.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	15.750.000,00	
		Reklas dari Bahan Habis Pakai	347.278.975,29	
		Reklas dari Kdp	19.280.938,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	97.310.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	31.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.775.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	28.380.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	9.845.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	13.014.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	81.950.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.656.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	2.750.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	36.646.500,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.280.000,00	
		Reklas dari Peralatan Pemancar	5.225.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	2.730.638.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	255.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	11.918.500,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	1.515.790.100,00	
		Reklas dari Alat Kedokteran	592.520.000,00	
		Reklas dari Unit Alat Laboratorium	231.000.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	60.060.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Peralatan Komputer	14.817.250,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	33.302.500,00	
		Reklas dari Bahan Habis Pakai	237.798.879,75	
at	Sekretariat Daerah	Reklas dari Komputer Unit	9.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	9.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	10.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	1.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	527.370.000,00	
		Reklas dari Alat Bantu	56.500.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	71.000.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	87.340.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	7.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	6.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	235.350.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	76.950.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	792.375.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	30.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	80.650.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	994.925.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	378.550.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	452.461.750,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	137.850.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	48.000.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	75.125.000,00	
		Reklas dari Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	34.150.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	242.250.000,00	
		Reklas dari Alat Komunikasi	33.250.000,00	
		Reklas dari Peralatan Pemancar	24.900.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	25.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	548.075.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	194.955.000,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	60.500.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	9.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	1.062.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	34.000.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	2.895.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	1.800.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	4.650.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	5.600.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	6.800.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	13.500.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	44.434.000,00	
		Reklas dari Alat Kantor	9.455.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	9.150.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.500.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	9.600.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	13.900.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	7.400.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	8.675.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.337.500,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	
		Reklas dari Alat Rumah Tangga	14.900.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	3.000.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	8.850.000,00	
		Reklas dari Alat Studio	25.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	6.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	91.185.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	58.400.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	91.500.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	112.344.350,00	
		Reklas dari Komputer Unit	45.950.000,00	
		Reklas dari Komputer Unit	44.540.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	13.770.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	30.500.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	25.875.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	10.030.000,00	
		Reklas dari Peralatan Komputer	6.150.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
		Reklas dari Peralatan Komputer	36.515.800,00	
		Reklas dari Aset Tidak Berwujud	98.587.500,00	
au	PUPR	Reklas dari Alat Besar Darat	77.818.000,00	
		Reklas dari Alat Angkutan Darat Bermotor	7.330.000,00	
		Reklas dari KDP	1.033.342.100,00	
	Sub Total 1			33.000.687.921,44
	Jumlah Mutasi Tambah			33.000.687.921,44
2	Reklas Keluar			
a	BAPENDA	Pembayaran Piutang PBB	(841.837.205,00)	
b	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reklas Keluar ke Alat Rumah Tangga	(600.000,00)	
	Sub Total 2			(842.437.205,00)
3	Penghapusan			
	Dinas Ketahanan Pangan	Penghapusan	(12.225.000,00)	
	DPMPSTSP	Penghapusan	(140.676.500,00)	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penghapusan	(16.408.750,00)	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penghapusan	(63.913.333,00)	
	DPMD	Penghapusan	(99.448.750,00)	
	Sekretariat DPRD	Penghapusan	(518.028.600,00)	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(43.405.050,00)	
	Dinas Perikanan	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(14.409.100,00)	
	Dinas Peternakan & Keswan	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(209.507.000,00)	
	BAPPEDA	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(121.019.860,00)	
	BPBD	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(3.397.500,00)	
	Dinas Pertanian	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(14.021.000,00)	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(3.040.000,00)	
	BKPSDM	Penghapusan dari aset Lain-lain	(32.830.000,00)	
	SATPOL PP	Penghapusan dari aset Lain-lain	(81.019.000,00)	
	BPKAD	Penghapusan dari aset Lain-lain	(37.729.820,00)	
	BAPENDA	Penghapusan dari aset Lain-lain	(20.316.500,00)	
	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Penghapusan dari aset Lain-lain	(13.173.750,00)	
	Dinas Koperasi dan UM	Penghapusan	(10.387.880,00)	
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penghapusan Brg Inventaris dr Aset lain2	(620.000,00)	
	Dinas Perhubungan	Penghapusan	(518.999.950,00)	
	DLH	Penghapusan dari aset Lain-lain	(942.327.422,50)	
	Inspektorat	Penghapusan dari aset Lain-lain	(2.475.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Uraian	Nilai	Jumlah
	Inspektorat	Penghapusan dari aset Lain-lain	(243.450.000,00)	
	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Penghapusan Brg Inventaris dr Aset lain2	(10.604.000,00)	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OR	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(98.690.259,58)	
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OR	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(69.286.000,00)	
	Dinas Kesehatan	Penghapusan	(22.241.372,50)	
	RSUD Iskak	Penghapusan	(16.476.791.832,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(14.295.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(9.250.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan	(14.255.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(40.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan dari aset Lain-lain	(4.778.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan	(30.000.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan	(9.037.500,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan	(7.330.000,00)	
	Sekretariat Daerah	Penghapusan dari Aset Lain-Lain	(527.370.000,00)	
	PUPR	Penghapusan dari aset Lain-lain	(18.396.333,33)	
	Dinas Kesehatan	Penghapusan	(13.224.526,00)	
	Sub Total 3			(20.488.419.588,91)
	Jumlah Mutasi Kurang			(21.330.856.793,91)

Aset lain-lain senilai Rp22.861.676.032,24 termasuk di dalamnya aset berupa kendaraan yang dipinjamkaikan oleh pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184 Rincian Aset yang Dipinjamkaikan

(dalam Rupiah)

No	JENIS BARANG	MERK/TYPER	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	HARGA	INSTANSI/PIHAK KE TIGA
1	Mobil	Toyota Kijang KF80	2004	AG 621 RP	45.000.000,00	Komando Distrik Militer
2	Mobil	TOYOTA/FOR TU NER 2.4 VRZ 4X2 AT	2018	AG 1054 RP	515.370.000,00	Komando Distrik Militer
3	Mobil	Isuzu panther	1996	AG 335 RP	35.000.000,00	Komando Distrik Militer
4	Mobil	Toyota Kijang KF 83 SPR	2001	AG 317 RP	110.000.000,00	Corps Polisi Militer
5	Mobil	Toyota Avanza	2009	AG 575 RP	151.500.000,00	Kejaksanaan Negeri Tullungagung
6	Mobil	TOYOTA/FOR TU NER 2.4 VRZ 4X2 AT	2018	AG 4 RP	515.370.000,00	Kejaksanaan Negeri Tullungagung
7	Mobil	Toyota Innova G XW42	2013	AG 1069 RP	244.210.000,00	Kejaksanaan Negeri Tullungagung
8	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio Z LE	2014	AG 4947 RP	24.950.000,00	Komisi Pemilihan Umum
9	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio Z LE	2014	AG 4948 RP	24.950.000,00	Komisi Pemilihan Umum
10	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio Z LE	2014	AG 4946 RP	24.950.000,00	Komisi Pemilihan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN PEMBELIAN	NOMOR POLISI	HARGA	INSTANSI/PIHAK KE TIGA
11	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio Z LE	2014	AG 4951 RP	24.950.000,00	Komisi Pemilihan Umum
12	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio Z LE	2014	AG 4952 RP	24.950.000,00	Komisi Pemilihan Umum
13	Mobil	TOYOTA/FOR TU NER 2.4 VRZ 4X2 AT	2018	AG 5 RP	515.370.000,00	Pengadilan Negeri Tulungagung
14	Sepeda Motor	Yamaha GT 125	2014	AG 4183 RP	16.150.000,00	Panwaslu Kabupaten Tulungagung
15	Mobil	Toyota Avanza seri S	2010	AG 487 RP	152.600.000,00	Panwaslu Kabupaten Tulungagung
16	Mobil	TOYOTA/FOR TU NER 2.4 VRZ 4X2AT	2018	AG 1055 RP	515.370.000,00	Kepolisian Resort Tulungagung
17	Mobil	Toyota Innova G XW42	2015	AG 1230 RP	255.420.000,00	Kepolisian Resort Tulungagung
18	Mobil	toyota Kijang Innova EXW41	2011	AG 1025 RP	224.300.000,00	MUI
19	Mobil	Isuzu TBR54 F Turbo LM	2007	AG 364 RP	140.000.000,00	BAZNAS
TOTAL					3.560.410.000,00	

e. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Pada akhir tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF – TKD) yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada rekening lain BI TDF – LKD Pemda, yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah. Hal ini berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility Transfer* dalam rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil dalam bentuk Nontunai. Kebijakan penyaluran DBH melalui rekening TDF – TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBD dan APBD yang lebih sehat, efisien dan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar.

Secara umum proses bisnis penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD sebagai berikut :

- Pembukaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda oleh Direktorat PKN berdasarkan permohonan dari Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
- Pengisian dana pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda dilakukan dengan memindahkan dana dari RKUN ke Rekening TDF berdasarkan SP2D Nihil.
- Pembayaran remunerasi saldo DBH pada Rekening TDF-TKD yang belum dilakukan penarikan dana oleh Pemda (berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dengan Pemda).
- Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemda setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal terjadi retur pada proses penarikan dana dan/atau pembayaran remunerasi, penyelesaian retur dengan mengikuti ketentuan tata cara penyelesaian retur SP2D

Adapun setara kas sebesar Rp13.630.902.054,68 pada tahun 2022 yang ada di rekening Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000404980 terdiri dari saldo pokok sebesar Rp13.627.596.948,00 dan remunerasi sebesar Rp3.305.106,68.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sedangkan rincian Dana bagi Hasil tahun 2022 yang salurkan secara non tunai tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 185 Rincian Penyaluran DBH Non Tunai

(dalam Rupiah)

Jenis Dana bagi Hasil	Jumlah
Dana Bagi Hasil PBB	1.364.946.043,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	2.020.335.104,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	323.056.067,00
Dana Bagi Hasil CHT	3.473.845.885,00
Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi	4.890.481.005,00
Dana Bagi Hasil Gas Bumi	310.711.246,00
Dana Bagi Hasil Pengusahaan Panas Bumi	3.241.320,00
Dana Bagi Hasil Mineral dan batubara landrent	302.422,00
Dana Bagi Hasil Minaeral dan batubara royalty	978.935.576,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan - PSDH	49.989.069,00
Dana Bagi Hasil SDA Perikanan	211.753.211,00
Jumlah	13.627.596.948,00

7.5.3.2.6 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	45.623.419.836,61	34.754.159.603,69

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak lain yang jatuh temponya kurang dari satu Tahun Anggaran. Termasuk dalam kelompok tersebut adalah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp45.623.419.836,61 dan Rp34.752.159.603,69 terdiri dari:

Tabel 186 Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	22.915.856,43	24.504.367,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	274.876.110,00	237.418.065,00
3	Utang Belanja	41.684.650.927,18	33.721.647.784,69
	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.640.976.943,00	770.589.387,00
	Jumlah	45.623.419.836,61	34.754.159.603,69

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	22.915.856,43	24.504.367,00

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Adapun rincian utang PFK tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 187 Rincian Utang PFK

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Utang Pajak		
Dinas Kesehatan	299.744,00	2.044.277,00
- Utang PPh 21	299.744,00	1.203.077,00
- Utang PPh 22	0,00	109.750,00
- Utang PPN	0,00	731.400,00
Sekretariat DPRD	0,00	2.346.000,00
- Utang PPh 21	0,00	2.346.000,00
Dinas Sosial	0,00	20.114.140,00
- Utang Pajak Daerah	0,00	6.277.500,00
- Utang PPh 21	0,00	1.791.000,00
- Utang PPh 22	0,00	1.336.400,00
- Utang PPh 23	0,00	6.254.640,00
- Utang PPN	0,00	4.454.600,00
Dinas Pendidikan (Bendahara BOS)	22.616.112,43	0,00
- Utang Pajak Daerah	3.557.528,00	0,00
- Utang PPh 21	3.324.048,00	0,00
- Utang PPh 23	1.951.863,00	0,00
- Utang PPN	13.782.673,43	0,00
TOTAL	22.915.856,43	24.504.367,00

31 Desember 2022 (Rp)

31 Desember 2021 (Rp)

b. **Pendapatan Diterima Dimuka**

274.876.110,00

237.418.065,00

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan. Rincian nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp274.876.110,00 dan Rp237.418.065,00 terdiri dari:

Tabel 188 Rincian Saldo Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	RSUD Dr. Iskak	57.900.000,00	0,00
	- Pendapatan sewa ATM Bank BNI (masa sewa 1 Agst 2022 – 31 Des 2025)	57.900.000,00	0,00
2	Dinas PU BM & CK	3.576.026,67	14.304.106,67
	PT Supra Prima Nusantara dengan masa sewa (april 2018 - April 2023)	3.576.026,67	14.304.106,67
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.750.000,00	12.250.000,00
	- Pendapatan dari kontribusi fillet patin (masa sewa 01 Okt 2022 – 31 Okt 2023)	15.750.000,00	12.250.000,00
4	BPKAD	197.650.083,33	210.863.958,33
	- Pemakaian gedung eks.Kawedanan Campurdarat untuk Kantor Bank Jatim (masa 01 April 2020 - 31 Maret 2025)	45.675.000,00	65.975.000,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh PDAU (masa 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022)	0,00	2.120.000,00
	- Pemakaian tanah untuk ATM BNI Pasar Ngemplak (masa 1 April 2021 - 30 Maret 2022)	0,00	2.700.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	- Pemakaian tanah untuk ATM BNI di Kantor Camat Kalidawir (masa 1 April 2021 – 30 Maret 2024)	10.125.000,00	18.225.000,00
	- Pemakaian tanah untuk ATM BNI di Jl. A Yani Timur (masa 1 Agustus 2019 – 31 Juli 2022)	0,00	6.825.000,00
	- Retribusi Pemakaian Tanah untuk Gedung PD BPR di Kec. Gondang (masa 1 Oktober 2020 - 30 September 2025)	7.920.000,00	10.800.000,00
	- Retribusi Pemakaian Tanah untuk Gedung PD BPR di Kec. Kalidawir (masa 1 Oktober 2020 - 30 September 2025)	17.820.000,00	24.300.000,00
	- Retribusi Pemakaian Tanah untuk Gedung PD BPR di Kec. Tanggunggunung (masa 1 Oktober 2020 - 30 September 2025)	6.237.000,00	8.505.000,00
	- Retribusi BPR Jatim di Kecamatan Pucanglaban (1 April 2021 – 31 Maret 2022)	0,00	1.768.125,00
	- Pemakaian Tanah untuk ATM Bank Jatim di Jl. A. Yani Timur No.37 (01 Agst 2020 – 31 Juli 2025)	27.900.000,00	38.700.000,00
	- Pemakaian Tanah untuk ATM Bank Jatim di Jl. Ki Mangunsarkoro, Beji depan Kantor Diknas (15 Okt 2020 – 14 Okt 2025)	13.860.000,00	18.900.000,00
	- Sewa Bangunan Pemkab T.Agung untuk Kantor Bank Jatim – Kasda (1 Mei 2021 – 31 April 2022)	0,00	5.415.833,33
	- Sewa Bangunan Pemkab T.Agung untuk Kantor PT. BPR Bank Tulungagung (Perseroda) di Pasar Ngunut (1 Maret 2021 – 28 Feb 2022)	0,00	1.020.000,00
	- Sewa Bangunan Pemkab T.Agung untuk Kantor PT. BPR Bank Tulungagung (Perseroda) di Pasar Ngunut (7 Des 2021 – 6 Des 2022)	0,00	5.610.000,00
	- Pemakaian Tanah untuk ATM BNI di Psr NGEMPLAK (1 April 2022 – 30 Maret 2023)	2.700.000,00	0,00
	- Retribusi Pemakaian Tanah untuk ATM BNI di jl. A.Yani Timur No.1b (1 Agst 2022 – 30 Juli 2025)	30.225.000,00	0,00
	- Retribusi Sewa Tanah Kelurahan Kenayan untuk Reklame PDAU (01 Juli 2022 – 30 Juni 2023)	840.000,00	0,00
	- Retribusi Sewa Tanah Kelurahan Kutoanyar untuk Reklame PDAU (01 Juli 2022 – 30 Juni 2023)	1.280.000,00	0,00
	- Retribusi BPR Jatim di Kecamatan Pucanglaban (1 April 2022 – 31 Maret 2025)	8.991.000,00	0,00
	- Pemakaian Tanah untuk ATM Bank Jatim di Pasar Ngemplak (1 Des 2022 – 30 Nov 2023)	12.031.250,00	0,00
	- Sewa Bangunan Pemkab T.Agung untuk Kantor Bank Jatim – Kasda (1 Mei 2022 – 30 April 2023)	5.415.833,33	0,00
	- Sewa Bangunan Pemkab T.Agung untuk Kantor PT. BPR Bank Tulungagung (Perseroda) di Pasar Ngunut (1 Maret 2022 – 28 Feb 2023)	1.020.000,00	0,00
	- Sewa Bangunan Pemkab T.Agung untuk Kantor PT. BPR Bank Tulungagung (Perseroda) di Pasar Ngunut (7 Des 2022 – 6 Des 2023)	5.610.000,00	0,00
	Jumlah	274.876.110,00	237.418.065,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
c. Utang Belanja	41.684.650.927,18	33.721.647.784,69

Tabel 189 Rincian Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1.	Utang Belanja Pegawai	3.949.734.768,62	13.164.102.734,69
2.	Utang Belanja Barang	10.027.000,00	975.000,00
3.	Utang Belanja Jasa	2.986.649.882,56	2.587.047.863,00
4.	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.250.000,00
5.	Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	137.994.300,00	282.892.750,00
6.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.983.009.455,00	16.064.898.554,00
7.	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.563.430.511,00	1.551.473.173,00
8.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	53.805.010,00	62.007.710,00
	Jumlah	41.684.650.927,18	33.721.647.784,69

1) Utang Belanja Pegawai

Tabel 190 Rincian Utang Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Utang Belanja Pegawai		
a.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	23.315.528,00
c.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.431.121.240,42	1.328.429.282,69
d.	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	230.746.185,00	174.122.235,00
e.	Utang Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	5.399.130.000,00
e.	Utang Belanja Pegawai BLUD	1.287.867.343,20	6.239.105.689,00
	JUMLAH	3.949.734.768,62	13.164.102.734,69

Penjelasan :

- a. Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp1.287.867.343,20 yang terdiri dari :

Tabel 191 Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Utang Belanja Pegawai BLUD		
a.	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.234.057.790,20	6.239.105.689,00
b.	Beban Honorarium Pertanggungjawaban Keuangan	26.383.778,00	0,00
c.	Beban Honorarium Pejabat Pengadaan Barang atau Jasa	3.003.945,00	0,00
d.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.421.830,00	0,00
	JUMLAH	1.287.867.343,20	6.239.105.689,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

2) Utang Belanja Barang

Tabel 192 Rincian Utang Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Utang Belanja Barang		
a.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.435.000,00	975.000,00
b.	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.592.000,00	0,00
	JUMLAH	10.027.000,00	975.000,00

3) Utang Belanja Jasa

Tabel 193 Rincian Utang Belanja Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
	Utang Belanja Barang		
a.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	7.500.000,00	0,00
b.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	5.250.000,00
c.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	15.093.652,00	19.676.750,00
d.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	17.769.030,00	12.216.950,00
e.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	2.797.276.106,00	2.400.768.333,00
f.	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	3.750.000,00
g.	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.919.247,00	41.278.105,00
h.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.308.950,00	1.444.500,00
g.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	10.133.550,00	9.693.135,00
i.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.282.050,00	571.275,00
j.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	538.650,00	571.275,00
k.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	47.683.440,00	43.652.250,00
l.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	230.895,00	242.010,00
m.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak	384.615,00	455.940,00
n.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	128.205,00	242.010,00
o.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	47.957.417,56	29.383.222,50
p.	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	32.444.075,00	17.852.107,50
	JUMLAH	2.986.649.882,56	2.587.047.863,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Berikut ini rincian dari masing-masing utang belanja jasa di atas:

Tabel 194 Rekap Utang Listrik, Air, Telepon dan Internet Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Listrik (PT PLN)	Air (PDAM)	Telepon (PT TELKOM)	Internet (PT TELKOM)	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN	15.865.670,00	29.800,00	175.090,00		16.070.560,00
2	DINAS KESEHATAN	109.861.116,00	142.310,00	444.349,00		110.447.775,00
3	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	20.025.195,00	463.560,00	353.257,00		20.842.012,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	6.021.173,00	64.740,00	0,00		6.085.913,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.487.306,00	381.730,00	357.155,00		10.226.191,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.462.966,00	333.110,00	0,00		4.796.076,00
7	BAKESBANGPOL	4.002.568,00	580.360,00	16.927,00		4.599.855,00
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.958.372,00	0,00	60.054,00		2.018.426,00
9	DINAS SOSIAL	1.513.796,00	41.000,00	0,00		1.554.796,00
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.311.040,00	0,00	65.182,00		6.376.222,00
11	DINAS KB, PP dan PA	4.576.834,00	564.990,00	17.874,00		5.159.698,00
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.801.701,00	0,00	88.700,00		4.890.401,00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.916.758,00	685.300,00	157.850,00		10.759.908,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dan DESA	5.302.534,00	0,00	38.905,00		5.341.439,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	2.313.728.013,00	41.400,00	84.454,00		2.313.853.867,00
16	DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA	14.120.185,00	80.300,00	244.277,00		14.444.762,00
17	DINAS KOPERASI dan USAHA MIKRO	6.103.920,00	307.750,00	44.089,00		6.455.759,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL dan PTSP	8.273.312,00	685.300,00	214.136,00		9.172.748,00
19	DINAS KEBUDAYAAN dan PARIWISATA	9.312.306,00	5.367.870,00	38.017,00		14.718.193,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN dan KEARSIPAN	13.759.729,00	264.800,00	0,00		14.024.529,00
21	DINAS PERIKANAN	19.851.147,00	565.680,00	141.624,00		20.558.451,00
22	DINAS PERTANIAN	8.675.786,00	293.520,00	39.238,00		9.008.544,00
23	DINAS PETERNAKAN dan KESEHATAN HEWAN	13.239.847,00	82.800,00	48.954,00		13.371.601,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN	18.469.085,00	1.202.170,00	130.296,00		19.801.551,00
25	SEKRETARIAT DAERAH	77.266.453,00	2.402.480,00	8.186.508,00	5.919.247,00	93.774.688,00
26	SEKRETARIAT DPRD	12.562.729,00	217.400,00	1.717.702,00		14.497.831,00
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16.111.347,00	461.900,00	264.653,00		16.837.900,00
28	BPKAD	14.415.413,00	271.100,00	91.464,00		14.777.977,00
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.816.503,00	216.400,00	36.678,00		15.069.581,00
30	BKPSDM	0,00	204.320,00	0,00		204.320,00
31	INSPEKTORAT	1.296.580,00	68.420,00	0,00		1.365.000,00
32	KECAMATAN BANDUNG	1.124.690,00	0,00	28.416,00		1.153.106,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	SKPD	Listrik (PT PLN)	Air (PDAM)	Telepon (PT TELKOM)	Internet (PT TELKOM)	Jumlah
33	KECAMATAN BESUKI	1.378.319,00	0,00	28.416,00		1.406.735,00
34	KECAMATAN BOYOLANGU	1.581.720,00	0,00	0,00		1.581.720,00
35	KECAMATAN CAMPURDARAT	1.930.605,00	0,00	28.416,00		1.959.021,00
36	KECAMATAN GONDANG	1.699.530,00	0,00	37.407,00		1.736.937,00
37	KECAMATAN KALIDAWIR	746.242,00	0,00	28.416,00		774.658,00
38	KECAMATAN KARANGREJO	2.860.581,00	128.000,00	48.507,00		3.037.088,00
39	KECAMATAN KAUMAN	2.304.563,00	0,00	55.500,00		2.360.063,00
40	KECAMATAN KEDUNGGWARU	4.632.874,00	258.920,00	48.507,00		4.940.301,00
41	KECAMATAN NGANTRU	1.694.431,00	0,00	37.407,00		1.731.838,00
42	KECAMATAN NGUNUT	620.368,00	104.150,00	55.500,00		780.018,00
43	KECAMATAN PAGERWOJO	494.960,00	0,00	37.407,00		532.367,00
44	KECAMATAN PAKEL	1.555.896,00	0,00	0,00		1.555.896,00
45	KECAMATAN PUCANGLABAN	470.212,00	0,00	0,00		470.212,00
46	KECAMATAN REJOTANGAN	1.546.572,00	0,00	0,00		1.546.572,00
47	KECAMATAN SENDANG	576.736,00	80.300,00	192.030,00		849.066,00
48	KECAMATAN SUMBERGEMPOL	854.344,00	0,00	720.059,00		1.574.403,00
49	KECAMATAN TANGGUNGUNUNG	340.399,00	65.000,00	121.911,00		527.310,00
50	KECAMATAN TULUNGAGUNG	4.753.680,00	1.112.150,00	568.320,00		6.434.150,00
	TOTAL	2.797.276.106,00	17.769.030,00	15.093.652,00	5.919.247,00	2.836.058.035,00

4) Utang Belanja Perjalanan Dinas

Pada tahun 2022 tidak terdapat Utang perjalanan dinas sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp8.250.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan merupakan perjalanan dinas JKN Non Kapitasi dan Tulungagung Emergency Medical Service (TEMS) yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021.

5) Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

a. Dinas Perhubungan - Penjelasan utang jasa pemungutan retribusi parkir dan persampahan sebesar Rp137.994.300,00 sebagai berikut:

- Untuk retribusi parkir berlangganan bulan Desember 2022 sebesar Rp 742.797.500,00 dan bagi hasil yang belum terbayarkan sebesar Rp133.703.550,00. Hal ini berdasarkan Nota Kesepahaman antara Bupati Tulungagung dengan Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kepolisian Resor Tulungagung Nomor 181/202/003/2022, Nomor 188/3/202/2022, Nomor MOU/16/I/2022/POLRES tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Setiap Tahun di Kabupaten Tulungagung, yang menyatakan bahwa penerimaan bagi hasil retribusi parkir diatur dengan pembagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 82%, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 13% dan Polres/Polresta Kabupaten/Kota sebesar 5%.
- Retribusi parkir non langganan bulan Desember 2022 sebesar 8.581.500,00 dan bagi bagi hasil yang belum terbayarkan sebesar Rp 4.290.750,00 ditetapkan dengan Surat Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

masing-masing juru parkir dengan ketentuan bahwa juru parkir akan menerima honorarium sebesar Rp750.000,00/tiap bulan yang dibayarkan pada akhir bulan dan selain itu menerima 50% dari pendapatan retribusi parkir non langganan.

- 6) Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri dari :

Tabel 195 Rincian Utang Belanja BLUD RSUD dr. ISKAK

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	-	-
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		8.560.000,00
4	Belanja Obat-Obatan-Obat	31.104.005.449,00	14.678.006.120,00
5	Belanja Natura dan Pakan-Natura	243.194.686,00	152.090.905,00
6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		-
7	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		2.680.000,00
8	Belanja Tagihan Telepon	3.073.722,00	3.919.418,00
9	Belanja Tagihan Air	73.200,00	74.200,00
10	Belanja Tagihan Listrik	463.291.257,00	417.150.613,00
11	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	52.136.050,00	27.859.392,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	68.304.874,00	-
13	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.900.000,00	-
14	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	503.152.876,00	-
	Jumlah	32.447.132.114,00	15.290.340.648,00

Tabel 196 Rincian Utang Belanja pada BLUD Puskesmas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	800.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.870.000,00	8.140.000,00
3	Belanja Persediaan pengisian isi tabung gas	299.000,00	3.075.000,00
4	Beban Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	170.000,00	300.000,00
5	BebanBarang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	9.570.000,00	0,00
6	Beban Obat-- Obatan	4.300.000,00	
7	Belanja makanan dan minuman rapat	27.583.000,00	17.315.500,00
8	Belanja Makanan dan Minuman Pasien - LO	0,00	46.670.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.560.000,00	1.066.000,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.510.000,00	2.979.220,00
11	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	243.498.900,00	70.009.000,00
12	Belanja Jasa telepon	4.345.731,00	4.372.061,00
13	Belanja Jasa air	4.147.570,00	2.619.120,00
14	Belanja Jasa listrik	59.610.232,00	49.061.863,00
15	Belanja Jasa kawat/faksimili/internet	20.291.250,00	9.900.120,00
16	Beban Jasa Kalibrasi	2.467.500,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	64.232.318,00	505.302.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.000.000,00	750.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	2.250.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Sopir	1.500.000,00	1.500.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.350.000,00	4.200.000,00
24	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.790.840,00	11.374.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
25	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	462.000,00	4.560.000,00
26	Beban Medical check Up	925.000,00	
27	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	17.700.000,00	6.600.000,00
28	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	6.450.000,00
29	Beban Jasa Pemeliharaan Komputer Jaringan	1.750.000,00	0,00
30	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.944.000,00	10.134.022,00
31	Beban Persediaan untuk dijual/diserahkan – persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.	0,00	5.130.000,00
	Jumlah	535.877.341,00	774.557.906,00

7) Utang Belanja Bagi Hasil

Utang Belanja bagi hasil per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.617.235.521,00 terdiri dari:

- kurang salur nilai bagi hasil pajak daerah (Non PBB-P2) kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.529.189.412,00;
- kurang salur nilai bagi hasil pajak daerah (PBB-P2) kepada Pemerintah Desa sebesar Rp34.241.099,00; dan
- Kurang salur nilai bagi hasil retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp53.805.010,00

Rincian pada Lampiran 1.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
d. Utang Jangka Pendek Lainnya	3.640.976.943,00	770.589.387,00

Utang jangka pendek lainnya tahun 2022 sebesar Rp3.640.976.943,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 197 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	2.668.088.966,00	176.969.872,00
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
	- PBB- Bagian Daerah Migas	708.238.233	6.250.786,00
	- PBB – Biaya Pemungutan Migas	0,00	302.316,00
	- PBB – Bagian Daerah Perhutanan	1.347.978.666	0,00
	- SDA – Panas Bumi	12.722.750	12.722.750,00
	- SDA - Perikanan	173.472.924	157.694.020,00
	- Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	425.676.393	0,00
2	Utang kepada Pemerintah Provinsi	280.484.500,00	243.254.500,00
	- Sisa Bantuan Keuangan Khusus Provinsi	280.484.500,00	243.254.500,00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga	692.403.477,00	350.365.015,00
	Utang Jaminan Bongkar	637.553.477,00	296.534.575,00
	Utang Jaminan Sewa	51.525.000,00	52.200.000,00
	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.325.000,00	1.630.440,00
	- Dinas Pendidikan – Kekurangan Pembayaran Honor	0,00	1.551.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Uraian	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
-	BAPPEDA - Kekurangan Pembayaran Honor	3.325.000,00	22.000,00
-	BPBD - Kekurangan Pembayaran Honor	0,00	4.574,00
-	DPMDes – Kekurangan Pembayaran ke pihak ketiga	0,00	52.616,00
	JUMLAH	3.640.976.943,00	770.589.387,00

i. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer merupakan perhitungan lebih salur Dana Bagi Hasil. Pada tahun 2021 terdapat saldo sebesar Rp176.969.872,00 sesuai dengan PMK.129/PMK.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2021 dengan memperhitungkan penyelesaian pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 terdapat saldo sebesar Rp2.668.088.966,00 sesuai dengan PMK.127/PMK.07/2022 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2022 dengan memperhitungkan penyelesaian pada tahun 2022.

ii. Utang Kepada Pemerintah Provinsi

Utang Kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp280.484.500,00 merupakan kelebihan/sisa Bantuan Keuangan Khusus propinsi yang belum di setorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022. Sisa dana tersebut sudah disetorkan pada tanggal 6 Pebruari 2022

iii. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp692.403.477,00 dengan perincian sebagai berikut :

a. Utang Jaminan Bongkar sebesar Rp637.553.477,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

	<u>Jumlah (Rp)</u>
Utang Jaminan Bongkar	
Utang Jaminan Bongkar per 31 Desember 2021	296.534.575,00
Penerimaan Jaminan Bongkar Tahun 2022	419.063.073,00
Jaminan Bongkar Tahun 2022 yang diambil pemohon/pihak ketiga	(69.800.536,00)
Jaminan Bongkar Tahun 2022 yang menjadi hak Pemda dan sudah disetorkan ke kas daerah Tahun 2022	(8.243.635,00)
Jaminan Bongkar yang belum jatuh tempo (Utang Jaminan Bongkar)	637.553.477,00

b. Utang Jaminan Sewa sebesar Rp51.525.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

	<u>Jumlah (Rp)</u>
Utang Jaminan Sewa Rusunawa	
Utang Jaminan Sewa Rusunawa per 31 Desember 2021	52.200.000,00
Penerimaan Jaminan Sewa Tahun 2022	21.675.000,00
Jaminan Sewa yang diserahkan kembali ke penyewa	(22.350.000,00)
Jaminan Sewa yang masih di Bendahara (Utang Jaminan Sewa)	51.525.000,00



7.5.3.2.7 Ekuitas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas	4.347.497.472.400,64	4.484.561.139.194,25

Ekuitas merupakan selisih antara aktiva dengan kewajiban/utang, yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Adapun Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.347.497.472.400,64.

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2022. Laporan Operasional Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan dengan Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

Secara garis besar terdapat perbedaan jumlah Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Pendapatan dan beban pada Laporan Operasional (LO), perbedaan tersebut dipengaruhi oleh :

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.
2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.
3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
a. Pendapatan-LO	2.810.472.416.254,63	3.092.885.923.675,62

Pendapatan-LO Kabupaten Tulungagung adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.810.472.416.254,63 atau menurun sebesar Rp282.413.507.420,99 atau 9,13% dibandingkan tahun 2021.

Adapun rincian pendapatan berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

Tabel 198 Rincian Pendapatan LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	600.684.493.391,63	955.610.600.221,24
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.834.301.195.823,00	1.805.267.434.401,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	375.486.727.040,00	332.007.889.053,38
	Jumlah	2.810.472.416.254,63	3.092.885.923.675,62

Adapun realisasi masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Tulungagung adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp600.684.493.391,63 atau menurun sebesar Rp354.926.106.829,61 atau 37,14% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp955.610.600.221,24 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tabel 199 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pendapatan Pajak Daerah	134.809.722.329,00	112.893.317.306,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	18.073.102.675,00	20.504.368.389,67
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.497.987.599,34	8.498.654.369,40
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	438.302.524.940,29	813.714.260.156,17
	Jumlah	600.684.493.391,63	955.610.600.221,24

	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
b. Beban LO	2.943.860.780.659,90	Rp2.586.714.674.475,46

Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.943.860.780.659,90 atau mengalami peningkatan sebesar Rp357.146.106.184,44 (13,81%) dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp2.586.714.674.475,46.

Adapun rincian belanja menurut jenisnya sebagai berikut:

Tabel 200 Rincian Beban-LO

(dalam Rupiah)

No	Beban	TA 2022	TA 2021
1	Beban Pegawai	1.096.733.948.457,37	1.180.136.483.215,55
2	Beban Persediaan	701.480.186.886,65	436.275.077.131,56
3	Beban Jasa	423.002.362.110,37	326.564.147.313,11
4	Beban Pemeliharaan	45.164.726.357,85	41.356.377.981,11
5	Beban Perjalanan Dinas	98.355.536.084,00	62.371.808.613,00
6	Beban Hibah	119.215.091.924,23	118.009.605.830,05
7	Beban Bantuan Sosial	33.984.547.350,99	23.236.921.200,00
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	248.338.708.936,39	244.751.490.146,65
9	Beban Penyisihan Piutang	224.636.021,34	1.545.369.868,96
10	Beban Lain-lain	3.962.232.120,71	6.029.352.160,47
11	Beban Transfer	173.398.804.410,00	146.438.041.015,00
	Jumlah	2.943.860.780.659,90	2.586.714.674.475,46

Penjelasan lebih lanjut atas realisasi Beban Tahun 2022 sebagai berikut:

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
c. Surplus/Defisit		
Dari Kegiatan Operasional	(133.388.364.405,27)	506.171.249.200,16

Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama 1 (satu) periode pelaporan. Bila pendapatan lebih besar daripada beban, terjadi kondisi surplus, dan apabila sebaliknya terjadi kondisi defisit. Pada tahun 2022 laporan operasional Pemerintah Kabupaten Tulungagung menunjukkan defisit sebesar (Rp133.388.364.405,27) sedangkan di tahun 2021 terdapat surplus sebesar Rp506.171.249.200,16 atau terjadi penurunan sebesar Rp639.559.613.605,43 atau 126,35%. Penurunan yang signifikan terjadi karena penurunan pendapatan dari Badan



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Layanan Umum Daerah dari sebesar Rp803.534.875.634,35 di Tahun 2021 menjadi sebesar Rp420.644.225.851,26 di Tahun 2022.

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
d. Surplus/Defisit		
Dari Kegiatan Non Operasional	(3.312.294.632,44)	4.591.667.189,43

Tabel 201 Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1)	Surplus Non Operasional	307.487.234,41	6.115.638.558,43
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	307.487.234,41	6.115.638.558,43
2)	Defisit Non Operasional	(3.619.781.866,85)	(1.523.971.369,00)
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
	▪ Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	0,00	0,00
	▪ Defisit Penjualan Aset Aset Lain-lain-LO	0,00	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(3.619.781.866,85)	(1.523.971.369,00)
	▪ Defisit Penghapusan Aset Tetap	(3.619.781.866,85)	(1.523.971.369,00)
	Jumlah	(3.312.294.632,44)	4.591.667.189,43

- Surplus Non Operasional Lainnya – LO timbul karena adanya penurunan nilai piutang yang sudah dilakukan penyisihan. Sehingga nilai penyisihan piutang pada akhir tahun lebih rendah daripada tahun sebelumnya, yang berarti akan menambah nilai surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah. Jumlah Surplus Non Operasional Lainnya – LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp307.487.234,41, yang berasal dari penghapusan penyisihan piutang dari pelunasan piutang dari Dinas PUPR sebesar Rp261.593.048,14 yang merupakan pelunasan piutang lainnya (piutang TGR), Bapenda sebesar Rp890.686,27 dari pelunasan piutang pajak, dan Kecamatan Tulungagung Rp45.003.500,00 dari pelunasan piutang lain-lain PAD.
- Defisit Non Operasional Lainnya LO – merupakan beban yang timbul karena adanya penghapusan aset tetap atau aset lainnya. Jumlah Defisit Non Operasional Lainnya – LO untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.619.781.866,85, yang berasal dari penghapusan aset tetap dan aset lainnya sebagai berikut:
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar Rp32.830.000,00
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp3.040.000,00
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.397.500,00
 - Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp861.692.088,00
 - BPKAD sebesar Rp460.482.602,00
 - BAPPEDA sebesar Rp121.019.860,00
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp35.405.050,00
 - Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp13.173.750,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp623.251.724,50
 - Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp12.225.000,00
 - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp10.387.880,00
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp710.219.322,50
 - Dinas PUPR sebesar Rp18.396.333,33



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp13.098.750,00
- Dinas Perhubungan sebesar Rp5.400.000,00
- Dinas Perikanan sebesar Rp14.409.100,00
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp60.380.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp2.580.000,00
- Dinas Pertanian sebesar Rp14.021.000,00
- Dinas Perumahan dan Perkim sebesar Rp10.604.000,00
- Dinas Peternakan sebesar Rp70.875.000,00
- Dinas Nakertrans sebesar Rp16.408.750,00
- Kecamatan Karangrejo sebesar Rp36.623.796,66
- Sekretariat Daerah sebesar Rp247.331.928,57
- Sekretariat DPRD sebesar Rp23.028.600,00
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp116.005.831,29
- Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp81.019.000,00
- Inspektorat Daerah sebesar Rp2.475.000,00

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
d. Pos Luar Biasa	958.766.601,00	0,00

Pos luar biasa menampung kenaikan atau penurunan Ekuitas akibat peristiwa luar biasa yaitu kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan luarbiasa dan beban luar biasa. Suatu transaksi digolongkan sebagai kejadian luar biasa apabila memenuhi kondisi:

- a. kejadian yang tidak dapat diprediksi pada awal tahun anggaran;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Tabel 202 Rincian Pos Luar Biasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021
1)	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
2)	Beban Luar Biasa	958.766.601,00	0,00
	▪ Beban Tidak Terduga-LO	958.766.601,00	0,00
	Jumlah	958.766.601,00	0,00

Beban luar biasa pada Tahun 2022 sebesar Rp958.766.601,00 dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar 100% disebabkan karena pada Tahun 2020 dan 2021 beban luar biasa untuk penanganan pandemi covid 19 harus dialokasikan menjadi beban operasi, hal ini sesuai dengan panduan penerapan SAP pada masa pandemi covid-19 yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa karena pengaruh Pandemi Covid-19 hampir menyebar di seluruh pos laporan keuangan. Untuk itu dampak Pandemi Covid-19 akan dijelaskan pada pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak signifikan. Sedangkan pada Tahun 2022 beban luar biasa sudah tidak lagi digunakan untuk penanganan covid-19.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

	TA 2022	TA 2021
	(Rp)	(Rp)
e. Surplus/Defisit LO	(137.659.425.638,71)	510.762.916.389,59

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Jumlah ini akan menjadi bagian yang menambah atau mengurangi ekuitas di Neraca. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp137.659.425.638,71.



7.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

7.5.5.1 Ikhtisar Laporan Arus Kas

a. Saldo Awal Kas

	<u>2022(Rp)</u>	<u>2021(Rp)</u>
Jumlah Saldo Kas Awal	782.288.867.149,38	448.973.947.636,21

Saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp782.288.867.149,38. Dibandingkan Tahun 2021 yaitu Rp448.973.947.636,21, jumlah saldo Kas awal Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp333.314.919.513,17 atau sebesar 74,24%. Jumlah saldo awal kas sebesar Rp782.268.995.593,38 terdiri dari :

Kas di Kas Daerah	Rp	428.452.190.106,34
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	1.767.160,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	11.500.125,00
Kas di Bendahara BLUD	Rp	353.653.708.927,62
Kas di Bendahara Dana BOS	Rp	145.196.463,42
Kas Lainnya	Rp	24.504.367,00
Jumlah	Rp	782.288.867.149,38

b. Arus Kas Bersih

Arus kas bersih dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	80.522.541.524,97	630.225.416.987,75
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(385.187.320.106,98)	(295.242.465.048,78)
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	106.049,43	(1.668.032.425,80)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(304.664.672.532,58)	333.314.919.513,17

c. Saldo Akhir Kas

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
Jumlah Saldo Kas Akhir	477.624.194.616,80	782.288.867.149,38

Saldo akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp477.624.194.616,80 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah pada tahun anggaran berikutnya, dengan perincian sebagai berikut:

	<u>2022 (Rp)</u>	<u>2021 (Rp)</u>
Kenaikan (Penurunan) Kas	(304.664.672.532,58)	333.314.919.513,17
Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	782.288.867.149,38	448.973.947.636,21
Saldo akhir kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	477.624.194.616,80	782.288.867.149,38
Jumlah Saldo Akhir Kas	477.624.194.616,80	782.288.867.149,38



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sedangkan posisi saldo akhir kas per 31 Desember 2022 terdiri dari :

Kas di Kas Daerah	Rp	415.077.681.447,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	3.325.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	153.230.363,06
Kas di Bendahara BLUD	Rp	62.289.293.586,18
Kas di Bendahara Dana BOS	Rp	77.748.364,06
Kas Lainnya	Rp	22.915.856,43
Jumlah	Rp	477.624.194.616,80

7.5.5.2 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Pada Tahun 2022 dan 2021, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp80.522.541.524,97 dan Rp630.225.416.987,75 dengan perhitungan sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	2.642.162.688.915,22	3.095.925.929.866,44
Arus Kas Keluar	(2.561.640.147.390,25)	(2.465.700.512.878,69)
Jumlah Arus Kas Bersih	80.522.541.524,97	630.225.416.987,75

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp549.702.875.462,78 (87,22%) dibandingkan Tahun 2021. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 203 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pajak Daerah	133.576.824.382,00	112.058.312.343,00
2.	Retribusi Daerah	18.081.749.300,00	20.602.266.523,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.460.163.497,56	6.400.865.514,75
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	419.109.535.912,66	814.781.191.542,69
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	62.685.226.864,00	61.463.639.071,00
6.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	81.608.422.237,00	63.916.609.232,00
7.	Dana Alokasi Umum	1.058.151.665.715,00	1.062.757.430.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	406.217.205.659,00	364.664.117.577,00
9.	Dana Desa	245.102.197.000,00	277.329.399.000,00
10.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	199.946.976.348,00	210.705.776.663,00
11.	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi lainnya	0,00	0,00
12.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.814.722.000,00	10.387.075.500,00
13.	Hibah	408.000.000,00	90.859.246.900,00
	Jumlah	2.642.162.688.915,22	3.095.925.929.866,44



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Sedangkan rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 204 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pembayaran Pegawai	1.105.948.316.423,44	1.177.487.042.959,42
2.	Pembayaran Barang	899.004.702.666,36	773.538.004.507,16
3.	Pembayaran Hibah	102.827.446.326,46	91.303.782.511,11
4.	Pembayaran Bantuan Sosial	34.133.751.100,99	21.772.982.500,00
5.	Pembayaran Bantuan Keuangan	407.626.317.000,00	374.660.762.500,00
6.	Pembayaran Tidak Terduga	1.228.684.101,00	17.151.113.610,00
7.	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	10.492.257.465,00	9.417.175.795,00
8.	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	378.672.307,00	369.648.496,00
	Jumlah	2.561.640.147.390,25	2.465.700.512.878,69

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Sampai dengan periode 31 Desember 2022 dan 2021, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan masing-masing sebesar (Rp385.187.320.106,98) dan (Rp295.242.465.048,78) dengan perhitungan sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	315.893.532,00	49.390.500,00
Arus Kas Keluar	(385.503.213.638,98)	(295.291.855.548,78)
Jumlah Arus Kas Bersih	(385.187.320.106,98)	(295.242.465.048,78)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 205 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	261.246.832,00	0,00
2.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	54.646.700,00	49.390.500,00
	Jumlah	315.893.532,00	49.390.500,00

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 206 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	0,00
2.	Perolehan Tanah	13.388.794.832,00	5.430.000.000,00
3.	Perolehan Peralatan dan Mesin	132.382.446.981,63	148.480.353.467,60
4.	Perolehan Gedung dan Bangunan	94.083.313.985,28	69.246.688.066,80
5.	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	104.920.363.082,07	59.715.735.094,38
6.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.273.444.070,00	5.419.078.920,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.454.850.688,00	7.000.000.000,00
	Jumlah	385.503.213.638,98	295.291.855.548,78



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan nihil

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris masing-masing sebesar (Rp22.510.063,00) dan (Rp1.668.032.425,80)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Arus Kas Masuk	119.414.312.355,09	108.161.103.731,25
Arus Kas Keluar	(119.414.206.305,66)	(109.829.136.157,05)
Jumlah Arus Kas Bersih	106.049,43	(1.668.032.425,80)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 207 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.410.987.355,09	108.159.473.291,25
2.	Penerimaan dari Pihak Ketiga	3.325.000,00	1.630.440,00
	Jumlah	119.414.312.355,09	108.161.103.731,25

Rincian penerimaan perhitungan pihak ketiga tersebut adalah:

Tabel 208 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pungutan	Jumlah
1.	Iuran BPJS 4% Kontribusi Pemda	33.446.448.912,00
2.	Iuran Wajib Pegawai 1% (BPJS)	9.041.393.991,00
3.	Iuran Wajib Pegawai 8%	36.407.936.006,00
4.	JKK Taspen	1.475.855.552,48
5.	JKM Taspen Kediri	3.693.397.368,18
6.	PPH Pasal 21	35.323.039.669,00
	Utang PFK Dinas Kesehatan	
1	Utang PPh.21	299.744,00
	Utang PFK Bendahara BOS	
1	Utang PPh 21	3.324.048,00
2	Utang PPh 23	1.951.863,00
3	Utang PPN	13.782.673,43
4	Utang PPN	3.557.528,00
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.410.987.355,09
1.	BAPPEDA	
	Kurang bayar Honorarium Konsultan Teknis Kecamatan Kegiatan Anti Poverti Program	3.325.000,00
	Jumlah Penerimaan dari Pihak Ketiga	3.325.000,00
	TOTAL	119.414.312.355,09



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Rincian arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Tabel 209 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	119.412.575.865,66	109.826.989.407,05
2.	Pembayaran kepada Pihak Ketiga	1.630.440,00	2.146.750,00
	Jumlah	119.414.206.305,66	109.829.136.157,05

Rincian pengeluaran perhitungan pihak ketiga tersebut adalah:

Tabel 210 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pungutan	Jumlah
1.	Iuran BPJS 4% Kontribusi Pemda	33.446.448.912,00
2.	Iuran Wajib Pegawai 1% (BPJS)	9.041.393.991,00
3.	Iuran Wajib Pegawai 8%	36.407.936.006,00
4.	JKK Taspen	1.475.855.552,48
5.	JKM Taspen Kediri	3.693.397.368,18
6.	PPH Pasal 21	35.323.039.669,00
	Utang PFK BLUD Puskesmas	
1	Utang PPh.21	1.203.077,00
2	Utang PPh.22	109.750,00
3	Utang PPN Pusat	731.400,00
	Utang PFK Sekretariat DPRD	
1	Utang PPh.21	2.346.000,00
	Utang PFK Dinas Sosial	
1	Utang Pajak Katering	6.277.500,00
2	Utang PPh 21	1.791.000,00
3	Utang PPh 22	1.336.400,00
4	Utang PPh 23	6.254.640,00
5	Utang PPN	4.454.600,00
	Jumlah Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	119.412.575.865,66
1.	Dinas Pendidikan	
	Kurang bayar honorarium pengelola keuangan sub kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	1.551.250,00
2.	BAPPEDA	
	Kurang bayar honorarium tim koordinasi kabupaten anti poverty program	22.000
3.	BPBD	
	Kurang Bayar SPPD tahun 2020	4.574,00
4.	DPMDes	
	Kurang bayar pihak ketiga	52.616,00
	Jumlah Penerimaan dari Pihak Ketiga	1.630.440,00
	TOTAL	119.414.206.305,66



7.5.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp4.484.561.139.194,25 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021.
2. Surplus/Defisit LO sebesar (Rp137.659.425.638,71).
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp595.758.845,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Koreksi nilai kas sebesar (Rp0,00)
 - b. Koreksi nilai piutang sebesar (Rp1.843.197.581,00) terdiri dari:
 - Koreksi atas pelunasan piutang transfer DBH Pusat tahun 2021 sebesar (Rp1.843.197.581,00).
 - c. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp770.738.134,99 terdiri dari:
 - Koreksi tambah persediaan obat awal pada RSUD Dr. Iskak sebesar Rp507.232.525,19;
 - Koreksi tambah saldo awal karena kurang catat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp171.505.609,80;
 - Koreksi kurang persediaan karena penurunan harga sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar (Rp4.500.000,00);
 - Koreksi tambah persediaan karena kenaikan harga dan kelahiran sapi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp96.500.000,00.
 - d. Koreksi nilai investasi jangka panjang Permanen sebesar (Rp2.929.640.334,58) terdiri dari:
 - Pengakuan cadangan laba yang belum dibagikan PDAM Rp12.514.198,45;
 - Koreksi saldo laba sesuai LK PDAM 2021 sebesar (Rp1.537.879.180,03);
 - Koreksi pembagian laba PD BPR Bank Daerah Tulungagung sebesar (Rp1.243.402.014,00);
 - Pengukuran kembali imbalan kerja pegawai PDAM (Rp160.873.338,00)
 - Koreksi karena pembulatan investasi BPR Bank Daerah sebesar (Rp1,00);
 - e. Koreksi nilai aset tetap sebesar Rp1.935.879.387,19 terdiri dari:
 - Koreksi kurang nilai komputer jaringan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar (Rp0,03);
 - Koreksi tambah saldo awal buku umum pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp8,53;
 - Koreksi kurang nilai aset tetap Kurvol Kegiatan Jalan Tahun 2021 pada Dinas PUPR sebesar (Rp2.967.924.620,22);
 - Koreksi kurang nilai perolehan tanah jalan karena pembulatan pada Dinas PUPR sebesar (Rp1,72);
 - Koreksi kurang nilai perolehan jalan pembulatan karena pembulatan pada Dinas PUPR sebesar (Rp0,15);
 - Koreksi tambah Harga Perolehan Sebab Salah Hitung (Jalan, Jaringan dan Irigasi) pada Dinas Perkim sebesar Rp0,78;
 - Koreksi tambah pencatatan aset karena belum tercatat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.907.686.000,00;
 - Koreksi tambah nilai aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp7.393.000,00;
 - Koreksi kurang aset tetap pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp12.375.000,00);



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Koreksi tambah aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp1.100.000,00.
- f. Koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp5.131.566.698,50 terdiri dari:
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena perubahan kebijakan pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp6.082.727.993,11);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp76.499.591,32);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi amortisasi pada Dinas Pendidikan sebesar (Rp10.000.000,00);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat musik pada Dinas Pendidikan sebesar Rp0,75;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat musik pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp30.251.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan barang bercorak kesenian lainnya (alat musik) pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp166.312.500,00);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena salah hitung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,10;
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp0,13;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp0,09);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan jalan pada Dinas PUPR sebesar Rp12.887.001.770,21;
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan bangunan pembawa irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp772.018.029,19;
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas PUPR sebesar Rp0,14;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas PUPR sebesar (Rp0,03);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena salah hitung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp121.141.533,33;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena salah hitung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar (Rp0,15);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena salah hitung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp0,11;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan compacting equipment pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp47.510.666,66);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan kendaraan bermotor angkutan barang pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp585.580.928,86);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp3.978.879,99);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung tempat kerja lain pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.491.840,00;
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat musik karena perubahan kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp126.105.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat musik karena salah hitung pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp2.062.857,15);



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan kendaraan bermotor beroda 3 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp47.142.857,14);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan kendaraan tak bermotor angkutan barang pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp43.570.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan perkakas bengkel kerja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp3.166.666,67);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan pemel tanaman/ikan/ternak pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp10.300.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat penyimpanan perlengkapan kantor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp4.380.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat kantor lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp6.545.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan mebelair pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp2.646.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat pembersih pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp4.350.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat pendingin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp6.640.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat rumah tangga lainnya (homeuse) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp15.155.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat pemadam kebakaran pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp5.263.500,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan meja kerja pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp6.055.200,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan kursi kerja pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp5.216.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat lab kimia pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp15.516.875,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat lingkungan hidup lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp1.414.285,71);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan komputer jaringn pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp12.325.912,50);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan personal komputer pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp29.808.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan peralatan personal komputer pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp6.752.750,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan bangunan pembuang air kotor pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp3.025.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan bangunan penampung sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp5.336.100,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp0,02);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp0,02;
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan alat pelindung pada Satpol PP sebesar Rp58.674.000,00;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan bangunan gedung parkir pada Dinas Sosial sebesar (Rp200.000,00);



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena salah hitung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar (Rp200.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi (alat musik) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar (Rp983.026,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp4.500.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sebesar (Rp0,05);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp0,01;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada DPMD sebesar (Rp50.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena umur ekonomis pada Dinas Perhubungan sebesar Rp123.000.000,00;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan kebijakan akuntansi (alat musik) pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp10.000.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena salah hitung home use pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp0,27);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pembulatan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp0,03;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap alat musik pada Dinas Koperasi sebesar (Rp185.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap alat musik pada Dinas Pariwisata sebesar (Rp29.300.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Dinas Pariwisata sebesar (Rp9.093.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Dinas Perpustakaan sebesar (Rp0,04);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp0,01;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan kebijakan akuntansi pada Dinas Perikanan sebesar (Rp28.800.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Dinas Perikanan sebesar Rp0,06;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Dinas Pertanian sebesar (Rp0,05);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena salah hitung pada Dinas Peternakan sebesar Rp1.422.000,00;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan kebijakan akuntansi pada Dinas Peternakan sebesar (Rp11.890.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Dinas Peternakan sebesar Rp0,03;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap alat pendingin pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp3.800.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan gedung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp432.603.910,56);



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp0,03;
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena salah hitung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp0,86;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena pembulatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar (Rp0,02);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan karena perubahan kebijakan akuntansi pada Sekretariat Daerah sebesar (Rp592.490.300,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan peralatan jaringan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.837.500,00;
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi karena double catat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp12.375.000,00;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp300.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BPKAD sebesar (Rp495.105.214,29);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BPKAD karena perubahan kebijakan akuntansi (barang bercorak kesenian) sebesar (Rp34.750.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BPKAD sebesar Rp0,99;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar (Rp5.814.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp0,02;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada BKPSDM karena perubahan kebijakan akuntansi sebesar (Rp10.800.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Inspektorat Daerah sebesar Rp205.434.598,54;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Bandung sebesar (Rp300.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Besuki sebesar (Rp45.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Campurdarat sebesar (Rp425.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Gondang sebesar (Rp35.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Kalidawir sebesar (Rp25.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Karangrejo sebesar Rp90.939,56;
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Karangrejo sebesar (Rp20.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan kebijakan akuntansi pada Kecamatan Kedungwaru sebesar (Rp3.000,00);
- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan kebijakan akuntansi pada Kecamatan Ngantru sebesar (Rp3.000,00);
- Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Kecamatan Ngantru sebesar Rp0,04;



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Ngunut sebesar (Rp25.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pagerwojo sebesar (Rp200.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Pakel sebesar (Rp50.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Sendang sebesar (Rp120.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap pada Kecamatan Sumbergempol sebesar (Rp482.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap alat musik pada Kecamatan Tanggunggunung sebesar (Rp30.000,00);
 - Koreksi tambah pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan kebijakan akuntansi pada Kecamatan Tulungagung sebesar (Rp14.654.500,00);
 - Koreksi kurang pencatatan nilai akumulasi penyusutan aset tetap karena pembulatan pada Kecamatan Tulungagung sebesar Rp0,02;
- g. Koreksi nilai kewajiban sebesar (Rp2.469.587.460) terdiri dari:
- Koreksi utang atas Belanja BLUD pada RSUD Dr. Iskak TA 2021 sebesar Rp21.531.634,00
 - Koreksi utang atas pelunasan utang transfer Dana Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp176.969.872,00;
 - Koreksi utang atas Transfer Dana Bagi Hasil TA 2022 sebesar (Rp2.668.088.966,00)
- h. Koreksi nilai penyisihan piutang sebesar Rp0,00
4. Saldo akhir ekuitas Tahun 2022 sebesar Rp4.347.497.472.400,64.



7.6 INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

7.6.1 PENYALURAN DANA BAGI HASIL NON TUNAI

- a. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
- b. Gambaran penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai
 1. Berdasarkan Angka 19 Perubahan Pasal 47 pada ayat 6 PMK 211/PMK.07/2022 tersebut, bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk nontunai dapat dilakukan dengan:
 - a. Penerbitan SBN; dan/atau
 - b. Treasury Deposit Facility.
 2. Selanjutnya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility dalam rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Nontunai mengatur ketentuan teknis lebih lanjutnya.
 3. Pada akhir tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda.
 4. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar.
 5. Secara umum proses bisnis penyaluran DBH melalui rekening TDF-TKD sebagai berikut:
 - a. Pembukaan Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda oleh Direktorat PKN berdasarkan permohonan dari Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
 - b. Pengisian dana pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda dilakukan dengan memindahkan dana dari RKUN ke Rekening TDF berdasarkan SP2D Nihil.
 - c. Pembayaran remunerasi saldo DBH pada Rekening TDF-TKD yang belum dilakukan penarikan dana oleh Pemda (berdasarkan hasil rekonsiliasi antara DJPK dengan Pemda).
 - d. Penarikan DBH dari Rekening Lain BI TDF-TKD ke RKUD dapat dilakukan oleh Pemda setelah holding period sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal terjadi retur pada proses penarikan dana dan/atau pembayaran remunerasi, penyelesaian retur dengan mengikuti ketentuan tata cara penyelesaian retur SP2D.
 6. Berdasarkan proses bisnis tersebut, pemda perlu menatausahakan dan mencatat transaksinya sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Meskipun kebijakan akuntansi belum diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, namun secara umum perlakuan akuntansi yang perlu dilakukan Pemda adalah mencatat realisasi pendapatan transfer DBH-nya dan mencatat saldo dana TDF-TKD sebagai Kas dan Setara Kas/Investasi Jangka Pendek (sesuai jangka waktu penyimpanan).



- c. Data Saldo dan Remunerasi pada Rekening TDF per 31 Desember 2022
 1. Saldo Pokok Rp13.627.596.948,00
 2. Remunerasi Rp3.305.106,68

7.7 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Domisili Pemerintah Kabupaten Tulungagung berada di Kabupaten Tulungagung Jl. A. Yani Timur Nomor 37 Kabupaten Tulungagung. Yurisdiksi Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah seluruh wilayah yang berada di lingkup Kabupaten Tulungagung. Bentuk Hukum atas eksistensi Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9).

Sifat operasi yang diperankan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung bukanlah mencari untung (*profit oriented*) tapi mengedepankan implementasi jasa (*service*), bersifat administratif operasional pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kegiatan pokoknya adalah menjalankan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan publik. Landasan pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menjadi momentum untuk melakukan penataan Perangkat Daerah yang efektif serta mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efisien.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 4) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5) Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

- 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Pertanahan, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan Drainase dan sub urusan permukiman;
 - 10) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 11) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
 - 12) Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
 - 14) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - 15) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - 16) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - 17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 18) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 - 19) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan sub urusan persampahan;
 - 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
 - 21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; dan
 - 22) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Sub Urusan Kebakaran;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
- 1) Badan Pendapatan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - 4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Kecamatan, terdiri dari:
- 1) Kecamatan Bandung dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Gondang dengan Tipe A;



- 6) Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Kauman dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Ngantru dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Ngunut dengan Tipe A;
- 12) Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
- 13) Kecamatan Pakel dengan Tipe A;
- 14) Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
- 15) Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
- 16) Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
- 17) Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
- 18) Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A; dan
- 19) Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 ditetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung;
2. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
4. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung;
5. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung;
10. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung;
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung;



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung;
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung;
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
17. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Tulungagung;
18. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung;
19. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung;
20. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung;
21. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
22. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung;
23. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
24. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
25. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;
26. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
27. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;
28. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung; dan
29. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, yang bertindak sebagai entitas akuntansi adalah perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan BPKAD Kabupaten Tulungagung bertindak sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan akuntansi sekaligus entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

7.8. PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Informasi yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna baik untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini disajikan dengan kondisi yang sebenarnya, transparan, andal, komparatif dan mudah untuk dipahami.

Sistematika penyusunan dalam CaLK telah disesuaikan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan, menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung lebih informatif dan diharapkan dapat membantu pembaca laporan dalam memahami informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, sehingga tidak mempunyai potensi kesalahpahaman bagi pengguna laporan dalam menganalisis informasi yang ada.

Tulungagung, Mei 2023

BUPATI TULUNGAGUNG



Drs. MARYOTO BIROWO, MM